



SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI KABUPATEN TEGAL

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)

untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Nama : AMELIA ANISAH PUTRI

NPM : 2115500009

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMELIA ANISAH PUTRI

NPM : 2115500009

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)** adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 29 Juli 2019



AMELIA ANISAH PUTRI
2115500009



**EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA
BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)
DI KABUPATEN TEGAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tegal, 29 Juli 2019
Telah disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Djoko suyono, M.Si
NIPY.2451891956

Arif Zainudin, S.IP, MA
NIPY.20964101988

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974



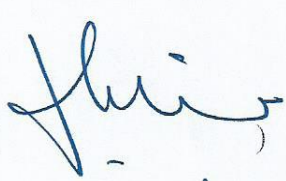
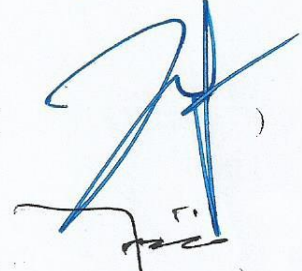
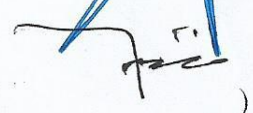
YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) · DI KABUPATEN TEGAL

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2019

1. Ketua Dewan Penguji : Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si ()
NIPY. 14251921973
2. Sekertaris Dewan Penguji : Arif Zainudin, S.IP, MA ()
NIPY. 20964101988
3. Anggota Dewan Penguji : Drs. Djoko Suyono, M.Si ()
NIPY. 2451891956

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY.9351091960



MOTTO

“Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini.” (Malcolm X)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” (Ali bin Abi Thalib)

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.” (Benyamin Franklin)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” (Muhammad Ali)

“Yakinlah atas kekuatan doa pada Tuhanmu, doa orangtuamu, dan usaha kerasmu, maka tidak akan ada kerja keras yang sia-sia.” (Penulis)

“Jika lelah beristirahatlah, namun jangan menyerah” (Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka didalam proses pembuatan dan penyusunnya, maka dari itu peneliti ingin mempersembahkan karya ilmiah ini untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta banyak nikmat kemudahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku, kakak, adikku dan kamu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, yang telah menjadikanku kuat dan tak patah semangat dalam penyusunan skripsi ini
3. Kedua dosen pembimbingku yang luar biasa telah sabar memberikan ilmu, bimbingan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua Dosen, Dekan FISIP, tanpa terkecuali yang sudah mendukung dan memotivasi bagi terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman–teman baik dari FISIP maupun fakultas lain yang selama ini selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak terkait yang tidak kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak doa, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Putri, Amelia Anisah. NPM 2115500009. 2019. *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Tegal*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Arif Zainudin, S.IP, MA.

Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau *e-procurement* adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Kabupaten Tegal telah menerapkan *e-procurement* ini sejak tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal dan juga untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan didukung data sekunder. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas menurut Duncan yakni efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan aplikasi Powersim untuk menguraikan dampak positif dan negatif dari sistem *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan *e-procurement* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tegal telah efektif. Hanya saja masih terdapat kendala pada implementasi *e-procurement* ini.

Kata Kunci : Efektivitas, *E-Procurement*

ABSTRACT

Putri, Amelia Anisah. NPM 2115500009. 2019. Effectiveness of E-Procurement of Goods and Services in Tegal Regency. A Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Drs. Djoko Suyono. M.Si. and Advisor II: Arif Zainudin, S.IP, MA.

The procurement of electronic-based goods and services or e-procurement is the implementation of procurement of goods/services carried out electronically using an information system consisting of an Electronic Procurement System (SPSE) and a support system. Tegal Regency has implemented this e-procurement since 2011.

This study aims to determine how effective the procurement of electronic-based goods and services (e-procurement) in Tegal Regency and also to find out the supporting and inhibiting factors and solutions in the procurement of electronic-based goods and services (e-procurement) in Tegal Regency. The type of research used is descriptive qualitative research and supported by secondary data. The theory used in this study is Duncan's theory of effectiveness, which is effectiveness according to Duncan, namely achievement of goals, integration, and adaptation. And using indicators of policy implementation according to George Edwards III (1980) theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques used were observation, interviews, literature, and documentation. The data analysis technique uses the Powersim application to describe the positive and negative impacts of the e-procurement system in Tegal Regency.

The results of the study illustrate that the implementation of e-procurement in the procurement of government goods and services in Tegal Regency has been effective. It's just that there are still obstacles in the implementation of this e-procurement.

Keywords : *Effectiveness, E-Procurement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT pendengar semua doa, rumah semua harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.
- b. Dr. Nuridin, SH. MH., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
- c. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
- d. Drs. Djoko Suyono, M.Si dan Arif Zainudin, S.IP, MA dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.
- e. Arif Zainudin, S.IP, MA, dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama peneliti melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.

- f. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu pengetahuan dan membantu terkait dengan administrasi selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
- g. Ibu Zakiyah, S.Kom selaku Kepala Seksi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Tegal, yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- h. Bapak Dedy Junaedi selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- i. M. Rizal Alim Kuncoro, S.Kom selaku admin LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Tegal yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- j. Pihak penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa, yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Tegal, 29 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Penulis	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvii
Glosariumxviii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
I.3.1 Tujuan	9
I.3.2 Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Penelitian Terdahulu	11
II.2 Kerangka Teori	16
II.2.1 Efektivitas	17
II.2.1.1 Pengertian Efektifitas	17
II.2.1.2 Pendekatan Efektifitas	19
II.2.1.3 Indikator Efektivitas	23
II.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa	28

II.2.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional	28
II.2.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (<i>E-Procurement</i>)	30
II.2.2.3 Perbedaan <i>Procurement</i> dengan <i>E-Procurement</i>	37
II.2.2.4 Tujuan Penerapan <i>E-Procurement</i>	46
II.2.2.5 Gambaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	48
II.2.2.6 Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010	51
II.2.2.7 Efektivitas <i>E-Procurement</i>	56
II.2.2.8 Implementasi Kebijakan.....	57
II.3 Pokok-Pokok Penelitian	62
II.4 Alur Pikir Penelitian	64

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Type Penelitian.....	47
III.2 Jenis dan Sumber Data	49
III.3 Informan Penelitian	50
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
III.5 Teknik Analisis Data	53
III.5.1 Teknik dan Analisis Data dengan Aplikasi Powersim...	75
III.5.2 Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman	80
III.6 Sistematika Penulisan	83

BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

IV.1 Deskripsi KabupatenTegal.....	85
IV.1.1 Visi dan Misi KabupatenTegal	85
IV.1.2 Letak Geografis Kabupaten Tegal.....	86
IV.1.3 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal	90

IV.2 Sejarah LPSE Kabupaten Tegal.....	94
IV.2.1 Visi dan Misi LPSE Kabupaten Tegal.....	95
IV.2.2 Jumlah Pegawai LPSE Kabupaten Tegal	96
IV.2.3 Sarana dan Prasarana LPSE Kabupaten Tegal	105
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1 Hasil Penelitian	108
V.1.1 Efektivitas E-Procurement di Kabupaten Tegal	94
V.1.1.1 Pencapaian Tujuan.....	118
V.1.1.2 Integrasi	145
V.1.1.3 Adaptasi.....	149
V.1.2 Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kabupaten Tegal	152
V.1.2.1 Komunikasi	153
V.1.2.2 Sumber Daya	162
V.1.2.3 Disposisi/Sikap Implementor	173
V.1.2.4 Struktur Birokrasi	181
V.2 Pembahasan	191
V.2.1 Pencapaian Tujuan	193
V.2.2 Integrasi	214
V.2.3 Adaptasi	217
V.2.4 Komunikasi	221
V.2.5 Sumber Daya.....	222
V.2.6 Disposisi/Sikap Implementor.....	224
V.2.7 Struktur Birokrasi	226
 BAB VI PENUTUP	
VI.2. Kesimpulan	244
VI.3. Saran	251
 DAFTAR PUSTAKA	252
LAMPIRAN	255

DAFTAR TABEL

Tabel II.01 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel II.02 Kriteria Efektivitas Organisasi yang disusun oleh John P. Campbell	27
Tabel II.03 Peta Tahapan <i>E-Government</i> pada Renstra TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014	32
Tabel II.04 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	45
Tabel II.05 Klasifikasi Sistem <i>E-Procurement</i>	46
Tabel IV.01 Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Tegal	88
Tabel IV.02 Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2017 (Ha).....	89
Tabel IV.03 Struktur Organisasi Kabupaten Tegal	90
Tabel IV.04 Inventarisasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Th. 2017.....	93
Tabel IV.05 Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Tingkat Pendidikan..	96
Tabel IV.06 Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Usia	97
Tabel IV.07 Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Masa Kerja	97
Tabel IV.08 Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Golongan	98
Tabel IV.09 Profil Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Tahun 2019	99
Tabel IV.10 Personil Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE) Kabupaten Tegal Tahun 2019.....	101
Tabel IV.11 Infrastruktur LPSE Kabupaten Tegal	105
Tabel IV.12 Hardware LPSE Kabupaten Tegal	106
Tabel IV.13 <i>Software</i> LPSE Kabupaten Tegal	107
Tabel V.01 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tegal	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.01	Kendala yang terlihat pada website <i>e-procurement</i>	7
Gambar II.01	Proses <i>E-Procurement</i>	35
Gambar II.02	Skema <i>E-Procurement</i>	56
Gambar II.03	Alur Pikir Penelitian	62
Gambar III.01	Tampilan Awal dari Powersim.....	78
Gambar III.02	Variabel Dalam Powersim	78
Gambar III.03	Komponen dalam Analisis Data (<i>Interaktif model</i>)	82
Gambar IV.01	Peta Administrasi Kabupaten Tegal.....	86
Gambar IV.02	Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Tegal Tahun 2019	100
Gambar V.01	Informasi Lelang dalam LPSE Kabupaten Tegal.....	110
Gambar V.02	Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa	111
Gambar V.03	Jadwal Lelang <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal.....	112
Gambar V.04	Jadwal Lelang <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal.....	112
Gambar V.05	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	113
Gambar V.06	Pengumuman Pemenang Tender <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal	114
Gambar V.07	Informasi terkait Regulasi <i>E-Procurement</i>	117
Gambar V.08	Hasil Evaluasi Tender <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal	122
Gambar V.09	Pendaftaran Online <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal	123
Gambar V.10	Monitoring dan Evaluasi Online <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal melalui TEPRa	134
Gambar V.11	Rencana Paket Pengadaan pada <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal melalui TEPRa	134
Gambar V.12	Grafik Progres Keuangan pada <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal melalui TEPRa	135
Gambar V.13	Grafik Progres Fisik pada <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal melalui TEPRa	135
Gambar V.14	Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal melalui TEPRa	136

Gambar V.15 Pelaksanaan Pengadaan pada <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal melalui TEPR	136
Gambar V.16 Keterbukaan Informasi Lelang <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Tegal	142
Gambar V.17 Standarisasi <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Tegal	166
Gambar V.18 Fitur Tanya Jawab pada SPSE 3	170
Gambar V.19 LPSE Support dalam <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal pada SPSE 4.3	171
Gambar V.20 Jadwal Lelang <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Tegal	176
Gambar V.21 Struktur Organisasi UKPBJ	182
Gambar V.01 Pencapaian Tujuan dalam Aplikasi Powersim	193
Gambar V.02 LPSE Support dalam <i>E-Procurement</i> Kabupaten Tegal pada SPSE 4.3	214
Gambar V.03 Integrasi dalam Aplikasi Powersim	214
Gambar V.04 Adaptasi pada Aplikasi Powersim	217
Gambar V.05 Komunikasi pada Aplikasi Powersim	221
Gambar V.06 Sumber Daya pada Aplikasi Powersim	222
Gambar V.07 Disposisi/Sikap Implementor pada Aplikasi Powersim	224
Gambar V.08 Struktur Birokrasi pada dalam Aplikasi Powersim	222
Gambar V.09 Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Tegal Tahun 2019	227
Gambar V.10 Efektivitas Implementasi <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Tegal	233

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	256
Lampiran 2	Hasil Wawancara	262
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	343
Lampiran 4	Surat Riset.....	347

GLOSARIUM

A

Aanwijzing	Pemberian penjelasan, adalah salah satu proses dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APH	Aparat Penegak Hukum, adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

B

<i>Bidding room</i>	Ruang layanan pemasukan penawaran
BLP	Bagian Layanan Pengadaan, adalah sebuah istilah pada layanan pengadaan barang dan jasa yang bertugas memimpin, mengkoordinir, memvalidasi, mempromosi, membina,

	mengendalikan, menyelenggarakan dan menetapkan seluruh kegiatan bagian dan urusan pemerintahan di bidang layanan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik
BLU	Badan Layanan Umum, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
C	
CV	<i>Commanditaire Venootschap</i> /Perseroan Komanditer, adalah jenis badan usaha persekutuan yang belum memiliki badan hukum.
D	
DED	<i>Detail Engineering Design</i> , adalah proyek untuk membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil (gedung, jalan, jembatan, bendungan, dll) Hasil dari proyek ini yang nantinya

akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan

E

Efektivitas	Tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama
<i>E-Analysis</i>	Tahap yang meliputi proses analisis pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategi pemasokan
<i>E-Auction</i>	Pelelangan melalui internet dengan tiga langkah yaitu menyampaikan tawaran, negosiasi kontrak, serta evaluasi dan manajemen kontrak
<i>E-Buying</i>	Proses transaksi yang dikelola oleh organisasi selama pengadaan barang dan jasa sehari-hari
<i>E-Marketplace</i>	Pertukaran bisnis ke bisnis secara elektronik dimana perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau supplier untuk mengkomunikasikan dan mengatur bisnis melalui internet
<i>E-Procurement</i>	Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
<i>E-Purchasing</i>	Tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik
<i>E-Sourcing</i>	Proses otomatis dimana organisasi mengidentifikasi, memilih dan mengelola supliernya
<i>E-Tendering</i>	Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan

H

HPS	Harga Perkiraan Sendiri, adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang
-----	---

ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

I

Integrasi Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi

IUMK Izin Usaha Mikro Kecil, adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

K

KAK Kerangka Acuan Kerja, adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh SKPD/dinas terkait. KAK/Term of Reference (TOR) menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan KAK/TOR sebagai salah satu acuan perencanaan anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud

KKN Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan

KPA Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

L

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik, adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

N

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

P

PA Pengguna Anggaran, adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PBJP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa

POK	Pelaksana Operasi Kegiatan, adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA
PPHP	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bidang pengadaan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
PT	Perseroan Terbatas, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya
R	
RAB	Rencana Anggaran Biaya, adalah suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
RUP	Rencana Umum Pengadaan, adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama.
S	
SIKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia, adalah aplikasi yang merupakan subsitem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP

SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
SKN	Sisa Kemampuan Nyata, adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan
SLA	Service Level Agreement, adalah kontrak dari penyedia layanan dengan kita sebagai pengguna yang memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik, adalah aplikasi <i>e-procurement</i> yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia
T	
TDP	Tanda Daftar Perusahaan, adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang
TEPRA	Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran, adalah kelanjutan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA) yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri, adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa

U

UKM Usaha Kecil Menengah, adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

UKPBJ Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, adalah unit kerja di lingkungan K/L/PD yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. UKPBJ dibentuk oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, dan di setiap K/L/PD dibentuk 1 (satu) UKPBJ

ULP Unit Layanan Pengadaan, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

V

VO-IP *Voice over Internet Protocol*, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Padang (2016:1), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini berkembang dengan cepat. Aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, begitupun organisasi pemerintahan maupun swasta juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya peningkatan kinerja organisasi maka upaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat akan dapat terwujud.

Padang (2016:1) juga menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi. Pemerintah pun dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan kerja pemerintahan. Selain itu pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), agar tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menurut Nurchana dkk, dalam penerapannya untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa

pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional.

Adapun Padang (2016:22) menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa sistem konvensional adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang dan jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada setiap pengadaan barang dan jasa.

Dalam peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, *e-procurement* adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Menurut Mutiarin, dkk (2014:206-207), *e-procurement* memang sedikit berbeda dengan *procurement* konvensional sebagaimana yang digunakan oleh beberapa *stakeholder* pelelangan sebelumnya. Pengadaan barang dan jasa konvensional lebih menyita waktu dalam mengemas kertas kerja dibanding dengan melayani supplier mereka atau menegosiasikan harga. Sementara *e-*

procurement lebih mengefisienkan waktu dan biaya operasional yang lebih tinggi, jika dibandingkan cara pelanggan atau tender konvensional.

Tentunya ada tantangan yang harus dihadapi para implementor saat mengimplementasikan *e-procurement* di sektor publik. Mac Manus dalam Padang (2016:29) mengatakan tiga faktor penghambat implementasi *e-procurement* di sektor publik, yakni: pertama, perbedaan karakter antara sektor publik dengan sektor bisnis. Kedua, adanya ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Ketiga, kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*.

Adapun tujuan diadakannya *e-procurement* dalam website resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Republik Indonesia (<https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>) yakni transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, tingkat efisiensi proses pengadaan, proses monitoring dan audit, serta kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Dikutip pada *website* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-inpres-percepatan-pelaksanaan-pengadaan-barasangjasa-pemerintah/>), untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah maka di keluarkanlah Instruksi Presiden . Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Januari 2014 lalu, telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah adanya perubahan regulasi dalam pengadaan barang/jasa, maka muncul perbedaan dari peraturan lama ke yang baru. Yakni dari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang telah di ganti dengan Perpres No. 16 Tahun

2018. Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya diantaranya yaitu lebih sederhana, agen pengadaan, swakelola tipe baru, layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, perubahan istilah, otonomi BLU (Badan Layanan Umum) untuk mengatur pengadaan sendiri, ULP (Unit Layanan Pengadaan) menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), Batas Pengadaan Langsung, Jaminan Penawaran, dan Jenis Kontrak

Dan untuk mengatasi masalah pada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik digunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa (diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Inpres No 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Penerapan *e-procurement* pada Pemerintah Kabupaten Tegal diawali dari Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tegal, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal. Kedua Perbup diatas merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan *e-procurement*.

Adapun kasus-kasus pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah terjadi di Kabupaten Tegal adalah seperti halnya yang dikutip dari Detik News (<https://news.detik.com/berita/1670783/bupati-tegal-ditahan-terkait-kasuskorupsi-rp-39-m>) 28 Juni 2011, dimana pada saat itu mantan Bupati Tegal

Agus Riyanto terlibat dalam korupsi proyek Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) yang total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 3,9 miliar.

Seperti halnya pula yang terlihat pada berita Media Rakyat tanggal 4 February 2015 (<http://www.mediarakyat99.com/2015/02/pengangkatan-ketua-ulp-kab-tegal.html>), yakni saat pengangkatan kepala ULP Kabupaten Tegal Slamet Wiharto ST diawal Januari Tahun 2015 dinilai cacat hukum, yang seharusnya dijabat oleh Kepala Biro/Bagian/Subidang Sekertariat Daerah, namun pada kenyataanya Kepala ULP Kab Tegal yang baru Slamet Wharto ST saat itu masih menjabat sebagai salah satu Kasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Hal ini tidak sesuai pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 99 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dan ada permasalahan lain seperti yang dikutip dari Radar Tegal (<https://radartegal.com/berita-lokal/rugikan-negara-rp49-miliar-dua-tersangka-korupsi.24025.html>) 06 Juli 2018, yakni terjadi kasus korupsi pada proyek peningkatan Jalan Langon-Kemantran pada tahun 2016 dengan anggaran Rp14.614.614.000. Dimana pelaksana atau penyedia jasa tidak mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak dan melakukan perbuatan curang dengan cara mengurangi volume pekerjaan atau tidak sesuai dengan kontrak, serta konsultan pengawas proyek membiarkan terjadinya penyimpangan dalam pengerjaan proyek. Penyimpangan itu diperkuat dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, tercatat kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengerjaan proyek mencapai Rp.4.966.735.635.

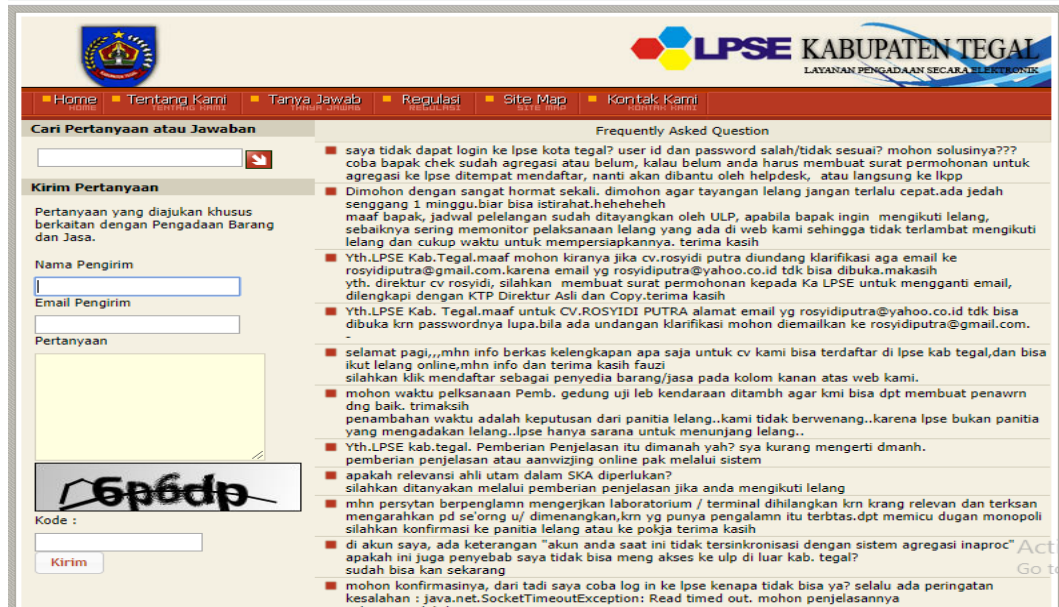
Serta kasus pelanggaran lainnya seperti berita yang dikutip dari Suara Merdeka (<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/103386/lelang-pasar-margasari-tak-sesuai-perpres>) 13 Juli 2018, yakni lelang Pasar Margasari tak sesuai Perpres. Dimana pada pembangunan Pasar Margasari senilai Rp 17,5 miliar tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, karena dalam beberapa tahap jadwal lelang yang dibuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tegal, tidak dicantumkan dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal.

Adapun kendala yang terjadi pada pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Tegal adalah seperti halnya yang dikutip dari Tribun Jateng.com (<http://jateng.tribunnews.com/2018/04/24/pemkab-tegal-tegaskan-kualitas-menjadi-hal-penting-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa>.) 24 April 2018, dari total 58 SKPD Kabupaten Tegal, Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sudah ada yang tercatat, namun masih ada empat SKPD yang belum mengirimkan laporannya. Seperti yang telah disampaikan Dedy Junaedi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bahwa jika barang dan jasa yang belum dilaporkan ke SiRUP memang memiliki beberapa kendala pada aplikasinya, menurutnya ini karena servernya satu jadi ada kendala.

Kendala pada aplikasi pengadaan barang dan jasa ini dapat terlihat pada *website* LPSE (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc/faqpage>) masih banyak rekanan yang belum faham dan kesulitan dalam mengakses *website e-procurement* Kabupaten Tegal.

Sebagaimana seperti yang terlihat dalam gambar berikut:

Gambar I.01
Kendala yang terlihat pada website *e-procurement*



Sumber: Website LPSE Kab.Tegal (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc/faqpage>)

Dari gambar I.01 diatas, dapat dilihat bahwa masih adanya rekanan yang kebingungan dalam menggunakan sistem *e-procurement* di Kabupaten Tegal, melihat gambar diatas ada pihak yang merasa bingung pada saat akan melakukan log in, mereka kebingungan tidak dapat *log in* itu dikarenakan *user id* atau passwordnya yang salah, tidak dapat membuka e-mail, read time out dan lain sebagainya. Terlihat pula ada pihak yang akan mengikuti proses lelang mengeluhkan kesulitan, seperti halnya ada yang mengeluhkan mengenai persyaratan salah satunya persyaratan berpengalaman mengerjakan laboratorium/terminal karena mereka menganggap itu kurang relevan dan terkesan mengarahkan pada seseorang untuk dimenangkan,

Dan mengutip dari Radar Tegal (<https://radartegal.com/berita-pemkab-tegal/hingga-maret-baru-dua-paket-kegiatan-yang.29028.html>) 22 Maret 2019,

diketahui masih ada keterlambatan proses lelang yang dilaksanakan berdasarkan RUP, dari laporan yang masuk baru ada empat paket pengadaan barang dan jasa yang selesai tender/ sudah ada penyedia dan dua diantaranya lelang mendahului tahun anggaran. Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) menjadi catatan Bupati, beliau meminta agar seluruh OPD segera menginput anggaran kegiatannya ke dalam SIRUP. Dan pada kendala ini masih belum jelas proses penyelesaian kontrak dengan melihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 instruksi ketiga angka (1) dan kejelasan sanksi yang akan dikenakan kepada si pelanggar dengan melihat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (3) dan Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 79 ayat (4).

Tentunya hal-hal ini akan menghambat pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dari *e-procurement*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI KABUPATEN TEGAL.

I.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam Prakoso (2018:26) adalah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal ?
- b. Faktor–faktor apakah yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal ?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.
- b. Mendeskripsikan faktor–faktor yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.

I.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
 - b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai program-program yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini adalah pengadaan

barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.

- c. Bagi studi manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian, khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam setiap pembuatan dan pengambilan keputusan ataupun program-program yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bagi peneliti untuk meraih gelar sarjana Strata 1 (S.IP) dan dapat menerapkan teori dalam pembuatan Karya Ilmiah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*).
- d. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan masukan anggota kelompok kerja dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*).
- e. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan pihak ketiga/rekanan dibidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam Prakoso (2018:29) adalah uraian mengenai teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian dan juga menjadi landasan teori dalam penelitian, supaya bisa diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, masih perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat guna memungkinkan pembaca meningkatkan wawasannya dari segi tujuan dan hasil penelitian.

II.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan *e-procurement*, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama mengenai *e-procurement* telah dilakukan sebelumnya oleh Kodar Udoyono (2012) mengenai *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota Yogyakarta berisi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas yang mana memang terlihat fisibel tapi tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya *e-procurement*, adanya dukungan pelebagaan *e-procurement*, adanya dukungan dari *stakeholder* terhadap implementasi *e-procurement*, dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan *e-procurement*. Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa,

pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi *e-procurement* di Kota Yogyakarta tahun 2009 fisibel tetapi tidak akuntabel.

Di dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang oleh Nurchana, dkk mengenai efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) dikatakan kurang efektif karena terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Serta didalam tesis Victoria Sampe Padang (2016) tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tana Toraja yang berisi penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya efektif, diukur berdasarkan pada pendekatan sasaran yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif, dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah memberikan ruang bagi rekanan dari luar Kabupaten Tana Toraja untuk berpartisipasi namun syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia kadang menyulitkan rekanan untuk berpartisipasi dalam proses tender. Penulis melihat bahwa pencapaian tujuan dari

e-procurement yang ada dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan efektivitas, namun akses pasar dan persaingan usaha yang sehat belum efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *e-procurement* memang ada pengaruhnya terhadap daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa serta dalam pelaksanaan *e-procurement* harus menekankan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu, efisien, efektif, transparansi, akuntabel, dan keadilan/tidak diskriminatif. Berdasarkan penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal pada tahun 2018-2019

Tabel II.01
Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	PENULIS/JURNAL	ISI
1.	<i>E-procurement</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta	Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012 Kodar Udoyono	Penelitian ini berisi tentang <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas yang mana memang terlihat fisibel tapi tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, dimensi fisibilitas harus Memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya <i>e-procurement</i> , adanya dukungan pelebagaan <i>e-procurement</i> , adanya dukungan dari stakeholder terhadap implementasi <i>e-procurement</i> , dan adanya

			dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan <i>e-procurement</i> . Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup.
2.	Efektivitas <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.2, Hal. 355-359, Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang	Efektivitas <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 - 359, Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Penelitian ini berisi tentang penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, telah ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor

			<p>yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, diperlukan pengawasan atau pemantauan yang intensif dari masyarakat dan LSM seperti ICW (<i>Indonesia Corruption Watch</i>). Perlunya pengawasan masyarakat dan LSM tersebut, karena dua aktor tersebut memiliki peran yang dianggap paling bagus dan netral dalam pengadaan barang/jasa, sehingga tujuan <i>e-procurement</i> nantinya dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kecurigaan.</p>
3.	<p>Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (<i>e-procurement</i>) di Kabupaten Tana Toraja.</p>	<p>Skripsi Victoria Sampe Padang (2016), Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.</p>	<p>Penelitian ini berisi tentang penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya efektif, diukur berdasarkan pada pendekatan sasaran yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana efektivitas pelaksanaan <i>e-procurement</i> dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif, dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah memberikan ruang bagi rekanan dari luar Kabupaten</p>

			<p>Tana Toraja untuk berpartisipasi namun syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia kadang menyulitkan rekanan untuk berpartisipasi dalam proses tender. Penulis melihat bahwa pencapaian tujuan dari <i>e-procurement</i> yang ada dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan efektivitas, namun akses pasar dan persaingan usaha yang sehat belum efektif.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti akan melihat penelitian *e-procurement* di Kabupaten Tegal ini dari aspek pelaksanaannya. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis akan mendeskripsikan efektivitas *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Untuk menganalisis efektivitas tersebut, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Serta peneliti juga menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Nantinya penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dengan jelas efektivitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.

II.2 Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam

menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Adapun teori- teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

II.2.1 Efektivitas

II.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Sedangkan menurut Mutiarin, dkk (2014:96), efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Sedangkan efisien lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Hari Lubis dan Martani Huseini dalam Padang (2016:14) menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Adapun beberapa pandangan efektivitas dalam Mutiarin, dkk (2014:95-99) diantaranya dari Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu Caster I. Bernard, mengatakan efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Adapun Drucker menyatakan bahwa efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar atau sejauhmana kita mencapai tujuan. Adapula Handoko, yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komaruddin (1994) juga berpendapat tentang efektivitas yakni suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Serta Winardi (1992) mengatakan efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil yang di peroleh seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu. The Lang Gie pun berpendapat efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dan menurut Hidayat, efektifitas adalah suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target telah dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Adapun Mutiarin mendefinisikan efektifitas dalam empat hal yakni pertama, mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. Kedua, mencapai tingkat diatas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengna lawan yang laain sebagai yang terbaik. Ketiga, membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat. Keempat, menangani tantangan masa depan.

II.2.1.2 Pendekatan Efektivitas

Dalam Nawawi (2013: 192-194) terdapat dua jenis pendekatan efektivitas yakni ada pendekatan tujuan dan pendekatan sistem, diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Tujuan Tentang Efektivitas

Menurut Michael Kelly dalam Nawawi (2013:192-193), pendekatan tujuan merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut Chaster I Barnard pendekatan ini, keberadaannya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam menunjukan bahwa organisasi itu diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, dimana hal ini dapat dicapai dengan bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Teori Sistem

Secara Konseptual sistem berpikir menurut Nawawi (2013:194) berpikir tentang sistem berarti berpikir tentang keterkaitan, keharmonisan, dan keutuhan antarbagian sehingga membentuk suatu kebulatan. Dalam kaitan sistem manajer organisasi, baik yang engelola usaha bisnis maupun nonbisnis harus dibangun

secara sistemis. Dalam hubungannya dengan teori sistem, organisasi dipandang sebagai unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.

Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini dalam Padang (2016:14-15) menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber yaitu mengukur efektivitas organisasi dari keberhasilannya dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan organisasi. Efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan jumlah atau kuantitas berbagai jenis sumber yang telah berhasil didapatkan dari lingkungan.

Pendekatan sumber didasarkan pada teori organisasi tentang keterbukaan sistem organisasi pada lingkungannya. Organisasi memiliki sebuah hubungan dengan lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan output yang dihasilkan juga akan dilemparkan organisasi kepada lingkungannya. Sementara itu, sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali langka dan bernilai tinggi (mahal). Dengan penjelasan tersebut, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun nilainya tinggi.

Dimensi/komponen yang biasa digunakan untuk mengukur efektifitas melalui pendekatan ini adalah

- a. Pemanfaatan Lingkungan

Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan bersifat tinggi.

b. Interpretasi Lingkungan Untuk Pengambilan Keputusan

Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat

c. Menghasilkan Output Berdasarkan Sumber Yang Ada

Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh

d. Operasionalisasi Organisasi

Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.

e. Adaptasi Terhadap Lingkungan

Kemampuan organisasi untuk berreaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

2. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki organisasi sehingga cenderung menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan organisasi. Pendekatan ini umumnya digunakan oleh penganut mazhab neo klasik (human relation) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektifitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Beberapa komponen yang biasa digunakan dalam pendekatan ini adalah relasi atasan bawahan yakni perhatian atasan terhadap pegawai

- a. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja
- b. Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pemimpin
- c. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*)
- d. Adanya komunikasi vertical dan horizontal yang lancar dalam organisasi
- e. Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang direncanakan
- f. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok- kelompok kerja yang efektif serta performansi dan pengembangan pegawai.
- g. Organisasi dan bagian- bagian bekerjasama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama.

3. Pendekatan sasaran (*Goal approach*)

Pendekatan sasaran ini mengukur efektifitas organisasi berdasarkan identifikasi sasaran organisasi dan keberhasilan mencapai sasaran dimaksud. Sasaran yang coba diukur adalah sasaran yang sebenarnya (*operative goal*) karena lebih realistis ketimbang mengukur efektifitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*). Beberapa komponen yang biasa digunakan untuk mengukur efektifitas berdasarkan pendekatan ini adalah adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi, produktifitas, kepuasan karyawan, tingkat keuntungan, kontrol terhadap organisasi, dan lain-lain.

4. Pendekatan Gabungan

Pendekatan ini digunakan untuk menutupi kelemahan yang ada pada masing-masing pendekatan utama. Pengukuran efektifitas organisasi melalui

pendekatan ini mencakup pengukuran dari segi input, efisiensi proses transformasi, dan keberhasilan mencapai sasaran (*output*). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh dari seluruh dimensi efektifitas organisasi.

II.2.1.3 Indikator Efektivitas

Menurut Duncan dalam buku Richard M. Steers yang berjudul “Efektivitas Organisasi” (1985:53) mengemukakan 3 indikator efektivitas, antara lain :

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Pencapaian tujuan, dengan difokuskan kepada tercapainya tujuan atau mandat dari apa yang diinginkan dengan menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ini. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan berarti seberapa bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tujuan dari *e-procurement* itu sendiri.

- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Integrasi, dengan memfokuskan kepada seberapa jauh kemampuan organisasi pelaksana dalam memberikan sosialisasi kepada beberapa organisasi terkait dan masyarakat sebagai objek dari seluruh tujuan kerja pemerintah. Dalam penelitian ini integrasi adalah menyangkut proses sosialisasi, artinya kemampuan pelaksana *e-procurement* Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mensosialisasikan sistem ini kepada publik/organisasi terkait.

- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adaptasi, dengan memfokuskan kepada seberapa jauh organisasi pelaksana dalam menyesuaikan diri dalam pelaksanaan sistem ini, termasuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini adalah adaptasi terhadap penerapan sistem baru yaitu pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Untuk mengukur adaptasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mengadopsi sistem *e-procurement* ini, dari persiapan infrastruktur dan teknologi, juga persiapan sumber daya manusianya.

Menurut Gibson dalam Mutiarin, dkk (2014:89), menyimpulkan kriteria efektivitas suatu kegiatan dalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu:

1. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*effeciency*), dan kepuasan (*satisfaction*);

2. Efektivitas jangka menengah, meliputi: kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*developement*);
3. Efektivitas jangka panjang: keberlangsungan (*sustainability*)

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas.

Menurut Gibson dalam Steers (1977:52) ada beberapa kriteria ukuran efektivitas organisasi yakni:

1. Produksi

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi meliputi keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan lain-lain.

2. Efisiensi

Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan. Sebuah organisasi sangat perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan. Ukuran efisiensi meliputi tingkat laba, modal atau pun harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi, dan sebagainya. Pernyataan perbandingan antara keuntungan dan biaya. Sebuah organisasi sudah bertindak realistis yakni keuntungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesempatan lingkungan.

3. Kepuasan

Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya,

sehingga mereka merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan seorang manajer dengan pencarian keuntungan yang maksimal. Yang dimaksudkan maksimal yaitu pencapaian tujuan telah diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usaha. Oleh karena itu, sangat diperlukan kemampuan beradaptasi.

4. Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi bersifat lebih abstrak dibanding dengan masalah lainnya seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan lain sebagainya. Meskipun bersifat lebih abstrak, namun bisa diamati dari hasil penelitian. Saat organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup akan terancam. Manajemen dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat menambah kesiapan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan perubahan, setidaknya perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi. Adanya perubahan diharapkan sebuah organisasi dapat berkembang.

5. Pengembangan

Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Suatu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik. Usaha pengembangan kemampuan itu misalnya program

pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan itu diharapkan dapat mengembangkan organisasinya baik untuk sekarang ataupun nanti.

6. Kelangsungan hidup

Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Banyak pihak yang berminat untuk mencapai efektivitas memunculkan bermacam-macam sudut pandang dan kriteria tentang hal itu. Jika dilakukan sebuah riset tentang kriteria efektivitas organisasi dari keseluruhan organisasi akan dapat memunculkan kriteria sejumlah organisasi yang beraneka ragam. Kriteria efektivitas organisasi yang disusun oleh John P. Campbell dalam buku *Teori & Perilaku Organisasi* (2008:35) sebagai berikut:

Tabel II.02
Kriteria Efektivitas Organisasi yang disusun oleh John P. Campbell

1. Keefektifan Keseluruhan	11. Motivasi	20. Ketrampilan manajerial
2. Produktivitas	12. Motivasi/ semangat juang	21. Kesiapan
3. Efisiensi	13. Kontrol	22. Pemanfaatan lingkungan
4. Laba	14. Konflik/ solidaritas	23. Evaluasi pihak luar
5. Kualitas	15. Fleksibilitas	24. Stabilitas
6. Kecelakaan	16. Perencanaan dan penetapan tujuan	25. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
7. Pertumbuhan	17. Konsensus tentang tujuan	26. Penekanan pada performa
8. Manajemen informasi dan komunikasi	18. Internalisasi tujuan organisasi	27. Nilai SDM 28. Kemangkiran
9. Pergantian pegawai 10. Kepuasan kerja	19. Ketrampilan interpersonal manajerial	29. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan

Sumber: Siswanto, dkk (2008:35)

Berdasarkan dari berbagai indikator efektivitas yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan dalam bukunya Richard M. Steers yang berjudul “Efektivitas Organisasi” (1985:53), yakni: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Karena hal ini diteliti dari aspek pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Dimana indikator-indikator digunakan peneliti ini untuk meneliti efektivitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal, yakni:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Artinya seberapa bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan tujuan dari *e-procurement* itu sendiri.
2. Integrasi adalah menyangkut proses sosialisasi, artinya kemampuan pelaksana *e-procurement* Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mensosialisasikan sistem ini kepada publik/organisasi terkait.
3. Adaptasi adalah tingkat kemampuan organisasi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mengadopsi *e-procurement*, berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana (persiapan infrastruktur dan teknologi), serta tenaga kerja (persiapan sumber daya manusia).

II.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

II.2.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 1 ayat 1, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Padang (2016:22) pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Maksud dari barang disini yakni peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Dengan kata lain pengadaan barang dan jasa sistem konvensional adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang dan jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada setiap pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya Padang (2016:22) menjelaskan beberapa tahapan pengadaan barang dan jasa konvensional, yakni tahap perencanaan pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi peserta, tahap penyusunan dokumen tender, tahap pengumuman tender, tahap pengambilan dokumen tender, tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tahap penjelasan tender, tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang, tahap penandatanganan kontrak dan terakhir tahap penyerahan barang dan jasa.

Adapun menurut *website* LKPP, kelemahan dari pengadaan barang dan jasa konvensional/Non Elektronik, antara lain:

- a. Pelaksanaan lelang dibatasi waktu dan tempat

- b. Membutuhkan biaya besar
- c. Sulit mengikuti prosedur pengadaan
- d. Informasi lelang sulit diakses
- e. Tidak ada jaminan dalam menyelenggarakan/ mengikuti lelang
- f. Sulit mengelola dan mengakses dokumen kertas
- g. Tidak ada yang memandu tahapan dan proses lelang.

II.2.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*)

Menurut Indrajit (2016:159-160), *e-procurement* adalah pembelian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, equilibrium adalah keadaan keseimbangan di pasar antara penawaran dan permintaan sehingga tercipta harga yang disetujui dan berlaku.

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta pada regulasi yang baru yakni pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, *e-procurement* adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Ada beberapa tujuan diadakannya *e-procurement* dalam *website* resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Republik Indonesia (<https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>) diantaranya:

1. Transparansi dan akuntabilitas;
2. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Proses monitoring dan audit;
5. Kebutuhan akses informasi yang real time;

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan bahwa *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Menurut *website* LKPP, kelebihan lelang elektronik, diantaranya:

1. Lelang bisa dilaksanakan darimana saja, kapan saja
2. Biaya untuk menyelenggarakan/ mengikuti lelang sangat kecil
3. Sudah mengacu pada prosedur di Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
4. Lebih mudah mengakses informasi lelang
5. Semua pihak dijamin bisa menyelenggarakan dan mengikuti lelang
6. Dokumen disimpan oleh sistem dan dijamin integritasnya
7. Tahapan dan proses lelang dipandu oleh sistem

Udoyono dalam Mutiarin, dkk (2014:205), menernakan bahwa *e-procurement* adalah sebuah proses pengembangan G2B (*Government to Business*) yang digunakan sebagai alat penghubung antara pemerintah dengan dunia usaha. Sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.03
Peta Tahapan *E-Government* pada Renstra TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014

Peran Pemerintah	G2G Antar Instansi Pemerintah	G2C Pemerintah ke Warga	G2B Pemerintah ke Dunia Usaha
Perdagangan	Sistem pengadaan barang berpusat	Layanan keluhan	Sistem pembayaran secara terpusat
Pendidikan	Sistem pelatihan berbasis komputer	<i>E- learning</i> bagi sekolah- sekolah	Pelatihan online untuk pengembangan UKM
Kuangan	Berbasis data keuangan terpusat	Pembayaran pajak online	<i>E- Procurement</i>
Ketenagakerjaan	Basis data PNS <i>online</i>	Sistem infomasi lowongan pekerjaan	Sistem pembayaran via online
Transportasi	Basis data angkutan masal	Sistem informasi kondisi lalu lintas	Basis data tarif transportasi <i>online</i>
Kesehatan dan Pelayanan Sosial	Sistem Akuransi kesehatan <i>online</i>	Sistem jaminan kesehatan dan sosial	Basis data <i>online</i>

Sumber: Mutiarin, dkk (2014:206)

Adapun beberapa pandangan *e-procurement* dalam Mutiarin, dkk (2014: 205-206) yakni menurut Muhtar (2011) *e-procurement* merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa

dilakukan secara *online*. Lalu menurut Oliviera, *e-procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan oprasional secara elektronik. Adapun Croom dan Jones mengatakan bahwa *e-procurement* adalah sistem data base yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian. Serta Neef menyatakan bahwa *e-procurement* sebagai sistem berbasis internet dalam proses pembelian.

Menurut Padang (2016:23-24), pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, baik di sektor publik (pemerintahan) maupun di sektor swasta. Di sektor pemerintahan pengadaan berfungsi menjadi lebih penting karena semakin besar tuntutan publik terhadap pelayanan yang dihasilkan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta semakin besarnya anggaran pemerintah yang dibelanjakan melalui proses pengadaan. Kemudian Padang (2016:23-24) mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berbasis internet atau *e-procurement* merupakan salah satu mekanisme mewujudkan nilai-nilai *good governance*. Serta menurut Croom dan Brandon Jones dalam Padang (2016:23) mengatakan bahwa *e-procurement* dalam pengertian umum diterapkan sistem data base yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian.

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 1 Point 9 pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement*

adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan lelang *e-procurement* pada *website* resmi LPSE, antara lain yaitu pengumuman pascakualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pemilihan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil tender, surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan penandatanganan kontrak.

Lalu dalam Mutiarin, dkk (2014:209) proses implementasi sistem *e-procurement* merupakan sebuah jalinan sistem yang saling terkait, kemudian Thai menjelaskan bahwa, sistem *e-procurement* memiliki lima komponen dalam implementasinya, diantaranya:

1. Pembuatan Kebijakan dan Manajemen

Dalam Mutiarin, dkk (2014:211), Thai menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan *e-procurement*, eksekutif yang dikepalai oleh Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati, melakukan sejumlah manajerial dan pertanggungjawaban pengadaan secara teknis dan menentukan kebijakan pengadaan sebagai berikut:

- a. Melengkapi dan menambahkan kebijakan yang berupa undang- undang dan prosedur tentang pengadaan barang/ jasa melalui perintah eksekutif;

- b. Mengembangkan dan memelihara kebijakan brupa undang- undang dan prosedur tentang pengadaan;
- c. Menentukan apakah untuk memenuhi kebutuhan program dengan dilakukan oleh internal pemerintah atau dilakukan oleh pihak ketiga.

2. Regulasi Pengadaan

Dalam Mutiarin, dkk (2014:212), Thai menjelaskan bahwa regulasi terhadap pengadaan barang/jasa ini diperlukan untuk:

- a. Memperjelas struktur organisasi, aturan dan pertanggungjawaban,
- b. Fase dan proses pengadaan,
- c. Standar dan perilaku pelaksanaan.

3. Pemberian kewenangan dan pemenuhan

Dalam Mutiarin, dkk (2014:213), Thai menyimpulkan penyerahan kewenangan itu adalah bahwa pembuat kebijakan penyerahan kewenangan proses pengadaan kepada penyelenggara pengadaan termasuk memberikan informasi, penilaian dan juga pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian penyelenggara pengadaanlah yang menyelenggarakan proses pengadaan dengan mengacu pada regulasi yang telah dirancang dan proses yang berjalan dengan baik akan menentukan umpan balik terhadap proses pengadaan tersebut.

4. Oprasionalisasi Fungsi *Procurement Public*

Lalu menurut Padang (2016:24) penerapan *e-procurement* di sektor publik merupakan pengadopsian dari penerapan *e-procurement* di sektor swasta. Kemudian Majdalawieh & Batemen dalam Padang bahwa meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement*

sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Pengadaan barang dan jasa secara konvensional, dikatakan tidak efisien dan efektif lagi dalam peningkatan bisnis.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 yang kemudian diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan upaya perbaikan sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi serta mengendalikan resiko yang ada. Pengendalian melalui peraturan itu ada yang telah jelas dan mudah didalam prakteknya tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang kurang jelas dan butuh perbaikan untuk membuat mekanisme berikutnya sebagai rincian sekaligus panduan langkah kerjanya.

Peraturan Presiden ini telah menjelaskan tugas dan wewenang tiap pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem *e-procurement* melaksanakan tender melalui internet yang nantinya akan membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber input produk dan jasa pada harga terendah, memastikan bahwa input tersebut memadai secara teknis dan spesifikasi tender lainnya. *E-procurement* ini merupakan praktek pembelian barang antar pelaku bisnis dengan pemanfaatan internet untuk memantau penawaran yang potensial, pembelian barang dan jasa, pembayaran, dan berinteraksi dengan pihak rekanan.

5. Umpan Balik

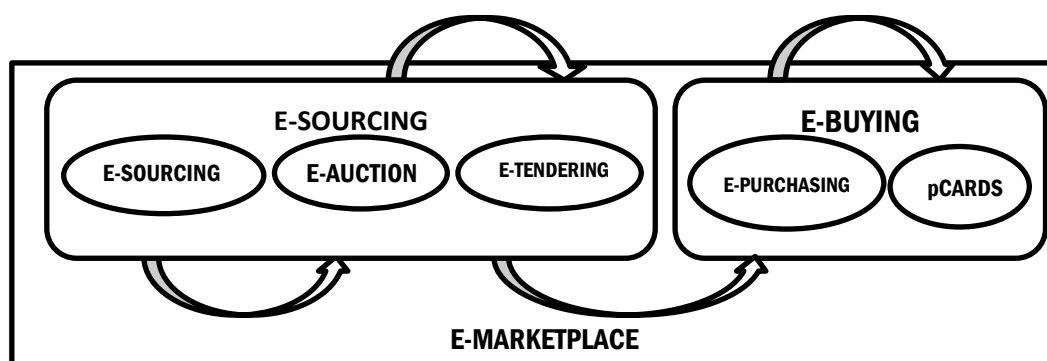
Dalam Mutiarin, dkk (2016:214), Thai menjelaskan umpan balik adalah sangat penting bagi sistem pengadaan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, maka

akan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk seluruh sistem pengadaan dan apa yang terjadi serta apa hasilnya. Lalu Thai menjelaskan bahwa umpan balik dapat mengindikasikan apa yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian atau untuk meningkatkan semua sistem pengadaan. Selanjutnya Thai mengatakan bahwa umpan balik juga dapat mengindikasikan bahwa regulasi pengadaan atau kebijakan pengadaan atau standar pengadaan masih relevan atau tidak. Dengan adanya umpan balik dapat meningkatkan atau memperbaiki siklus pengadaan yang tidak berjalan dengan efektif.

II.2.2.4 Perbedaan *Procurement* dengan *E-Procurement*

E-procurement memang sedikit berbeda dengan *procurement* konvensional sebagaimana yang digunakan oleh beberapa *stakeholder* pelelangan sebelumnya. Menurut Mutiarin, dkk (2014:27), pengadaan barang dan jasa konvensional lebih menyita waktu dalam mengemas kertas kerja dibanding dengan melayani *supplier* mereka atau menegosiasikan harga. Sementara *e-procurement* lebih mengefisienkan waktu dan biaya operasional yang lebih tinggi, jika dibandingkan cara pelanggan atau tender konvensional.

E-procurement bertumpu pada tiga hal, seperti pada gambar berikut:



Sumber: Mutiarin, dkk (2014:27)

Gambar II.01 Proses *E-Procurement*

Berikut penjelasan lebih detail, yaitu sebagai berikut:

- ***E-SOURCING***

Proses otomatis dimana organisasi mengidentifikasi, memilih dan mengelola supliernya. *E-sourcing* menggunakan jaring internet dengan tiga tahap utama proses pemasokan *e-analysis*, *e-tendering*, dan *e-caution*.

- *E-Analysis*

Merupakan tahap yang meliputi proses analisis pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategi pemasokan,

- *E-Tendering*

Penawaran via internet yang memfasilitasi proses penawaran dari pengumuman penawaran hingga penandatanganan kontrak. Elemen ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam format elektronik. Dalam *website* resmi LKPP, *e-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

- Ruang lingkup *e-Tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang
- Para pihak yang terlibat dalam *e-Tendering* adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.

- Aplikasi *e-Tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- *E-Tendering* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.
- Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
 - Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan
 - bebas lisensi (*free lisencc*).
- *E-Auction*

Pelelangan melalui internet dengan tiga langkah yaitu menyampaikan tawaran, negosiasi kontrak, serta evaluasi dan manajemen kontrak.

- ***E-BUYING***

Proses transaksi yang dikelola oleh organisasi selama pengadaan barang dan jasa sehari-hari. Proses ini dilakukan via internet untuk menopang dua tahap utama yaitu e-purchasing dan pcards.

- *E-Purchasing*

Proses pembelian otomatis sebagai perluasan dari proses manual dari identifikasi kebutuhan ke penciptaan daftar permintaan melalui pengiriman persetujuan menjadi daftar penciptaan daftar pembelian bagi penerima barang dan jasa. Dalam *website* resmi LKPP, *e-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik. *E-Purchasing* diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
- b. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.

- *P-cards (Purchasing Cards)/ Kartu Pembelian*

Fasilitas *P-cards* memberikan kemudahan yang besar dalam proses pembayaran, namun proses pembayaran hanyalah sebagian saja dari proses pembelian. *P-cards* ini sangat mirip dengan kartu kredit yang digunakan organisasi dalam pembelian barang dan jasa, baik untuk pembayaran kepada *supplier* ataupun membatasi pembelian pada jenis komoditas tertentu.

Menurut Indrajit (2016:107) ada beberapa jenis *P-cards* yang dikembangkan dalam menunjang proses pembelian, antara lain:

- *Employee P-Cards*

- Setiap karyawan dapat diberikan satu atau lebih *P-Cards*
- Hanya karyawan yang disebutkan namanya dalam kartu berwenang menggunakannya
- Digunakan untuk membayar pembelian barang atau jasa sampai nilai tertentu
- Berlaku untuk semua pemasok

- *Ghosted P-Cards (charge account)*

- Ini jenis *Pcards* yang berlaku untuk pemasok tertentu
- Semua pembelian oleh setiap karyawan yang memiliki kartu tersebut dibebankan ke kartu
- Penggunaan kartu cukup transparan antar karyawan

- *Expense Cards*

Adalah kartu yang digunakan umumnya untuk membayar biasaya yang dikeluarkan dalam proses membeli, di luar harga barang itu sendiri.

Berikut beberapa keuntungan menggunakan *P-Cards*, antar lain:

- Tidak perlu biaya di muka
- Berhubungan dengan hampir semua sistem pembukuan
- Dapat digunakan untuk pembelian secara *offline* atau *online*
- Cepat dalam pelaksanaan
- Penyelesaian di belakang.

- ***E-MARKETPLACE***

Pasar di dunia maya atau yang dikenal dengan “*e-marketplace*” atau “*marketspace*”. *E-marketplace* ini berkaitan dengan pertukaran bisnis ke bisnis secara elektronik dimana perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau supplier untuk mengkomunikasikan dan mengatur bisnis melalui internet. *E-marketplace* mengintegraikan pengadaan barang dan jasa dari pembeli dengan pemenuhan sistem dari *supplier*, menciptakan standar bagi transaksi.

Menurut Warran D. Raisch dalam Indrajit (2016:12-14), mengemukakan beberapa tahapan evolusi dari *e-marketplace*, diantaranya:

- *Commodity Exchanges*

Pada bentuk awal ini, *e-marketplace* merupakan arena tempat bertemunya berbagai pihak atau entiti yang memiliki tujuan utama untuk berdagang (transaksi jual-beli). Produk atau jasa yang paling cocok untuk diperdagangkan dalam *e-marketplace* adalah yang bersifat komoditas. Alasannya adalah karena selain sesuai dengan karakteristik transaksi dagang yang cepat dan berjangka pendek, barang-barang komoditas ini mudah sekali menentukan harganya sehingga tidak sulit jika dipertukarkan secara internasional (dengan memakai standar pembayaran semacam kartu kredit dan transfer bank). Perbedaan yang mendasar antara pasar konvensional dengan *e-marketplace* jenis ini adalah pada konsep transparansi. Disisi pembelian (*buyer transparency*), besar sekali manfaat yang diperoleh jika bertransaksi dipasar ini karena melalui internet harga-harga produk maupun jasa dapat secara transparan diketahui. Artinya,

karena begitu banyak pemasok (*suppliers*) produk atau jasa yang sama, maka seorang calon pembeli dapat melakukan pengecekan dan perbandingan antara masing-masing harga yang ditawarkan tersebut, tentu saja dengan tujuan untuk mencari harga termurah. Selain harga, transparansi terhadap kualitas pelayanan, aturan garansi, fasilitas asuransi, dan jaminan pelayanan purna jual merupakan beberapa hal yang dapat pula diperbandingkan keberadaannya oleh para calon pembeli.

- *Value Added Service*

Perkembangan berikutnya dari *e-marketplace* akan menuju kepada terbentuknya sebuah arena dimana terciptanya sebuah bentuk penawaran-penawaran baru terhadap sebuah metode jual-beli yang belum atau sulit terjadi pada pasar konvensional (*value added services*). Filosofi utama yang mendasari jenis perdagangan ini adalah suatu pandangan yang unik, sehingga mereka sebenarnya mengharapkan untuk memperoleh atau dapat membeli produk atau jasa yang khusus sesuai dengan kebutuhan atau kesukaan masing-masing individu. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu menghasilkan dan menawarkan produk atau jasa yang dapat ditambah sulamkan (*tailor made*) sesuai dengan keinginan untuk pelanggan. Selain variasi produk yang dapat disesuaikan, harga, cara pengiriman, lama garansi, jenis asuransi, dan hal-hal lain pun dapat dipilih sesuka hati konsumen.

- *Knowledge Networks*

Perkembangan berikutnya dari *e-marketplace* adalah menuju ke sebuah komunitas yang berbasis pengetahuan (*knowledge*). Perusahaan adalah merupakan kumpulan dari sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang beragam. Interaksi antara perusahaan dengan mitra bisnis, *stakeholder* (yang berkepentingan), dan konsumen merupakan tidak hanya merupakan sebuah komunikasi pasif belaka, namun didalamnya terkandung aspek-aspek pengetahuan yang secara sadar atau tidak saling dipertukarkan. Lihatlah bagaimana dengan hanya berbekal fasilitas browsing dan situs-situs portal, seseorang yang sangat awam di bidang tertentu dalam waktu singkat dapat memiliki berbagai referensi berharga berkualitas tinggi untuk dipelajari. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa hanya dengan berbekal email dan situs (*homepage*), seorang individu dapat mengembangkan bisnis dengan berbagai sumber daya data dan informasi yang telah tersedia gratis di internet.

- *Value Trust Networks*

Akhirnya *e-marketplace* akan berkembang ke sebuah jaringan yang merupakan pusat bertemunya berbagai individu, komunitas, institusi, perusahaan, bisnis, pemerintah, negara, dan entiti-entiti lain yang kehadirannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai interaksi yang tidak efisien dan efektif lagi dilakukan di pasar konvensional akan segera beralih ke *e-marketplace*.

Komunitas manusia akan terbentuk di dunia maya berdasarkan kepentingannya masing-masing (*workgroups*). Tentu saja interaksi tersebut dapat terwujud jika jejaring e-marketplace yang ada dapat dipercaya. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh e-marketplace untuk menuju kepada lingkungan tersebut diantaranya adalah faktor keamanan dalam bertransaksi, jaminan privasi dalam berkomunikasi, adanya standar pertukaran informasi antar institusi yang disepakati, dan berlakunya hukum dunia maya yang efektif.

Tabel II.04
Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No	Konvensional	<i>E-Procurement</i>
1.	Pelaksanaan lelang dibatasi waktu dan tempat	Lelang bisa dilaksanakan darimana saja, kapan saja
2.	Membutuhkan biaya besar	Biaya untuk menyelenggarakan/ mengikuti lelang sangat kecil
3.	Sulit mengikuti prosedur pengadaan	Sudah mengacu pada prosedur di PERPRES 54 tahun 2010 dan perubahannya
4.	Informasi lelang sulit diakses	Lebih mudah mengakses informasi lelang
5.	Tidak ada jaminan dalam menyelenggarakan/ mengikuti lelang	Semua pihak dijamin bisa menyelenggarakan dan mengikuti lelang
6.	Sulit mengelola dan mengakses dokumen kertas	Dokumen disimpan oleh sistem dan dijamin integritasnya

Sumber: *website* LKPP, 2018

Dengan mengacu pada tabel II.04 diatas maka dapat diketahui beberapa manfaat lebih dari *e-procurement* ini. manfaat tersebut seperti layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang terkadang menghabiskan waktu tidak sedikit. manfaat lainnya adalah

transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses kapan saja oleh siapa saja dan dimana saja dan dengan adanya *e-procurement* ini menjadi satu upaya dalam mempersiapkan para penyedia barang/jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan bersaing dipergembangan global saat ini.

Tabel II.05
Klasifikasi Sistem *E-procurement*

Tipe Sistem <i>E- Proc</i>	Fungsi Utama	Dampak Terhadap Biaya	Dampak Terhadap Aspek Organisasi
<i>E-MRO</i>	Pengambilalihan pelayanan perawatan, perbaikan, dan operasional	Rendah	Meluas ke seluruh bagian organisasi
<i>Web-Based ERP</i>	Integrasi proses pembelian dalam organisasi	Rendah, terbatas pada fase operasi	Meluas ke seluruh bagian organisasi
<i>E-Sourcing</i>	Memilih suplier melalui teknologi internet	Rendah, terbatas pada fase operasi	Terbatas pada departemen pembelian
<i>E-Tendering</i>	Pengiriman informasi permintaan kebutuhan dan harga kepada suplier dan pengumpulan penawaran oleh suplier via internet	Rendah, terbatas pada fase operasi	Terbatas pada departemen pembelian
<i>E-Reserves-Auctioning</i>	Penawaran online via internet	Rendah	Terbatas pada departemen pembelian

Sumber: Mutiarin, dkk (Thai,2014:209)

II.2.2.4 Tujuan Penerapan *E-Procurement*

Padang (2016:35) menjelaskan bahwa keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada penyedia-penyedia jasa. Secara umum tujuan dari penerapan *e-procurement* yaitu

untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Lalu Demin dalam Padang (2016:35) menambahkan terkait tujuan *e-procurement* yakni memperbaiki tingkat layanan kepada para pengguna dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, dan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Adapun Singk dalam Padang (2016:35) menyebutkan ada beberapa tujuan secara umum dari penerapan *e-procurement*, yaitu: (1) mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan, (2) meningkatkan akses kepada *supplier* untuk memastikan perluasan partisipasi, (3) mengurangi biaya pengadaan melalui *competitive bidding* dan *reverse auctioning*, (4) menghilangkan sistem kartel oleh *supplier group*. (5) meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, (6) hampir menghilangkan *paperwork* untuk meningkatkan kecepatan dalam fungsi efisiensi.

Sementara itu dalam *website* resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (<https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>). Tujuan dari penerapan *e-procurement* yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas;

Pelaksanaan *e-procurement* dikatakan efektif apabila transparan yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas serta dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa serta oleh masyarakat pada umumnya. Serta akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan

dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

Pelaksanaan *e-procurement* dikatakan efektif apabila proses *e-procurement* melibatkan pelaku pasar didalamnya dan persaingan didalamnya berlangsung dengan baik.

3. Tingkat efisiensi proses pengadaan;

Pelaksanaan *e-procurement* dikatakan efektif apabila dengan penerapan program ini pengadaan barang dan jasa menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

4. Proses monitoring dan audit;

Pelaksanaan *e-procurement* dikatakan efektif apabila publik dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa ini dan apakah proses auditnya terlaksana.

5. Kebutuhan akses informasi yang real time;

Pelaksanaan *e-procurement* dikatakan efektif apabila publik dengan mudah mendapatkan informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tegal.

II.2.2.5 Gambaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah maka di keluarkanlah Instruksi Presiden. Sebagaimana dalam Presiden Joko Widodo

(Jokowi) pada 16 Januari 2014 lalu, telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah itu ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa agung, panglima tni, sekretaris kabinet, para kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan lembaga negara; dan 8 para gubernur dan bupati/walikota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap tahun Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud, Presiden menginstruksikan para Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk: Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel.

Selain itu, menginstruksikan para Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara juga harus menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun. “Melaksanakan seluruh Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*), mendorong pelaksanaan pengadaan dimasing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi, dan mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi,” bunyi Diktum Kedua Inpres tersebut.

Khusus kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, Presiden Jokowi menambahkan instruksi sebagaimana ditujukan kepada para pejabat di atas untuk bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna mempercepat penetapan APBD, sesuai tentang waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Guna pengembangan *e-procurement*, khusus kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk melakukan percepatan pengembangan sistem untuk *e-procurement* dan penerapan *e-purchasing* yang berbasis *e-catalogue*. Selain itu, juga harus memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun kepada Menteri Keuangan, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran atas pekerjaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah atas nilai impor dan beban perpajakan dari barang-barang impor tertentu sebagai bahan *e-catalogue*.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Sementara kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Presiden menginstruksikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Pemerintah Daerah. “Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab,” bunyi Diktum Ketujuh Inpres tersebut yang ditujukan kepada para pejabat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

II.2.2.6 Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah akan berlaku Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik. Dengan mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara .Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); dan
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Adapun untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah mengacu kepada Perpres ini. Sebagai pelaksana Pengadaan, kita harus mengetahui apa saja poin-poin perbedaan Perpres PBJ terbaru ini dengan Perpres sebelumnya.

Dalam *website* (Pengadaan. Web. Id), terdapat 10 Poin Penting Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, diantaranya yaitu:

1. Lebih Sederhana

Perpres PBJ Baru direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres PBJ Baru juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan

menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

2. Agen Pengadaan

Dalam Perpres Baru akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I. Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelakannya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilihan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksanakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.

3. Swakelola Tipe Baru

Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll.

4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan

Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan

respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres PBJ Baru. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.

5. Perubahan Istilah

Perpres PBJ Baru akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.

6. Otonomi BLU (Badan Layanan Umum) Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri

Perpres PBJ Baru akan menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.

7. ULP menjadi UKPBJ

Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

8. Batas Pengadaan Langsung

Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.

9. Jaminan Penawaran

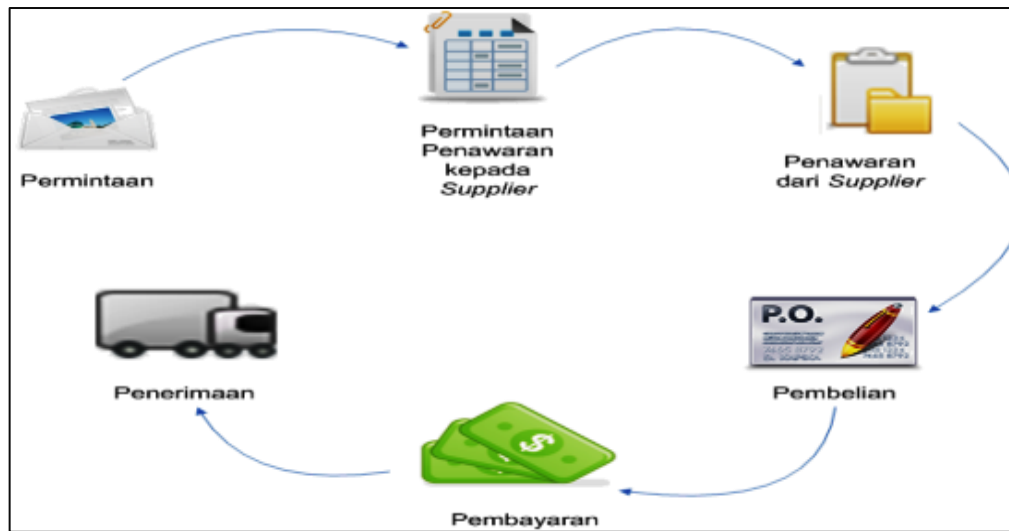
Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp.10 Milyar.

10. Jenis Kontrak

Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung (*framework contract*). Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (*lumpsum*), waktu penugasan (*time base*) dan kontrak payung.

II.2.2.7 Efektivitas *E-Procurement*

Efektivitas *e-procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.



Sumber: <http://sis.binus.ac.id/is-laboratory/>

Gambar II.02 Skema *E-Procurement*

Pada gambar II.02 dijelaskan secara singkat cakupan *e-procurement* secara garis besar yaitu dari permintaan pengadaan barang hingga barang tersebut di terima oleh pengguna. Prosesnya secara lebih spesifik adalah sebagai berikut di mana dimulai dari adanya permintaan barang disebut *purchase request*, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya pembuatan permintaan penawaran harga kepada *supplier*/pemasok yang dianggap mampu menyediakan barang tersebut disebut *request for quotation*. *Supplier*/pemasok akan merespon permintaan penawaran harga tersebut dengan memberikan penawaran harga disebut *quotation*. Lalu dari penawaran harga tersebut, akan dipilih penawaran harga terbaik sesuai kriteria permintaan barang yang telah ditentukan kemudian dibuat nota pembelian *purchase order*. Setelah dibuatkan nota pembelian, maka akan

dilakukan pembayaran (*payment*) sesuai dengan skema pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya dengan pemasok. Proses terakhir adalah proses penerimaan barang di mana supplier / pemasok akan mengirimkan barang sesuai permintaan kepada pengguna (*goods receipt*).

Salah satu contoh penerapan *e-procurement* saat ini dapat dilihat pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat diakses pada (<https://eproc.lkpp.go.id/>) dimana situs mencakup proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Berbagai pengguna yang terlibat dalam penggunaan sistem ini pada LPSE diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Badan Layanan Pengadaan (BLP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa. Salah satu bentuk transparansi yang diterapkan dalam sistem LPSE adalah memungkinkan adanya fitur audit pada sistem ini.

II.2.2.8 Implementasi Kebijakan

Menurut Rahayu, dkk implementasi kebijakan itu mengarah pada bagaimana suatu kebijakan itu akan dilaksanakan. Adapun Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik dari individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Adapun Van Metter dan Van Horn dalam Yuwnanto (2013:221) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Menurut Teori George C. Edwards III (1980) dalam Dewi, dkk. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Komunikasi

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian: pertama, transmisi sebuah kebijakan yang akan di implementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang

berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya). Kedua, kejelasan (Clarity) Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Ketiga adalah konsistensi, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber Daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III yakni:

a. Staf, yang size (jumlah) dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Informasi

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah: i).

Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Kewenangan

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dll.

d. Fasilitas

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : ruang kantor, komputer, dll.

3. Disposisi

Kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan.

Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidak mampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

- b. Arah dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

4. Struktur birokrasi

Terdapatnya *Standart Operating Procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Selain itu berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi yaitu pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan indikator implementasi kebijakan yang diuraikan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini dikarenakan peneliti akan meneliti efektivitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal, yakni:

- a. Komunikasi, dengan memfokuskan kepada transmisi kebijakan, kejelasan tujuan dan cara kebijakan, dan konsistensi komunikasi.
- b. Sumber daya, dengan memfokuskan kepada staf (jumlah dan kemampuan), informasi, kewenangan dan fasilitas.
- c. Disposisi/sikap implementor, dengan memfokuskan kepada kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana.
- d. Struktur birokrasi, dengan memfokuskan kepada struktur organisasi (unit organisasi pelaksana), pembagian tugas, koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

II.3 Pokok-Pokok Penelitian

Dalam Prakoso (2017:48), pokok-pokok penelitian adalah tahapan dimana kita berusaha menjabarkan konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Definisi operasional atau pokok-pokok penelitian berfungsi untuk menjelaskan ukuran atau indikator-indikator penelitian agar data yang diperoleh lebih konkret.

Penelitian ini berfokus pada pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018-2019. Penelitian ini difokuskan pada indikator efektivitas menurut Duncan yang berkenaan dengan penerapan *e-procurement* di Kabupaten Tegal, yakni dalam dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

- a. Pencapaian Tujuan, dengan memfokuskan kepada tercapainya tujuan atau mandat dari apa yang diinginkan dengan menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- b. Integrasi, dengan memfokuskan kepada seberapa jauh kemampuan organisasi pelaksana dalam memberikan sosialisasi kepada beberapa organisasi terkait dan masyarakat sebagai objek dari seluruh tujuan kerja pemerintah.
- c. Adaptasi, dengan memfokuskan kepada seberapa jauh organisasi pelaksana dalam menyesuaikan diri dalam pelaksanaan sistem ini, termasuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana (persiapan infrastruktur dan teknologi) dan tenaga kerja (persiapan sumber daya manusia)

Adapun indikator implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III (1980) yang peneliti gunakan untuk mengukur efektivitas *e-procurement* di Kabupaten Tegal yakni:

- a. Komunikasi, dengan memfokuskan kepada transmisi kebijakan, kejelasan tujuan dan cara kebijakan, dan konsistensi komunikasi.
- b. Sumber daya, dengan memfokuskan kepada staf (jumlah dan kemampuan), informasi, kewenangan dan fasilitas.

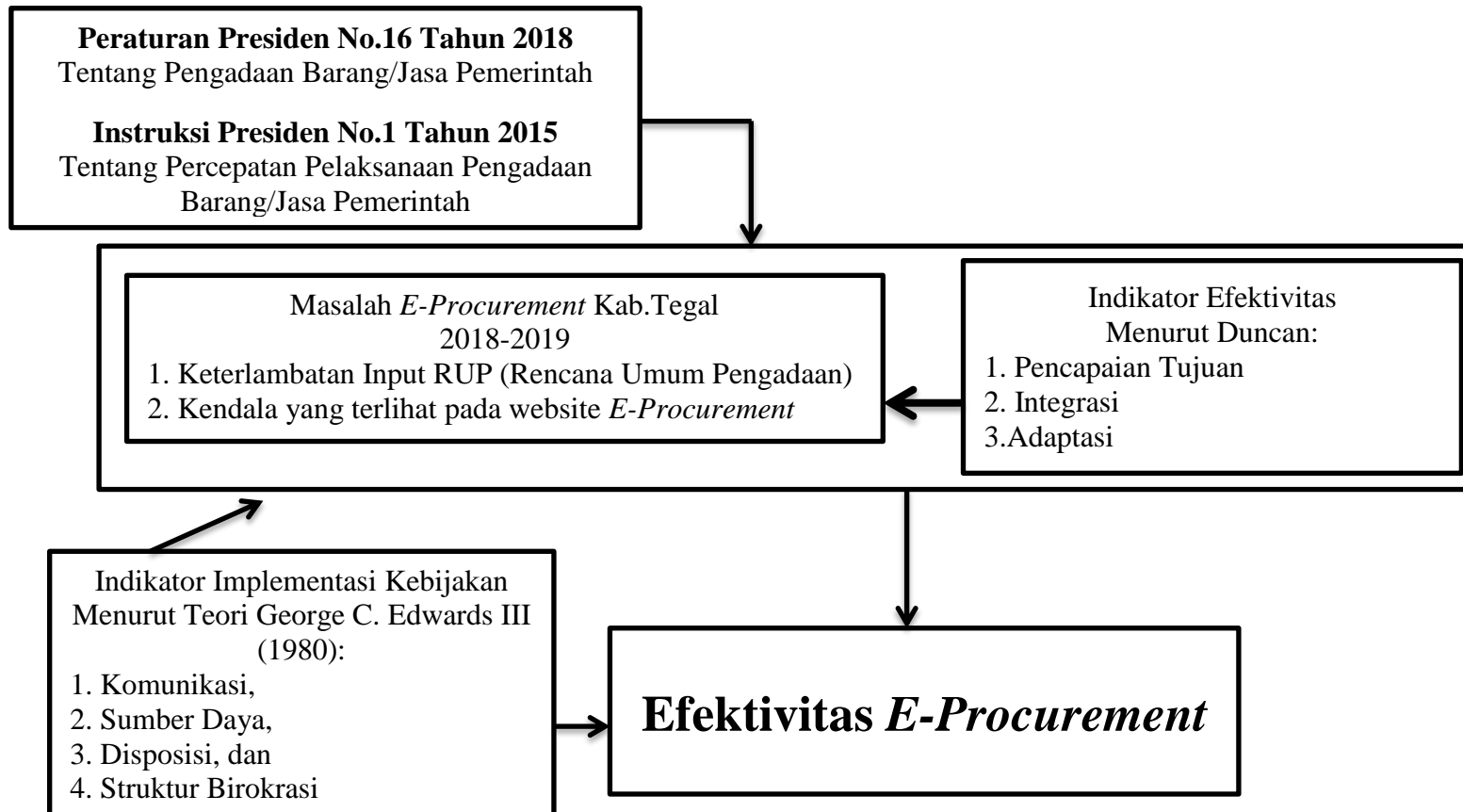
- c. Disposisi/sikap implementor, dengan memfokuskan kepada komitmen, kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dan Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana
- d. Struktur birokrasi, dengan memfokuskan kepada struktur organisasi (unit organisasi pelaksana), pembagian tugas, koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

II.4 Alur Pikir Penelitian

Penelitian ini berlandaskan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti efektivitas pelaksanaan program *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program *e-procurement* di Kabupaten Tegal, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang tentunya terkait dengan *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.03 Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto (2013:203), metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Seperti sudah dijelaskan, variasi metode dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dokumentasi.

Dalam Sugiyono (2015:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut Singarimbun (2006:4), penelitian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu:

a. Tipe Penelitian Penjajagan (Eksploratif)

Penelitian penjajagan adalah penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari. Pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk dapat melakukan studi deskriptif, data belum mempunyai hipotesis, pengetahuan penelitian tentang gejala yang akan diteliti masih kurang atau sedikit sekali. Penelitian yang dilakukan sebagai langkah penelitian pertama untuk penelitian yang mendalam, baik penjelasan maupun deskriptif.

b. Tipe Penelitian Penjelasan (Eksplanator)

Penelitian penjelasan adalah penelitian yang meyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan pula penelitian pengujian hipotesis atau *testing research*. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian rasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan variabel.

c. Tipe Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Maka dari itu laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dari ketiga tipe penelitian diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu berarti peneliti mencoba mendeskripsikan secara

umum tentang masalah yang diteliti mengenai bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.

III.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Arikunto (2013:22) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Dalam Arikunto (2013:22) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

III.3 Informan Penelitian

Dalam Pajli (2015:45) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Lalu Bogdan dan Biklen dalam Emzir (2010:101) mengatakan bahwa informan kunci adalah subjek yang pandangan dan tuturannya jelas. Mereka dapat digunakan sebagai sumber dalam analisis pendahuluan. Meskipun peneliti dapat menggunakan informan sebagai sumber, perlu diperhatikan agar peneliti tidak menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu kepada mereka. Mereka mempunyai kepentingan dalam melihat sesuatu dalam suatu cara khusus yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka membantu menjelaskan dan menganalisis. Meskipun tidak semua orang harus ditanya, meskipun tidak semua orang yang peneliti dengar dapat bermanfaat, informan kunci, dibawah keadaan yang tepat, dapat membantu analisis peneliti selanjutnya, khususnya untuk mengisi bagian-bagian deskripsi yang masih bolong-bolong.

Penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat, serta informasi yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Informan yang diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) : 1 orang
2. Administrator Layanan Pengadaan Secara Elektronik : 1 orang

- | | |
|--|-----------|
| 3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) | : 1 orang |
| 4. Pengguna Barang dan Jasa | : 2 orang |
| 5. Penyedia Barang dan Jasa | : 2 orang |
| Jumlah | : 7 orang |

Adapun yang melatarbelakangi pemilihan informan tersebut karena:

1. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), peneliti akan menggali informasi dalam hal efektivitas *e-procurement* yaitu pencapaian tujuan (tujuan *e-procurement*), integrasi (sosialisasi pada organisasi terkait serta masyarakat), dan adaptasi yakni (penyesuaian diri pada sistem, pengadaan perangkat kerja (sarpras: persiapan infrastruktur dan teknologi) serta tenaga kerja (persiapan tenaga kerja), peneliti juga akan menggali informasi dalam hal implementasi kebijakannya yakni komunikasi (transmisi kebijakan, kejelasan tujuan, cara kebijakan, dan konsistensi kebijakan), sumber daya (jumlah dan kemampuan staff), disposisi/sikap implementor (kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana), dan struktur birokrasi pada pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Administrator Layanan Pengadaan Secara Elektronik, peneliti akan menggali informasi dalam hal efektivitas *e-procurement* yaitu pencapaian tujuan (tujuan *e-procurement*), integrasi (sosialisasi pada organisasi terkait serta masyarakat), dan adaptasi yakni (penyesuaian diri pada sistem, pengadaan perangkat kerja (sarpras: persiapan infrastruktur dan teknologi) serta tenaga kerja (persiapan

tenaga kerja), peneliti juga akan menggali informasi dalam hal implementasi kebijakannya yakni komunikasi (transmisi kebijakan, kejelasan tujuan, cara kebijakan, dan konsistensi kebijakan), sumber daya (jumlah dan kemampuan staff), disposisi/sikap implementor (kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana), dan struktur birokrasi pada pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP), peneliti akan menggali informasi dalam hal efektivitas *e-procurement* yaitu pencapaian tujuan (tujuan *e-procurement*), integrasi (sosialisasi pada organisasi terkait serta masyarakat), dan adaptasi yakni (penyesuaian diri pada sistem, pengadaan perangkat kerja (sarpras: persiapan infrastruktur dan teknologi) serta tenaga kerja (persiapan tenaga kerja), peneliti juga akan menggali informasi dalam hal implementasi kebijakannya yakni komunikasi (transmisi kebijakan, kejelasan tujuan, cara kebijakan, dan konsistensi kebijakan), sumber daya (jumlah dan kemampuan staff), disposisi/sikap implementor (kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana) dan struktur birokrasi pada pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Pengguna Barang dan Jasa, peneliti akan menggali informasi dalam hal implementasi kebijakannya yakni komunikasi (transmisi kebijakan, kejelasan

tujuan, cara kebijakan, dan konsistensi kebijakan), sumber daya (jumlah dan kemampuan staff), disposisi/sikap implementor (kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana), dan struktur birokrasi pada pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

5. Penyedia Barang dan Jasa, peneliti akan menggali informasi dalam hal implementasi kebijakannya yakni komunikasi (transmisi kebijakan, kejelasan tujuan, cara kebijakan, dan konsistensi kebijakan), sumber daya (jumlah dan kemampuan staff), disposisi/sikap implementor (kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana), dan struktur birokrasi pada pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini dimungkinkan akan ada penambahan informan diluar dari informan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*) pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di

jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Menurut Sugiyono (2015:225-241) ada empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun jauh dapat terobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Esterberg (2002) mengatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Sedangkan teknik pengumpulan data lain yang penulis gunakan yakni:

1. Teknik Kepustakaan

Dalam Prakoso (2018:144), Koentjaraningrat menjelaskan teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Dimana observasi untuk meneliti secara langsung di lapangan tentang efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Teknik wawancara untuk menggali informasi tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal. Melalui *e-procurement* yang salah satu tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menjadi

objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal beberapa informan yaitu dari Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Administrator LPSE, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP), pengguna barang dan jasa, serta dari penyedia barang dan jasa.

Pada teknik kepustakaan pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti buku-buku, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Serta pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dimana pengumpulan data diperoleh dari dokumen (berbentuk tulisan/gambar), peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.

III.5 Teknik dan Analisis Data

III.5.1 Teknik dan Analisis Data dengan Aplikasi Powersim

Dalam (https://www.academia.edu/22127028/WORKSHOP_POWERSIM), Powersim adalah *software* simulasi untuk sistem dinamik dengan menggunakan metodologi pemodelan berbasis komputer (Powersim, 2005). Dan bisa dikatakan pula powersim merupakan salah satu software yang digunakan untuk membuat model simulasi sistem dynamics.

Dinamika Sistem (*System dynamics*) adalah suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh Jay Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di *Massachusetts Institute of Technology* Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi-tendensi dinamik sistem-sistem yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Asumsi

utama dalam paradigma dinamika sistem adalah bahwa tendensi-tendensi dinamik yang persistent (terjadi terus menerus) pada setiap sistem yang kompleks bersumber dari struktur kausal yang membentuk sistem itu. Oleh karena itulah model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal (*theory-like*).

1. Struktur dan Hubungan Dalam Model

Suatu model dinamika sistem dibentuk karena adanya hubungan sebab-akibat (*causal*) yang memengaruhi struktur di dalamnya baik secara langsung antar dua struktur, maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur, hingga membentuk umpan-balik (*causal loop*). Struktur umpan-balik ini merupakan blok pembentuk model yang diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran hubungan sebab-akibat dari variabel-variabel yang melingkar secara tertutup.

Ada 2 macam hubungan kausal, yaitu

1. hubungan sebab-akibat positif; dan
2. hubungan sebab-akibat negatif.

Ada 2 macam umpan-balik, yaitu:

1. umpan-balik positif (*growth*); dan
2. umpan –balik negatif (*goal seeking*).

Dalam merepresentasikan aktivitas dalam suatu lingkaran umpan-balik, digunakan dua jenis variabel utama yang disebut sebagai stok dan aliran (*level and rate* atau dikenal juga dengan sebutan *stock and flow*). Stok menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Dalam kerekayasaan (*engineering*) stok sistem

lebih dikenal sebagai *state variable system*. Stok merupakan akumulasi di dalam sistem. Persamaan suatu variabel rate merupakan suatu struktur kebijaksanaan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu keputusan dibuat berdasarkan kepada informasi yang tersedia didalam sistem. Aliran adalah satu-satunya variabel dalam model yang dapat memengaruhi stok.

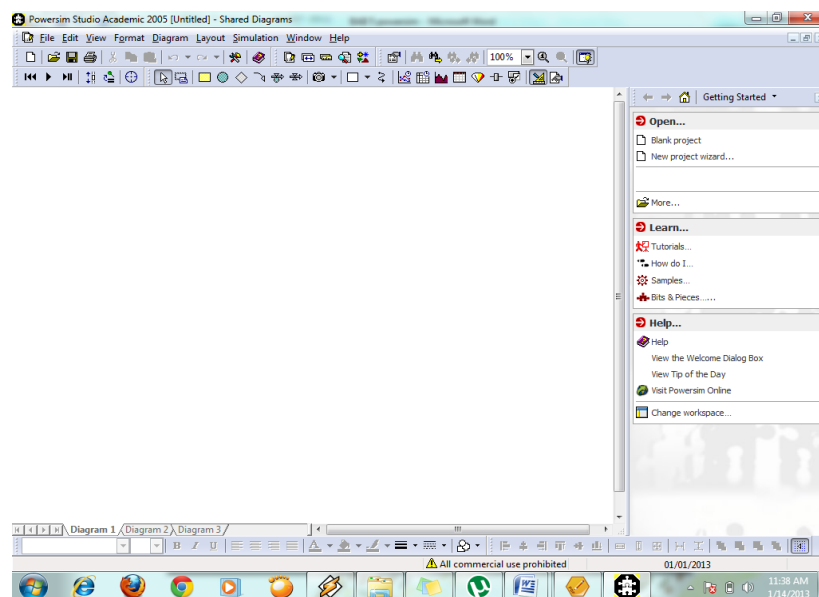
Melengkapi variabel stok dan aliran, dalam memodelkan dinamika sistem dikenal juga variable lain *auxiliary*, konstanta (*constant*) dan tundaan (*delay*). Auxiliary merupakan variabel yang bisa berubah seiring dengan waktu, perubahannya dapat disebabkan atas hubungan-hubungan sebab-akibat yang terjadi antara variabel dalam model atau pun akibat variabel dari luar secara independen. Konstanta merupakan variabel dengan nilai tetap yang tidak berubah sepanjang waktu. Sedangkan tundaan adalah variabel waktu pada perilaku perubahan yang tidak serta-merta (tertunda) atas proses yang terjadi dalam hubungan-hubungan antar struktur hingga memengaruhi perilaku model.

2. Penggunaan

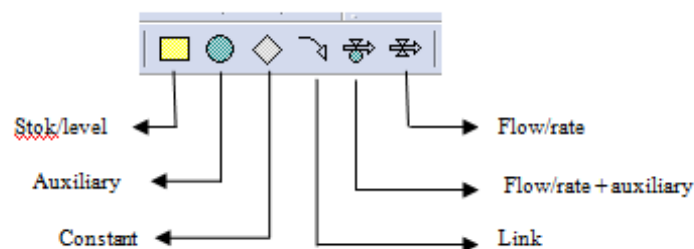
Pada mulanya Forrester menerapkan metodologi dinamika sistem untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam industri (perusahaan). Model-model dinamika sistem pertama kali ditujukan kepada permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventori, ketidakstabilan tenaga kerja, dan penurunan pangsa pasar suatu perusahaan (Forrester 1961). Perkembangannya terus meningkat semenjak pemanfaatannya dalam persoalan sistem-sistem sosial yang sangat beragam, yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan.

Pembuatan model dinamika sistem umumnya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang memang dirancang khusus. Perangkat lunak tersebut seperti Powersim, Vensim, Stella, dan Dynamo. Dengan perangkat lunak tersebut model dibuat secara grafis dengan simbol-simbol atas variabel dan hubungannya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak yang dapat mengolah operasi matematis jenis *spreadsheet* seperti Microsoft Excel atau Lotus juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembuatan model dinamika sistem.

Berikut merupakan tata cara dan icon-icon yang digunakan dalam membuat model dengan menggunakan powersim.



Gambar III.01 Tampilan Awal dari Powersim



Gambar III.02 Variabel Dalam Powersim

Berikut merupakan penjelasan dari variabel yang digunakan dalam proses pembuatan sistem menggunakan powersim:

☐ *Level*

Besaran yang mengakumulasikan nilai, biasanya didahului dengan aliran atau rate masuk (*inflow*) dan setelahnya terdapat aliran keluar (*outflow*). Contohnya populasi, *Inventory* (Gudang).

Variabel level merepresentasikan akumulasi atau integrasi suatu aliran dari waktu ke waktu. Aliran tersebut dapat berupa aliran fisik seperti aliran material, uang dan orang maupun aliran yang sifatnya *intangible* seperti aliran informasi. Level menyatakan *state* dari sistem yang menyediakan informasi bagi pengambil keputusan untuk mengambil tindakan. Level hanya dapat berubah melalui *variabel rate*. Level merupakan akumulasi aliran masuk (*inflow*) dikurangi aliran keluar (*outflow*). Level berada pada kondisi equilibrium ketika tidak terjadi perubahan pada level, yang berarti total *inflow* sama dengan total *outflow*.

☐ *Auxiliary*

Besaran yang nilainya dihitung berdasarkan besaran yang lain. *Auxiliary* merupakan simbol yang menunjukkan sebuah faktor yang mempengaruhi rate atau level yang nilai (besarannya) dipengaruhi juga oleh faktor lain.

Variabel *auxiliary* ialah persamaan *derivative* yang merupakan fungsi dari variabel lain, baik berupa konstanta maupun variabel eksogen. Dengan *auxiliary*, kita dapat merepresentasikan suatu struktur kebijakan secara lebih

baik dan jelas. Jika variabel *auxiliary* dihilangkan maka detail dari struktur kebijakan tidak dapat tergambarkan didalam model.

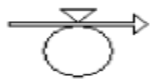
◇ *Constant*

Besaran yang nilainya tetap dan digunakan dalam perhitungan besaran pada *auxiliary* atau *flow*. Dalam simbol ini menunjukan faktor constant mempengaruhi faktor lain namun tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain tidak ada cabang sebelumnya.



Flow

Aliran dalam sistem yang mempengaruhi level



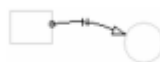
Flow with rate

Mempengaruhi level yang dikendalikan oleh besaran *auxiliary*.



Information link

Memberikan informasi ke variabel *auxiliary* tentang nilai variabel yang lain.



Delayed-info-link

Untuk variabel *auxiliary* yang mengandung fungsi *delay* khusus.

III.5.2 Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Adapun teknik analisis data menurut Sugiyono (2015:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam Sugiyono (2015:246), Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung seacara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun aktivitas dalam analisis data di lapangan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:247-252) yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutny sarankan dalam mendisplay data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

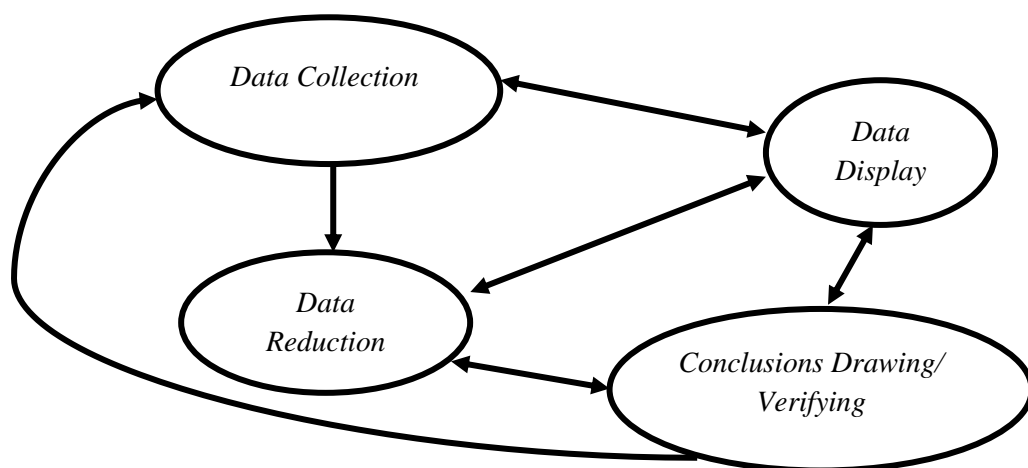
3. *Conclusion Drawing* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Model Interaktif dalam analisis data menurut Miles and Huberman dikutip dari Sugiyono (2015:247) sebagai berikut:



Gambar III.03 Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)

Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi satu sama lainnya berinteraksi dari ketiga komponen yang ada. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun fokus penelitian pada efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal.

III.6 Sistematika Penulisan

Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca atau mempelajari pembahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini dibahas tentang penelitian terdahulu, kerangka teori, pokok-pokok penelitian, alur pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini dibahas tentang jenis dan tipe penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data, sistematika penulisan.

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Didalam bab ini dibahas:

1. Visi dan Misi Kabupaten Tegal
2. Letak Geografis Kabupaten Tegal,
3. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal,

4. Sejarah LPSE Kabupaten Tegal,
5. Visi dan Misi LPSE Kabupaten Tegal,
6. Jumlah Pegawai LPSE Kabupaten Tegal,
7. Sarana dan Prasarana LPSE Kabupaten Tegal.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini dibahas:

1. HASIL PENELITIAN

- a. Efektivitas Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Tegal
- b. Faktor–faktor pendukung maupun penghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal *E-Procurement* di Kabupaten Tegal

2. PEMBAHASAN

- a. Efektivitas Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Tegal
- b. Faktor–faktor pendukung maupun penghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal *E-Procurement* di Kabupaten Tegal

BAB VI PENUTUP

Didalam bab ini dibahas:

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Dalam Prakoso (2018:148) untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, peneliti kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

IV.1 Deskripsi KabupatenTegal

IV.1.1 Visi dan Misi KabupatenTegal

A. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.

B. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat,
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan,
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

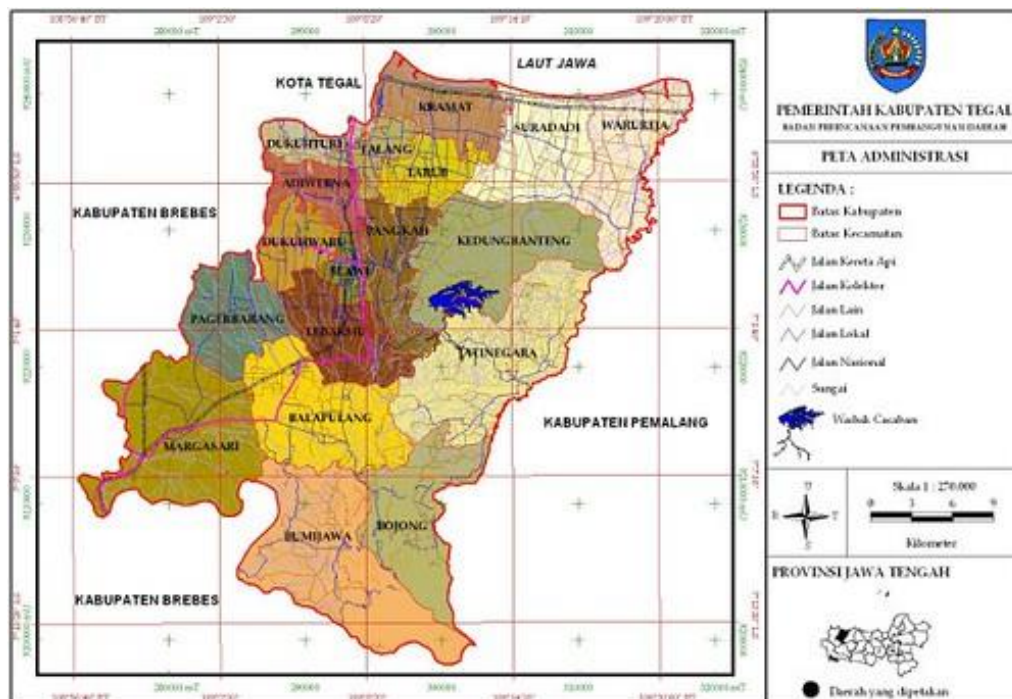
IV.1.2 Letak Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 878,79 km persegi, yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa

Gambar IV.01
Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber: http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai/pesisir meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja (3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan);
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah (10 kecamatan dengan 159 desa/kelurahan)
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng (5 kecamatan dengan 85 desa)

Kecamatan Warureja adalah kecamatan yang paling jauh terhadap Kecamatan Slawi yaitu 42 km, sedangkan yang terdekat adalah Kecamatan Pangkah yaitu 4 km.

➤ Iklim

Kabupaten Tegal beriklim Tropis, secara keseluruhan pada tahun 2017 curah hujan di bawah tahun 2016, dimana temperatur pada tahun 2017 maksimum rata-rata 32,1° C, minimum rata-rata 24,9° C dan suhu rata-rata 27,9° C. Kelembaban di Kabupaten Tegal Tahun 2017 rata-rata 78,08 persen lebih rendah dari tahun 2016 yang 80,00 persen dengan jumlah bulan basah 12 bulan. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari 394,3 mm³ dan terendah bulan Agustus 4,0 mm³. Rata-rata curah hujan 141,54 mm³, dengan tekanan udara rata-rata 1009,99 hPa serta sinar matahari rata-rata menyinari 183,57 jam per bulan dengan rata-rata penguapan sebesar 87,24 mm.

Tabel IV.01
Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Tegal

Uraian	Satuan	2016	2017
Luas	Km ²	878,79	878,79
Kelembaban	%	80,00	78,08
Hari Hujan	Hari	139	115
Kecepatan Angin	Knots	3,80	4,08
Desa Pesisir	Desa	53	53
Desa Bukan Pesisir	Desa	234	234

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018

Tabel IV.02
Luas Wilayah Kabupaten Tegal
Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2017 (Ha)

No.	Kecamatan	Sawah *)	Bukan Sawah	Jumlah	Sawah (%)	Bukan Sawah (%)
1	Margasari	3.489	5.194	8.683	9,01	10,57
2	Bumijawa	2.280	6.576	8.856	5,89	13,38
3	Bojong	2.245	3.607	5.852	5,80	7,34
4	Balapulang	3.152	4.339	7.491	8,14	8,83
5	Pagerbarang	2.752	1.548	4.300	7,10	3,15
6	Lebaksiu	2.719	1.376	4.095	7,02	2,80
7	Jatinegara	2.111	5.851	7.962	5,45	11,9
8	Kedungbanteng	1.379	7.383	8.762	3,56	15,02
9	Pangkajene	1.448	2.103	3.551	3,74	4,28
10	Slawi	375	1.014	1.389	0,97	2,06
11	Dukuhwaru	1.836	794	2.630	4,74	1,62
12	Adiwerna	989	1.397	2.386	2,55	2,84
13	Dukuhturi	624	1.124	1.748	1,61	2,29
14	Talang	1.202	637	1.839	3,10	1,30
15	Tarub	1.742	940	2.682	4,50	1,91
16	Kramat	2.157	1.692	3.849	5,57	3,44
17	Suradadi	4.131	1.442	5.573	10,66	2,93
18	Warureja	4.104	2.127	6.231	10,60	4,33
Jumlah		38.735	49.144	87.879	100	100

*) Termasuk lahan yang diusahakan di kawasan hutan

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018

Dari tabel IV.02 dapat diketahui keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tegal menurut kecamatan dan jenis penggunaan lahan 2017 (ha), baik mencakup luas sawah maupun bukan sawah yakni 87.879 (ha). Luas keseluruhan lahan sawah adalah 38.735 (ha) dan luas keseluruhan lahan bukan sawah adalah 49.144 (ha). Dan dari 18 kecamatan, kecamatan Bumijawa yang memiliki lahan terluas yakni 5,89 % sawah (2.280 ha) dan 13,38 % bukan sawah (6.576 ha) dimana total luasnya adalah 8.856 (ha).

IV.1.3 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur atau Bupati/Walikota, serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kabupaten Tegal sebagai Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten juga menata organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Struktur organisasi di Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.03
Struktur Organisasi Kabupaten Tegal

NO.	NAMA PERANGKAT
I	BUPATI TEGAL
II	WAKIL BUPATI TEGAL
1.	SEKRETARIAT DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari: 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Pemerintahan Desa 3. Bagian Hukum Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 1. Bagian Perekonomian 2. Bagian Pembangunan 3. Bagian Layanan Pengadaan

	<p>4. Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Organisasi 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 4. Bagian Umum <p>Staf Ahli</p>
2.	DPRD SEKRETARIAT
3.	<p>DINAS-DINAS DAERAH</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Perhubungan</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.	INSPEKTORAT, DAN BADAN DAERAH Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Pengelolaan Investasi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	RSUD, KANTOR DAN LEMBAGA LAIN RSUD Dr.Soeselo RSUD Suradadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kecamatan

Sumber: http://utama.tegalkab.go.id/page/view/struktur_organisasi_20190306085

Tabel IV.04
Inventarisasi Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Th. 2017

URAIAN	JUMLAH
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	
SEKOLAH DASAR	174
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	473
SEKOLAH MENENGAH ATAS	1.888
DIPLOMA I	59
DIPLOMA II	994
DIPLOMA III	714
DIPLOMA IV	120
STRATA 1	5.325
STRATA 2	293
STRATA ²	-
MENURUT GOLONGAN	
GOLONGAN 1	122
GOLONGAN II	1.806
GOLONGAN III	4.410
GOLONGAN IV	3.702
MENURUT JENIS KELAMIN	
LAKI-LAKI	5.292
PEREMPUAN	4.748
JUMLAH	10.040

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018

Dari Tabel IV.04 dapat diketahui ada tahun 2017 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal adalah 10.040 orang. Dengan komposisi pada tahun 2017 adalah pegawai golongan I sebanyak 122 orang, golongan II sebanyak 1.806

orang, golongan III sebanyak 4.410 orang dan Golongan IV sebanyak 3.702 orang.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah PNS dengan latar belakang pendidikan tamat SD sebanyak 174 orang, tamat SLTP sebanyak 473 orang, dan tamat SMA sebanyak 1.888 orang, untuk latar belakang tamat pendidikan Diploma terdiri dari D-I sebanyak 59 orang, D II 994 orang, D-III sebanyak 714 orang, dan D-IV berjumlah 120 orang.

Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah S1 yaitu sebanyak 5.325 orang, dan S2 sebanyak 293 orang. Dari total Pegawai Negeri Sipil yang tercatat yaitu sebanyak 10.040 pada tahun 2017 dengan jumlah pegawai laki-laki 5.292 orang lebih banyak daripada pegawai perempuan yang sebanyak 4.748 orang.

IV.2 Sejarah LPSE Kabupaten Tegal

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupten Tegal dibentuk pada tahun 2011. Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal dan Surat Keputusan Bupati untuk penunjukan personil LPSE. Surat keputusan Bupati ini yang mengusulkan bagian perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Tegal dari tahun 2011-2016 serta SK LPSE ini dapat berubah setiap tahunnya karena ada perubahan personil dan anggaran.

Tahun 2011 merupakan masa transisi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Tegal. Dimana pada tahun ini pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Tegal masih menggunakan pengadaan langsung (manual). Apabila nilainya dari 0-100 juta pengadaan langsung, dan bila nilainya diatas 100 juta nantinya berkas pengadaan langsung dikumpulkan dan dievaluasi lalu baru di upload. Di tahun 2012 baru dapat diintegrasikan menggunakan aplikasi SPSE hingga sekarang, dimana nilainya 200juta. Pengadaan ada 4 macamnya yakni pertama barang, yang nilainya dulu nilainya 0-100 juta itu pengadaan langsung. Kedua konstruksi yang nilainya bila lebih dari 100 juta itu melalui lelang. Ketiga jasa lainnya, ditahun 2012 nilainya hingga 200 juta. Keempat jasa konsultansi, nilainya 50 juta dengan cara lelang.

IV.2.1 Visi dan Misi LPSE Kabupaten Tegal

A. Visi

Terwujudnya masyarakat Tegal yang maju dan mandiri melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efesien berbasis teknologi dan komunikasi.

B. Misi

Mewujudkan layanan online (*E-Government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi dan komunikasi, serta mewujudkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

IV.2.2 Jumlah Pegawai LPSE Kabupaten Tegal

Dalam rangka meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang lebih baik di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal dan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Nomor: 050/ 007/ Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Personil Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal Tahun 2019. Dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.05
Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tamat SD	0	0
2.	Tamat SLTP	0	0
3.	Tamat SLTA	2	22,22
4.	D-III	1	11,11
5.	S-1	5	55,56
6.	S-2	1	11,11
7.	S-3	0	0
Jumlah		9	100

Sumber: <http://bkd.tegalkab.go.id/main/detail/196601131996032001>

Berdasarkan tabel IV.05 dapat diketahui pegawai LPSE Kabupaten Tegal dilihat dari tingkat pendidikan. Dimana dari sembilan (9) pegawai LPSE Kabupaten Tegal, mayoritas 55,56 % tamatan S-1 yakni ada 5 orang. Dan pegawai LPSE Kabupaten Tegal untuk pendidikan lainnya terdapat 22,22 % tamat SLTA yakni 2 orang, 11,11% tamatan D-III yakni 1 orang dan 11,11% sisanya tamatan S-2 yakni 1 orang.

Tabel IV.06
Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Usia

No.	Usia/ Tahun	Jumlah	%
1.	0-20	0	0
2.	21-30	0	0
3.	31-40	6	66,67
4.	41-50	2	22,22
5.	51-60	1	11,11
6.	60+	0	0
Jumlah		9	100

Sumber: <http://bkd.tegalkab.go.id/main/detail/196601131996032001>

Berdasarkan tabel IV.06 dapat diketahui pegawai LPSE Kabupaten Tegal dilihat dari usia. Dimana dari sembilan (9) pegawai LPSE Kabupaten Tegal, mayoritas 66,67% adalah berusia 31-40 tahun yakni ada 6 orang. Dan pegawai LPSE Kabupaten Tegal dilihat dari usia lainnya terdapat 22,22 % berusia 41-50 tahun yakni 2 orang, serta 11,11% sisanya adalah berusia 51-60 tahun yakni 1 orang.

Tabel IV.07
Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah	%
1.	0-5	8	88,89
2.	6-10	1	11,11
3.	11-15	0	0
4.	16-20	0	0
5.	21-25	0	0
6.	26-30	0	0
7.	30+	0	0
Jumlah		9	100

Sumber: Wawancara LPSE Kabupaten Tegal 2019

Berdasarkan tabel IV.07 dapat diketahui pegawai LPSE Kabupaten Tegal dilihat dari masa kerja. Dimana dari sembilan (9) pegawai LPSE Kabupaten

Tegal, mayoritas 88.89% telah bekerja selama 0-5 tahun yakni ada 8 orang. Dan pegawai LPSE Kabupaten Tegal sisanya terdapat 11,11% telah bekerja selama 6 tahun yakni 1 orang.

Tabel IV.08
Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Dilihat dari Golongan

No.	Golongan	Jumlah	%
1.	I	0	0
2.	II	3	33,33
3.	III	6	66,67
4.	IV	0	0
Jumlah		9	100

Sumber: <http://bkd.tegalkab.go.id/main/detail/196601131996032001>

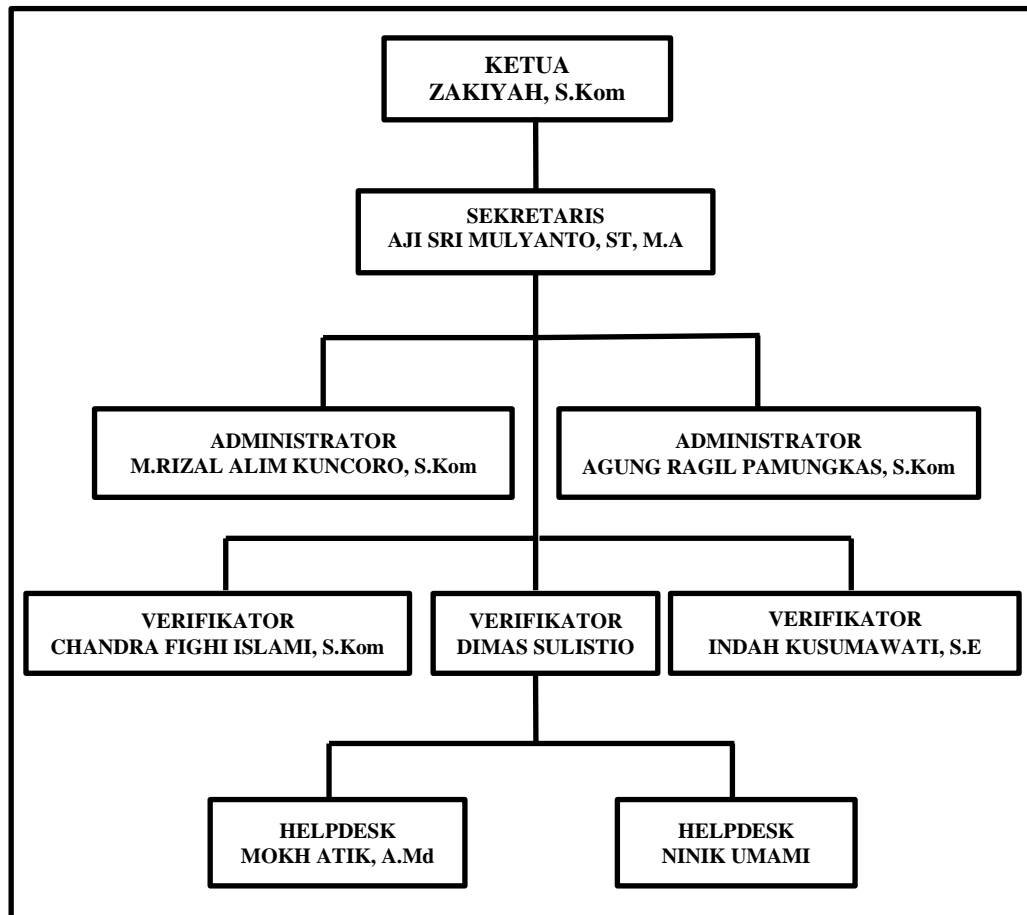
Berdasarkan tabel IV.08 dapat diketahui pegawai LPSE Kabupaten Tegal dilihat dari golongan. Dimana dari sembilan (9) pegawai LPSE Kabupaten Tegal, mayoritas 66,67% merupakan pegawai golongan III yakni ada 6 orang. Dan pegawai LPSE Kabupaten Tegal dilihat dari golongan lainnya terdapat 33,33% adalah pegawai golongan II yakni 3 orang.

Tabel IV.09
Profil Pegawai LPSE Kabupaten Tegal Tahun 2019

No.	Nama	(L/P)	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Zakiyah, S.Kom (196601131996032001)	P	53	S-1	Kasi LPSE
2.	Aji Sri Mulyanto, ST, M.A (197705072003121004)	L	42	S-2	Kasi Infrastruktur TIK
3.	M. Rizal Alim Kuncoro, S.Kom (198807272010011008)	L	31	S-1	Pranata Komputer
4.	Agung Ragil Pamungkas, S.Kom (198708282011011006)	L	32	S-1	Pranata Komputer
5.	M. Chandra Fighi Islami, S.Kom (198712312015021001)	L	32	S-1	Pranata Komputer
6.	Dimas Sulistio (198407202014061007)	L	35	SLTA	Staf
7.	Indah Kusumastuti,S.E (198709102011012014)	P	32	S-1	Staf
8.	Ninik Umami (197810031999032001)	P	41	SLTA	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
9.	Mokh Atik, A.Md (198605192010011013)	L	33	Diploma III	Pranata Hubungan Masyarakat

Sumber: <http://bkd.tegalkab.go.id/main/detail/196601131996032001>

Gambar IV.02
Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Tegal Tahun 2019



Sumber: Surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Tahun 2019

Tabel IV.10
Personil Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE)
Kabupaten Tegal Tahun 2019

NO.	NAMA/JABATAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Kepala Seksi LPSE (ZAKIYAH, S.Kom)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Kepala Seksi Infrastruktur TIK (AJI SRI MULYANTO, ST.MA)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Sekretaris
3.	M. RIZAL ALIM KUNCORO, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Administrator
4.	AGUNG RAGIL PAMUNGKAS, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Administrator
5.	CHANDRA FIGHI ISLAMI, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Verifikator
6.	DIMAS SULISTIO	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Verifikator
7.	INDAH KUSUMASTUTI,S.E	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Tegal	Verifikator
8.	NINIK UMAMI	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Tegal	Helpdesk
9.	MOKH ATIK, A.Md	Bagian humas Setda Kabupaten Tegal	Helpdesk

Sumber: Surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Tahun 2019

Adapun tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Nomor: 050/007/ Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Personil Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1. Tugas:

- a. Memimpin Layanan Pengadaan Secara Elektronik agar sesuai tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Merumuskan kebijakan internal terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

2. Fungsi:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Bertanggungjawab atas kerahasiaan data dan dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta keberlangsungan dan kelancaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

b. Sekretaris

1. Tugas: melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, tata kelola, kerja sama, hubungan masyarakat, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

2. Fungsi:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kinerja pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Melaksanakan perencanaan internal sesuai kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Penyelenggaraan ketatausahaan, tata kelola, kerja sama, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai tugas dan fungsi;
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh staf pendukung.
- c. Koordinator Unit Administrasi dan Sistem Elektronik
1. Tugas: Melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 2. Fungsi:
 - a. Penyiapan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. Pengelola kapasitas komponen pendukung layanan;
 - d. Pengelola keamanan informasi layanan;
 - e. Pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sertifikat digital sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dan APIP;

- f. Pemberian informasi kepada Lembaga Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal;
 - g. Pelaksanaan intruksi teknik dari lembaga pengadaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Koordinator Unit Registrasi dan Verifikasi
1. Tugas: Melaksanakan pengelola registrasi dan verifikasi pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 2. Fungsi:
 - a. Pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai syarat pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - e. Unit registrasi dan verifikasi berhak menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - f. Unit registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan *user id* dan *password* pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik dan permintaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan *blacklist* Penyedia Barang/Jasa.

e. Staf Pendukung

1. Tugas: melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoprasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

2. Fungsi:

- a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Penanganan keluhan tentang pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

IV.2.3 Sarana dan Prasarana LPSE Kabupaten Tegal

Tabel IV.11
Infrastruktur LPSE Kabupaten Tegal

No.	Infrastruktur	Jumlah
1.	Gedung layanan	1
2.	Ruang pelayanan	1
3.	Ruang Nego	1
4.	Ruang verifikasi	1
5.	Ruang Registrasi	1
6.	Ruang pelatihan	1
7.	Ruang Server	1

Sumber: Wawancara LPSE Kabupaten Tegal 2019

Berdasarkan tabel IV.11 dapat diketahui berbagai macam infrastruktur LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Diantaranya adalah gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server.

Tabel IV.12
Hardware LPSE Kabupaten Tegal

No.	Hardware	Jumlah
1.	Komputer	14
2.	Leptop	5
3.	Scanner	2
4.	Printer	2
5.	Wifi/ Acces Point	1
6.	Lemari	1
7.	Filing kabinet	6
8.	Meja	14
9.	Kursi	28
10.	AC	3
11.	Lembar Registrasi	Sesuai Kebutuhan
12.	Lembar Verifikasi	Sesuai Kebutuhan

Sumber: Wawancara LPSE Kabupaten Tegal 2019

Berdasarkan tabel IV.12 dapat diketahui berbagai macam hardware LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Diantaranya adalah komputer, leptop, scanner, printer, wifi/acces point, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi.

Tabel IV.13
Software LPSE Kabupaten Tegal

No.	Software	Jumlah
1.	<i>Operating System Server</i>	1
2.	Jaringan Internet (SPSE 4.3)	1

Sumber: Wawancara LPSE Kabupaten Tegal 2019

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui dua (2) *software* LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal yakni *operating system server* dan jaringan internet (SPSE 4.3).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini membahas efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Layanan Pengadaan, pengguna barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa. Dimana untuk mengukur efektivitas *e-procurement* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang tentunya terkait dengan *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

V.1.1 Efektivitas *E-Procurement* di Kabupaten Tegal

Dalam hal ini untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program *e-procurement* di Kabupaten Tegal, peneliti menggunakan dari indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

V.1.1.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian

tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam Padang (2016:65), transparansi *e-procurement* berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat dan bagi masyarakat umum pada umumnya. Adanya transparansi memberikan jaminan pada masyarakat adanya persebaran informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan *stakeholders* untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan yakni Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Inpres No 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan ketentuan lain yang sesuai dengan pengadaan barang dan jasa seperti Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tegal, Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor: 050/ 007 Tahun 2019 sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan yang transparan semakin menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah saat ini, salah satu aspek penting dalam transparansi adalah menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan tender proyek baik yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penerapan *e-procurement* selain dapat menghemat anggaran Negara, juga lebih transparan dan akuntabel sehingga sangat efektif untuk mencegah terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Sistem ini telah mengurangi peran orang-orang yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan lelang yang dapat menimbulkan terjadinya praktek KKN. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa pada pelaksanaan *e-procurement* telah dilakukan pimpinan secara transparan¹.

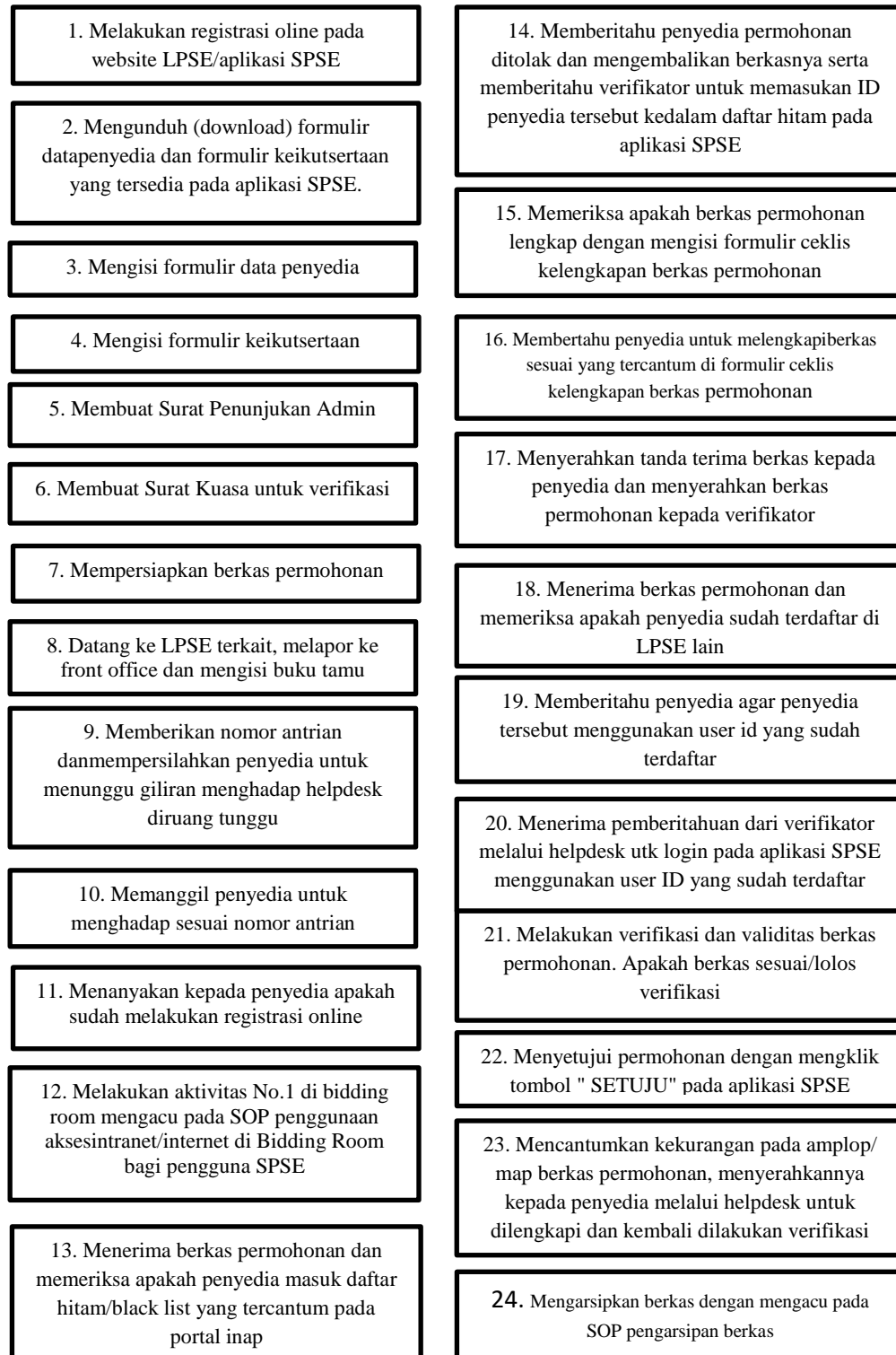
Gambar V.01
Informasi Lelang dalam LPSE Kabupaten Tegal

Informasi Tender				
Pengumuman	Peserta	Hasil Evaluasi	Pemenang	Pemenang Berkontrak
Kode Tender	1977287			
Nama Tender	Pengadaan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih)			
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	
	21520363	Pengadaan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih)	APBN	
Tanggal Pembuatan	17 Mei 2019			
Keterangan				
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai			
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah			
Satuan Kerja	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			
Kategori	Pengadaan Barang			
Sistem Pengadaan	Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur			
Tahun Anggaran	APBN 2019			
Nilai Pagu Paket	Rp 1.400.000.000,00		Nilai HPS Paket	Rp 1.375.000.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Lumsum	
	Lokasi Pekerjaan		• Kec. Bojong - Tegal (Kab.)	
	Kualifikasi Usaha		Perusahaan Kecil atau Non Kecil	
Syarat Kualifikasi	Lihat Syarat Kualifikasi			

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang/1977287/pengumumanlelang>

¹ Informan 1

Gambar V.02
Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa



Sumber: SOP LPSE Kabupaten Tegal

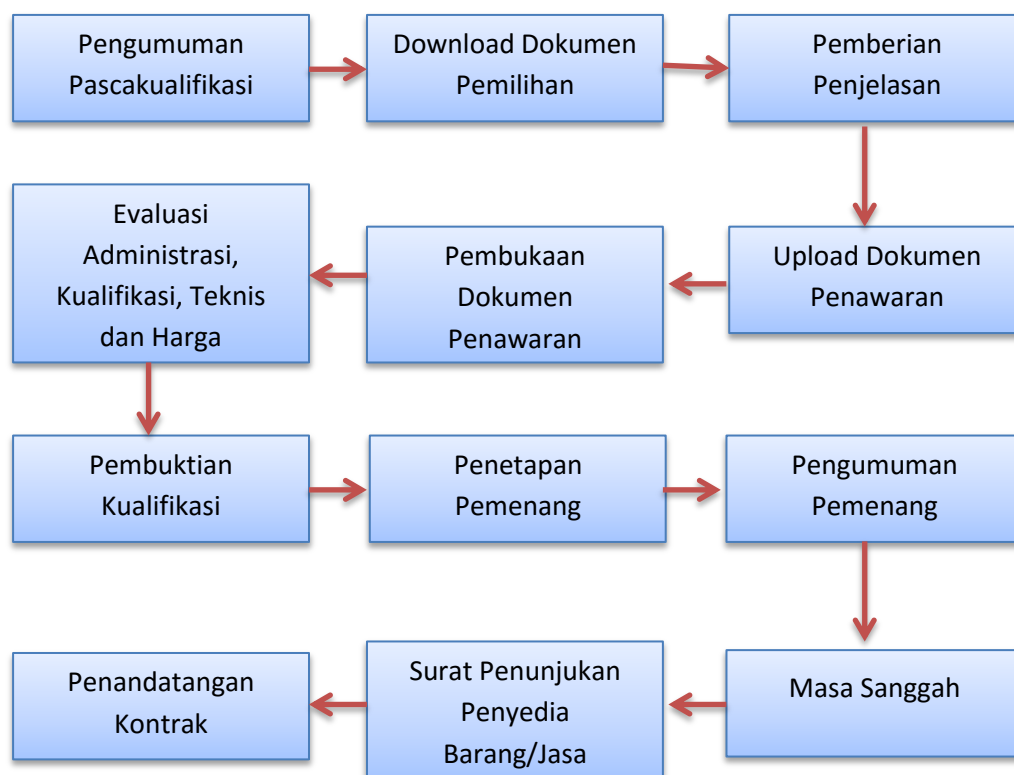
Gambar V.03
Jadwal Lelang *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Tahap Tender Saat Ini - [1951287] Pembangunan Pasar Margasari				
No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10 April 2019 09:00	16 April 2019 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	10 April 2019 09:01	16 April 2019 23:59	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	12 April 2019 09:00	12 April 2019 10:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	12 April 2019 10:01	23 April 2019 10:00	2 kali perubahan
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	23 April 2019 10:01	25 April 2019 16:00	1 kali perubahan
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	23 April 2019 11:00	07 Mei 2019 12:00	3 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	25 April 2019 08:00	07 Mei 2019 12:00	3 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	07 Mei 2019 12:01	07 Mei 2019 15:00	3 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	07 Mei 2019 12:01	07 Mei 2019 15:00	3 kali perubahan
10	Masa Sanggah	08 Mei 2019 08:00	14 Mei 2019 08:00	2 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15 Mei 2019 08:01	24 Mei 2019 10:00	3 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	27 Mei 2019 08:00	29 Mei 2019 15:00	2 kali perubahan
LPSE Kabupaten Tegal - 03 Juli 2019 17:34				

LPSE Kabupaten Tegal - 03 Juli 2019 17:34

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang/1951287/jadwal>

Gambar V.04
Jadwal Lelang *E-Procurement* Kabupaten Tegal



Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang/1951287/jadwal>

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lainnya yang menjelaskan bahwa sudah dilaksanakan pimpinan dengan transparan, proses *e-procurement* dimulai dari pengumuman rencana umum pengadaan di SIRUP².

Gambar V.05
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

No	KUPD	Penyedia	Swakelola	Penyedia dalam Swakelola	Total
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	2026	528.891	2085	522.931
				63	9.949
					4.174
					1.061.772

No	Satuan Kerja	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan Data Centre	143.960.000	Pengadaan Langsung	APBD
2	KECAMATAN MARGASARI	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	69.000.000	Pengadaan Langsung	APBD
3	KECAMATAN JATINEGARA	Pengadaan Komputer dan Printer	27.705.000	Pengadaan Langsung	APBD, APBD
4	KECAMATAN DUKUHTURI	Pengadaan Meubeler	9.900.000	Pengadaan Langsung	APBD
5	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penyediaan Alat Tulis Kantor	71.900.000	Pengadaan Langsung	APBD

Sumber: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap17/index/2019/KABUPATEN>

Serta dari informan berikutnya menjelaskan bahwa selama tahun 2011 sampai tahun 2019 pertengahan ini kalo menurut saya sebagai admin di LPSE dan pranata komputer Diskominfo selaku pemegang sistem. Maksudnya adalah yang mengatur atau pun menambahkan paket kegiatan layanan lelang atau tender itu sudah cukup transparan karena masyarakat bisa memantau secara realtime jadwal

² Informan 2

pelaksanaan tender atau lelang yang berlangsung, misalkan jadwalnya sekarang upload dokumen, pembukaan dokumen, pemberian penjelasan sampai penetapan pemenang³.

Gambar V.06
Pengumuman Pemenang Tender *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Informasi Tender					
<div> Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak </div>					
Nama Tender	Pengadaan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih)				
Kategori	Pengadaan Barang				
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah				
Satker	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN				
Pagu	Rp 1.400.000.000,00				
HPS	Rp 1.375.000.000,00				
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lelang Terbalik
CV. QASARA MITRA PERKASA	Jl.Nginden VI B No.19 Rt.08 Rw.04 Kel.Nginden Jangkungan Kec.Sukolilo, Kota SŮrabaya - Surabaya (Kota) - Jawa Timur	73.159.289.5-606.000	Rp 1.324.750.000,00	Rp 1.324.750.000,00	Rp 1.324.750.000,00

LPSE Kabupaten Tegal - 30 Juni 2019 15:19

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/evaluasi/1977287/pemenang>

Selanjutnya terkait penyampaian transparansi oleh pimpinan. Bahwa hal tersebut telah dilaksanakan oleh pimpinan di dinas yang menangani terkait *e-procurement*, dalam hal ini pada dinas pelaksana *e-procurement* itu sendiri dari pihak LPSE Kabupaten Tegal dan BLP Kabupaten Tegal. Hal ini di sampaikan langsung oleh kepala LPSE Kabupaten Tegal, admin LPSE Kabupaten Tegal dan kepala BLP Kabupaten Tegal. Bahwa transparansi *e-procurement* selalu disampaikan oleh atasan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan⁴. Hal yang sama pun disampaikan oleh informan lainnya yang menjelaskan bahwa BLP tupoksinya adalah melaksanakan tender untuk semua pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau nilainya diatas 200 juta untuk pekerjaan pengadaan

³ Informan 3

⁴ Informan 1

barang, konstruksi, jasa lainnya BLP yang handel. Kalau pekerjaan yang konsultasi diatas 100 juta BLP handel, BLP sifatnya melayani semua OPD. Jadi OPD-OPD itu meminta BLP untuk melakukan proses tender Dengan melaksanakan ketentuan persyaratan yang berlaku. OPD meminta BLP melaksanakan proses tander. Dengan mencukupi persyaratan yang BLP minta sesuai dengan ketentuan, setelah persyaratan masuk, baru di BLP menentukan kelompok kerja pengadaan barang jasa untuk melaksanakan proses. Kalau dibilang transparan, BLP sangat transparan sekali. Dibilang transparan dari pertama sudah diumumkan dari SIRUP. Semua yang akan ditanderkan harus diinput dulu dari aplikasi SIRUP yang dimiliki oleh LKPP. Data ada di SIRUP, semua data ada di SIRUP. Kalau ternyata data di SIRUP tidak diupload, BLP tidak bisa melayani. karena semua data pintunya adalah SIRUP. Aplikasi namanya SIRUP tujuannya mengumumkan seluruh paket pengadaan keseluruhan masyarakat baik yang ada di Kabupaten Tegal sampai semua Indonesia. Orang yang ada di Kabupaten Tegal ataupun seluruh Indonesia dapat melihat. Semua bisa liat baik yang ditanderkan ataupun tidak. Orang seluruh Indonesia dapat melihat pengadaan barang, semua OPD muncul, baik yang ditanderkan maupun yang tidak itu muncul. Itu pertanggungjawaban ada disitu. Kalau dari atasan, tentu BLP sudah transparansi⁵. Serta hal itu pun disampaikan oleh informan berikutnya. bahwa pimpinan selalu menyampaikan transparansi informasi setiap periodik minimal 6 bulan sekali biasanya ada laporan secara tertulis setiap 3 bulan

⁵ Informan 2

disampaikan kepada kepala dinas kemudian menyampaikan ke pimpinan daerah/bupati atau wakil bupati⁶.

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa pelaksanaan *e-procurement* sebelumnya telah disosialisasikan secara transparansi oleh pimpinan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan. Hal ini melihat pernyataan dari informan, bahwa sudah ada sosialisasi yakni workshop dan bimtek⁷. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa sebelum BLP melaksanakan *e-procurement* sudah melaksanakan sosialisasi. Kalau sekarang sudah dilaksanakan atau sudah pelaksanaan atau implementasi bukan tarafnya sosialisasi. Sekarang pengadaan barang yang tidak menggunakan sistem itu dilarang. Semua sudah memakai sistem dan harus menggunakan sistem *e-procurement*⁸. Informan berikutnya juga menjelaskan bahwa sudah ada sosialisasi, jadi kalo sosialisasi sudah setiap tahun karena regulasi dari pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dinamis, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan di setiap daerah. *E-procurement* ada banyak, tender, *e-purchasing*, pengadaan langsung secara elektronik jadi setiap tahun LPSE Kabupaten Tegal itu selalu memberikan sosialisasi kepada dinas atau OPD untuk mengupdate data informasi terkait dengan regulasi dan teknis pengadaan barang jasa pemerintah⁹.

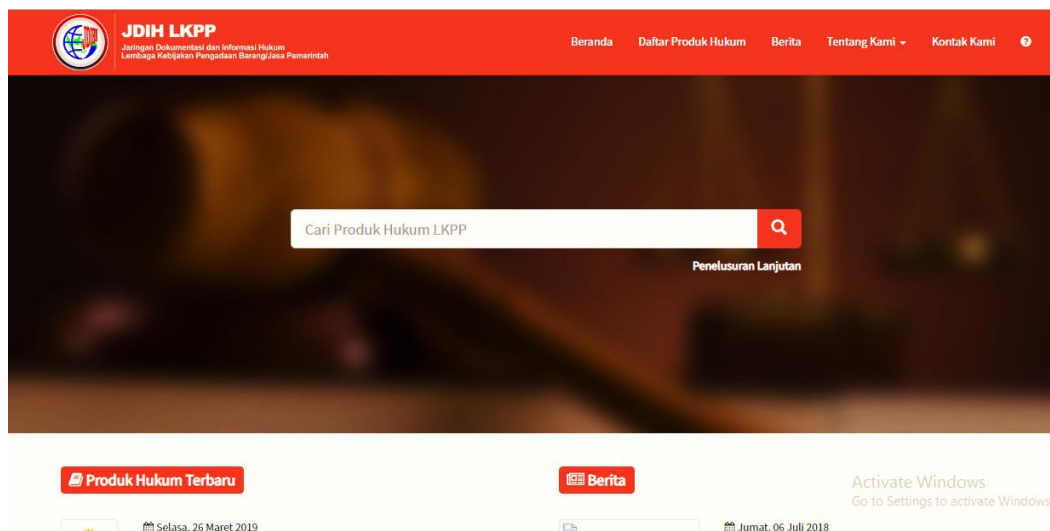
⁶ Informan 3

⁷ Informan 1

⁸ Informan 2

⁹ Informan 3

Gambar V.07
Informasi terkait Regulasi *E-Procurement*



Sumber: <https://jdih.lkpp.go.id/>

Adapun berdasarkan jawaban dari informan, bahwa pada pelaksanaan *e-procurement* sudah dapat dilaksanakan secara akuntabel yakni dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi *E-Procurement* oleh bagian/unit yang menyelesaikan tugas pekerjaan¹⁰. Hal ini dijelaskan juga oleh informan selanjutnya yakni sudah akuntabel dan pokja siap dilaksanakan uji forensik yakni APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) atau APH (Aparat Penegak Hukum) mengaudit paket tender tertentu ke LPSE untuk menunjuk paket mana yang diaudit dengan membawa surat perintah tugas jadi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Audit itu biasanya dilakukan oleh BPK didampingi oleh inspektorat.¹¹ Serta informan berikutnya pun demikian, bahwa sudah dilakukan secara akuntabel karena prosesnya terbuka kemudian disitu juga ada negosiasi ataupun pemilihan secara adil dari penyedia barang, melakukan

¹⁰ Informan 1

¹¹ Informan 2

negosiasi ke panitia pengadaan/panitia lelang penyedia barang yang gugur juga tahu kenapa alasannya gugur jadi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan dapat diaudit melalui system. Jadi ketika ada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) atau APH (Aparat Penegak Hukum) yang ingin mengaudit paket lelang tertentu atau paket tender tertentu dapat menghubungi ke LPSE untuk menunjuk paket mana yang diaudit dengan membawa surat perintah tugas jadi dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel.

Selanjutnya berdasarkan jawaban informan terkait dengan akhir laporan pelaksanaan *e-procurement* dinyatakan telah dilakukan oleh pimpinan secara transparan dan akuntabel, dengan sendirinya karena itu sudah menggunakan sistem, makanya rekapitulasi laporan itu sesuai yang termuat dalam sistem itu¹². Informan berikutnya juga menyatakan hal yang sama, bahwa hal itu sudah dilakukan¹³. Adapun pernyataan informan selanjutnya yang menyatakan bahwa sudah transparansi dan akuntabilitas, saat paket tender atau lelang selesai seluruh masyarakat bahkan diluar Kabupaten Tegal pun bisa melihat rekapitulasi proses pelelangan dari mulai pengumuman sampai penetapan pemenang. Dan PPK juga melaporkan ke Pengguna Anggaran dan pengguna anggaran juga ada laporan di tingkat kabupaten yakni laporan POK (Pelaksana Operasi Kegiatan)¹⁴.

Adapun kendala yang disampaikan informan dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Antara lain yakni yang pertama kendalanya hanya dari manual ke elektronik/ sistem. Jadi kendalanya itu pengenalan IT-nya kepada para pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu kan ada PA (Pengguna

¹² Informan 1

¹³ Informan 2

¹⁴ Informan 3

Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, kemudian ada penyedia barang jasa¹⁵. Yang kedua, yang paling sering terjadi kendala diserver. Untuk BLP pengadaan barang jasa ini posisi server ada di LPSE, jika LPSE berada dibawah dinas Kominfo. Kendala itu seringkali terjadi pada saat mati lampu. Idealnya kalo mati lampu server itu ada sumber energi cadangan, jadi tidak ada mati lampu server ikut mati, tetapi yang BLP hadapi sekarang kadang kala lampu mati server ikut mati karena cadangan genset kurang bisa berfungsi dengan baik. Kendala ketiga, yang BLP hadapi sekarang itu perubahan aturan. Dahulu mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 sekarang mengacu pada Perpers No.16 Tahun 2018. Serta kendala pada akuntabilitas, yang keempat adalah koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain. Contohnya adalah antara PPK dengan panitia lelang. Jadi misalkan dari perpres yang baru itu yang membuat paket lelang adalah PPKom sementara di Perpres yang lama yang membuat paket lelang/ paket tender itu adalah panitia pengadaan atau panitia pokja pemilihan, karena ada pergantian ini tahun 2018 maka perlu di sesuaikan tugas fungsi antara PPK dan Pokja. Karena ini masa transisi banyak pejabat pembuat komitmen yang masih belum siap untuk membuat pake tender sendiri, sehingga perlu dibantu oleh tim teknis ataupun pokja sendiri, sehingga ketika PPKom membuat paket terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada beberapa yang harus dievaluasi atas saran dari pokja sehingga ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan

¹⁵ Informan 1

sehingga diperlukan rapat ataupun koordinasi teknis terkait dengan rencana umum teknis pengadaan itu sendiri¹⁶

2. Akses Pasar dan Persaingan Usaha Yang Sehat

Tujuan selanjutnya dari penerapan *e-procurement* ini berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Dalam Padang (2016:70), terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Dengan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat disetiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan. Secara umum sistem *e-procurement* menuntut penyedia barang dan jasa berlomba untuk melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga menghasilkan output yang berkualitas. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka *e-procurement* juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi UKM dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa akses pasar dan persaingan usaha yang sehat pada pelaksanaan *e-procurement* sudah diwujudkan di pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Didalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* telah melibatkan para pelaku pasar dengan sendirinya, karena disitu disampaikan secara terbuka melalui website dan setiap OPD itu juga harus mengunggah SIRUP-nya. Sehingga setiap pelaku pasar itu yang sesuai

¹⁶ Informan 3

dengan kriterianya bisa mengikuti¹⁷. Hal yang sama pun disampaikan oleh informan berikutnya, menjelaskan bahwa sudah melibatkan para pelaku pasar. Namun pelaku pasar juga harus secara aktif melihat website LPSE. Dengan itu melihat pasar yang tersedia di pemda baik konstruksi, konsultasi maupun jasa lainnya¹⁸. Dan informan berikutnya juga menjelaskan hal yang sama bahwa *e-procurement* sudah melibatkan pelaku pasar. Sejauh ini dari LKPP sendiri sudah mengembangkan cukup banyak untuk akses pasar bahkan mendorong tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), mendorong untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) atau usaha kecil mikro menengah untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal katalog sektoral ataupun katalog lokal jadi disetiap kabupaten kota itu LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) memberikan kesempatan untuk memberikan peluang kepada penyedia lokal agar barangnya bisa muncul dikatalog nasional walaupun dari sisi tender ataupun lelang juga pokja juga tidak hanya untuk memberikan kriteria usaha yang besar tetapi bisa juga yang usaha kecil ataupun mikro menengah¹⁹.

Selanjutnya terkait akses pasar pelaksanaan *e-procurement*. Bahwa hal tersebut telah melibatkan pelaku pasar yang tepat²⁰. Apabila menurut BLP, pelaku usaha itu bisa mendaftar sesuai dengan yang mereka mau, tetapi yang mendaftar mereka juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Kalau ada pemenang itu adalah penyedia barang jasa yang dianggap oleh pokja atau panitia yang

¹⁷ Informan 1

¹⁸ Informan 2

¹⁹ Informan 3

²⁰ Informan 1

memenuhi syarat, administrasi, teknis, kualifikasi, ataupun biaya. Jadi sebenarnya kalau tepat atau tidak penyedia itu yang mendapatkan pekerjaan menurut kami sudah melaksanakan evaluasi tentu sudah tepat²¹.

Gambar V.08
Hasil Evaluasi Tender *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Informasi Tender													
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak													
No	Nama Peserta	K	B	A	T	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Reverse Auction	H	P	V	PK	Alasan
1	CV. ZAHIRA - 75.541.078.4-101.000	-	-	-	-	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.250.000.000,00		✓	★			tidak menghadiri undangan verifikasi dan setelah dihubungi ternyata mengundurkan diri karena pertimbangan jarak lokasi pengadaan dan harga
2	CV. QASARA MITRA PERKASA - 73.159.289.5-606.000	-	-	-	-	Rp 1.324.750.000,00	Rp 1.324.750.000,00		✓		★	★	
3	Reksa Tamindo Oliva - 85.428.387.6-432.000	-	-	-	-	Rp 1.325.000.000,00	Rp 1.325.000.000,00		✓				
4	PT. GRAHA REKA SENTOSA - 74.449.317.2-061.000	-	-	-	-	Rp 1.350.000.000,00	Rp 1.350.000.000,00		✓				
5	PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA - 72.370.082.9-401.000	-	-	-	-								
6	CV. TRI CAHYA SUMINAR - 74.534.189.1-543.000	-	-	-	-								
A Evaluasi Administrasi T Evaluasi Teknis K Evaluasi Kualifikasi B Pembuktian Kualifikasi H Evaluasi Harga P Pemenang V Pemenang Terverifikasi PK Pemenang Berkontrak													
PSF Kabupaten Tegal - 30 Juni 2019 15:18													

LPSE Kabupaten Tegal - 30 Juni 2019 15:18

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/evaluasi/1977287/hasil>

Penjelasan informan selanjutnya bahwa *e-procurement* sudah melibatkan akses pasar yang tepat, karena tidak penyedia barang misal penyedia mebel itu mengerjakan pembangunan. Untuk penyedia pembangunan misalkan dari pihak kantor menyediakan peralatan komputer, karena dari kantor itu sudah jelas ketika ada proses tender itu juga persyaratannya sudah jelas. Ada aanwijzing (pemberian penjelasan) sehingga udah sesuai dengan kegiatan ini²².

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa persaingan di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah berlangsung dengan baik²³. Informan selanjutnya dari menjelaskan bahwa dalam akses pasar

²¹ Informan 2

²² Informan 3

²³ Informan 1

semuanya berkesempatan baik untuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal ataupun di Kabupaten sekitar. Karena sistem pendaftaran itu secara online. Jadi semua bisa daftar. Tidak hanya dari kabupaten ini bahkan dari Papua, Aceh dan sebagainya bisa akses pasar disini. Kalau tander menentukan sistem sangat terbuka²⁴.

Gambar V.09 Pendaftaran Online *E-Procurement* Kabupaten Tegal

The screenshot shows the LPSE website interface for Kabupaten Tegal. At the top, there is a header with the LPSE logo and navigation links: BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, KONTAK KAMI, and a red button labeled 'PENDAFTARAN PENYEDIA' with a 'LOGIN' dropdown. Below the header, the main content area is titled 'Pendaftaran Penyedia'. It contains a message: 'Sebelum melakukan pendaftaran ke LPSE, kami perlu memastikan alamat email Anda. Pastikan alamat email Anda benar.' followed by an email input field labeled 'Masukkan alamat email'. Below this is a security code section with the text 'Kode Keamanan' and a large 'LYgff' image, followed by an input field labeled 'Isikan Kode Keamanan' and a green 'Mendaftar' button. The footer contains links: 'Tentang Kami', 'Pakta Integritas', and 'Persyaratan dan Ketentuan'. It also displays 'Total Pengunjung: 2.097.515' and '30 Juni 2019 13:46 WIB'. Copyright information at the bottom right reads: '© 2006-2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) SPSE v4.3u20190513'.

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>

Serta informan berikutnya menjelaskan bahwa sejauh ini akses pasar e-procurement sudah berlangsung dengan baik karena setiap tahun LPSE mengadakan sosialisasi ke asosiasi jasa konstruksi ke penyedia barang yang mendaftar di LPSE dan publikasi website LPSE bagi penyedia barang atau pelaku usaha yang membutuhkan informasi atau bahkan bimbingan teknis dan pelatihan terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah di wilayah Kabupaten Tegal²⁵.

Adapun berdasarkan jawaban dari informan, bahwa pada pelaksanaan *e-procurement* persaingan usaha yang sehat dinyatakan sudah tercipta dengan baik²⁶. Hal yang sama pun disampaikan oleh informan selanjutnya, jika

²⁴ Informan 2

²⁵ Informan 3

²⁶ Informan 1

persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik itu karena sudah melaksanakan evaluasi dari semua penawaran yang masuk. Evaluasi tidak hanya dilihat harganya tetapi juga teknisnya. Secara teknis mereka punya syarat atau tidak karena harga dilihat paling akhir. Tender itu tidak melulu melihat nilai, nilai yang paling kecil yang menang tidak seperti itu. Tetapi bahwa BLP melihat administrasinya, teknis, yang terakhir adalah harga. Bahkan harga pun misal ngga sekonyong-konyong pemenang nomor satu adalah penawar terendah tidak seperti itu. Tetapi melihat penawarannya wajar atau tidak. Misal penawaran itu turunnya lebih dari 20% dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri) itu aja panitia pertanyakan, itu dianggap wajar atau tidak, kalau tidak dianggap wajar maka penawaran itu gagal. Misal ada satu penyedia barang konstruksi, menawarkan harga semen 50 ribu, BLP survey dilapangan ternyata harga semen 70 ribu itu tidak bisa BLP menangkan karena itu harganya tidak wajar kalau tetap menangkan mereka tidak mendapat keuntungan tetapi mendapat kerugian²⁷. Dan informan berikutnya pun menjelaskan bahwa persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah tercipta dengan baik²⁸.

Selanjutnya berdasarkan jawaban informan terkait dengan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat semakin lancar dan para penyedia pun sudah mulai menyadari karena memang sudah saatnya pelaksanaan/proses pengadaan

²⁷ Informan 2

²⁸ Informan 3

barang dan jasa itu oleh sistem²⁹. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa BLP seoptimal melaksanakan proses pemilihan di bagian layanan pengadaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun itu terkadang berbenturan dengan beberapa kepentingan. Karena yang tender itu seperti perlombaan. Peserta tender itu tentu mengharapkan menjadi pemenang. Tetapi yang namanya perlombaan pasti hanya ada satu pemenang. Pihak BLP sudah berusaha dengan maksimal. Yang pertama dengan aturan yang sudah tersedia. Yang kedua tentu aturan aturan pengadaan barang jasa itu dinamis kadang berubah-ubah. Maka dari itu pihak BLP berusaha untuk menyampaikan sesuai aturan yang berlaku karena sangat dinamis, jadi aturan yang baru pun BLP selalu update. Pada intinya akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah maksimal³⁰. Informan selanjutnya pun menjelaskan bahwa sejauh ini sudah karena sudah sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena informasi pengadaan itu bisa diakses dimanapun ada berada asalkan ada koneksi internet. Jadi sudah bisa diakses melalui *mobile application* ataupun melalui website, jadi kalo ada perubahan terkait dengan informasi itu bisa cepat diakses oleh pelaku usaha ataupun dari sisi pemerintah. Terkait Perubahan regulasi dari perpres No. 54 Tahun 2010 dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 sehingga membuat banyak perubahan. Kalau dari sisi pemerintah sendiri terkait pengadaan barang jasa itu lebih simple untuk lelang. Kalau dulu ada beberapa macam metode lelang, sekarang hanya ada secara umum ada tender non tender kemudian juga ada terobosan lagi namanya *e-purchasing*. Jadi disisi

²⁹ Informan 1

³⁰ Informan 2

pemerintah ini lebih diuntungkan karena lebih mudah untuk membeli barang secara cepat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sisi penyedia barang itu juga diberikan kesempatan untuk menampilkan produknya ataupun membuat produk di katalog nasional. Dan dari sisi aplikasi ataupun pengguna lelang, dimenunya penyedia barang lebih mudah jadi saling menguntungkan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa³¹

Adapun kendala pada akses pasar dan persaingan usaha yang sehat diantaranya adalah ada kendala ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Kendalanya disitu jika mereka belum mengisi itu penyedia mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke tawaran-tawaran yang sudah diumumkan pada website, kuncinya disitu³². Kendala selanjutnya yakni setelah adanya perubahan regulasi hal ini harus di imbangi dengan sosialisasi. Muncul kerepotan pasti, karena harus beradaptasi dengan regulasi pengadaan yang baru karena dari sisi PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen). PPKom tugas yang baru ini perannya sangat vital sangat penting, mulai dari penyusunan rencana umum pengadaan kemudian pembuatan paket tender/lelang kemudian sampai e-kontrak kemudian sampai penetapan pemenang. Berbeda dengan perpres yang dulu Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya itu yang membuat paket itu pokja yang RUP (Rencana Umum Pengadaan) hanya pengguna anggaran disini tentunya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas PPK karena perannya sangat penting bahkan ketika pekerjaan telah selesai yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan baik itu spesifikasi volume dan teknis adalah PPK. Dan dilihat

³¹ Informan 3

³² Informan 1

dari segi kinerja, PPK yang bekerja di Kabupaten masih perlu diperbaiki karena banyak PPK yang belum mengerti tugas fungsinya sebagai PPK, sebagaimana tercantum pada Perpres, banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Apalagi terkait tender yang nilainya cukup besar bahkan milyaran rupiah. Ketika PPK memang tidak mengetahui tugas dan pokok fungsinya. Dengan adanya audit maka merepotkan diri PPK tersebut, sehingga perlu adanya peningkatan ataupun bimtek untuk PPK.³³

3. Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan juga merupakan tujuan dari penerapan *e-procurement* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Padang (2016:74), menurut pengertiannya efisien berarti menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Dalam hal ini berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait tingkat efisiensi proses pengadaan bahwa jasa dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran

³³ Informan 3

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan³⁴. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa kalau dana kecil karna BLP pada sistem saja, BLP pakai sistem yang dibutuhkan tentu hanya pada saat klasifikasi. Klasifikasi aja kalau diluar kota BLP datang kesana.tetapi kalau dalam daerah BLP kecil. Kalau penyediaanya hanya di sekitar Kabupaten sangat kecil. Melihat kualitas telah dijaga, BLP sangat menentukan kualitas dari hasil akses pemilihan. Karena apabila BLP berkecimpung dalam hal pengadaan tentu seperti halnya sedang berjalan di antara dua jurang. Karena pihak BLP seringkali berhadapan dengan beberapa kepentingan dengan semua keterampilan mereka pengetahuan mereka mengenai pengadaan barang jasa, jadi kita pada akhirnya balik lagi ke dokumen. Dokumennya seperti apa, itu yang BLP lalui karena kalau tidak sesuai dengan dokumen itu pihak kepolisian atau kejaksaan yang mencari BLP. BLP berusaha tetap lurus, fokus, hati-hati.³⁵. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa sekarang prinsipnya pengadaan barang dan jasa adalah mendapatkan barang sebagus-bagusnya dengan harga yang wajar jadi kalo misalkan membeli barang bagus harganya tidak murah. Dahulu semurah-murahnya, untuk kualitasnya tidak dilihat tapi sekarang dalam perkembangannya itu LPSE berusaha dari pemerintahan itu mengadakan barang bagus dengan harga yang wajar. Jadi kalo efesiensi segi oprasional itu sudah cukup efesien, karena dari sisi LPSE juga tingkat kesejahteraan sudah teratasi oleh pemerintah itu sendiri tidak ada biaya-biaya

³⁴ Informan 1

³⁵ Informan 2

yang lain dan pelaku pengadaan atau pelaku usaha ketika mendaftar di LPSE pun gratis tidak ada biaya untuk pendaftaran seperti itu³⁶.

Selanjutnya terkait dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bahwa hal tersebut telah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Biasanya itu ketika melalui monev diketahui secara dini kendala-kendala yang muncul adanya keterlambatan segera di lakukan antisipasi seperti itu. Keterlambatannya itu biasanya bersifat teknis dilapangan tetapi secara umum 90% tepat waktu. Kecuali kalau paket-paket yang memang besar dan memang disitu ada *multy years* itu kan memang ada tambahan tahapannya³⁷. Informan berikutnya menjelaskan bahwa kalau waktu yang telah ditetapkan BLP sebenarnya kalau proses pemilihan tidak ada masalah. Namun kadang kala dari pemilik pekerjaan/OPD itu lambat melakukan pengadaan yang ditenderkan. Kalo dari BLP mengeluarkan pokja, paling cepat sehari, paling lambat dua hari. Setelah dua hari ada undangan untuk mengulas dokumen pemilihan. Dalam waktu dekat juga bisa segera ditayangkan³⁸. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, karena dari LPSE sendiri ada namanya kegiatan operasional LPSE dan itu sudah ada RKO (Rencana kegiatan Oprasional) dan setiap bulan sekali itu dievaluasi sesuai dengan target apa engga. Jadi ketika ada miss dari target itu kita bisa mengevaluasinya dan mencari bersama-sama dengan tim yang lain seperti itu³⁹.

³⁶ Informan 3

³⁷ Informan 1

³⁸ Informan 2

³⁹ Informan 3

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa penggunaan dana dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum⁴⁰. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa kalau kualitas sudah optimal dan sudah berusaha, kalau ada kendala BLP konsultasikan dengan LKPD sebagai lembaga tertinggi dalam pengadaan barang jasa⁴¹. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa terkait kualitas pekerjaan, sejauh ini memang kualitas pekerjaan dikabupaten Tegal cukup baik⁴².

Adapun berdasarkan jawaban dari informan, bahwa proses pengadaan barang dan jasa dalam *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, karena tujuan *e-procurement* itu pada LPSE tepat sasaran baik anggaran maupun sasaran target itu sendiri⁴³. Hal yang sama pun disampaikan oleh informan selanjutnya bahwa proses pengadaan barang dan jasa dalam *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum⁴⁴. Informan selanjutnya juga mengatakan bahwa proses pengadaan *e-procurement* cukup baik⁴⁵.

⁴⁰ Informan 1

⁴¹ Informan 2

⁴² Informan 3

⁴³ Informan 1

⁴⁴ Informan 2

⁴⁵ Informan 3

Selanjutnya berdasarkan jawaban informan terkait dengan proses pengadaan dalam *e-procurement* sudah dapat dikatakan efisien⁴⁶.

Tabel V.01
Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tegal

No.	Uraian	2017	2018
1.	Jumlah Lelang(Paket)	177	150
2.	Jumlah Pagu (Rp.)	818.138.000.000	882.746.148.045
3.	Nilai Pagu Selesai (Rp.)	226.031.913.362	192.414.581.909
4.	Total Penawaran (Rp.)	191.502.505.401	165.091.906.136
5.	Selisih Pagu & Penawaran	34.529.407.961	27.322.675.773
6.	Efisiensi (%)	18,03	14,20

Sumber: Laporan Akhir Tahun Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tegal

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan berikutnya bahwa secara keseluruhan sudah cukup efisien, kalau pengadaan barang kalau memang segala persyaratan ketentuan, jadwal sudah ada patokannya sendiri-sendiri. Jadi untuk tingkat efisiensi pengadaan barang jasa sudah baik⁴⁷. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa jika waktu dinilai efisien karena bisa dilihat intens, dipantau dimana pun berada bahkan proses pengadaan barang dan jasa tidak melihat hari kerja tetapi hari kalender. Kadang libur pun bisa dilakukan proses pengadaannya seperti itu. Kalo sdmnya masih kurang untuk panitia ataupun pokja pemilihan karena masih dirangkap oleh beberapa pejabat struktural belum ada yang khusus menangani proses pengadaan barang dan jasa untuk di Kabupaten Tegal itu masih sekitar yang udah fungsional itu sekitar 6 orang sementara kebutuhannya itu sampai 30 orang untuk melakukan proses pengadaan di Kabupaten Tegal⁴⁸

⁴⁶ Informan 1

⁴⁷ Informan 2

⁴⁸ Informan 3

Adapun kendala yang disampaikan informan terkait tingkat efesiensi proses pengadaan. Antara lain yakni salah satunya keterlambatan Penginputan RUP (Rencana Umum Pengadaan). Yang kadang jadi kendalanya itu karena OPD/ yang masih terlambat mengentri RUPnya, mengunggah SIRUPnya. Sehingga jadi mundur waktunya. Kalo SIRUPnya sudah tepat waktu, Desember sudah di unggah, Januari sudah bisa dibuka diikuti oleh penyedia, jadi tidak terlambat. Kendala internal itu dari pihak OPD yang terlambat mengentri RUP, itu biasanya mereka itu belum melihat resikonya ketika terlambat mengentri RUP⁴⁹. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa kualitas pekerjaan di Kabupaten Tegal cukup baik tetapi dari sisi penyediaanya masih perlu ditingkatkan. Karena ketika ada paket-paket yang besar itu ketika terlihat bagus tidaknya itu dari masyarakat itu bisa dibilang cukup sedikit. Ketika ada pembangunan gedung ataupun gapura itu dari desain sudah cukup bagus dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) juga sudah cukup sesuai tetapi ketika pekerjaan tetapi ketika pekerjaan tidak sesuai. Tetapi hal itu bukan disalahkan proses pengadaanya tetapi penyediaanya yang mengerjakan. Jadi harapannya diluar proses pengadaan itu ada semacam sosialisasi ke penyedia dari pemimpin daerah karena jangan sampai itu yang dicari hanya menang lelangnya saja tetapi pekerjaan ditinggalkan. Kalau dari proses pengadaannya sudah sukses hanya pelaksanaanya kadang perlu ditingkatkan kualitas sdmnya⁵⁰

⁴⁹ Informan 1

⁵⁰ Informan 3

4. Proses Monitoring dan Audit

Tujuan lain dari penerapan *e-procurement* berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah proses monitoring dan audit. Proses monitoring serta audit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengadaan melalui *e-procurement* sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada ataukah justru belum mencapai kesesuaian dalam peraturan. Selanjutnya dari hasil monitoring dan audit tersebut diketahui kekurangan-kekurangan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan *e-procurement*, sehingga setelah adanya proses monitoring dan audit dilakukan perbaikan-perbaikan serta pengembangan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa monitoring pada pelaksanaan *e-procurement*, dari publik sudah dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa pada *e-procurement* Kabupaten Tegal. Monitoring lewat TEPRA (Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran). Pada TEPRA terpantau langsung karena online. Jadi serapan-serapannya dapat dipantau dan diketahui. Pada intinya dapat dimonitor langsung oleh tim Bappeda dan ketuanya juga dari Bappeda⁵¹.

⁵¹ Informan 1

Gambar V.10
Monitoring dan Evaluasi Online *E-Procurement* Kabupaten Tegal
Melalui TEPR



Sumber: <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>

Gambar V.11
Rencana Paket Pengadaan pada *E-Procurement* Kabupaten Tegal
Melalui TEPR

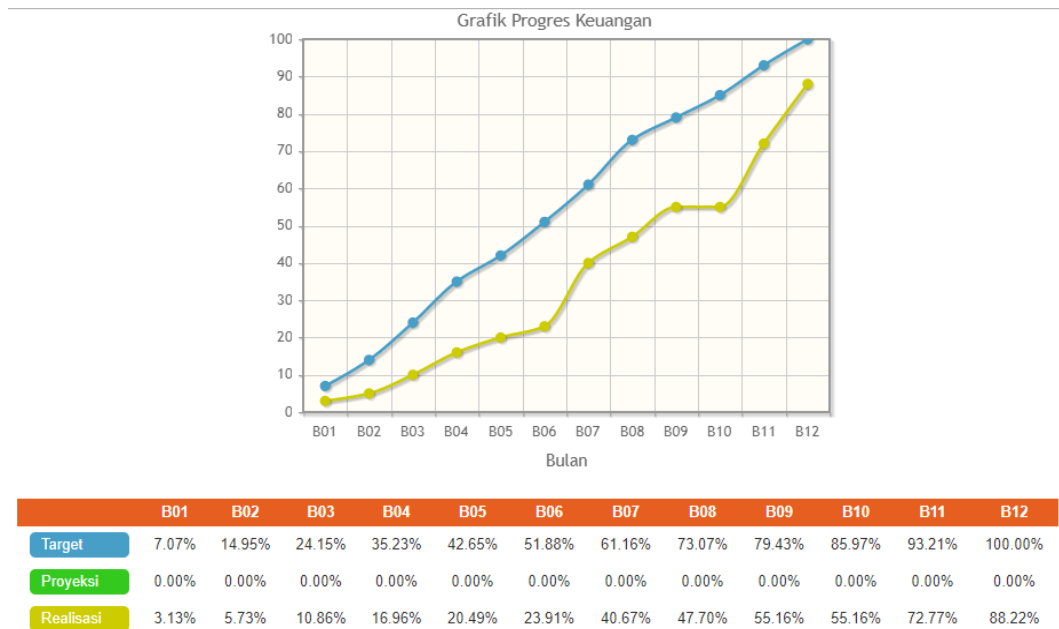
Rencana Paket Pengadaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar				Penyedia + swakelola	
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
BARANG	1.583	45,50	79	48,84	12	73,47	0	0,00	0	0,00	-	-	1.674	167,81
KONSTRUKSI	1.074	164,26	117	101,38	22	119,98	0	0,00	0	0,00	-	-	1.213	385,62
KONSULTANSI	315	7,82	7	3,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	322	10,85
JASA LAINNYA	155	8,18	12	8,42	1	2,86	0	0,00	0	0,00	-	-	168	19,46
Jumlah	3.127	225,76	215	161,67	35	196,31	0	0,00	0	0,00	1.941	299,33	5.318	883,07

Data pagu ditampilkan dalam satuan milyar rupiah *) Data diperbaharui otomatis, Setiap Jam 00:00

Sumber: <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>

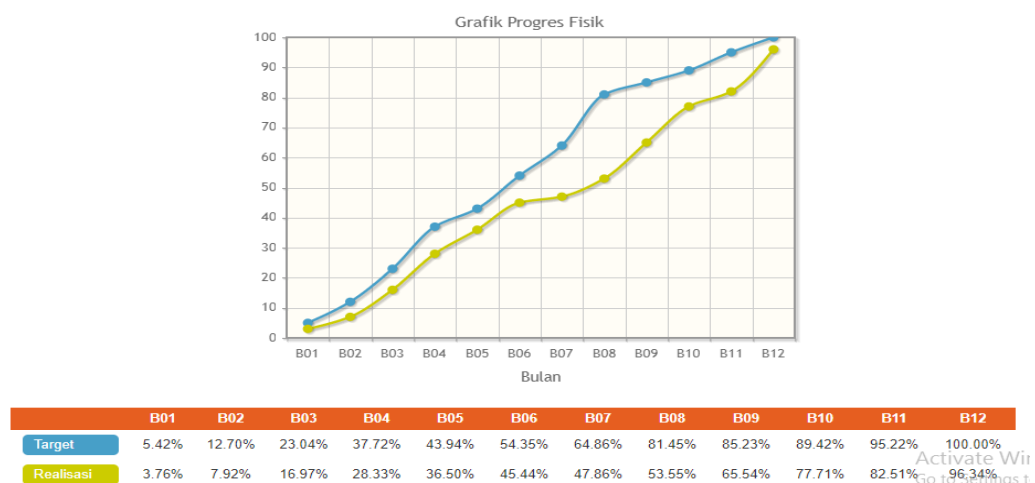
Gambar V.12
Grafik Progres Keuangan pada E-Procurement Kabupaten Tegal Melalui TEPR



Sumber: <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2019>

Gambar V.13
Grafik Progres Fisik pada E-Procurement Kabupaten Tegal Melalui TEPR

Progres Fisik



Sumber: <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>

Gambar V.14
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pada *E-Procurement* Kabupaten Tegal Melalui TEPR

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 200 juta < 2.5 Miliar : 215 paket / Rp. 161,67 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	6	7	18	21	40	47	13	14	4	0	0	0
	%	2.79%	3.26%	8.37%	9.77%	18.60%	21.86%	6.05%	6.51%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%
Hasil Pemilihan	Paket	1	0	0	0	3	2	11	2	7	1	0	0
	%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.93%	5.12%	0.93%	3.26%	0.47%	0.00%	0.00%
Kontrak	Paket	3	4	10	18	28	35	76	97	104	100	52	0
	%	1.40%	1.86%	4.65%	8.37%	13.02%	16.28%	35.35%	45.12%	48.37%	46.51%	24.19%	0.00%
Serah Terima	Paket	0	0	0	0	0	0	3	4	4	19	68	120
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	1.86%	1.86%	8.84%	31.63%	55.81%

Sumber: <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>

Gambar V.15
Pelaksanaan Pengadaan pada *E-Procurement* Kabupaten Tegal
Melalui TEPR

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 2.5 miliar < 50 Miliar : 35 paket / Rp. 196,31 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Hasil Pemilihan	Paket	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kontrak	Paket	0	0	0	0	0	0	14	16	16	13	9	0
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	45.71%	45.71%	37.14%	25.71%	0.00%
Serah Terima	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	16
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.57%	20.00%	45.71%

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 50 Miliar : 0 paket / Rp. 0,00 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12

Data tidak tersedia, silakan lakukan Pembaruan Perencanaan

Sumber: <https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa publik dapat memantau dengan baik dengan cara mengakses website⁵². Serta informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa publik dapat melihat bahkan bisa melakukan sanggahan. Jadi ketika proses pengadaan berlangsung sebelum penetapan pemenang itu ada jadwal masa sanggah. Disitu penyedia yang terlibat boleh melakukan sanggahan ketika memang ada beberapa yang diindikasikan

⁵² Infoman 2

kecurangan ataupun diindikasikan kurang tepat menentukan pemenang itu boleh. Jadi masyarakat secara umum boleh melihat dan bahkan bisa melihat ketika ada kejanggalan bisa melaporkan seperti itu⁵³.

Selanjutnya terkait monitoring pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Bahwa hal tersebut telah sudah sepenuhnya ditanggapi publik dengan baik⁵⁴. Adapun informan yang menjelaskan bahwa kebanyakan yang merespon publik yang punya kepentingan sebagai makelar-makelar yang tidak bertanggungjawab. Kalo masyarakat-masyarakat jarang, biasanya dari LSM dan wartawan yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan apalah mengancam-mengancam yang mempunyai visi misi tertentu. Kalau dari masyarakat sudah bisa mengakses tapi jarang⁵⁵. Dan informan selanjutnya menjelaskan hal yang sama pula bahwa sejauh ini sudah direspon publik dengan baik karena beberapa tahun kemudian itu pasti ada yang mengirimkan surat terkait dengan sanggahan bahkan ada yang langsung mengirim ke Bupati waktu itu. Waktu itu masih PJ Bupati yang melaporkan langsung ketidakpuasan proses pengadaan. Itu tetap LPSE terima dan hasilnya pun secara administrasi kita balas dan kita dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia pengadaan. Jika keluhan dari masyarakat sampai sekarang itu belum ada, yang ada itu keluhan dari penyedia barang atau biasanya dari LSM. Jadi kalo masyarakat secara umum jarang, yang masuk itu LSM. LSM melihat ada beberapa yang dirasa tidak adil tetapi kembali lagi itu yang menentukan adil atau tidaknya bukan dari LSM itu sendiri, tapi kalau mau dilanjutkan terus naik ke tingkat persidangan silahkan. Tapi LSM kadang

⁵³ Informan 3

⁵⁴ Informan 1

⁵⁵ Informan 2

hanya menanyakan ini mengapa prosesnya seperti ini, LPSE juga dari panitia pengadaan juga memberikan jawaban. Dari situ berarti LPSE melihat bawahannya sudah ada keterbukaan informasi dari proses pengadaan barang jasa, mulai dari pengumuman sampai penetapan hasil pemenang. Dan ada masa sanggah yang memang diperuntukan untuk masyarakat ataupun LSM/penyedia untuk menyanggah paket tersebut. Keluhan LSM kalo sejauh ini yang secara jujur itu mereka ditunggangi oleh penyedia barang jasa tertentu. Jadi motifnya sebagian besar itu titipan dari penyedia barang. Kalau sejauh ini seperti itu, karena jarang ada LSM murni yang memperjuangkan itu monitoring pengadaan barang secara intens itu paling ada informasi dari penyedia tersebut motifnya sebagian besar itu kalah menang disitu. Untuk motif yang lain sepertinya belum ada belum ketemu⁵⁶.

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa proses monitoring dapat melancarkan proses *e-procurement*. Dengan monitoring ini LPSE bisa melakukan percepatan, percepatan serapan anggaran pada setiap triwulannya yang harus dicapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan⁵⁷. Hal yang sama juga disampaikan informan berikutnya bahwa kalau BLP tentu semua masukan dari masyarakat ditindak lanjuti. Sebagai koreksi teman-teman pokja dalam melaksanakan proses pemilihan⁵⁸. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalo dari monitoring ini tentunya dapat melancarkan proses e-procurement, karena LPSE bisa melihat dan mengevaluasi kenapa ada masa sanggah mencari

⁵⁶ Informan 3

⁵⁷ Informan 1

⁵⁸ Informan 2

kekurangannya dimana, kemudian yang diperbaiki bisa dari waktunya atau pelayanannya dan seterusnya⁵⁹.

Adapun berdasarkan jawaban dari informan, bahwa audit dalam pelaksanaan *e-procurement* telah berjalan dengan baik. Audit itu biasanya dilakukan oleh BPKP didampingi oleh Inspektorat. Selama ini LPSE lihat telah berjalan lancar⁶⁰. Hal yang sama disampaikan oleh informan berikutnya bahwa audit yang dilaksanakan oleh inspektorat-inspektorat Kabupaten Tegal itu secara reguler ada audit, audit dinilai sudah berjalan dengan baik⁶¹. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau audit di LPSE ada namanya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), inspektorat. Jadi di LPSE sendiri memberikan fasilitas ke pada auditor ataupun penyidik/ yakni APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Itu bisa mengaudit paket-paket yang diinginkan dengan cara melampirkan surat tugasnya. Contohnya kemarin pihak BPKP dan Polres Tegal ke LPSE meminta akses untuk mengaudit paket tertentu. Kemudian dari PPK juga pernah, jadi LPSE itu sifatnya sangat terbuka sekali barangkali ada yang mau di audit mempersilahkan⁶².

Selanjutnya berdasarkan jawaban informan terkait dengan proses audit dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan regulasi terkait pelaksanaan *e-procurement*. Tentunya berdasarkan dengan Perpresnya, sesuai dengan Perpresnya⁶³. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa tentu jika mereka melaksanakan audit itu dengan membandingkan

⁵⁹ Informan 3

⁶⁰ Informan 1

⁶¹ Informan 2

⁶² Informan 3

⁶³ Informan 1

ketentuan berlaku dengan pelaksanaan. Selama ini hasil audit tidak ada sesuatu yang salah dengan BLP. Jadi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁶⁴. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa sudah sesuai regulasi di Perpres juga sudah ada Di perpres yang lama dan yang baru sudah ada ataupun petunjuk teknis untuk audit itu seperti apa. Bahkan diberikan akses masuk ke dalam sistemnya, sistem pengadaan terutama yang dilakukan menggunakan tender/lelang itu sudah ada dan sudah ada regulasinya di tiap Perpres yang kemarin atau aturan turunannya, di Perlemnya atau perka LKPPnya dulu ada. Proses monitoring dan audit dinilai cukup baik⁶⁵.

Adapun kendala yang disampaikan informan pada proses monitoring dan audit dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Yakni kendalanya pada tahun 2018 dalam monitoring pengadaan langsung itu karna belum elektronik masih manual dengan istilahnya dengan pemeriksaan secara berkala dari inspektorat. Dan masih ada kritik dari pihak tertentu, namun biasanya itu dari pihak LSM yang berkepentingan.

5. Kebutuhan Akses Informasi Yang Realtime

Kebutuhan akses informasi yang realtime juga merupakan salah satu tujuan diadakannya *e-procurement* yang terdapat dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, badan publik juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk dapat menyampaikan informasi secara terbuka. Dalam Padang (2016:84), hal ini berarti bahwa siapa saja yang menjalankan tugas dan fungsi

⁶⁴ Informan 2

⁶⁵ Informan 3

dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD dan sumbangan dana publik, harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan seperti misalnya informasi strategi dan rahasia bisnis yang menjadi hak perusahaan, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa informasi yang tersedia pada sistem *e-procurement* sudah bisa mencukupi informasi yang tepat dan benar. Karena dengan membuka alamat website, semua orang bisa melihat dari sana RUPnya bisa diketahui⁶⁶. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa karena informasi BLP relevan semua, pada tender relevan semua⁶⁷. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa informasi yang tersedia pada sistem *e-procurement* sudah bisa mencukupi informasi yang tepat dan benar, karena itu langsung realtime jadi dari proses pengadaan itu bukan hanya di hari kerja tetapi hari kalender. Bahkan ketika hari liburpun penyedia barang bisa mengakses ataupun bahkan mendownload atau mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahkan pokja kerjanya pun bukan hanya dijam kerja tetapi di hari kalender, kapanpun bisa⁶⁸.

⁶⁶ Informan 1

⁶⁷ Informan 2

⁶⁸ Informan 3

Selanjutnya terkait *e-procurement* bahwa itu sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa⁶⁹. Hal yang sama disampaikan pula oleh dua informan berikutnya.

Gambar V.16
Keterbukaan informasi Lelang *E-Procurement* di Kabupaten Tegal

Kode	Nama Paket	Instansi	Tahap	HPS
2040287	Penyusunan peraturan Zonasi Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2019 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	Pengumuman Prakualifikasi [...]	181,7 Jt
2039287	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bojong Kec.Bojong Kab.Tegal Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	Download Dokumen Pemilihan [...]	380 Jt
2038287	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Cikura Kec.Bojong Kab.Tegal Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	Download Dokumen Pemilihan [...]	691,9 Jt

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang>

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa terdapat kendala pada pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time. Biasanya itu kendalanya kadang dari penyedia ketika log in, biasanya karena server⁷⁰.

Adapun informan berikutnya yang menjelaskan bahwa kalo sejauh ini kendala yang begitu besar tidak ada, kalau orang tidak punya internet itu kendala, selama dia bisa mengakses semuanya tersedia semua. Terkadang server, itu saja mati lampu tidak terus menerus dua/tiga bulan sekali tidak pasti. BLP menilai

⁶⁹ Informan 1

⁷⁰ Informan 1

untuk akses orang melihat apa yang ada di proses pengadaan sangat mudah⁷¹. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kendala *e-procurement* secara teknis itu ketika listrik mati. Jadi di LPSE itu sistemnya sistem terdistribusi, dari LKPP membuat aplikasi kemudian mendistribusikannya ketiap tiap daerah. Jadi setiap daerah kab/kota ataupun provinsi itu mempunyai LPSE masing-masing jadi punya server disitu punya pengolahan disitu, untuk di Kabupaten Tegal sendiri karena gensetnya itu belum otomatis terkadang ketika malam hari kena petir atau listrik mati itu tidak bisa langsung hidup harus menunggu besoknya perlu di hidupkan. Solusinya ketika hal itu terjadi maka ada perubahan jadwal lelang yang LPSE sampaikan, LPSE berita acara ke pokja ke panitia lelang atau biasanya ada listrik mati dari jam sekian sampe jam sekian mohon jika memang diperlukan perubahan jadwal maka pokja bisa membuat perubahan jadwal lelang. Jadi misalkan aanwijzing (pemberian penjelasan) dari jam 7 mati bisa diganti keesokan harinya⁷².

Adapun berdasarkan jawaban dari informan, bahwa akses jaringan pada e-procurement sudah berjalan lancar. Hanya kadang karena ini bersifat nasional itu kepadatan pengguna jam-jam padat agak lemot. SIRUP masih nasional belum lokal. Tapi jika sudah jam siang, sore udah agak lancar lagi⁷³. Hal yang sama disampaikan oleh informan berikutnya bahwa hanya saat ini wifi LPSE kurang bagus. Jika server untuk proses pemilihan lumayan bagus, ini kalau mereka menggunakan jaringan biznet lumayan bagus. Kalo wifi untuk temen-temen pokja di BLP kadang BLP mengharapkan dari semua proses pemilihan dilaksanakan di

⁷¹ Informan 2

⁷² Informan 3

⁷³ Informan 1

jam kerja dikantor, jadi apply adressnya temen-temen itu kan sekarang bermain dengan IT kan tentu apply adress itu pilihan. Dimana di upload, log in ya di BLP tentu lebih baik. Hanya kendalanya akses wifi dari LPSE sendiri kadang kurang bagus. Bahkan BLP sampai menggunakan akses wifi dari kantor sebelah. Harapan BLP dari LPSE bisa memperbaiki untuk akses wifi untuk oprasional temen-temen pokja⁷⁴. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa Kalo jaringan internet menggunakan VO-IP (*Voice Over Internet Provider*), dari mulai di Diskominfo sampai sini sudah ada VO-Ipnya. Jadi server LPSE berada di Diskominfo, di Diskominfo Provinsi juga ada dua jadi ketika satu mati ada back up lagi di Provinsi. Tetapi memang *backup* ini juga belum langsung otomatis masih terkendala secara teknis tetapi untuk jaringannya LPSE menggunakan bandwidth yang cukup besar sampai 150 Mbps. Dari sisi server LPSE tidak lemot artinya konektivitasnya stabil⁷⁵

Selanjutnya berdasarkan jawaban informan menjelaskan bahwa dari pihak penyedia layanan *e-procurement* sudah dapat mengatasi kendala pada *networks e-procurement*. Biasanya kalo mereka mengalami kesulitan juga dipandu oleh petugas LPSE⁷⁶. Hal yang sama disampaikan oleh informan berikutnya bahwa jika kendala itu pada saat upload penawaran, saat tidak bisa penyedia segera ke BLP meminta bantuan, itu sangat terbuka sekali. Pihak LPSE juga sangat terbuka apabila penyedia membutuhkan bantuan upload untuk penawaran. Terus untuk sebelum penyedia bisa *log in*, mereka harus melaksanakan pelaksanaan registrasi,

⁷⁴ Informan 2

⁷⁵ Informan 3

⁷⁶ Informan 1

dari LPSE juga bagus. Registrasi untuk semua penyedia yang mendaftar, update ganti alamat mereka sangat support, yang penting jika ada kendala ada komunikasi dengan LPSE pasti coba dibantu⁷⁷. Dan informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kalo jaringan jarang mati karena LPSE ada semacam SLA (Service Level Agreement) dengan penyedia jasa. Ketika lampu mati itu kita langsung perbaikan maksudnya penanganannya cepat. Bahkan SLA nya itu 99% setahun jadi jarang mati hitungan jam itu jarang sekali. paling yang hitungan jam itu listrik. Untuk itu membuat berita acara, menyampaikan ke panitiaawasannya ada listrik mati disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan tendernya. Untuk kebutuhan akses informasi yang realtime sudah baik, hanya saja terkadang terkendala pada listrik.⁷⁸

V.1.1.2 Integrasi

Dalam Patattan (2015:61), integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Integrasi, dengan memfokuskan kepada seberapa jauh kemampuan organisasi pelaksana dalam memberikan sosialisasi kepada beberapa organisasi terkait dan masyarakat sebagai objek dari seluruh tujuan kerja pemerintah. Dalam penelitian ini integrasi adalah menyangkut proses sosialisasi, artinya kemampuan pelaksana *e-procurement* Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mensosialisasikan sistem ini kepada publik/organisasi terkait.

⁷⁷ Informan 2

⁷⁸ Informan 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, terkait kewenangan BLP dan LPSE dalam *e-procurement*. Bahwa BLP (Bagian Layanan Pengadaan) tupoksinya adalah melaksanakan tender untuk semua pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau nilainya diatas 200 juta untuk pekerjaan pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya BLP yang handel. Kalau pekerjaan yang konsultasi diatas 100 juta BLP handel, BLP sifatnya melayani semua OPD. Jadi OPD-OPD itu meminta BLP untuk melakukan proses tender Dengan melaksanakan ketentuan persyaratan yang berlaku. OPD meminta BLP melaksanakan proses tender. Yakni dengan cara OPD mencukupi persyaratan yang BLP minta sesuai dengan ketentuan, setelah persyaratan masuk, baru di BLP menentukan kelompok kerja pengadaan barang jasa untuk melaksanakan proses tender.⁷⁹ Dan untuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) memiliki kewenangan sebagai layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, yakni menangani SPSE (sistem pengadaan secara elektronik)⁸⁰

Adapun hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa didalam pelaksanaan *e-procurement* telah diadakan sosialisasi kepada OPD dan masyarakat. LPSE dalam 1 tahun melaksanakan sosialisasi atau bimtek itu diawal dan diakhir tahun, sesuai dengan perkembangan-perkembangan sistem yang ada⁸¹. Hal yang sama disampaikan oleh informan berikutnya bahwa kalau OPD dan masyarakat sudah diadakan sosialisasi. Kalo pengadaan barang jasa di masyarakat itu penyedia. Untuk penyedia BLP sudah pernah melaksanakan sosialisasi baik

⁷⁹ Informan 2

⁸⁰ Informan 3

⁸¹ Informan 1

aturan baru ataupun sistem yang baru. Karena BLP juga tidak mau melaksanakan proses tender dimana penyedia tidak bisa menggunakan alat karena kita tender menggunakan alat. Alatnya namanya SPSE versi 4,3. Jadi pada saat BLP menjelang melaksanakan tender BLP melaksanakan seoptimalnya sosialisasi kepada penyedia bahkan langsung workshop, workshop itu mereka mencoba sistem. Jadi pada saat tayang mereka sudah tidak bingung, mereka bisa⁸². Dan informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa setiap tahun sekali LPSE mengadakan satu tahun dua kali atau tiga kali pesertanya LPSE pilih yang memang belum pernah terutama penyedia barang, kalau penyedia barang setiap sebulan sekali mesti kan ada yang daftar baru, yang baru-baru itu biasanya yang LPSE undang⁸³.

Selanjutnya terkait sosialisasi *e-procurement*. Bahwa hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan⁸⁴. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa sosialisasi pernah BLP laksanakan, LPSE pun juga melaksanakan. Bahkan BLP berencana dalam bulan ini Juni ini melaksanakan bimtek untuk para PPKom dan jadwal pelaksanaan untuk non tender, karena kedepan non tender juga harus masuk sistem⁸⁵. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa ,sudah sesuai karena itu LPSE sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan tupoksi dari LPSE kemudian DPA (Dana pengelolaan Anggaran) kemudian juga disesuaikan dengan indeks satuan Harga Kabupaten Tegal. Jadi misalkan untuk makan minum rapat itu indeksnya sekian,

⁸² Informan 2

⁸³ Informan 3

⁸⁴ Informan 1

⁸⁵ Informan 2

kemudian untuk narasumbernya itu sekian itu sesuai dengan regulasi dan dengan jadwal rencana tahunan⁸⁶.

Adapun kendala yang disampaikan informan terkait integrasi dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Antara lain yakni biasanya mereka yang diundang tidak seluruhnya datang artinya tingkat kehadiran dari yang diundang sosialisasi masih kurang, karena mereka kebanyakan merangkap jabatan. Yang diundang itu pelaku pengadaan, yakni PA, Kuasa pengguna Anggaran (KPA), PPK/PPKOM (Pejabat pembuat komitmen), pejabat pengadaan, penyedia, dan admin OPD⁸⁷. Hal yang sama disampaikan pula oleh informan selanjutnya bahwa penyedia susah diundang, BLP mengundang lewat perwakilan dari asosiasi-asosiasi. Ternyata memang asosiasi itu kurang efektif, misalkan BLP menyediakan kursi sosialisasi 100 penyedia hanya dihadiri 80%. Makanya kemarin LPSE masukan dari kami dibuka pengumuman pendaftaran secara online di website, itu juga kurang maksimal. Makanya BLP harus beberapa kali lagi supaya penyedia semuanya familiar jadi dengan apa yang ada di pengadaan barang jasa. Intinya dari integrasi sudah baik, hanya kendala di keaktifan penyedia⁸⁸. Dan informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kendalanya ketika LPSE mengundang peserta itu ngga 100% datang. Jadi misalkan LPSE padahal sudah memberikan jangka waktu tertentu misalkan 1/ 2 minggu sebelumnya LPSE sudah melayangkan undangan atau bahkan melakukan pendaftaran secara online menggunakan *google spreadsheet* tetapi ketika dilakukan ada aja yang tidak datang

⁸⁶ Informan 3

⁸⁷ Informan 1

⁸⁸ Informan 2

, prosentase kehadirannya seitar 80/90%. Kendalanya karena yang bersangkutan ada acara atau berhalangan hadir karena satu dan lain hal LPSE kurang tau.⁸⁹

V.1.1.3 Adaptasi

Dalam Patattan (2015:61), adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi, dengan memfokuskan kepada seberapa jauh organisasi pelaksana dalam menyesuaikan diri dalam pelaksanaan sistem ini, termasuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini adalah adaptasi terhadap penerapan sistem baru yaitu pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Untuk mengukur adaptasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mengadopsi sistem *e-procurement* ini, dari persiapan infrastruktur dan teknologi, juga persiapan sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait penyesuaian diri OPD pelaksana terhadap pengadaan perangkat kerja (persiapan sarana prasarana & tenaga kerja) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. bahwa hal tersebut ada yang cepat, ada yang lambat. Lambat kendalanya karena mereka belum familiar dengan sistem elektronik, sehingga mereka mengabaikan, berarti mindset SDMnya⁹⁰. Adapun yang disampaikan oleh informan berikutnya bahwa jika peralatan tergantung kerja, kan kalo penyedia jasa konstruksi yang membuat dari konsultan perencana. Jadi BLP serahkan sepenuhnya kalau untuk paket pekerjaan. BLP hanya menerima persyaratan

⁸⁹ Informan 3

⁹⁰ Informan 1

persyaratan yang disusun oleh PPKom. Mereka menyesuaikan diri, BLP kalau ada perubahan persyaratan BLP kirim surat ke OPD yang bersangkutan supaya kedepan semua OPD itu sudah tau dengan perubahan-perubahan yang terjadi⁹¹. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa jika adaptasi karena ini Perpres dilakukan ditengah tahun anggaran yaitu diberlakukan 1 Juli 2018 maka adaptasinya kurang begitu cepat. Untuk ditahun ini 2019 awal itu baru ada percepatan adaptasi karena terkait dengan anggaran dan penentuan PPKnya siapa, pokjanya siapa dan seterusnya. Sehingga indeks-indeks harga Kabupaten Tegal pun perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Jadi kalau adaptasinya diawal tahun 2018 itu cukup cepat tetapi ketika dari juli 2018-Desember 2018 itu agak kurang. Tapi kalau di tahun 2019nya itu udah lebih baik daripada Juli-Desember. Karena terbentur anggaran dan ketentuan disini di daerah⁹².

Selanjutnya terkait OPD pelaksana *e-procurement* di Kabupaten tegal. Bahwa OPD pelaksana tersebut telah melaksanakan pengadaan perangkat kerja e-procurement di Kabupaten Tegal sesuai SOP⁹³. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikutnya bahwa OPD pelaksana sudah melaksanakan dengan SOP, kalau masuk ke BLP mereka harus menyesuaikan sesuai dengan SOP⁹⁴. Dan informan selanjutnya juga menjelaskan hal yang sama, untuk SOP sendiri seharusnya dibentuk tetapi sampai saat ini itu setahu LPSE belum ada SOP yang sama atau pun yang seragam terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Karena LPSE masih mengacu hanya di Perpresnya saja belum diturunkan di Keputusan

⁹¹ Informan 2

⁹² Informan 3

⁹³ Informan 1

⁹⁴ Informan 2

Daerah disini atau Keputusan Bupati Tegal ataupun keputusan Daerah itu belum ada. Sehingga SOPnya masih mengacu ke Perpres belum ditentukan setiap dinas, belum diturunkan jadi SOP di Kabupaten Tegal⁹⁵.

Adapun kendala terkait adaptasi yang disampaikan informan dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Antara lain yakni pertama, kendala ketersediaan anggaran pada OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan tersebut⁹⁶. Kedua, terlalu lama yang menyebabkan waktu yang tersedia terbatas. Tidak ada asumsi bahwa paket itu gagal lelang. Mereka lambat dalam memasukan paket pengadaan yang mau ditenderkan. Waktu semakin habis, sehingga tidak ada pokja melelang itu menenderkan itu tidak boleh gagal. Itu kendala sebenarnya. Berarti kecepatan mereka mengirimkan paket pengadaan. Padahal kalo pokja kan harusnya jangan dibatasi waktu. Evaluasi supaya benar tentu tidak bisa dievaluasi sehari aja, ngga bisa. Tapi kan karena waktunya terbatas kan terpaksa harus dievaluasi sehari itu. Walaupun kadang ada kesalahan-kesalahan sedikit⁹⁷. Dan yang ketiga, PPK dulunya itu mengabaikan tugasnya sekarang harus dituntut lebih menguasai dari sisi teknis . karena PPK juga secara teknis harus menginputkan sendiri aplikasi dengan pembuatan RUP, kemudian pembuatan paket, kemudian e-kontrak , lalu kemudian SKPBJ harus PPK sendiri yang menggunakan. Maka adaptasinya sangat besar tantangannya karena sebagian besar PPK terkendala kurang memiliki skill di teknis IT gitu ataupun perkomputeran. Jadi masih ada PPK yang tidak menguasai skill skill dasar IT seperti mengetik, membuat perencanaan dan seterusnya. Sehingga

⁹⁵ Informan 3

⁹⁶ Informan 1

⁹⁷ Informan 2

biasanya dibuatkan tim teknis pendukung PPK. Pembuatan tim teknis PPK kan tidak langsung bisa dibuat harus ada beberapa kriteria atau beberapa pertimbangan. Ini yang menjadi sedikit menghambat proses adaptasinya. Tahun 2019 ini dari pemerintah Kabupaten Tegal mendorong untuk para PPK agar bisa meningkatkan kapasitas atau bisa jadi yang punya skill itu dituntut untuk mempunyai sertifikat pengadaan. Jadi mengirimkan diklat ataupun bimtek agar mendapatkan sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa. Jadi syarat untuk membuat ahli PPK itu ada yang namanya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kalo tidak punya sertifikat tidak bisa jadi PPK. Bisa jadi PPK kalo dia merangkap sebagai pengguna Anggaran. Jadi kalau dia sebagai pengguna anggaran wajib punya sertifikat tetapi kalo dia bukan pengguna anggaran, dia wajib hukumnya mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa untuk menjadi PPK. Di Kabupaten Tegal sebagian sudah memiliki sertifikat sebagian belum. Presentasinya sekitar 40/30%. Banyak yang sudah punya tetapi skill di teknis IT masih kurang⁹⁸.

V.1.2 Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Tegal

Penelitian ini juga menggunakan indikator Implementasi Kebijakan menurut Teori George C. Edwards III (1980) untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program *e-procurement* di Kabupaten Tegal yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap implementor dan struktur birokrasi.

⁹⁸ Informan 3

V.1.2.1 Komunikasi

Menurut Teori George C. Edwards III (1980) dalam Dewi, dkk. Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian yakni transmisi kebijakan, kejelasan tujuan dan cara kebijakan, serta konsistensi komunikasi. Pertama, transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya). Kedua, kejelasan (Clarity) Kejelasan tujuan dan cara yang digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Ketiga adalah konsistensi, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang melaksanakannya. Tentunya seperti itu, seperti misalkan kalo memang itu harus ke PPK berarti ke PPK, Pejabat pengadaan berarti ke pejabat pengadaan, ke admin SPSE berarti ke admin⁹⁹. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau sekarang, karena BLP sudah melaksanakan *e-procurement* bertahun tahun, hal ini dinilai sudah baik. Kepala perangkat daerah

⁹⁹ Informan 1

sudah familiar apa yang harus dikerjakan apa yang harus disiapkan pun jadi sudah terbiasa dengan pola¹⁰⁰. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa jika kebijakan ini untuk pendelegasian tugas sebenarnya sudah, karena LPSE sudah melakukan sosialisasi lebih dari satu kali bahkan pernah juga mengundang wakil bupati yang dulu Bu Umi. Tahun 2016 mengundang LKPP, pimpinan daerah, itu untuk mendorong agar pelaksanaan barang dan jasa itu disesuaikan dengan regulasi yang baru. Apalagi terkait dengan pendelegasian tugas yang beda, ada beberapa pelaku pengadaan itu istilah baru di Perpres yang sekarang kalo dulu tidak ada istilah pelaku pengadaan. Ini yang mencoba untuk digali dan dikenalkan secara masif kepada OPD terutama kepada pengguna anggaran PPK dan pejabat pengguna anggaran ataupun pejabat penerima hasil pekerjaan¹⁰¹. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa beberapa kali dari bagian layanan pengadaan LPSE itu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk *e-procurement*, baik untuk pejabat pengadaan, pokja ULP maupun pejabat pembuat komitmen dan juga sebenarnya untuk pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran jadi sebetulnya sudah disosialisasikan sudah disampaikan¹⁰². Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa transmisi kebijakan telah disalurkan. Artinya masing-masing SKPD punya kegiatan, kegiatan kalo kaitan dengan pengadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal komunikasi sama LPSE, kita membentuk tim begitu lalu dikomunikasikan, komunikasi baik¹⁰³. Informan berikutnya juga menjelaskan bahwa telah ada pemberitahuan dari petugas

¹⁰⁰ Informan 2

¹⁰¹ Informan 3

¹⁰² Informan 4

¹⁰³ Informan 5

LPSEnya untuk mendaftarkan perusahaannya mengikuti lelang secara elektronik¹⁰⁴. Dan informan berikutnya menjelaskan bahwa kalau sejauh ini seluruh informasi biasanya PT Kamajati dapatkan di sebuah website namanya LPSE. Jadi seluruh informasi baik syarat lelang ataupun hal-hal yang perlu disiapkan untuk pengajuan lelang atau penawaran biasanya disampaikan melalui situs LPSE, untuk peraturannya juga lewat situs LPSE¹⁰⁵

Selanjutnya terkait kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Informan menjelaskan bahwa dari pihak LPSE pertama melakukan sosialisasi internal, pembekalan kepada petugas-petugas pengelola LPSE, kemudian ke internal kominfo sendiri, yang ada di kominfo kan paling tidak kan harus mengenal, nah setelah itu baru kita sosialisasikan kepada seluruh OPD dengan metode bimtek/sosialisasi¹⁰⁶. Informan berikutnya menjelaskan bahwa sebenarnya kalau ditingkat OPD, harusnya OPD ditarget melaksanakan kebijakan secepatnya, karena itu hubungannya dengan realisasi anggaran. Hanya memang yang terjadi di *e-procurement* Kabupaten Tegal realisasi anggaran sedikit terlambat, terlambat dikatakan karena persiapan pengadaan barang jasanya kurang bagus. Terutama kalo pekerjaan konstruksi itu belum tersedianya DED (*Detail Engineering Design*)/ gambar kerja detail, itu yang menyebabkan pekerjaan lambat. Pada intinya realisasi anggaran masih lambat, karena kelengkapan perencanaan pengerjaan pengadaannya kurang cepat¹⁰⁷. Dan informan selanjutnya menjelaskan

¹⁰⁴ Informan 6

¹⁰⁵ Informan 7

¹⁰⁶ Informan 1

¹⁰⁷ Informan 2

bahwa caranya adalah dengan melakukan konsolidasi dengan BLP, Bappeda, dan LPSE. Jadi direncanakan itu menggunakan metode tender, apakah itu pengadaan langsung ataukah itu *e-purchasing* itu tentunya harus tau kriteria masing-masing kegiatannya ini lebih pasti menggunakan swakelola/penyedia dan seterusnya. Konsolidasinya tadi bagian layanan pengadaan dengan LPSE, Bappeda kan biasanya terkait dengan target penyerapan anggarannya jadi misalkan kegiatan ini ditargetkan harus selesai bulan Juli namun ternyata molor itu juga harus ada konsolidasinya. Kalo di LPSE biasanya terkait dengan pembuatan rencana umum pengadaannya jadi beberapa OPD itu ketika mau dibuat paket tendernya ternyata metodenya tidak sesuai itu berarti PPKnya juga ngga paham. Kemudian ketika dilelang ternyata dokumen-dokumennya belum siap maka kan perlu dikonsolidasikan dengan BLP. Jadi kendalanya adalah jarang adanya undangan-undangan ataupun rapat-rapat kecil dengan bertemu secara intens karena komunikasinya hanya secara personal tidak langsung rapat. Sehingga kendala-kendala seperti itu masih tetap muncul meskipun sudah tau solusinya¹⁰⁸. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa dalam *e-procurement* itu ada beberapa aplikasi, aplikasi yang digunakan untuk tender, digunakan untuk *e-purchasing* dan digunakan untuk pengadaan langsung. Jadi dari aplikasi SPSE yang sudah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal itu adalah aplikasi tender, tender cepat, kemudian aplikasi *e-purchasing*. Salah satu yang belum digunakan adalah aplikasi e-pengadaan langsungnya. Jadi belum keseluruhan dari fungsi-fungsi *e-procurement* itu digunakan oleh pemerintah Kab Tegal. Jadi hanya tinggal satu, e-

¹⁰⁸ Informan 3

pengadaan langsung. *E-pengadaan* langsung itu sistemnya, pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang dianggap memiliki kemampuan kualifikasi usaha untuk mengadakan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu untuk jasa konsultasi dibawah 100 juta untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu dibawah 200 juta. Itu yang memang di lingkungan kabupaten Tegal belum digunakan. Salah satu bagian dari *e-procurement* yaitu e-pengadaan langsung, untuk tahun depan diimplementasikan. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengadaan langsung secara manual. Jadi pengadaan secara manual adalah pejabat pengadaan memberikan undangan pengadaan langsung dilampiri dokumen pemilihan, kemudian baru dikirim ke calon penyedia (pelaku usaha namanya pelaku usaha. Dari pelaku usaha itu diberikan waktu 3 hari untuk memberikan dokumen penawaran. Itu prosesnya masih manual. Jadi kedepan *e-procurement* kalau satu sudah dilaksanakan e-pengadaan langsung semua fungsi tadi sudah tercapai. Kalau kendala tidak ada karena sudah training, sudah ada pelatihan barangkali hanya terjadi ketika aplikasi spse itu dalam kondisi maintenance atau pada saat down jadi ketika misalkan akses internet down atau listriknya mati kemudian genset ngga nyala, server LPSE nya kemudian down itu menimbulkan gangguan. Tapi itu paling berkisar antara 5 sampai 20 menit sebelum genset nyala. Pernah beberapa kali ada saat itu terjadi down server atau pada saat maintenance dari LKPP itu kendalanya disitu aja. Maintenance itu kan sudah menjadi agenda rutin dari LKPP itu di akhir Desember itu 30, 31, tanggal 1 itu 3 hari sudah maintenance aplikasi. Kemudian ketika upgrade aplikasi dari SPSE 3.6 ke SPSE 4.0 itu juga jadi sedikit gangguan. Kemudian sekarang SPSE yang 4.3

sudah baik. Ketika ada pengembangan aplikasi SPSE 5.0 gangguan itu biasanya ketika terjadi instalasi saja berlangsung 1-2 hari paling lama¹⁰⁹. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk kejelasan tujuan sangat bagus realisasinya dari 5 tujuan tadi sudah terpenuhi. Untuk realisasi tujuan pada transparansi dan akuntabilitas kembali pada pelakunya panitia lelang dengan si pengadaan barang jasa. Selama ini di Kabupaten Tegal cukup baik¹¹⁰. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa tujuan dan cara *e-procurement* pihak CV Arta telah berusaha memahami dan mempraktekkan. Meski ada sedikit bingung karena ada peraturan peraturan baru dari tahun yang dulu, sedikit kesulitan¹¹¹. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya kalo tujuan dikatakan standar, dalam artian untuk masalah PT Kamajati selaku pihak kedua penyedia jasa, selama ini standar, maksudnya umum persyaratannya seperti ini. Intinya PT Kamajati harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kalau kontraktor atau penyedia jasa harus kemampuan untuk mendapat sebuah pekerjaan persyaratan seperti ini ya harus, tidak bisa keluar dari spesifikasi. Kalau keluar dari situ resikonya PT Kamajati tidak bisa ikut menawar. Di Kabupaten Tegal *e-procurement* sudah transparan dan akuntabel. Kalau persaingan belum tentu setiap tahun beda, dalam artian setiap tahun biasanya kerja itu kadang lagi banyak ataupun lagi sedikit. Dan yang nawar juga dulu masih satu wilayah. Jadi ada sebuah lelang khususnya di wilayah Kabupaten Tegal, biasanya itu penyedia jasa yang lelang itu orang-orang kabupaten, jadi kompleknya di masih satu wilayah. Tapi kalau sudah kearah sini, sekarang istilahnya bisa memperluas wilayah, dari Jawa Tengah ada, misalkan

¹⁰⁹ Informan 4

¹¹⁰ Informan 5

¹¹¹ Informan 6

dari PT kabupaten ada, PT kota ada. Ya intinya sih semuanya ikut bersaing, jadi tidak hanya PT sini. Untuk dana daya, yang namanya perusahaan kepenginnya untung hanya biasanya yang namanya pekerjaan yang menentukan pihak pertama, misalkan dari PU ataupun apa, PT Kamajati menjelaskan kalau untuk penyedia jasa sebelum PT Kamajati melakukan penawaran biasanya hitung-hitungan kemampuan PT, kira-kira sanggup tidak. Kalau dikira tidak, ngga bakalan untung yang paket ini atau gimana. Biasanya penyedia jasa juga PT Kamajati perlu nawar atau tidak. Kalau pengawasan, biasanya kalau jasa, pengawasan itu PT Kamajati mulai dari mendapat pekerjaan. Setelah menang proyek atau lelang itu mulai mengerjakan, pelaksanaannya gimana, baru ada pengawasan dari pihak dinas. Pengawasan sesuai dengan perjanjian lelang kerjaan. Misalkan pekerjaan aspal harus ketebalan 3 cm, harus sesuai dengan spesifikasi waktu penawaran. Terkait kebutuhan informasi, kalau informasi PT Kamajati mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, hanya saja dari pihak kontraktor harus selalu memantau, harus selalu update. Kalau tidak sering liat itu, PT Kamajati tidak dapat informasi. Selanjutnya terkait implementasi kebijakan *e-procurement* Kabupaten Tegal, biasanya kalau pihak LPSE setelah menentukan, biasanya ketika PT Kamajati menawar LPSE mengelompokkan dari juara 1, 2, 3, 4,5 semuanya itu PT, penyedia jasa yang akan nawar sebuah proyek baru. Dari 5 itu LPSE menilai dari segi harga ataupun kelayakan sebuah perusahaan, alat, dan tenaga. PT Kamajati menilai untuk LPSE juga cukup sesuai dengan aturan yang ada¹¹²

¹¹² Informan 7

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal, pihak LPSE berusaha semaksimal setiap kali ada perkembangan atau ada perubahan dari LKPP baik itu berubah sistemnya atau regulasinya LPSE segera sosialisasikan, beritahukan, publikasi¹¹³. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa karena BLP sudah lama itu tidak ada kendala, sudah berjalan dengan baik. Tinggal perlu diintenskan saja. Tentu target kami sebenarnya percepatan pengadaan di triwulan pertama. Kalau lain-lain sudah oke semua. Untuk komunikasi sudah terealisasi dengan baik. Hanya realisasi anggaran yang terlambat, karena perencanaan DED (*Detail Engineering Design*)/ gambar kerja detail belum ada¹¹⁴. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa konsisten komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal¹¹⁵. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa pertama itu sebenarnya sudah diatur itu di Peraturan Bupati Tegal tentang penjabaran penatausahaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), jadi di sana sudah ada klausul untuk pengadaan barang yang ini barang ya yang sudah ada di e-catalog itu harus menggunakan e-purchasing. Itu salah satunya. Kemudian ketentuan yang lainnya di peraturan Perbup tersebut adalah sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi semua proses itu ditempuh melalui dengan *e-procurement*. Untuk konsistensi komunikasi OPD pelaksana, sangat konsisten. Itu hampir di setiap tahun ada yang namanya evaluasi untuk keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Tegal untuk

¹¹³ Informan 1

¹¹⁴ Informan 2

¹¹⁵ Informan 3

pelaksanaan e-procurement itu sendiri. Jadi ada monev, baik dari Dinas Kominfo maupun dari setda berkaitan dengan berapa jumlah paket yang ditenderkan ya melalui *e-procurement* itu registernya sudah ada. Yang tidak melalui e-procurement itu juga ada sebenarnya di bagian layanan pengadaan rinciannya itu. Jadi ada yang melalui *e-procurement* dan ada yang belum menggunakan e-procurement. Yang belum melalui e-procurement itu pengadaan langsung yang belum menggunakan aplikasi LPSE. Intinya dari sisi komunikasi sudah tergolong baik¹¹⁶. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa selama ini yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal amati karena dinas ini barang jasanya sangat kecil, ini sudah dapat dipantau dengan baik. contohnya didinas perpustakaan hanya beberapa kegiatan satu atau dua. Cukup baik LPSE. Cukup konsisten¹¹⁷. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa terkadang baik kadang juga ngga. Kadang servernya suka error. Dari pihak sini komunikasi sudah langsung merespon, hanya server suka error¹¹⁸. Dan informan berikutnya menjelaskan bahwa kalau konsistensi informasi dari pihak LPSE ke kontraktor maksudnya ke penyedia jasa itu tidak ada, semuanya seluruh informasi pekerjaan nilai kontrak ataupun apa itu masuk di sistem website itu sistem elektronik, kecuali setelah pihak penyedia jasa mendapatkan sebuah project pekerjaan dari hasil pemenang tender, biasanya LPSE menginformasikan atau membuka informasi. Setelah LPSE dilanjutkan pihak kedua, biasanya DPU. Pada intinya tidak ada kendala komunikasi yang berat¹¹⁹.

¹¹⁶ Informan 4

¹¹⁷ Informan 5

¹¹⁸ Informan 6

¹¹⁹ Informan 7

V.1.2.2 Sumber Daya

Menurut Teori George C. Edwards III (1980) dalam Dewi, dkk. Sumber Daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III yakni: Sumber daya, dengan memfokuskan kepada staf (jumlah dan kemampuan), informasi, kewenangan dan fasilitas.

e. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

f. Informasi

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah: i). Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

g. Kewenangan

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dll.

h. Fasilitas

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak

akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : ruang kantor, komputer, dll.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa dalam pelaksanaan *e-procurement* jika kemampuan staff sudah sesuai, hanya saja jumlah staffnya dinilai masih kurang. Masih kurang banyak kalo di staff LPSE itu masih membutuhkan 3-4 personil lagi¹²⁰. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau di BLP masih sangat kurang. Kalo hasil dari hitungan analisa pekerja, kabupaten membutuhkan 12 jabatan fungsional. Kita baru tersedia 3 orang, yang lainnya masih staff biasa, yang kami arahkan untuk segera beralih ke fungsional¹²¹. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa SDMnya perlu ditingkatkan karena pengadaan barang jasanya itu luas, tidak hanya tender tetapi pengadaan langsung masuk ke LPSE. Bahkan sudah disiapkan aplikasinya bahkan sekarang puskesmas, BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sudah difasilitasi di LPSE. Sehingga proses pengadaannya bisa lebih banyak, paketnya bisa lebih banyak. Bahkan bisa jadi tahun ini atau tahun depan itu sampe 1000 paket. Kalo yang sekarang tender itu sekitar 200-an yang 800-an pengadaan langsung belum yang *e-purchasing*. Sehingga SDMnya perlu ditambah, masih kurang jika melihat jumlah personil LPSE dalam Surat Keputusan Kepsda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor: 050/ 007 Tahun 2019¹²². Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa salah satu yang jelas sudah sesuai dengan SOP adalah pejabat pengadaan dan PPK. Itu syaratnya harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Itu pasti sesuai SOP salah satu syaratnya. Untuk staf

¹²⁰ Informan 1

¹²¹ Informan 2

¹²² Informan 3

pengelola perlu ditingkatkan kemampuan TIK nya disana, karena beberapa juga masih terkendala dalam misalkan upload SIRUP, sistem informasi rencana pengadaan. itu perlu ditingkatkan untuk kualitas SDM di staf pengelola. Kalau jumlah rata-rata sudah mencukupi, baik OPD pelaksana maupun OPD di luar Dinas Kominfo sudah cukup. Ini berbeda untuk paket pengadaan yang tender itu dilakukan oleh BLP, untuk paket. Untuk paket pengadaan ditentderkan. Jadi disana ada yang namanya bagian pengadaan itu jadi paketnya itu terjadi pokja. Misalkan paket konstruksi ada pokjanya. Paket jasa konsultasi ada pokjanaya. Pengadaan barang sudah. Jadi ini untuk tender. Jadi yang tendernya dilaksanakan BLP, yang sistemnya dilaksanakan oleh LPSE. Jadi berkolaborasi. Jumlah pokja BLP sudah cukup atau tidak yang mengerti BLP itu sendiri. Kalau di LPSE sendiri dengan 9 orang sudah cukup¹²³. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa kemampuan sudah cukup baik. Tergantung teknis, seperti contohnya APBD kan anggaran dimulai lelang-lelang kan april, kalau dipercepat semisal teknis dipercepat dibulan januari itu cepat, kayanya kalau contohnya di DPU ada kerja sama pihak ketiga berkaitan dengan konsultan, di DPU untuk gambar sudah menggunakan konsultan. Sehingga itu kan sangat membantu. Untuk jumlah di LPSE, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal menilai sudah cukup¹²⁴. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa jumlah dan kemampuan staff e-procurement Kabupaten Tegal cukup memadai, tidak ada problema dengan SDM¹²⁵. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau LPSE, kalau penyedia jasa memang PT Kamajati tidak tahu. Setahu mereka dari

¹²³ Informan 4

¹²⁴ Informan 5

¹²⁵ Informan 6

pihak penyedia jasa pekerjaan kita nawar, mendapatkan informasi dari sebuah website, kalau menang atau masuk ke kualifikasi berurutan, 1, 2, 3, 4, 5 dipanggil pihak LPSE pekerjaan mana yang sekiranya sesuai dengan kebijakan atau yang dianggap mampu. Kalau untuk sistemnya di LPSE itu SDMnya saya kira cukup mampu, cuman untuk pekerjaan itu monoton, maksudnya peraturannya dari dulu seperti itu, saya kira mudah, tinggal menceklist syarat-syaratnya itu. Jadi orang LPSE itu punya list sendiri, persyaratannya, tinggal ngoreksi saja yang mana atau pun yang tidak ada. Jadi saya kira cukup SDMnya¹²⁶.

Selanjutnya terkait OPD pelaksana, kepemilikan juklak-juknis serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Bahwa hal tersebut LPSE sudah mempunyai Perpresnya, Perbupnya, SOP-nya, SLA dari LKPP ada SLA-nya Servis Level Agreementnya, SOP-nya juga LPSE punya kemudian standarisasi LPSE sudah sampai 12 standar tinggal 5 standar lagi untuk mencapai 17 standar. Juklak-Juknis LPSE itu dengan 17 standar yang harus dipenuhi dari sanakan ada di dalamnya SOP yang harus di ikuti, seperti salah satu contohnya di standar 3 itu tentang aset. Aset itu harus di apakan, data harus diupdate kemudian dicatat resikonya pada standar 4 pencatatannya seperti apa seperti itu¹²⁷.

¹²⁶ Informan 7

¹²⁷ Informan 1

Gambar V.17
Standarisasi *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Tweet

Like 1

Share

Tentang LPSE

ID

287

Provinsi

Jawa Tengah

Alamat

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi -
Kabupaten Tegal
Bagian Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten
Tegal

Helpdesk

Telp : (0283) 492088
Email : lpse@tegalkab.go.id
/ helpdesk_lpse@slawi@yahoo.co.id

SPSE v3.6

3.6.0-sp5 build
20181127;4.3u20190513

Status Server

Online

28 June 2019 15:23:52

Personil

7

Partisipasi Kegiatan

6

Peserta Partisipasi Kegiatan

6

Standardisasi

12

Keterangan

✓

1 Standar Kebijakan Layanan

✓

2 Standar Organisasi Layanan

✓

3 Standar Pengelolaan Aset Layanan

✓

4 Standar Pengelolaan Resiko Layanan

✓

5 Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan

✓

6 Standar Pengelolaan Perubahan

✓

7 Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan

✓

8 Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

✗

9 Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat

✗

10 Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan

✗

11 Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan

✓

12 Standar Pengelolaan Kelangsungan Pelayanan

✓

13 Standar Pengelolaan Anggaran Layanan

✓

14 Standar Pengelolaan Pendukung Layanan

✓

15 Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan

✗

16 Standar Pengelolaan Kepatuhan

✗

17 Standar Penilaian Internal

Activate Windows

Go to Settings to activate Wi

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/>

Informan selanjutnya menjelaskan bahwa belum ada, juklak dan juknisnya Perpres. Yang secara khusus belum ada, perlu penatausahaan untuk seluruh lingkup kabupaten tegal itu ada Perbup Penata Usahaan Keuangan, didalamnya juga ada mekanisme pengadaan barang jasa untuk pekerjaan-pekerjaan, itu OPD tidak membuat sendiri. Tapi itu disatukan namanya Perbup Penata Usahaan di tingkat Kabupaten. OPD tidak buat sendiri tetapi diinput disini. Ada peraturan bupati yang dibuat di bagian keuangan¹²⁸. Informan selanjutnya juga menjelaskan hal yang sama bahwa di Kabupaten Tegal belum mempunyai juknis dan juklaknya. Kemarin sudah menyampaikan ke pimpinan untuk membuat sebuah minimal surat edaran atau keputusan Bupati mengambil isi dari Perpres itu. Disini itu belum, jadi masih mengacu Perpres. Untuk regulasi ditingkat daerah itu belum ada. masih mengacu Perpres belum jadi keputusan Bupati atau SOP di Kabupaten

¹²⁸ Informan 2

Tegal itu belum. Hal ini tidak menghambat pelaksanaan *e-procurement*, karena di Perpres itu juga udah jelas teknis dan uraian tugasnya. Juklak dan juknisnya Perpres menurut LPSE sebagai payung di daerah, bisa jadi di kabupaten/kota itu ada beberapa kalo diperpres itu masih longgar, itu misal di Tegal dipersempit, di daerah lain tetap diperlonggar. Itu sebenarnya seperti itu, fleksibilitas. Tetapi LPSE sepenuhnya masih masih mengacu Perpres. Kedepan ketika sudah menjadi UKPBJ itu baru dibuat Juklak/Juknis pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Tegal. Kalau di Perpresnya kan secara umum Pemerintah jadi entah itu Kab/kota atau provinsi itu sama. Jadi kedepan sudah menjadi UKPBJ dibuat juklak dan juknisnya. Jadi UKPBJ di Perpres, Permendagri pun sudah ada. Jadi kalau misalkan kab/kota itu UKPBJnya menginduk di Sekda/dibawahnya menjadi bagian layanan pengadaan. Setiap Kab dan kota itu berbeda, jadi kalo di Kabupaten Tegal tahun ini belum UKPBJ, dan di Indonesia masih sedikit. Kemarin LPSE Rapat Koordinasi Nasional itu masih sedikit, bahkan di Provinsi Jateng pun belum. Sehingga kedepan tahun depan tahun 2020 itu informasinya mau dibuat UKPBJ LPSEnya masuk kesini. Kalo UKPBJ dibawah Sekda, BLP dan LPSE sekarang belum satu atap, masih beda dinas, beda struktur. Kalau satu struktural UKPBJ. UKPBJ itu hanya istilahnya saja, ditiap daerah itu namanya bisa badan pengadaan barang dan jasa ataupun kegiatan barang dan jasa, bagian badan pengadaan barang dan jasa. Itu kan setiap daerah beda. Tetapi intinya itu bisa disebut UKPBJ ketika dibawah Sekda, dibawahnya ada ULP ada LPSE sama satunya badan monitoring dan evaluasi. Ada 3 seksi itu atau subbagian tapi bagiannya namanya UKPBJ. Sekarang koordinasi ULP dan LPSE sudah baik

meskipun belum satu atap tetapi terkait dengan aset itu masih ada perbedaan karena di LPSE Kabupaten Tegal itu sendiri ruangnya masih minjem di Sekda tetapi strukturnya di Diskominfo, kemudian ketika ada perbaikan aset juga ini juga koordinasinya cukup memakan waktu, jadi kalo punya sendiri kan bisa cepet perbaikan aset, dari pusat langsung diganti kalo ini masih ada beberapa tingkatanlah/tahapan terkait dengan reformasi birokrasi. Jadi kalo LPSE koordinasinya sudah cukup baik tetapi kalo dari sisi asetnya ini masih perlu diperbaiki. Berarti dari sarprasnya, dan perbaikan sarpras masih terhambat, masih berpisah. Peningkatan sarprasnya masih kurang, karena masih beda atap¹²⁹. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa sudah ada juklak-juklisnya. Bagi bagian layanan pengadaan maupun di dinas kominfo sudah memiliki SOP untuk pengadaan barang jasa melalui elektronik¹³⁰. Adapun informan yang menjelaskan bahwa kalau dimasing-masing OPD yang mengatur ada juklak-juknisnya, biasanya ada Peraturan Bupati¹³¹. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa dari pihak CV. Arta tidak tahu akan juklak-juknisnya¹³². Dan informan selanjutnya juga menjelaskan hal yang sama bahwa kalau juklak-juknis, semua hampir sama kaya persyaratan, persyaratan lelang. Jadi disampaikan oleh LPSE, jadi semuanya harus mengacu kesitu. Kalau juklak-juknis pihak PT Kamajati kurang tahu, kalau arahnya sudah masuk kesitu. Penyedia jasa kayaknya kurang paham¹³³.

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan terkait langkah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema

¹²⁹ Informan 3

¹³⁰ Informan 4

¹³¹ Informan 5

¹³² Informan 6

¹³³ Informan 7

serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Informan menjelaskan bahwa ketika terjadi sesuatu LPSE segera melakukan re-check, ketika sudah ditemukan permasalahannya maka segera di instruksikan kepada petugas sesuai dengan kendala yang muncul. Kalo itu bersifat sistem atau SPSE-nya berarti ke admin LPSE, kalo bersifat hardwarenya berarti ke admin agensi¹³⁴. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa jika ada problema BLP handel sendiri. BLP berkoordinasi dengan APH karena kalo sekarang proses pengadaan itu BLP meminta pendampingan ke kejaksaan ataupun polisi. Semua paket yang ditenderkan BLP minta perbandingan kepada APH jadi kalau ada kendala mengenai perselisihan hukum BLP berkoordinasi dengan kejaksaan ataupun kepolisian¹³⁵. Adapun informan berikutnya menjelaskan bahwa kalo misalkan dari OPD itu ada problem, LPSE sudah ada sistemnya namanya LPSE *support*. Contohnya kemarin dinas Pertanian tidak dapat membuat paket. PPK bisa melaporkan melalui sistem, kemudian di LPSE dapat menangani masalahnya, LPSE dapat penanganan melalui sistem juga dan sudah ada nomor tiketnya, namanya e-ticketing terkait dengan permasalahan yang ada jadi. Ketika ada dinas manapun yang kesulitan atau terjadi permasalahan itu bisa dilaporkan melalui LPSE *support*. Penanganannya bisa online ataupun LPSE bisa bertemu dengan dinas tersebut, jika penanganan yang memang harus dijelaskan.

¹³⁴ Informan 1

¹³⁵ Informan 2

Gambar V.18
Fitur Tanya Jawab pada SPSE 3

The screenshot shows the LPSE Kabupaten Tegal website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Tentang Kami, Tanya Jawab, Regulasi, Site Map, and Kontak Kami. Below the navigation bar, the page is divided into two main sections: 'Cari Pertanyaan atau Jawaban' (Search Questions or Answers) and 'Frequently Asked Question'. The 'Cari Pertanyaan atau Jawaban' section contains a form for submitting questions, with fields for 'Nama Pengirim' (Sender Name), 'Email Pengirim' (Sender Email), and 'Pertanyaan' (Question). Below the form is a 'Kirim' (Send) button. The 'Frequently Asked Question' section contains a list of questions and their answers, such as 'saya tidak dapat login ke lpse kota tegal? user id dan password salah/tidak sesuai? mohon solusinya???' and 'Dimohon dengan sangat hormat sekali, dimohon agar tayangan lelang jangan terlalu cepat, ada jeda 1 minggu, biar bisa istirahat, hehehehehe'.

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc/faqpage>

Dapat dilihat pada gambar V.19 diatas, itu merupakan bentuk dari fitur tanya jawab pada website *e-procurement* Kabupaten Tegal saat masih menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi SPSE 3. Dimana pada fitur tanya jawab ini dari pihak penyedia maupun LSM bahkan publik dapat langsung memberikan pertanyaan mengenai kesulitannya dalam mengikuti *e-procurement*. Atau pun memberikan sanggahan kepada pihak LPSE secara online tanpa harus *log in* ke sebuah akun penyedia. Artinya apabila seseorang itu bukan dari pihak penyedia yang telah memiliki akun penyedia, maka siapapun dapat mengajukan pertanyaan kesulitan pada *e-procurement* ataupun sanggahan secara cuma-cuma. Yang mana penyedia, masyarakat ataupun pihak LSM yang mempunyai kepentingan atau tidak itu dapat memberi pertanyaan, saran bahkan kritik, hanya dengan mengakses website *e-procurement* (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc/faqpage>).

Gambar V.19
LPSE Support dalam E-Procurement Kabupaten Tegal pada SPSE 4.3

LPSE Support Control Panel

Tiket Baru Tiket Proses Daftar Tiket Buat Tiket Baru

No	Nomor Tiket	Tanggal Dibuat	Judul Tiket	Dikirim Oleh	Asal LPSE	Aksi
1	UC2019031400012	KUSNANTO,S,IP 2019-03-14 08:55:05	SATKER TIDAK MUNCUL SAAT E-PURCHASING	KUSNANTO,S,IP	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
2	UC2019022600101	HERIVANTO PRABOWO AJI, ST, ME 2019-02-26 16:07:44	harga nego spse dalam tidak bisa disesuaikan dengan harga nego offline	HERIVANTO PRABOWO AJI, ST, ME	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
3	UC2019041900003	SETIYO RAGIL, A,M,TR 2019-04-19 10:23:29	TAYANG DAFTAR HITAM	SETIYO RAGIL, A,M,TR	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
4	UC2019042200085	ALIMUDIN 2019-04-22 13:34:24	Ketuar kode error pada waktu memasukkan isian kualifikasi	ALIMUDIN	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
5	UC2019051500053	CV. ADJI PUTRA 2019-05-15 11:16:08	Error saat mengirim syarat kualifikasi	CV. ADJI PUTRA	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
6	UC2019052800066	SUGRIWO SUBALI, CV 2019-05-28 13:14:52	konsultasi	SUGRIWO SUBALI, CV	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
7	UC2019052900031	Dra SRI WAHYUNINGSIH, MM 2019-05-29 09:24:44	RUP TIDAK MUNCUL PADA SPSE VERSI 4.3	Dra SRI WAHYUNINGSIH, MM	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket

FAQ LPSE Support Control Panel

Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Penyedia tidak mendapatkan notifikasi password baru setelah menggunakan fitur "lupa password"

Admin LPSE memastikan konfigurasi mail server pada utility SMTP sama dengan konfigurasi akun mail LPSE Admin LPSE melakukan re-send manual melalui menu utility SMTP Apabila masih belum berhasil admin LPSE melakukan restart aplikasi SPSE (ikuti tata cara penyelesaian dalam SOP error handling). Jika ... [Selengkapnya](#)

Muncul pesan "internal server error"

Data penyedia di SPSE tidak sinkron dengan Inaproc muncul pesan peringatan "Data akun anda tidak tersinkronisasi dengan inaproc" di halaman beranda setelah login.

Pada saat user mengalami kendala dengan pesan error berupa kode error, misal: "7xxxx"

Penyedia tidak bisa login roaming karena belum muncul halaman aktivasi agregasi. TIDAK ada pesan yang muncul.

Penyedia tidak bisa login roaming karena belum muncul halaman aktivasi agregasi. Muncul pesan "Akun anda sedang dalam proses seleksi admin inaproc"

Penyedia dapat login roaming, tetapi tidak bisa login di salah satu LPSE. Selain itu penyedia dapat login di SPSE V3.6 tapi gagal login di SPSE V4 dengan tampil pesan "User id atau password anda salah"

Penyedia dapat login di LPSE terdaftar tetapi tidak bisa login di LPSE lain (tidak bisa roaming)

Sumber: https://eproc.lkpp.go.id/case/admin_case

Sedangkan pada gambar V.20 diatas, itu merupakan bentuk dari fitur tanya jawab terbaru pada website *e-procurement* Kabupaten Tegal yang telah menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi SPSE 4.3 yang disebut LPSE Support. Dimana pada LPSE Support ini dari pihak penyedia maupun LSM bahkan publik tidak dapat langsung memberikan pertanyaan ataupun sanggahan kepada pihak LPSE secara online melainkan harus *log in* ke sebuah akun penyedia. Artinya apabila seseorang itu bukan dari pihak penyedia yang telah memiliki akun penyedia, maka siapapun tidak dapat mengajukan pertanyaan kesulitan pada *e-procurement* ataupun sanggahan secara cuma-cuma. Yang mana dari pihak penyedia, masyarakat ataupun LSM yang mempunyai kepentingan atau tidak itu tidak dapat memberi pertanyaan, saran bahkan kritik

hanya dengan mengakses website *e-procurement*, melainkan harus memiliki akun penyedia agar dapat log in pada LPSE Support.

Untuk kendala OPD secara umum teknis, terkadang RUP tidak bisa muncul sehingga tidak bisa membuat paket. Kemudian dari penyedia itu biasanya tidak bisa log in ataupun tidak bisa connect ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) atau kebanyakan penyedia tidak bisa upload dokumen kemudian datanya masih ngga sesuai dengan data yang sekarang. Kalau dari teknis yang lain, biasanya kadang perubahan jadwal yang itu masih bisa ditanyakan. Kesimpulannya SDM masih butuh peningkatan¹³⁶.

Dan selanjutnya informan menjelaskan bahwa biasanya ketika terjadi problem Diskominfo memberikan informasi kepada bagian layanan pengadaan ketika terjadi gangguan sistem. Itu menjadi sebuah SOP ketika terjadi gangguan sistem, ketua LPSE itu memberikan surat pemberitahuan ke bagian layanan pengadaan secara resmi diberikan, Secara singkatnya biasanya digunakan informasi whatsapp lebih dulu. Untuk surat informasi detailnya menggunakan surat resmi. Misalkan terjadi upgrade sistem dari 4.0 ke 4.3. Diskominfo memberitahukan terlebih dahulu ketika itu. Sehingga balada bisa mengantisipasi. Misalkan ketika disana ada paket Aanwijzing (pemberian penjelasan) misalnya jadwal menyesuaikan proses update sistem. Untuk jumlah sudah maksimal, jumlah di LPSE sudah cukup, tapi kalau jumlah orang yang menangani paket tender di bagian pengadaan, bagian pengadaan yang tahu. Itu bedanya disitu¹³⁷. Dan informan selanjutnya menjelaskan bahwa sementara ini Dinas Kearsipan dan

¹³⁶ Informan 3

¹³⁷ Informan 4

Perpustakaan Kabupaten Tegal melihat SKPD sendiri tidak ada kendala¹³⁸. Adapun informan yang menjelaskan bahwa sampai saat ini respond pelaksana *e-procurement* Kabupaten Tegal menurut pihak CV Arta sudah baik. SDM sudah dinilai cukup baik¹³⁹. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa Kalau untuk LPSE itu sebenarnya lembaga yang sifatnya hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan. Setelah pengadaan selesai, itu LPSE itu udah bukan kewajiban LPSE untuk mengawasi sebuah project. Biasanya ada pihak sendiri, dinas sendiri, biasanya PU atau DPU, itu untuk pekerjaan pengadaan jalan. Untuk selain itu pihak PT Kamajati kurang tahu. Penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal cukup dan dari SDM tidak ada kendala¹⁴⁰.

V.1.2.3 Disposisi/Sikap Implementor

Menurut Teori George C. Edwards III (1980) dalam Dewi, dkk. Disposisi/sikap implementor melihat pada kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan: ada tiga unsur utama yang mempengaruhinya yaitu: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

¹³⁸ Informan 5

¹³⁹ Informan 6

¹⁴⁰ Informan 7

d. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.

Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Ketidak mampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

e. Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

f. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Karakter dari pelaksana mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Tegal berjalan efektif. Bahwa LPSE memang sedapat

bisa memenuhi aspirasi/harapan-harapan itu sepanjang memang tanggung jawab LPSE yang harus dipenuhi, LPSE telah berusaha dalam menanggapi harapan-harapan masyarakat, hanya dengan cara bertahap tidak bisa secara sekaligus¹⁴¹. Hal yang sama disampaikan oleh informan berikutnya bahwa kalau BLP hanya sekedar pelaksana pengadaan saja. Kalau tentang kebutuhan pasar memang sudah ada mekanismenya sendiri, mekanisme perencanaan ada di musrenbang. Musrenbang itu meramu semua keinginan dari masyarakat. Jadi suatu dokumen perencanaan dijadikan suatu dokumen anggaran dan BLP eksekutornya disini atau pelaksana. Jadi kalau itu sesuai dengan kepentingan masyarakat itu ranahnya ranah diklat diperencanaan di musrenbangnya. Karena kalo kita itu sebenarnya fungsi BLP adalah hanya untuk memilihkan penyedia yang mau mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari pihak BLP sudah berusaha memahami kebijakan tersebut¹⁴². Adapun informan selanjutnya yang menjelaskan bahwa LPSE telah memahami kebijakan tersebut karena sudah beberapa kali mengusulkan ternyata memang belum difasilitasi, belum diterima oleh beberapa pengambilan kebijakan disini karena masih melihat itu dengan fasilitas yang ada itu sudah berjalan dengan baik padahal LPSE ingin memperbaiki lebih bagus dari sekarang. Solusinya adalah perlu dari LPSE perlu pimpinan yang memang memahami dengan kondisi yang ada, kondisi yang ada di BLP/LPSE perlu pendekatan yang persuasif agar dapat memperhatikan sarana dan prasana kemudian meningkatkan kesejahteraan di tingkat pengelola LPSE ataupun

¹⁴¹ Informan 1

¹⁴² Informan 2

pengelola BLP itu sendiri, masih belum terfasilitasi¹⁴³. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa menanggapi harapan masyarakat tentu Diskominfo bekerja secara profesional. Jadi tidak ada lagi yang namanya tatap muka antara pejabat pengadaan maupun pokja ULP dengan penyedia. Sekarang tatap muka hanya ketika penyedia mendaftarkan diri sebagai calon penyedia. Itu baru ada tatap muka antara penyedia dengan unit kerja dari LPSE. Sementara untuk tatap muka antara penyedia dengan pokja hampir tidak ada. Kecuali ketika telah terjadi pengumuman pemenang, Pembuktian kualifikasi. Pada saat pembuktian kualifikasi itulah pokja bertemu dengan penyedia. Jadi inilah yang namanya transparansi. Untuk harapan masyarakat tentu, pengadaan barang dan jasa melauli e-procurement itu dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada yang namanya kongkalikong¹⁴⁴.

Gambar V.20
Jadwal Lelang *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Tahap Tender Saat Ini - [1951287] Pembangunan Pasar Margasari			
No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10 April 2019 09:00	16 April 2019 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	10 April 2019 09:01	16 April 2019 23:59
3	Pemberian Penjelasan	12 April 2019 09:00	12 April 2019 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	12 April 2019 10:01	23 April 2019 10:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	23 April 2019 10:01	25 April 2019 16:00
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	23 April 2019 11:00	07 Mei 2019 12:00
7	Pembuktian Kualifikasi	25 April 2019 08:00	07 Mei 2019 12:00
8	Penetapan Pemenang	07 Mei 2019 12:01	07 Mei 2019 15:00
9	Pengumuman Pemenang	07 Mei 2019 12:01	07 Mei 2019 15:00
10	Masa Sanggah	08 Mei 2019 08:00	14 Mei 2019 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15 Mei 2019 08:01	24 Mei 2019 10:00
12	Penandatanganan Kontrak	27 Mei 2019 08:00	29 Mei 2019 15:00

LPSE Kabupaten Tegal - 03 Juli 2019 17:34

Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang/1951287/jadwal>

Informan berikutnya menjelaskan bahwa untuk saat ini sudah bagus, jadi publik sudah tahu, pihak pemborong konstruksi sudah tahu. Pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal menilai tidak ada masalah. Hanya

¹⁴³ Informan 3

¹⁴⁴ Informan 4

masih perlu publikasi lebih intens dimasyarakat¹⁴⁵. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa pihak CV. Arta menilai pelaksana e-procurement sudah faham. Menurutnya *e-procurement* sudah efektif¹⁴⁶. Serta informan berikutnya menjelaskan bahwa harapan untuk setiap penyedia jasa, intinya semuanya informasi harus transparan, dari seluruhnya bukan hanya informasi masalah kerjaan atau harga, semuanya harus transparan. Intinya penyedia harapkan harus transparan, dan informasi harus cepat dan tepat waktu. Biasanya informasi terkadang deadline sudah mepet. Sudah kurang berapa hari informasi biasanya baru keluar. Biasanya seringnya mepet kadang tidak, tidak tentu. Untuk pemahaman pelaksana, dari PT Kamajati harapannya seperti itu, hanya dari pihak LPSE sepertinya untuk merespon itu belum ada wadah dari sebuah penyedia jasa untuk menyampaikan kritik saran. Jadi sifatnya hanya face to face, maksudnya sampaikan ke panitia. Tapi untuk wadah untuk harapan dari pihak penyedia/publik itu seperti apa belum ada¹⁴⁷.

Selanjutnya terkait arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan e-procurement di Kabupaten Tegal. Informan menjelaskan bahwa LPSE lakukan koordinasi, kemudian LPSE tampung masukan-masukan, keinginan-keinginan penyedia, kemudian LPSE sampaikan tentang perihal apa yang menjadi penolakan penyedia artinya LPSE komunikasi yang harmonis, koordinasi dan konsultasi¹⁴⁸. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kalau

¹⁴⁵ Informan 5

¹⁴⁶ Informan 6

¹⁴⁷ Informan 7

¹⁴⁸ Informan 1

BLP menilai itu tidak ada yang menolak, karena itu kewajiban¹⁴⁹. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau tanggapannya bervariasi, mulai dari yang menerima, ada yang sedikit resisten tapi apapun tanggapannya itu harus dilakukan karena itu kan regulasinya kan sudah jelas. Ketika ada perubahan-perubahan mau tidak mau LPSE harus menaati. Kemudian terkait dengan kebijakan pimpinan disini. Dari juklak dan juklisnya kan belum ada jadi memang LPSE hanya menggunakan Perpres saja. Kemudian ketika ada permasalahan teknis di lapangan selama ini LPSE sudah menyampaikan dan tanggapan mereka juga sudah menerima. Jika ada permasalahan LPSE sudah mencoba untuk membantu dan mereka juga menerima serta memahami kondisi yang ada¹⁵⁰. Informan berikutnya menjelaskan bahwa Awal-awal tentu ada yang namanya penolakan itu hanya masalah kebiasaan saja. Dari manual ke sistem. Tapi lambat laun karena ini merupakan perintah aturan perundang-undangan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010. Pada saat LPSE berdiri 2011 sampai dengan sekarang. Diskominfo menilai e-procurement sudah terinternalisasi. Sudah menjadi budaya. Bahwa pengadaan dilakukan melalui *e procurement*¹⁵¹. Adapun informan berikutnya menjelaskan bahwa selama ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal dari diposisi proses lelangnya dari pengadaannya telah transparan dan betul-betul yang dapat adalah pemenang, secara administrasi terpenuhi tidak ada masalah. Arahan dan tanggapannya, Dari SKPD sendiri tidak ada. Karena tidak ada problema¹⁵². Informan selanjutnya menjelaskan bahwa

¹⁴⁹ Informan 2

¹⁵⁰ Informan 3

¹⁵¹ Informan 4

¹⁵² Informan 5

menurut CV Arta arahan dan tanggapan OPD pelaksana sudah cukup bagus. Harapannya untuk memverifikator stand by terus disitu agar menunggu tidak lama. Jadi datang langsung dikerjakan¹⁵³. Serta informan selanjutnya PT Kamajati menilai bahwa untuk LPSE itu sebenarnya konteknya bukan ke arah itu. Intinya LPSE itu sifatnya hanya memfasilitasi sebuah pengadaan, selebihnya biasanya dinas DPU yang mulai dari pengawasan biasanya dari DPU. Terkait pengarahannya, kalau pengarahannya secara langsung, sepertinya belum ada¹⁵⁴.

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan terkait kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Bahwa responnya kalau menurut LPSE cepat¹⁵⁵. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa terkait responnya, karena semuanya wajib *e-procurement*. Jadi memang BLP sebenarnya melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau itu harus *e-procurement*, kalau BLP pengadaan langsung yang nilainya kecil-kecil menggunakan manual itu memang suatu kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan berarti salah. Itu secara otomatis mereka melaksanakan¹⁵⁶. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau intensitas kontrol itu masih sedikit, karena sebagian besar itu yang LPSE lihat masih ada yang belum memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi kalau tadi kembali lagi PPK masih ada yang belum memahami PPK itu sangat penting. Kemudian PPHP kalau yang sekarang administrasi aja kalau dulu memeriksa teknis dan hasil pengerjaannya. Kalau sekarang yang memeriksa teknis hasil

¹⁵³ Informan 6

¹⁵⁴ Informan 7

¹⁵⁵ Informan 1

¹⁵⁶ Informan 2

pengerjaannya itu PPK. PPHP hanya administrasinya saja, ini kadang dari OPD ini belum tahu, padahal sudah beberapa kali sudah mensosialisasikan ataupun menyampaikan. Solusinya harus rutin ada kegiatan rapat koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa minimal 1 tahun sekali¹⁵⁷. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa terkait respon biasanya ketika ada aduan itu masuk LPSE dan kemudian biasanya masuk ke helpdesk ketika helpdesk itu belum bisa menyelesaikan, naik ke tingkat admin. Ketika admin belum juga menyelesaikan, baru naik ke tingkat pimpinan, ketua LPSE. Sikap implementor dinilai sudah nilai baik¹⁵⁸. Informan berikutnya menjelaskan bahwa kontrolnya jelas, pertama ada kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tentu dari awal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal sudah mengkomunikasikan dengan baik dengan LPSE, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal transparan apa adanya. LPSE yang mengetahui detailnya. Untuk sikap implementor sudah tergolong baik¹⁵⁹. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau kontrol intensitas respond OPD pelaksana menurut saya sudah bagus, langsung merespon dengan cepat, sudah baik¹⁶⁰. Serta informan berikutnya menjelaskan bahwa responnya standar. Untuk sikap implementor standar saja, kalau cukup baik kayaknya kurang, masih standar saja. Harapannya ada wadah kritik dan saran dan lebih transparan¹⁶¹

¹⁵⁷ Informan 3

¹⁵⁸ Informan 4

¹⁵⁹ Informan 5

¹⁶⁰ Informan 6

¹⁶¹ Informan 7

V.1.2.4 Struktur birokrasi

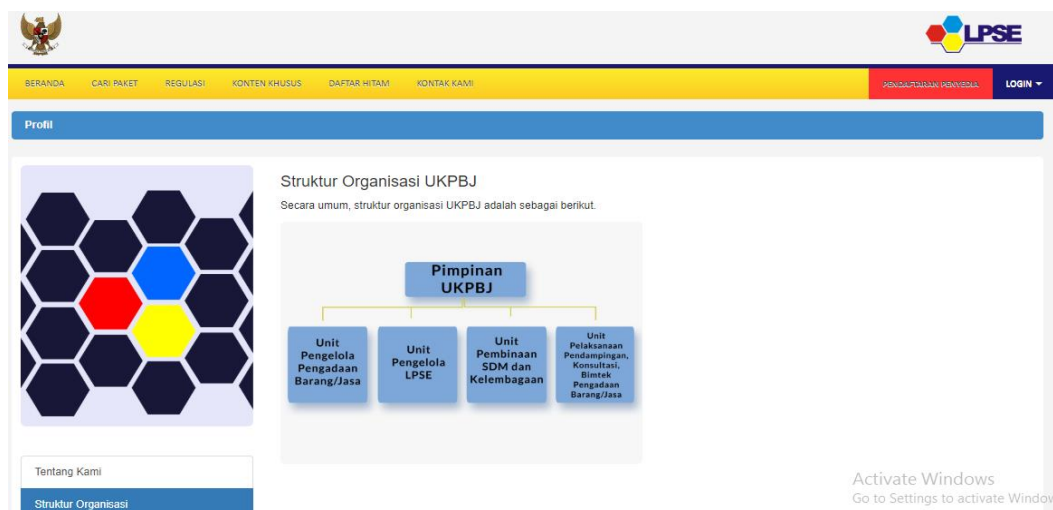
Menurut Teori George C. Edwards III (1980) dalam Dewi, dkk. Dalam struktur birokrasi ini melihat dari segi struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) terkait, pembagian tugas, koordinasi dari para pelaksana kebijakan. Terdapatnya *Standart Operating Procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Selain itu berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi yaitu pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, bahwa sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Sepanjang ini meskipun banyak pembenahan-pembenahan tetap lancar. Kalau kendala tetep ada dalam artian itu perlu ada advokasi pada pengambil kebijakan itu dikarenakan istilahnya belum dipahami secara keseluruhan terkait dengan kebijakan *e-procurement* itu¹⁶². Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kalau unit organisasi, sebenarnya dalam waktu dekat menyesuaikan dengan Permendagri 112 tahun 2018. Jadi dalam waktu dekat bagian pengadaan berubah menjadi bagian pengadaan barang jasa. Dimana perbedaanya LPSE masuk UKPPBJ. Terkait perubahan struktur birokrasi pada masa transmisi regulasi, kalau sekarang belum UKPBJ, karena peraturan yang baru terbit bulan Desember 2018 tapi draf sudah jadi, tinggal di tanda tangani Bupati saja. Kalo sekarang posisinya ditanda tangani Bupati, definitif pejabat

¹⁶² Informan 1

yang ada disitu menjabat yang baru. Tinggal pengesahan, sebenarnya sudah. Kalau membuat organisasi baru ada perhitungan scoring yang dilaksanakan oleh bagian organisasi, itu diverifikasi oleh biro organisasi provinsi, itu sudah dilampaui semua bahkan draf untuk perbupnya sudah ada tinggal tanda tangan. Tetapi bupatinya belum, menunggu momen. Karena juga sudah pertengahan tahun, kalau organisasi yang baru tentu penyesuaiannya kacau. UKPBJ dilaksanakan akhir tahun dengan struktur organisasi yang baru. Dimana bagian layanan pengadaan berubah menjadi bagian pengadaan barang dan jasa. Itu kalau bagian pengadaan barang dan jasa sudah 100% mengadopsi Permendagri 112 tahun 2018. Tetapi untuk sekarang UKPBJ belum dijalankan, untuk realisasinya di akhir tahun 2019¹⁶³.

Gambar V.21
Struktur Organisasi UKPBJ



Sumber: <http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/publik/strukturorganisasi>

Informan berikutnya juga menjelaskan hal yang sama bahwa untuk sekarang sudah jelas struktur organisasinya. Dengan adanya perpres yang baru ada rambu-

¹⁶³ Informan 2

rambu dari LKPP dan Kemendagri karena kabupaten/kota dibawahnya itu kementrian dalam negeri. Di permendagri sudah jelas kalau misalkan perlu dibentuk UKPBJ. UKPBJ itu ada LPSE, ULP dan juga yang menangani yang terkait dengan hukum sanggah dan lainnya. Jadi ketika ada masalah terkait pengadaan barang jasa itu ada subbagian atau bagian yang menangani itu. Jadi sudah cukup kalau melihat dari sisi regulasi terkait organisasi itu sudah dibuatkan desain untuk bagaimana LPSE kedepan itu kemana sudah dibuatkan desain cuma belum dijalankan, tahun depan karena mengganti struktur organisasi karena tidak bisa langsung, harus dievaluasi secara keseluruhan baru ditahapkan menggunakan Perbup¹⁶⁴. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa sudah jelas ada pembagin tugas dan kewenangan jelas di help desk kemudian di admin, kemudian di kesekretariatan dan diketuanya. Masing-masing sudah sesuai dengan job deskripsi dan disinipun tidak ada campur tangan pengguna anggaran, independen untuk pealaksanaan kegiatannnya tidak ada intervensi memenangkan pemenang tertentu. Untuk perubahan struktur organisasi UKPBJ itu belum di Kabupaten Tegal, jadi masih antara bagian layanan pengadaan dan LPSE itu terpisah. Di tahun 2020 struktur itu menjadi satu yang namanya UKPBJ. Jadi unit disini, seksi LPSE disini melebur ke bagian layanan pengadaan UKPBJ disini itu di tahun 2020. Jadi untuk bagaimana proses transformasi yang itu ketika sudah terjadi UKPBJ menyatunya antara LPSE dengan bagian pengadaan, untuk sementara ini belum satu atap¹⁶⁵. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa itu sangat baik, ada LPSE, karena tidak semua SKPD tahu tentang administrasi tata

¹⁶⁴ Informan 3

¹⁶⁵ Informan 4

cara pengadaan dan sebagainya. Saya sangat setuju dibentuk LPSE. Untuk struktur organisasinya sudah jelas, sudah ada¹⁶⁶. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa pihak CV. Arta belum kenal, belum tahu dengan jelas struktur birokrasinya¹⁶⁷. Dan informan selanjutnya juga menjelaskan hal yang sama bahwa pihak penyedia tidak tahu terkait struktur organisasinya. Kalau saya terus terang kurang begitu paham, tapi ngga tahu untuk penyedia jasa yang lain. Bahwa kalau pihak kontraktor bisanya fokusnya lebih ke arah penawaran. Jadi untuk masalah itu harusnya penting, penting bagi PT Kamajati untuk mengetahui, tapi di lapangan jarang memang, arahnya lebih fokus ke arah penawaran semua¹⁶⁸

Selanjutnya terkait pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak LPSE berusaha semaksimal untuk sesuai dengan regulasi¹⁶⁹. Hal yang sama juga dijelaskan oleh informan selanjutnya bahwa pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku¹⁷⁰. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai tapi memang perlu ditingkatkan terkait dengan pedomannya. Jadi masih ada OPD yang mengacu ke pemahaman-pemahaman yang lama Perpres yang lama. Tetapi sejauh ini dari mulai tahun 2018 pertengahan sampai 2019 itu sudah ada terlihat perubahannya. Kalau yang tahun ketika Perpres itu diberlakukan di unit yang lain masih ada kebingungan tapi sekarang yang berkurang tingkat pedomannya

¹⁶⁶ Informan 5

¹⁶⁷ Informan 6

¹⁶⁸ Informan 7

¹⁶⁹ Informan 1

¹⁷⁰ Informan 2

lebih baik hanya saja masih ada yang tidak tahu¹⁷¹. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik di Pepres Nomor 16 tahun 2018 maupun di Peraturan lembaga LKPP¹⁷². Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku¹⁷³. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau dilihat, pihak CV.Arta menilai hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau penyimpangan tidak ada, sudah sesuai dengan peraturan¹⁷⁴. Dan informan selanjutnya dari pihak PT Kamajati menjelaskan bahwa kalau LPSE sesuai peraturan, karena LPSE juga mengeluarkan pengadaannya harus sesuai dengan aturan¹⁷⁵.

Berikutnya peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan terkait koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Bahwa hal tersebut dinilai lancar¹⁷⁶. Informan berikutnya juga menjelaskan bahwa sebenarnya kalau koordinasi BLP bekerja sama dengan bagian pembangunan dan bagian-bagian yang lain yang mengampu beberapa OPD, LPSE sudah intens berkoordinasi dengan bagian-bagian yang lain juga¹⁷⁷. Informan berikutnya menjelaskan bahwa koordinasinya sejauh ini yang terjadi biasanya melakukan rapat koordinasi tetapi tidak menggunakan undangan jadi OPD pelaksana ketika ada permasalahan datang ke LPSE, bertanya kemudian dari LPSE berusaha untuk menjelaskan ataupun memberikan solusi permasalahan

¹⁷¹ Informan 3

¹⁷² Informan 4

¹⁷³ Informan 5

¹⁷⁴ Informan 6

¹⁷⁵ Informan 7

¹⁷⁶ Informan 1

¹⁷⁷ Informan 2

kemudian kalo sudah clear baru OPD itu ke BLP ataupun kadang OPD ke layanan BLP dulu baru ke LPSE, jadi tergantung ada permasalahannya dimana. Tetapi untuk yang rapat yang di undang secara resmi itu jarang, karena permasalahannya tidak sewaktu-waktu, kadang ada kadang tidak ada. Koordinasi dinilai cukup baik, tetapi tidak menggunakan rapat-rapat resmi jadi konsultasi bentuknya seperti ini atau wawancara dari OPD ke LPSE langsung menyampaikan tidak dalam bentuk rapat seperti itu. Sebenarnya perlu diadakan rapat resmi, karena minimal setiap OPD itu ketika membuat rencana pelaksanaan paling tidak dari LPSE dilibatkan karena ketika sudah berjalan dan dipertengahan ada perubahan itu bisa menghambat. Misal awalnya menggunakan tender diganti menggunakan *e-purchasing* atau tender itu metode atau pelaksanaannya ada yang tidak sesuai. Ketika membuat paket PPKnya tidak sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja), cuek dan lainnya. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk menghindari miss komunikasi¹⁷⁸. Informan selanjutnya menjelaskan pula bahwa koordinasi ini khususnya dengan koordinasi dengan bagian layanan pengadaan jelas rutin dilakukan karena itu harus menjadi satu kesatuan walaupun berbeda atap, itu menjadi satu unit kesatuan yang saling menyukseskan terjadinya proses pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk selisih faham tidak ada karena semuanya mengacu ke Perpres pengadaan barang dan jasa. Misalkan mengimplermentasikan SPSE versi 4.3 tidak serta merta LPSE langsung instalasi. Tapi komunikasi dulu dengan bagian pengadaan bahwa sesuai Perpres harus menggunakan aplikasi terbaru. Oleh karena itu bagian pengadaan mengikuti apa

¹⁷⁸ Informan 3

yang menjadi tupoksi dari LPSE. Jadi komunikasi itu terbangun antara bagian layanan pengadaan dengan LPSE khususnya¹⁷⁹. Adapun informan selanjutnya menjelaskan bahwa koordinasinya sangat baik LPSE dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal¹⁸⁰. Dan informan berikutnya menjelaskan bahwa untuk sampai ini koordinasi sudah cukup baik¹⁸¹. Serta informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa PT Kamajati menilai koordinasinya cukup¹⁸².

Terkait keterlambatan penginputan SIRUP, itu salah satu kendalanya OPD input SIRUPnya lama. Kalau dari BLP sebenarnya hanya melayani mereka melelang. Jadi kalo SIRUPnya belum masuk BLP tidak bisa lelang dari OPD yang memilih pekerjaan¹⁸³

Terkait perubahan struktur organisasi, terkait perubahan struktur birokrasi di Kabupaten Tegal saat ini, antara lain yakni dalam proses penggabungan/pembentukan UKPBJ. Perubahan struktur tidak berpengaruh karena tetap berjalan. Untuk Koordinasi BLP & LPSE ada plus minusnya menurut LPSE ini saling mengisi satu sama lain¹⁸⁴. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk struktur organisasi sudah ada rencana, tinggal pengesahan saja karena kalo pergantian susah jadi menghambat pekerjaan. Terutama seperti pengesahan proyek, belum selesai diganti pejabat langsung. Maka dari itu kalau slentingan dari sekitar Bupati akhir tahun dilaksanakan evaluasi organisasi sekabupaten dilaksanakan evaluasi kelembagaan organisasi. Memang kalau

¹⁷⁹ Informan 4

¹⁸⁰ Informan 5

¹⁸¹ Informan 6

¹⁸² Informan 7

¹⁸³ Informan 2

¹⁸⁴ Informan 1

sekarang dilaksanakan sesuai dengan permendagri kurang sesuai¹⁸⁵. Serta informan selanjutnya bahwa struktur birokrasi, kebanyakan belum memahami struktur karena PT Kamajati fokusnya ke bagaimana PT Kamajati mendapat sebuah pekerjaan. Dapat pekerjaan, dengan mudah, persyaratannya harus transparan, ataupun waktu harus sesuai kemampuan kebanyakan penyedia jasa, tidak terlalu mepet ataupun apa. Tapi untuk arah kesitu arahnya kesitu kurang tahu dan kurang tepat¹⁸⁶

Adapun kendala yang disampaikan informan dalam pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Tegal. Jika dulu kendalanya pada infrastruktur, contohnya kerusakan router. LPSE & BLP kerjasama untuk bagaimana mengantisipasi ini. Seperti itu jadi tidak diserahkan ke LPSE saja tapi kami bersama-sama. Untuk miss komunikasi BLP & LPSE, contohnya waktu itu mau sosialisasi, ini yang mau melaksanakan itu LPSE/ULP. Waktu itu sosialisasi tentang Perpres yang baru, tapi akhirnya dengan koordinasi sama-sama melaksanakan, hanya saja sasarannya yang berbeda. ULP mengadakan, LPSE juga mengadakan¹⁸⁷. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa kalau untuk sarpras, yang pertama itu wifi kurang bagus, kalau sarpras pihak BLP ingin temen-temen itu ada semacam desktop pribadi atau laptop satu-satu, jadi bekerja bukan cuma dikantor dimanapun bisa selama ada akses internet. Sebenarnya laptop sudah banyak, hanya kadang rusak, maintenance dan lain sebagainya. Harapan BLP, harapannya prasarana disini semacam desktop, laptop, scanner, printer, atau bahkan cctv. Kalau dokumentasi BLP juga mengharapkan

¹⁸⁵ Informan 2

¹⁸⁶ Informan 7

¹⁸⁷ Informan 1

dokumentasi gambar dan video kadang butuh kamera, dimana pada saat pokja menerima tamu penyedia itu ada rekaman semua, tidak hanya suara tetapi gambar harapan BLP kedepan seperti itu. Jadi manakala itu berkelit, BLP buka aja videonya. Saat ini sebenarnya sudah ada, cuma perlu ditingkatkan lagi. Seperti cctv kan baru didepan, BLP mengharapkan di dalam ruangan, tempat pokja rapat, serta saat pokja menerima tamu itu ada kamera¹⁸⁸. Selanjutnya kendalanya itu kendala teknis, kalau untuk kendala kebijakan, koordinasi itu tidak ada. Kendala teknis itu misalkan server LPSE itu down atau sedang dilakukan maintenance. Itu saja kendalanya disitu. Untuk penyedia itu ada yang namanya pelatihan untuk penyedia juga. Ini e-pengadaan langsung jadi penyedia itu karena belum terbiasa menggunakan e-pengadaan langsung. LPSE mereka sudah, cuma aplikasi pengadaan itu belum. LPSE juga melakukan bimtek untuk penyedia. Memang belum keseluruhan penyedia. Cuma biasanya menggunakan sistem asosiasinya. Pengadaan konsruksi diambil berapa, barang berapa, jasa konsultasi berapa, jasa lain-lainnya berapa. Kalau untuk keseluruhan sangat banyak. Kalau untuk keberatan tidak ada. Keberatan itu biasanya di proses tender di bagian layanan pengadaan. Keseluruhan kendala hanya di teknis¹⁸⁹. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa dalam hal teknis tidak kendala, sudah baik. Servernya sudah bagus. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal sering menggunakan diperpustakaan sendiri orang datang membaca, ada servernya. Jadi tidak ada kendala. Kalau dulu tidak ada LPSE. Saat ada kasus yang Bupati, dimana LPSE berdiri tahun 2011. Kasus itu sepertinya dulu masih pakai konvensional.

¹⁸⁸ Informan 2

¹⁸⁹ Informan 4

Kesimpulannya dari pelaksanaan *e-procurement* dinilai sudah baik¹⁹⁰. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa yang menjadi kendala itu biasanya waktu mendaftar, CV baru yang ingin mendaftar ke website LPSE Kabupaten Tegal tapi masuknya ke website LKPP. Ada kesalahan log in pada waktu pendaftaran, belum paham dari pihak CV atau penyedia. Sudah disosisaliasikan, tapi dari pihak penyedia yang belum paham betul. Kendalanya kebanyakan itu. Untuk kritik dan saran, sarannya buat LPSE Kabupaten Tegal, agar kalau buat yang pendaftaran itu yang di browser biar tulisannya jelas, jadi tidak keliru pada waktu daftar LKPP. Dan terkait penyimpangan pengadaan. Kalau melihat kondisi, kalau dalam pengadilan pasti ada kasus¹⁹¹. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa terkait untuk kendala sebenarnya umum. Biasanya kendala akses masuk, akses penguploadan dokumen, biasanya ada masalah kita harus nunggu beberapa jam, bahkan kadang harus menunggu beberapa hari baru bisa upload. PT Kamajati juga pernah mengalami sama sekali tidak bisa upload, jadi harus secara konvensional, harus kesana menanyakan bagaimana caranya. Sepertinya dulu PT Kamajati pernah konvensional, biasanya membawa dokumen atau apa kalo memang penguploadannya itu susah seringnya error. Servernya biasanya lagi down. Dan dari segi SDM tidak ada kendala PT Kamajati menilai cukup, kendala hanya secara teknis¹⁹².

¹⁹⁰ Informan 5

¹⁹¹ Informan 6

¹⁹² Informan 7

V. 2 Pembahasan

Dari penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang terkait dengan *e-procurement* dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama mengenai *e-procurement* telah dilakukan sebelumnya oleh Kodar Udoyono (2012) mengenai *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota Yogyakarta berisi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas yang mana memang terlihat fisibel tapi tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya *e-procurement*, adanya dukungan pelebagaan *e-procurement*, adanya dukungan dari *stakeholder* terhadap implementasi *e-procurement*, dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan *e-procurement*. Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi *e-procurement* di Kota Yogyakarta tahun 2009 fisibel tetapi tidak akuntabel.

Di dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang oleh Arinda Rosita, dkk mengenai efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten

Bojonegoro) dikatakan kurang efektif karena terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.

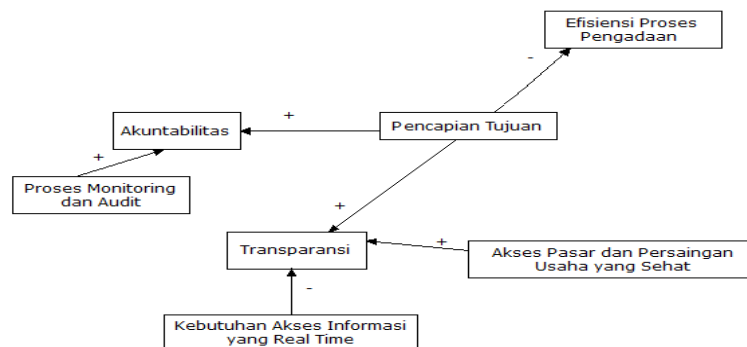
Serta didalam tesis Victoria Sampe Padang (2016) tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tana Toraja yang berisi penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya efektif, diukur berdasarkan pada pendekatan sasaran yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana efektivitas pelaksanaan *e-procurement* dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif, dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah memberikan ruang bagi rekanan dari luar Kabupaten Tana Toraja untuk berpartisipasi namun syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia kadang menyulitkan rekanan untuk berpartisipasi dalam proses tender. Penulis melihat bahwa pencapaian tujuan dari *e-procurement* yang ada dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan efektivitas, namun akses pasar dan persaingan usaha yang sehat belum efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, peneliti membuat penelitian berjudul efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal yang berisi penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tegal oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diukur berdasarkan indikator efektivitas

menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap implementor, dan struktur birokrasi yang tentunya terkait dengan *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

V.2.1 Pencapaian Tujuan

Gambar V.01
Pencapaian Tujuan dalam Aplikasi Powersim



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, bahwa transparansi telah dapat terwujud yakni dengan adanya jadwal lelang, hingga penetapan pemenang lelang dapat diketahui serta rincian lelang beserta realisasi anggarannya terlihat jelas dan rinci dalam website LPSE Kabupaten Tegal dengan mengakses (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang>). Dan untuk mengetahui pendaftaran online *e-procurement* Kabupaten Tegal dapat mengakses (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>), untuk mengetahui

informasi lelang penyedia maupun masyarakat umum dapat mengakses (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang/1977287/pengumumanlelang>), untuk mengetahui jadwal lelang *e-procurement* penyedia maupun masyarakat umum dapat mengakses (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/lelang/1951287/jadwal>), untuk mengetahui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat mengakses (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap17/index/2019/KABUPATEN>), untuk mengetahui pengumuman pemenang tender *e-procurement* dapat mengakses (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/evaluasi/1977287/pemenang>), untuk mengetahui informasi terkait regulasi *e-procurement* dapat mengakses (<https://jdih.lkpp.go.id/>), untuk mengetahui hasil evaluasi tender *e-procurement* dapat mengakses (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/evaluasi/1977287/hasil>), untuk mengetahui hasil monitoring dan evaluasi online melalui TEpra itu para penyedia maupun masyarakat umum (publik) dapat mengakses (<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>), untuk mengetahui informasi rencana paket pengadaan pada *e-procurement* melalui TEpra penyedia maupun masyarakat umum dapat mengakses (<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>). Dan saat penyedia ada kesulitan dalam mengikuti proses *e-procurement* Kabupaten Tegal itu dapat menggunakan fitur tanya jawab yakni LPSE Support yang terbaru pada SPSE 4.3 dengan mengakses (https://eproc.lkpp.go.id/case/admin_case). Ini menunjukkan bahwa semua informasi lelang Kabupaten Tegal sifatnya sudah terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat dan bagi masyarakat umum, sehingga memudahkan masyarakat dan *stakeholders* untuk melakukan

kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk akuntabilitas, adanya Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tegal per-Desember ditiap tahunnya. Dimana laporan ini merupakan bukti pertanggungjawaban dari setiap kegiatan lelang di tiap tahunnya.

Menurut Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 di Bagian Kedua tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 5 bahwa melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Dan pada realitanya hal-hal tersebut telah dilaksanakan pada *e-procurement* Kabupaten Tegal telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan kompetitif yang mana dalam website LPSE Kabupaten Tegal semua informasi pengadaan barang/jasa terlihat jelas dan dapat diakses dengan mudah pada *website* LPSE Kabupaten Tegal (<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc/faqpage>) dalam website ini termuat semua informasi pengadaan barang/jasa bagi publik. Dan untuk akuntabilitas *E-Procurement* Kabupaten Tegal ini, dapat dilihat dari data yang didapatkan pada lapangan yakni data Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tegal per-Desember ditiap tahunnya.

Adapun kendala pada transparansi dan akuntabilitas *e-procurement* diantaranya adalah kendala pertama pada transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan, dan kendala kedua pada server. Kendala pada server seringkali terjadi pada saat mati lampu. Idealnya kalo mati lampu server itu ada sumber energi cadangan, tetapi yang BLP hadapi sekarang kadang kala lampu mati dan server ikut mati karena cadangan genset kurang bisa berfungsi dengan baik. Kendala ketiga, yang

BLP hadapi sekarang itu transmisi regulasi. Dahulu mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 sekarang mengacu pada Perpres No.16 Tahun 2018. Dan yang keempat, pada akuntabilitas, terkendala oleh koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain. Contohnya adalah antara PPK dengan panitia lelang. Jadi misalkan dari perpres yang baru itu yang membuat paket lelang adalah PPKom sementara di Perpres yang lama yang membuat paket lelang/ paket tender itu adalah panitia pengadaan atau panitia pokja pemilihan, karena ada pergantian ini tahun 2018 maka solusinya perlu disesuaikan tugas fungsi antara PPK dan Pokja. Karena ini masa transisi banyak pejabat pembuat komitmen yang masih belum siap untuk membuat pake tender sendiri, sehingga solusinya perlu dibantu oleh tim teknis ataupun pokja sendiri, sehingga ketika PPKom membuat paket terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada beberapa yang harus dievaluasi atas saran dari pokja sehingga ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan sehingga diperlukan rapat ataupun koordinasi teknis terkait dengan rencana umum teknis pengadaan itu sendiri.

2. Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, bahwa dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* Kabupaten Tegal telah melibatkan para pelaku pasar diantaranya adalah para pihak penyedia dari sebuah CV (Commanditaire Venootschap/Perseroan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas) seperti CV Arta yang peneliti temui sedang melakukan verifikasi untuk dapat mengikuti lelang dengan mendatangi LPSE (Layanan Pengadaan Secara

Elektronik), bahwa dari pihak CV Arta melakukan konfirmasi telah mendaftarkan diri secara online dengan membawa persyaratan untuk dapat menjadi penyedia. Adapun PT Kamajati pula yang telah mendaftar di LPSE sebagai peserta lelang/tender. Persyaratan untuk dapat menjadi penyedia dalam mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Tegal, Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.

Persyaratan kualifikasi penyedia ada dalam lampiran Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan yakni sebagai berikut:

- **Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa**

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:

- a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
- b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).

- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- i. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
 - Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
 - Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

➤ Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

➤ **Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:**

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

➤ **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi:

1) Memiliki pengalaman:

- a. Penyediaan barang pada divisi yang sama (Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia Buku) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

➤ **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Lainnya**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:

1) Memiliki pengalaman:

- a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama (Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia Buku) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

- c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

➤ **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

➤ **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, meliputi:

- 1) Memiliki pengalaman;
 - a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b. Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

- c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

3) Memiliki sumber daya manusia:

- a. Manajerial; dan
- b. tenaga kerja (jika diperlukan).

4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan)

➤ **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, meliputi:

1) Memiliki pengalaman:

- a. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
- b. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

2) Jenjang pendidikan;

3) Memiliki sertifikat keahlian/teknis;

4) Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau

5) Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

➤ **Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan**

- a. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.

- b. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

Sesuai dengan Pasal 17 point (1) Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada faktanya ketentuan ini sudah ditaati dari pihak penyedia yang mengikuti CV maupun PT yang dapat memenuhi kualifikasi dari segi barang hingga harga sudah lolos kualifikasi sesuai Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Adapun kendala yang diketahui dari hasil wawancara dan observasi, pada akses pasar dan persaingan usaha yang sehat diantaranya adalah ada kendala

ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Kendalanya saat penyedia belum mengisi SIKAP, maka mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke tawaran-tawaran yang sudah diumumkan pada website. Kendala selanjutnya yakni setelah adanya perubahan regulasi hal ini harus diimbangi dengan sosialisasi. Dari hal tersebut akhirnya muncul kesulitan, karena harus beradaptasi dengan regulasi pengadaan yang baru. PPkom tugas yang baru ini perannya sangat vital sangat penting, mulai dari penyusunan rencana umum pengadaan kemudian pembuatan paket tender/lelang kemudian sampai e-kontrak hingga penetapan pemenang. Berbeda dengan perpres yang dulu Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya itu yang membuat paket itu pokja yang RUP (Rencana Umum Pengadaan) hanya pengguna anggaran disini tentunya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas PPK karena perannya sangat penting bahkan ketika pekerjaan telah selesai yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan baik itu spesifikasi volume dan teknis adalah PPK. Dan dilihat dari segi kinerja, PPK yang bekerja di Kabupaten masih perlu diperbaiki karena banyak PPK yang belum mengerti tugas fungsinya sebagai PPK, sebagaimana tercantum pada Perpres, banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Apalagi terkait tender yang nilainya cukup besar bahkan milyaran rupiah. Ketika PPK memang tidak mengetahui tugas dan pokok fungsinya, saat ada audit maka merepotkan diri PPK tersebut, sehingga solusinya perlu adanya peningkatan ataupun bimtek untuk PPK.

3. Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi dan data yang telah didapatkan dilapangan, *e-procurement* telah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tegal sejak tahun 2011. Sebelum tahun 2011, proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tegal masih menggunakan lelang manual belum berbasis elektronik. Pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2011 ini masih sangat rawan dengan kecurangan, kongkalikong bahkan tindak korupsi, karena rincian anggarannya tidak dapat diketahui/dimonitor oleh publik dan *stakeholder* lainnya, serta memakan waktu lama yakni 36 hari. Pelaksanaan *e-procurement* ini diadakan atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagai upaya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Setelah *e-procurement* ini dijalankan, otomatis seluruh rincian anggaran, jadwal pelelangan bahkan pemenang lelang sudah dapat diketahui secara langsung dalam website LPSE Kabupaten Tegal dan waktu yang dibutuhkan hanya 18 hari. Dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini sudah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai dengan kualitas yang maksimum ini diperkuat oleh Laporan Akhir Tahun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tahun 2017 dan tahun 2018 per-Desember. Jumlah penyedia ditahun 2017 adalah 174 dan di tahun 2018 adalah 138 penyedia. Besarnya efisiensi anggaran pada pelaksanaan *e-procurement* tahun 2017 adalah mencapai 18,03% yakni penghematan anggaran Rp.34.529.407.961 untuk 177 paket (173 paket lelang selesai, 1 paket dalam proses dan 3 paket gagal lelang) dengan jumlah pagu Rp.

818.138.000.000, nilai pagu selesai Rp.226.031.913.362 dan dengan total penawaran Rp. 191.502.505.401. Untuk tahun 2018 terdapat efesiensi 14,20% yakni penghematan anggaran Rp. 27.322.675.773 dari 150 (138 tender selesai, 2 tender cepat, 9 paket rasionalisasi, 1 paket gagal tender) dengan jumlah pagu Rp. 882.746.148.045, nilai pagu selesai Rp.192.414.581.909 dan dengan total penawaran Rp. 165.091.906.136 . Dari data yang diperoleh tersebut, mendapat penjelasan dari informan bahwa untuk prosentase efesiensi dari tahun 2017 dan tahun 2018 menurun itu tidak dapat dikatakan bahwa efesiensinya tidak baik. Di tahun 2017 jumlah paket yang ditenderkan jauh lebih banyak, besarnya efesiensi itu dikarenakan oleh banyaknya paket yang ditenderkan, wajar saja apabila di tahun 2017 lebih besar tingkat efesiensinya. Dan apabila peningkatan efesiensi di haruskan tiap tahunnya, ditakutkan akan berakibat pada hasil akhir pekerjaan, karena dapat berakibat menurunnya mutu pekerjaan atau spesifikasi teknis pekerjaan. Besarnya efesiensi ini dipengaruhi oleh spesifikasi pekerjaan penyedia untuk menawar pekerjaan, artinya penyedia sudah memperhitungkan semua aspek, dari material, tenaga kerja keuntungan dan pajak tanggungan. Dan apabila penawaran banyak penurunan itu dapat menyebabkan pekerjaan tidak selesai karena tidak menguntungkan. Pada intinya efesiensi itu tidak berbanding lurus dengan nilai pagu anggaran, artinya besarnya nilai pagu tidak menjamin meningkatnya efesiensi di tiap tahunnya. Untuk ketepatan waktu itu belum tercapai di tahun 2019 karena ada informasi dari Radar Tegal bahwa ada keterlambatan proses lelang yang mana juga terjadi keterlambatan penginputan anggaran kegiatan/Rencana Umum Pengadaan ditahun 2019 kedalam Sistem

informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Tentu ini berpengaruh pada pada banyak hal dan berpotensi gagalnya pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Bagian Layanan Pengadaan, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 17 tentang Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point d bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyerahan. Namun hal ini berbeda dengan fakta dilapangan, yang mana dalam keterlambatan proses lelang ini dikarenakan terlambatnya OPD/penyedia dalam menyerahkan/menginput Rencana Umum Pengadaan. Ini juga berimbas pada tersendatnya tugas PPK dalam Pasal 11 point 1 huruf (m) PPK bertugas untuk menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan. Tentunya melihat keterlambatan proses lelang ini berpengaruh pada banyak hal dari keterlambatan input RUP kedalam SIRUP. Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 point (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Keterlambatan penginputan RUP berimbas pula tersendatnya tugas PPK, hingga gagalnya kegiatan. Hal ini tentunya perlu dievaluasi kembali oleh pihak pengadaan barang/jasa pemerintah, agar dapat melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada instruksi Kedua yakni (1) menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan secara

transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan (2) menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Adapun kendala yang disampaikan informan terkait tingkat efesiensi proses pengadaan. Antara lain yakni salah satunya keterlambatan Penginputan RUP (Rencana Umum Pengadaan). Yang jadi kendalanya itu karena OPD yang masih terlambat mengentri RUP mengunggah SIRUP. Sehingga jadi mundur waktunya. Kalau SIRUPnya sudah tepat waktu, Desember sudah di unggah, Januari sudah bisa dibuka diikuti oleh penyedia, maka tidak terlambat. Kendala internal itu dari pihak OPD yang terlambat mengentri RUP, itu biasanya mereka itu belum melihat resikonya ketika terlambat mengentri RUP. Serta informan selanjutnya menjelaskan bahwa kualitas pekerjaan di Kabupaten Tegal cukup baik tetapi dari sisi penyediaannya masih perlu ditingkatkan. Karena ketika ada paket-paket yang besar itu ketika terlihat bagus tidaknya itu dari masyarakat itu bisa dibilang cukup sedikit. Ketika ada pembangunan gedung ataupun gapura itu dari desain sudah cukup bagus dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) juga sudah cukup sesuai tetapi ketika pekerjaan tetapi ketika pekerjaan tidak sesuai. Tetapi hal itu tidak menyalahkan proses pengadaanya tetapi penyediaannya yang mengerjakan. Jadi harapannya diluar proses pengadaan itu ada semacam sosialisasi ke penyedia dari pemimpin daerah karena jangan sampai itu yang dicari hanya menang lelangnya

saja tetapi pekerjaan ditinggalkan. Kalau dari proses pengadaannya sudah sukses hanya pelaksanaannya kadang perlu ditingkatkan kualitas sdmnya.

4. Proses Monitoring dan Audit

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan yakni proses monitoring evaluasi pada pelaksanaan *e-procurement* Kabupaten Tegal itu melalui TEPR (Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran). Sejak Tahun 2015 dari TEPR dapat membantu publik ataupun *stakeholder* untuk dapat memantau seluruh serapan anggaran dari lelang tiap tahunnya. Contohnya dengan mengakses (<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D142&tahun=2018>), maka dapat langsung dipantau dan diketahui serapan anggaran ditahun 2018. Dan pada monev (monitoring dan evaluasi) ini dimonitor langsung oleh tim Bappeda dan ketuanya juga dari Bappeda. Untuk pelaksanaan audit *e-procurement* Kabupaten Tegal dilakukan dengan mendatangi langsung LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melakukan uji forensik yakni pemeriksaan pada paket yang dinilai mencurigakan. Proses audit ini dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yakni BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ataupun Inspektorat Kabupaten Tegal dengan didampingi APH (Aparat Penegak Hukum). Selama ini proses monitoring dan audit telah berjalan lancar dan apabila terduga ada penyimpangan maka ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Sesuai Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Pasal 39 point, bahwa (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan Sistem Nilai, Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau

Harga Terendah. Point (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Point (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Metode evaluasi ini sudah dijalankan dalam pelaksanaan *e-procurement* Kabupaten Tegal, yang mana di tahun 2019 ini sudah dapat dipantau disistem monitoring evaluasi online pada *website* TEPPRA (Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran).

Adapun kendala yang disampaikan informan pada proses monitoring dan audit dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Yakni kendalanya pada tahun 2018 dalam monitoring pengadaan langsung itu belum elektronik masih manual hanya ada secara berkala dari APIP dan APH . Serta di tahun 2018 masih terlihat ada kritik dari pihak tertentu pada fitur tanya jawab SPSE 3.0, namun biasanya itu dari pihak LSM yang berkepentingan.

5. Kebutuhan Akses Informasi Yang *Realtime*

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan yakni pada *E-Procurement* Kabupaten Tegal bahwa informasi yang tersedia pada website LPSE selalu update setiap kali ada perubahan karena dari informasi yang didapatkan

bahwa server online 24 jam tetap bekerja setiap hari, dari pihak admin LPSE Kabupaten Tegal dapat dihubungi kapanpun saat penyedia merasa kesulitan, gangguan atau maintenance sistem. Serta akses jaringan yang digunakan pada *e-procurement* Kabupaten Tegal menggunakan jaringan VO-IP (*Voice Over Internet Provider*) dengan bandwidth yang cukup besar sampai 150 Mbps. Dan para pihak penyedia layanan *e-procurement* sudah dapat mengatasi saat ada kendala *networks e-procurement*, salah satunya dengan memberikan informasi kepada pihak penyedia bahwa ada kendala pada jaringan. Dan kalau jaringan itu jarang mati karena LPSE ada SLA (*Service Level Agreement*)/kesepakatan tingkat pelayanan dengan penyedia jasa. Ketika lampu mati LPSE langsung memberi perbaikan dan penanganannya cepat.

Sesuai dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada bab II huruf (d) pembentukan tugas dan fungsi LPSE bahwa penyelenggaraan LPSE didahului oleh dengan kesepakatan tingkat pelayanan (*Service Level Agreement*) antara K/L/D/I dengan LKPP. Berdasarkan peraturan tersebut, pelayanan *e-procurement* LPSE Kabupaten Tegal telah dilakukan perjanjian terlebih dahulu dengan perjanjian SLA (*Service Level Agreement*).

Adapun kendala *e-procurement* yakni kalau orang tidak punya internet itu kendala, selama ada akses internet siapapun dapat mengakses semua informasi pengadaan barang/jasa tersedia pada website LPSE Kabupaten Tegal. Terkadang kendala pada server, itu saja mati lampu tidak terus menerus dua/tiga bulan sekali tidak pasti. BLP menilai untuk akses orang melihat apa yang ada di proses

pengadaan sangat mudah. Informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kendala *e-procurement* secara teknis itu ketika listrik mati. Jadi di LPSE itu sistemnya sistem terdistribusi, dari LKPP membuat aplikasi kemudian mendistribusikannya ketiap tiap daerah. Jadi setiap daerah kab/kota ataupun provinsi itu mempunyai LPSE masing-masing jadi punya server disitu punya pengolahan disitu, untuk di Kabupaten Tegal sendiri karena gensetnya itu belum otomatis terkadang ketika malam hari kena petir atau listrik mati itu tidak bisa langsung hidup harus menunggu besoknya perlu di hidupkan. Solusinya ketika hal itu terjadi maka ada perubahan jadwal lelang yang LPSE sampaikan, LPSE berita acara ke pokja ke panitia lelang atau biasanya ada listrik mati dari jam sekian sampe jam sekian mohon jika memang diperlukan perubahan jadwal maka pokja bisa membuat perubahan jadwal lelang. Jadi misalkan aanwijzing (pemberian penjelasan) dari jam 7 mati bisa diganti keesokan harinya. Pemberian penjelasan (Aanwizjing) dilakukan secara langsung yakni saat penyedia mendatangi kantor LPSE Kabupaten Tegal untuk mempertanyakan persyaratan penyedia maupun kesulitan terkait e-procurement langsung ke kantor LPSE Kabupaten Tegal, makan dari pihak LPSE Kabupaten Tegal akan segera memberikan penjelasan dan segera menanganinya. Serta aanwizjing juga dapat dilakukan secara online yakni penyedia cukup mengirim pertanyaan terkait syarat sebagai penyedia maupun saat penyedia mengalami kesulitan untuk mengikuti *e-procurement* melalui LPSE Support dengan cara mengirim pesan elektronik menggunakan akunnya, dan pihak LPSE Kabupaten Tegal akan menjawab setiap pertanyaan yang dikirim oleh penyedia kecuali untuk substansi pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya.

Gambar V.02
LPSE Support dalam E-Procurement Kabupaten Tegal pada SPSE 4.3

The screenshot displays the LPSE Support Control Panel. The top navigation bar includes 'Tiket Baru', 'Tiket Proses', 'Daftar Tiket', and 'Buat Tiket Baru'. Below this is a table of tickets with columns: No, Nomor Tiket, Tanggal Dibuat, Judul Tiket, Dikirim Oleh, Asal LPSE, and Aksi. The table lists 7 tickets, including issues like 'SATHKIR TIDAK MUNCUL SAAT E-PURCHASING' and 'TAYANG DAFTAR HITAM'. Below the table is a section titled 'Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)' with several questions and answers regarding password resets, server errors, and login issues.

No	Nomor Tiket	Tanggal Dibuat	Judul Tiket	Dikirim Oleh	Asal LPSE	Aksi
1	UC2019031400012	KUSNANTO,S,IP 2019-03-14 08:55:05	SATHKIR TIDAK MUNCUL SAAT E-PURCHASING	KUSNANTO,S,IP	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
2	UC2019022600101	HERIVANTO PRABOWO AJI, ST, ME 2019-02-26 16:07:44	harga nego spse dalam tidak bisa disesuaikan dengan harga nego offline	HERIVANTO PRABOWO AJI, ST, ME	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
3	UC2019041900003	SETIYO RAGIL, A,M,TR 2019-04-19 10:23:29	TAYANG DAFTAR HITAM	SETIYO RAGIL, A,M,TR	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
4	UC2019042200085	ALIMUDIN 2019-04-22 13:34:24	Keluar kode error pada waktu memasukan isian kualifikasi	ALIMUDIN	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
5	UC2019051500053	CV. ADJI PUTRA 2019-05-15 11:16:08	Error saat mengirim syarat kualifikasi	CV. ADJI PUTRA	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
6	UC2019052800066	SUGRIWO SUBALI, CV 2019-05-28 13:14:52	konsultasi	SUGRIWO SUBALI, CV	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket
7	UC2019052900031	Dra SRI WAHYUNINGSIH, MM 2019-05-29 09:24:44	RUP TIDAK MUNCUL PADA SPSE VERSI 4.3	Dra SRI WAHYUNINGSIH, MM	LPSE Kabupaten Tegal	Ambil Tiket

Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Penyedia tidak mendapatkan notifikasi password baru setelah menggunakan fitur "lupa password"

Admin LPSE memastikan konfigurasi mail server pada utility SMTP sama dengan konfigurasi akun mail LPSE Admin LPSE melakukan re-send manual melalui menu utility SMTP Apabila masih belum berhasil admin LPSE melakukan restart aplikasi SPSE (ikuti tata cara penyelesaian dalam SOP error handling). Jika ... [Selengkapnya](#)

Muncul pesan "internal server error"

Data penyedia di SPSE tidak sinkron dengan Inaproc muncul pesan peringatan "Data akun anda tidak tersinkronisasi dengan inaproc" di halaman beranda setelah login.

Pada saat user mengalami kendala dengan pesan error berupa kode error, misal: "7xxxx"

Penyedia tidak bisa login roaming karena belum muncul halaman aktivasi agregasi. TIDAK ada pesan yang muncul.

Penyedia tidak bisa login roaming karena belum muncul halaman aktivasi agregasi. Muncul pesan "Akun anda sedang dalam proses seleksi admin inaproc"

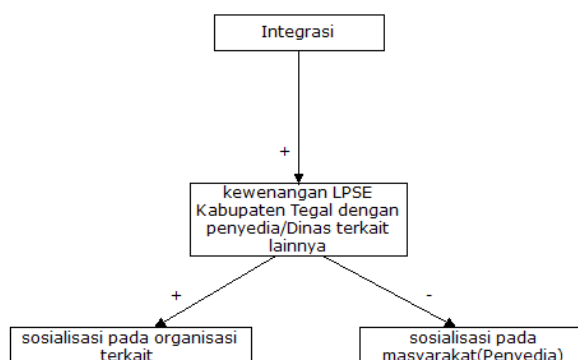
Penyedia dapat login roaming, tetapi tidak bisa login di salah satu LPSE. Selain itu penyedia dapat login di SPSE V3.6 tapi gagal login di SPSE V4 dengan tampil pesan " User id atau password anda salah"

Penyedia dapat login di LPSE terdaftar tetapi tidak bisa login di LPSE lain (tidak bisa roaming)

Sumber: https://eproc.lkpp.go.id/case/admin_case

V.2.2 Integrasi

Gambar V.03
Integrasi dalam Aplikasi Powersim



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, pada

pelaksanaan *e-procurement* Kabupaten Tegal sudah dapat dilakukan secara terintegrasi dengan organisasi lainnya atau dinas-dinas terkait lainnya. Maksud dalam hal ini adalah didalam pelaksanaan *e-procurement* LPSE Kabupaten Tegal dan Bagian Layanan Kabupaten Tegal mampu untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (kesepakatan yang disetujui bersama) dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dari informasi yang diperoleh bahwa dalam hal sosialisasi pihak LPSE Kabupaten Tegal telah mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai upgrade SPSE/ perubahan regulasi, workshop ataupun bimtek SIRUP. Dengan cara mengundang beberapa pelaku pengadaan barang/jasa, antara lain kepada (PA) Pengguna Anggaran, (KPA) Kuasa Pengunna Anggaran, (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, PjPHP/PPHP (pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan), penyelenggara swakelola dan penyedia. Serta sosialisasi *e-procurement* tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana seperti penjelasan diatas, sesuai dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Pasal 3 bahwa Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Dalam hal ini pada pelaksanaannya di *e-procurement* Kabupaten Tegal ,OPD pelaksana yakni LPSE Kabupaten Tegal dan Bagian Layanan Pengadaan mampu berintegrasi dengan para penyedia dan seluruh OPD/dinas yang terkait. Serta pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Bab X mengenai Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasal 69 point (1) bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan

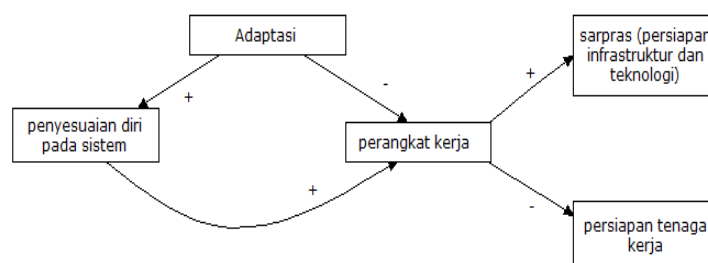
secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, dan point (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung. Peraturan inilah yang mendasari LPSE Kabupaten Tegal melakukan sosialisasi upgrade SPSE terbaru, workshop atau bimtek SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan).

Adapun kendala pada integrasi, diantaranya adalah biasanya pelaku pengadaan yang diundang tidak seluruhnya datang artinya tingkat kehadiran dari yang diundang sosialisasi masih kurang, karena mereka kebanyakan merangkap jabatan. Yang diundang itu pelaku pengadaan, yakni PA (Pengguna Anggaran), Kuasa pengguna Anggaran (KPA), PPK (Pejabat pembuat komitmen), pejabat pengadaan, penyedia, dan admin OPD. Hal yang sama disampaikan pula oleh informan selanjutnya bahwa penyedia susah diundang, BLP mengundang lewat perwakilan dari asosiasi-asosiasi. Ternyata memang asosiasi itu kurang efektif, misalkan BLP menyediakan kursi sosialisasi 100 penyedia hanya dihadiri 80%. Makanya kemarin LPSE masukan dari kami dibuka pengumuman pendaftaran secara online di website, itu juga kurang maksimal. Maka dari itu BLP harus beberapa kali lagi supaya penyedia semuanya familiar jadi dengan apa yang ada di pengadaan barang jasa. Intinya dari integrasi sudah baik, hanya kendala di keaktifan penyedia. Dan informan selanjutnya juga menjelaskan bahwa kendalanya ketika LPSE mengundang peserta itu tidak 100% datang. Jadi misalkan LPSE padahal sudah memberikan jangka waktu tertentu misalkan 1 atau 2 minggu sebelumnya LPSE sudah melayangkan undangan atau bahkan melakukan pendaftaran secara online menggunakan *google spreadsheet* tetapi

ketika dilakukan ada saja yang tidak datang, prosentase kehadirannya sekitar 80/90%. Kendalanya karena yang bersangkutan ada acara atau berhalangan hadir karena satu dan lain hal LPSE kurang mengetahuinya.

V.2.3 Adaptasi

Gambar V.04
Adaptasi pada Aplikasi Powersim



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan di lapangan, OPD pelaksana yakni LPSE Kabupaten Tegal mampu beradaptasi dengan sistem baru, sesuai dengan informasi dari informan bahwa saat ada upgrade sistem SPSE 3.0 ke SPSE 4.3, mereka langsung mengikuti bimtek yang telah diadakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaab Barang/Jasa Pemerintah). Untuk sarpras (persiapan infrastruktur dan teknologi), LPSE Kabupaten Tegal telah menyiapkan berbagai macam infrastruktur LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Diantaranya adalah gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server. Adapun hardware LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Diantaranya adalah komputer, laptop, *scanner*,

printer, wifi/*access point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi. Dan untuk teknologi LPSE ada dua (2) *software* LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal yakni *operating system server* dan jaringan internet (SPSE 4.3). Serta untuk tenaga kerja ada 9 personil anggota LPSE Kabupaten Tegal. Diantaranya terdiri dari ketua, sekretaris, 2 administrator, 3 verifikator, dan 2 helpdesk.

Dengan melihat penjelasan diatas, sesuai Peraturan Bupati No 14 Tahun 2012 terkait Layanan Pengguna SPSE , LPSE Kabupaten Tegal menyiapkan: (a) ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi. Untuk hal ini pihak LPSE sudah menyiapkannya dengan baik. Dan menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pasal 6 bahwa perangkat Organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi kepala, sekretaris, unit administrasi sistem elektronik, unit registrasi dan verifikasi, unit layanan dan dukungan. Dalam hal ini LPSE Kabupaten Tegal telah memenuhinya, hal ini juga sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019. Namun ternyata salah satu personil dari LPSE yakni Sekretaris (Kepala Seksi Infrastruktur TIK) diketahui pada saat wawancara beliau juga merangkap sebagai Pejabat Pengadaan, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2

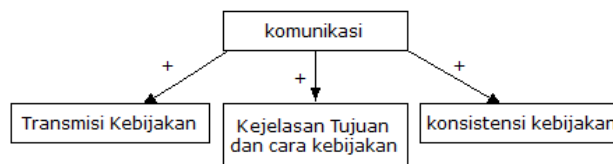
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bab IV Pasal 13 point (3) bahwa pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. Hal ini semestinya harus diperhatikan kembali oleh kepala LPSE maupun Bupati Tegal. Serta adapun menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Kedua terkait Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 5 point (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK bahwa pada huruf (c) memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK. Sedangkan berdasarkan informasi dari pihak Bagian Layanan Pengadaan bahwa dari Tahun 2019 seluruh PPK di Kabupaten Tegal baru sebagian saja yang memiliki sertifikat dan sebagiannya belum. Hal ini perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendorong para PPK agar mempunyai sertifikat pengadaan. Dengan mengirimkan PPK untuk diklat ataupun bimtek agar mendapatkan sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa.

Adapun kendala terkait adaptasi yang disampaikan informan dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Antara lain yakni pertama, kendala ketersediaan anggaran pada OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Kedua, terlalu lama yang menyebabkan waktu yang tersedia terbatas. Tidak ada asumsi bahwa paket itu gagal lelang. Mereka lambat dalam memasukan paket pengadaan yang ditenderkan. Waktu semakin habis, sehingga tidak ada pokja melelang itu menenderkan itu tidak boleh gagal. Itu kendala sebenarnya. Berarti kecepatan mereka mengirimkan paket pengadaan. Padahal kalo pokja kan harusnya jangan dibatasi waktu. Evaluasi supaya benar tentu tidak

bisa dievaluasi sehari itu tidak bisa. Tapi kan karena waktunya terbatas kan terpaksa harus dievaluasi sehari itu. Walaupun kadang ada kesalahan-kesalahan sedikit. Dan yang ketiga, PPK dulunya itu mengabaikan tugasnya sekarang harus dituntut lebih menguasai dari sisi teknis. Karena PPK juga secara teknis harus menginputkan sendiri aplikasi dengan pembuatan RUP, kemudian pembuatan paket, kemudian e-kontrak, lalu kemudian SKPBJ harus PPK sendiri yang menggunakan. Maka adaptasinya sangat besar tantangannya karena sebagian besar PPK terkendala kurang memiliki skill di teknis IT ataupun perkomputeran. Jadi masih ada PPK yang tidak menguasai skill dasar IT seperti mengetik, membuat perencanaan dan seterusnya. Sehingga biasanya dibuatkan tim teknis pendukung PPK. Pembuatan tim teknis PPK tidak langsung bisa dibuat harus ada beberapa kriteria atau beberapa pertimbangan. Ini yang menjadi sedikit menghambat proses adaptasinya. Tahun 2019 ini dari pemerintah Kabupaten Tegal mendorong untuk para PPK agar bisa meningkatkan kapasitas dan menuntut PPK untuk mempunyai sertifikat pengadaan. Dengan mengirimkan diklat ataupun bimtek agar mendapatkan sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa. Jadi syarat untuk menjadi PPK itu ada sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kalau tidak punya sertifikat tidak bisa jadi PPK. Bisa menjadi PPK apabila telah merangkap sebagai pengguna anggaran. Karena jika pengguna anggaran sudah punya sertifikat tetapi kalau dia bukan pengguna anggaran, PPK wajib hukumnya mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa untuk menjadi PPK. Di Kabupaten Tegal sebagian sudah memiliki sertifikat, banyak yang sudah memiliki sertifikat tetapi skill di teknis IT masih kurang.

V.2.4 Komunikasi

Gambar V.05
Komunikasi pada Aplikasi Powersim



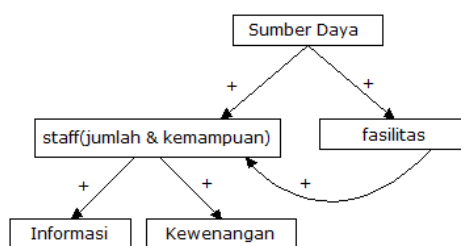
Sumber: Aplikasi Powersim 2019

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, transmisi kebijakan *e-procurement* telah disampaikan kepada para pelaku *e-procurement* Pengguna Anggaran, (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran, (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, PjPHP/PPHP (pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan), penyelenggara swakelola dan penyedia. Penyampaian transmisi kebijakan dituangkan pada website LPSE Kabupaten Tegal, saat ada perubahan regulasi maka langsung dapat diketahui oleh pihak penyedia, LPSE menyampaikan kejelasan tujuan dan cara kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal dengan melakukan sosialisasi SPSE maupun regulasi. Serta dari segi konsistensi komunikasi, LPSE sangat konsisten dalam menanggapi segala kondisi, yakni pada saat pihak penyedia mengalami kesulitan, maka dari pihak LPSE langsung dapat menanganinya. Saat penyedia terjadi masalah langsung dapat menghubungi LPSE atau datang langsung ke kantor LPSE Kabupaten Tegal, maka pihak LPSE Kabupaten Tegal memberi penjelasannya dan segera menanganinya, proses tersebut disebut Aanwijzing (pemberian penjelasan).

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pada bagian ketiga terkait penanganan masalah Pasal 24 point (1) LPSE dapat menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. Dan dalam pelaksanaan *e-procurement* ini pihak LPSE sudah dapat melaksanakan ketentuan tersebut.

V.2.5 Sumber Daya

Gambar V.06
Sumber Daya pada Aplikasi Powersim



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, yakni dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah staff dari LPSE Kabupaten Tegal ada 9 pegawai, yang mana masih dinilai kurang oleh pihak LPSE itu sendiri. Untuk kemampuan staff LPSE Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan yang dibutuhkan yakni para pegawai mampu mengoprasikan microsoft office dan menguasai teknologi dan informasi. Terkait informasi, LPSE Kabupaten Tegal belum memiliki (juklak-juknis) namun semua pelaksanaan *e-procurement* sudah cukup dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta data yang terkait

dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal dimiliki dan disimpan aman sesuai peraturan oleh pihak LPSE Kabupaten Tegal. Terkait kewenangan, saat penyedia terjadi masalah penyedia langsung dapat menghubungi LPSE atau datang langsung ke kantor LPSE Kabupaten Tegal dan pihak LPSE langsung dapat menanganinya. Terkait fasilitas, LPSE Kabupaten Tegal menyediakan fasilitas untuk para penyedia/OPD pengguna SPSE. Fasilitas tersebut adalah gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server. Adapun hardware LPSE yang dapat menunjang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Diantaranya adalah komputer, laptop, *scanner*, printer, wifi/*access point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi.

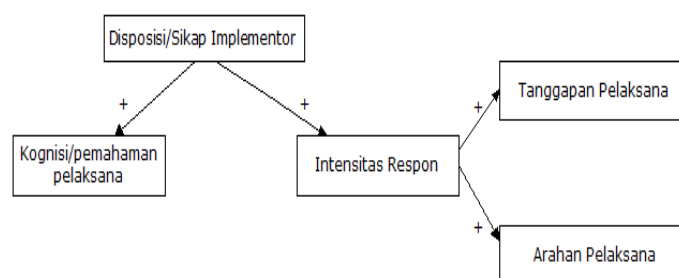
Dengan melihat penjelasan diatas, menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019, 9 personil LPSE Kabupaten Tegal yang dinilai masih kurang itu sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pasal 6 bahwa perangkat Organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi kepala, sekretaris, unit administrasi sistem elektronik, unit registrasi dan verifikasi, unit layanan dan dukungan. Jadi dari 9 anggota LPSE Kabupaten Tegal itu sudah mencakup 5 fungsi penyusunan anggota tersebut. Serta sesuai Peraturan Bupati No 14 Tahun 2012 terkait Layanan Pengguna SPSE,

LPSE Kabupaten Tegal menyiapkan: (a) ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan verifikasi. Untuk hal ini pihak LPSE sudah menyiapkannya dengan baik. Dan menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pada bagian ketiga terkait penanganan masalah Pasal 24 point (1) LPSE dapat menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.

Adapun kendala secara umum pada teknis, yakni terkadang RUP tidak bisa muncul sehingga tidak bisa membuat paket. Kemudian dari penyedia itu biasanya tidak bisa *log in* ataupun tidak bisa terhubung ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) atau kebanyakan penyedia tidak bisa upload dokumen yang terkadang datanya masih tidak sesuai dengan data yang sekarang.

V.2.6 Disposisi/Sikap Implementor

Gambar V.07
Disposisi/Sikap Implementor pada Aplikasi Powersim



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

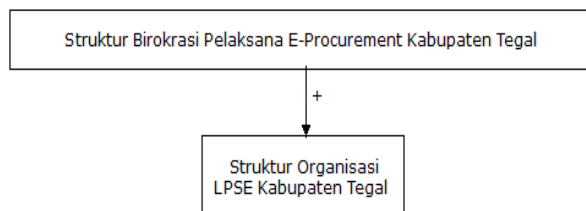
Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, yakni terkait kognisi/pemahaman, LPSE Kabupaten Tegal menanggapi kebutuhan-kebutuhan

penyedia diantaranya penyedia telah mendapat arahan dan tanggapan yang cepat dari pihak LPSE Kabupaten pelaksana saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Terkait intensitas respond, LPSE Kabupaten Tegal dengan intens merespon penyedia dalam bentuk aanwijzing (pemberian penjelasan) baik secara langsung maupun dengan LPSE Support. Pemberian penjelasan (Aanwizjing) dilakukan secara langsung yakni saat penyedia mendatangi kantor LPSE Kabupaten Tegal untuk mempertanyakan persyaratan penyedia maupun kesulitan terkait e-procurement langsung ke kantor LPSE Kabupaten Tegal, maka dari pihak LPSE Kabupaten Tegal akan segera memberikan penjelasan dan segera menanganinya. Serta aanwizjing juga dapat dilakukan secara online yakni penyedia cukup mengirim pertanyaan terkait syarat sebagai penyedia maupun saat penyedia mengalami kesulitan untuk mengikuti *e-procurement* melalui LPSE Support dengan cara mengirim pesan elektronik menggunakan akunnya, dan pihak LPSE Kabupaten Tegal akan menjawab setiap pertanyaan yang dikirim oleh penyedia kecuali untuk substansi pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya.

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pada bagian ketiga terkait penanganan masalah Pasal 24 point (1) LPSE dapat menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. Dan dalam pelaksanaan *e-procurement* ini pihak LPSE sudah dapat melaksanakan ketentuan tersebut.

V.2.7 Struktur Birokrasi

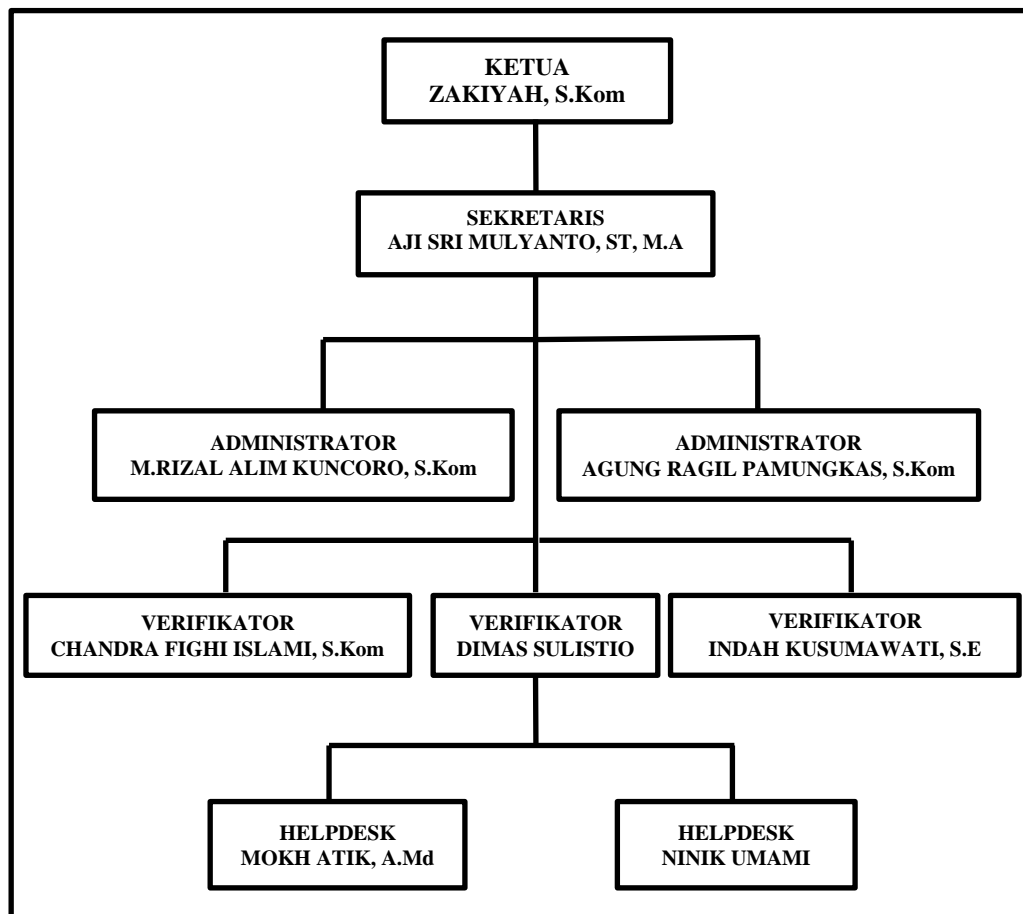
Gambar V.08
Struktur Birokrasi pada Aplikasi Powersim



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dilapangan, yakni LPSE Kabupaten Tegal memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 9 personil anggota LPSE Kabupaten Tegal. Diantaranya terdiri dari ketua, sekretaris, 2 administrator, 3 verifikator, dan 2 helpdesk. Yakni Zakiyah,S.Kom sebagai ketua kepala seksi LPSE, Aji Sri Mulyanto,St.Ma sebagai sekretaris/kepala seksi infrastruktur TIK, M. Rizal Alim Kuncoro, S.Kom sebagai administrator, Agung Ragil Pamungkas,S.Kom sebagai administrator, Chandra Fighi Islami, S.Kom sebagai verifikator, Dimas Sulistio sebagai verifikator, Indah Kusumastuti,S.E sebagai verifikator, Ninik Umami sebagai helpdesk, dan Mokh Atik,A.Md sebagai helpdesk.

Gambar V.09
Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Tegal Tahun 2019



Sumber: Surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Tahun 2019

Di tahun 2019 ini untuk struktur birokrasi yang baru yakni UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) belum dijalankan. Namun draft struktur organisasi UKPBJ sudah ada tinggal menunggu persetujuan Bupati, pada tahun 2020 sudah dijalankan untuk struktur organisasi yang baru. Pembagian tugas LPSE Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan tupoksi dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019. Serta koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal dengan para

pihak penyedia sudah tercipta dengan baik. Contohnya saat ada problema pihak penyedia langsung datang ke LPSE dan langsung ditangani oleh LPSE Kabupaten Tegal.

Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari 9 personil LPSE Kabupaten Tegal terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019. Yang mana dalam hal ini struktur organisasi LPSE ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pasal 6 bahwa perangkat Organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi kepala, sekretaris, unit administrasi sistem elektronik, unit registrasi dan verifikasi, unit layanan dan dukungan. Jadi dari 9 anggota LPSE Kabupaten Tegal itu sudah mencakup 5 fungsi penyusunan anggota tersebut. Sembilan (9) personil LPSE Kabupaten Tegal mempunyai kemampuan menggunakan microsoft office (microsoft word, microsoft excel, dan power point) serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Nomor: 050/ 007/ Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Personil Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

e. Ketua

3. Tugas:

- c. Memimpin Layanan Pengadaan Secara Elektronik agar sesuai tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Merumuskan kebijakan internal terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

4. Fungsi:

- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Bertanggungjawab atas kerahasiaan data dan dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta keberlangsungan dan kelancaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

f. Sekretaris

- 3. Tugas: melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, tata kelola, kerja sama, hubungan masyarakat, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

4. Fungsi:

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kinerja pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- g. Melaksanakan perencanaan internal sesuai kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- h. Penyelenggaraan ketatausahaan, tata kelola, kerja sama, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - i. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai tugas dan fungsi;
 - j. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh staf pendukung.
- g. Koordinator Unit Administrasi dan Sistem Elektronik
3. Tugas: Melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Fungsi:
- h. Penyiapan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - i. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - j. Pengelola kapasitas komponen pendukung layanan;
 - k. Pengelola keamanan informasi layanan;
 - l. Pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sertifikat digital sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dan APIP;
 - m. Pemberian informasi kepada Lembaga Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal;

- n. Pelaksanaan intruksi teknik dari lembaga pengadaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. Koordinator Unit Registrasi dan Verifikasi
3. Tugas: Melaksanakan pengelola registrasi dan verifikasi pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Fungsi:
- g. Pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - h. Penyampaian informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - i. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai syarat pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - j. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - k. Unit registrasi dan verifikasi berhak menyetujui atau menolah pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - l. Unit registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan *user id* dan *password* pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan permintaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan *blacklist* Penyedia Barang/Jasa.

f. Staf Pendukung

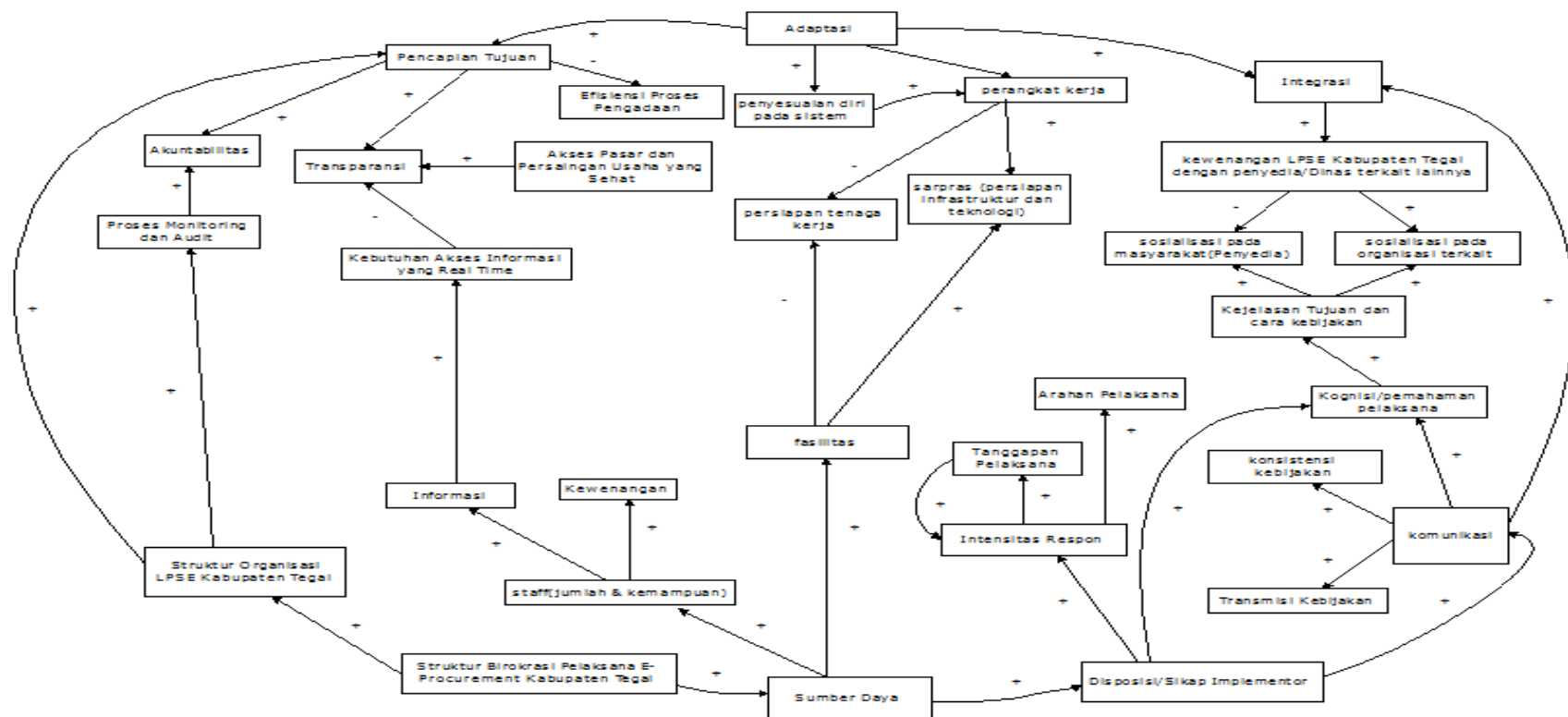
3. Tugas: melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoprasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

4. Fungsi:

- e. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- f. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- g. Penanganan keluhan tentang pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

V.2.8 Efektivitas Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal

Gambar V.10
Efektivitas Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Tegal



Sumber: Aplikasi Powersim 2019

Dari hasil penelitian dan hasil pembahasan sebelumnya, bahwa pada hal komunikasi ini telah dijalankan dengan baik. Yakni sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010, dan untuk kinerja LPSE Kabupaten Tegal sudah maksimal, LPSE dapat menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. Dan selama pengimplementasian e-procurement dalam hal komunikasi itu tidak ada kendala sama sekali. Kemudian terkait sumber daya sudah memenuhi ketentuannya yakni sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010, hanya saja masih ditemukan kendala. Diantaranya adalah kendala secara umum pada teknis, yakni terkadang RUP tidak bisa muncul sehingga tidak bisa membuat paket, kemudian dari penyedia itu biasanya tidak bisa *log in*, penyedia tidak bisa terhubung ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), dan kebanyakan penyedia tidak bisa upload dokumen yang terkadang datanya masih tidak sesuai dengan data yang sekarang. Dan terkait disposisi/sikap implementor ini sudah baik, yakni dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sikap LPSE Kabupaten Tegal sudah dinilai baik oleh informan, dalam hal ini tidak ada kendala sama sekali. Selanjutnya terkait struktur birokrasi ini sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah dijalankan baik.

Pada struktur LPSE Kabupaten personil LPSE yang telah disusun itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan *e-procurement* dan tentunya telah disusun sesuai regulasi yang berlaku. Yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019. Dalam hal struktur birokrasi dalam implementasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal ini tidak ditemukan kendala.

Adapun terkait transparansi dan akuntabilitas *e-procurement* Kabupaten Tegal. hal ini sudah tercipta dengan baik sesuai dengan ketentuan yakni sesuai dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 di Bagian Kedua tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Meski didalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala kecil yang tidak begitu berpengaruh besar pada pengimplementasian *e-procurement* di Kabupaten Tegal. Diantaranya adalah pada transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan, kendala pada server seringkali terjadi pada saat mati lampu, kendala pada transmisi regulasi yakni bila dahulu mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 kini Perpers No.16 Tahun 2018. Lalu kendala pada akuntabilitas, terkendala oleh koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain. Karena ini masa transisi banyak pejabat pembuat komitmen yang masih belum siap untuk membuat paket tender sendiri, terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada yang harus dievaluasi, ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan. Kemudian untuk akses pasar dan persaingan usaha yang sehat telah dapat terwujud dengan baik pada pelaksanaan

pengadaan barang/jasa berbasis elektronik dan sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dari para pelaku pasar yang terlibat ini sudah tepat dan tentunya sudah lolos kualifikasi penyedia. Dari segi barang bahkan harga penawaran sudah dapat berkompetisi dalam akses pasar dan persaingan usaha yang sehat ini. Dalam hal ini masih ada kendala yakni ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), setelah adanya perubahan regulasi yang masih perlu diimbangi dengan sosialisasi, dan banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Terkait tingkat efisiensi pengadaan, dalam proses pengadaan di tahun 2019 mengalami kendala yakni keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang berakibat pada banyak hal hingga gagalnya kegiatan lelang, hal ini menjadikan proses pengadaan dalam *e-procurement* belum dapat dikatakan efisien. Terkait proses monitoring dan audit tahun 2019 ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Karena sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis pelaksanaan dan peraturan yang berlaku yakni sesuai Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Hanya saja di tahun 2018 masih ditemui kendala dalam proses monitoring dan audit ini 2018 monitoring dilaksanakan secara manual oleh APIP dan APH, masih terlihat ada kritik dari pihak tertentu pada fitur tanya jawab SPSE 3.0, namun biasanya itu dari pihak LSM yang berkepentingan. Lalu terkait kebutuhan akses informasi yang realtime masih belum dapat dikatakan baik, karena masih terkendala pada server, itu saja mati lampu tidak terus menerus dua/tiga bulan sekali tidak pasti.

serta LPSE Kabupaten Tegal genset belum otomatis ketika listrik mati itu tidak bisa langsung hidup harus menunggu besoknya perlu di hidupkan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, bahwa untuk pencapaian tujuan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa kendala. Diantaranya adalah kendala pada transparansi dan akuntabilitas diantaranya adalah kendala pada transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan, lalu kendala pada server seringkali terjadi pada saat mati lampu, kendala transmisi regulasi, bila dahulu mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 kini Perpres No.16 Tahun 2018. Serta kendala pada akuntabilitas yakni pada koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain dalam membuat paket tender sendiri karena terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada yang harus dievaluasi, ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan. Dalam hal akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih ada kendala yakni ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia, setelah adanya perubahan regulasi hal ini harus diimbangi dengan sosialisasi, banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting.. Terkait tingkat efesiensi pengadaan, dalam proses pengadaan di tahun 2019 mengalami kendala yakni keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang berakibat pada banyak hal hingga gagalnya kegiatan lelang. Kendala monitoring dan evaluasi yakni saat 2018 monitoring dilaksanakan secara manual oleh APIP dan APH, masih terlihat ada kritik dari pihak tertentu pada fitur tanya jawab SPSE 3.0, namun biasanya itu dari

pihak LSM yang berkepentingan. Serta terkait kebutuhan akses informasi yang realtime masih terkendala pada server karena mati lampu dan genset LPSE Kabupaten Tegal belum otomatis ketika listrik mati itu tidak bisa langsung hidup harus menunggu besoknya perlu dihidupkan.

Untuk hal integrasi ini sudah dapat dikatakan baik, sesuai sebagaimana peraturannya. Meski integrasi sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya, tetapi tingkat kehadiran dari yang diundang sosialisasi masih kurang. Yang diundang itu pelaku pengadaan, yakni PA (Pengguna Anggaran), Kuasa pengguna Anggaran (KPA), PPK (Pejabat pembuat komitmen), pejabat pengadaan, penyedia, dan admin OPD. Pada intinya kendala ini berada di keaktifan penyedia dalam mengikuti sosialisasi masih rendah.

Kemudian terkait adaptasi dalam pelaksanaan *e-procurement* Kabupaten Tegal belum dapat dikatakan baik. Karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Pada adaptasi ini juga masih ditemukan kendala. Diantaranya adalah kendala untuk ketersediaan anggaran OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan, lambatnya penyedia dalam mengirimkan paket pengadaan, pembaruan tugas PPK maka dibutuhkan adaptasi kembali, dan belum seluruh PPK memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Adapun faktor yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan sistem *e-procurement* ini yakni adanya rangkap jabatan pada salah satu personil LPSE Kabupaten Tegal yang menjadi pejabat pengadaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas implementasi pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-*

procurement) di Kabupaten Tegal sudah efektif. Hanya saja masih ada beberapa kendala pada pelaksanaan *e-procurement* ini. Antara lain adalah kendala secara umum pada teknis, yakni terkadang RUP tidak bisa muncul sehingga tidak bisa membuat paket, kemudian dari penyedia itu biasanya tidak bisa *log in* , penyedia tidak bisa terhubung ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), dan kebanyakan penyedia tidak bisa upload dokumen yang terkadang datanya masih tidak sesuai dengan data yang sekarang. Lalu terkendala saat transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan, kendala pada server seringkali terjadi pada saat mati lampu, kendala pada transmisi regulasi yakni bila dahulu mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 kini Perpers No.16 Tahun 2018. Adapun terkendala oleh koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain. Karena ini masa transisi banyak pejabat pembuat komitmen yang masih belum siap untuk membuat paket tender sendiri, terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada yang harus dievaluasi, ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan. Lalu kendala itu terjadi ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), setelah adanya perubahan regulasi yang masih perlu diimbangi dengan sosialisasi, dan banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Dan di tahun 2019 ada keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang berakibat pada banyak hal hingga gagalnya kegiatan lelang, lalu pada proses monitoring dan audit di tahun 2018 monitoring dilaksanakan secara manual oleh APIP dan APH, serta masih terlihat ada kritik dari pihak tertentu pada fitur tanya

jawab SPSE 3.0. Lalu kendala karena minimnya partisipasi pelaku usaha *e-procurement* dalam berbagai undangan sosialisasi, adapun kendala untuk ketersediaan anggaran OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan, keterlambatan OPD/Penyedia dalam menginput RUP (Rencana Umum Pengadaan). Serta ada faktor yang dapat menghambat pelaksanaan *sistem e-procurement* ini yakni pada personil LPSE Kabupaten Tegal merangkap jabatan sebagai Pejabat Pengadaan, dan terkendala pada pembaruan tugas PPK yang masih membutuhkan adaptasi kembali karena sebagian besar PPK terkendala kurang memiliki skill di teknis IT, ketidaksesuaian syarat untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Seperti halnya PPK Kabupaten Tegal belum seluruhnya memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Serta dibutuhkan pembaharuan *hardware e-procurement*, karena ada kerusakan maupun masih dalam proses maintenance. Seperti halnya komputer, laptop, cctv, dan kamera.

V.2.9 Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal

V.2.9.1 Faktor-Faktor Pendukung *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal, terdapat faktor-faktor yang memperlancar implementasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal diantaranya adalah yang pertama, infrastruktur LPSE Kabupaten Tegal yakni gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server. Yang kedua,

hardware LPSE Kabupaten Tegal, antara lain: komputer, laptop, *scanner*, printer, *wifi/acces point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi. Yang ketiga, software LPSE Kabupaten Tegal yakni *operating system server* dan jaringan internet (SPSE 4.3). Yang keempat, Kelengkapan Staff LPSE Kabupaten Tegal, yakni 9 personil anggota LPSE Kabupaten Tegal. Yakni yang terdiri dari ketua, sekretaris, 2 administrator, 3 verifikator, dan 2 helpdesk. Dan yang kelima, kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*, yakni menguasai microsoft office dan menguasai teknologi dan informasi.

V.2.9.2 Faktor–Faktor Penghambat *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal, terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal diantaranya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplementasian *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah efektif. Hanya saja masih ada beberapa kendala pada pelaksanaan *e-procurement* ini. Antara lain adalah kendala secara umum pada teknis, yakni terkadang RUP tidak bisa muncul sehingga tidak bisa membuat paket, kemudian dari penyedia itu biasanya tidak bisa *log in* , penyedia tidak bisa terhubung ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), dan kebanyakan penyedia tidak bisa upload dokumen yang terkadang datanya masih tidak sesuai dengan data yang sekarang. Lalu terkendala saat transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan, kendala pada server seringkali terjadi pada saat mati lampu, kendala pada transmisi regulasi yakni bila dahulu mengacu pada Perpres No.54

Tahun 2010 kini Perpers No.16 Tahun 2018. Adapun terkendala oleh koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain. Karena ini masa transisi banyak pejabat pembuat komitmen yang masih belum siap untuk membuat paket tender sendiri, terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada yang harus dievaluasi, ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan. Lalu kendala itu terjadi ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), setelah adanya perubahan regulasi yang masih perlu diimbangi dengan sosialisasi, dan banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Dan di tahun 2019 ada keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang berakibat pada banyak hal hingga gagalnya kegiatan lelang, lalu pada proses monitoring dan audit di tahun 2018 monitoring dilaksanakan secara manual oleh APIP dan APH, serta masih terlihat ada kritik dari pihak tertentu pada fitur tanya jawab SPSE 3.0. Lalu kendala karena minimnya partisipasi pelaku usaha *e-procurement* dalam berbagai undangan sosialisasi, adapun kendala untuk ketersediaan anggaran OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan, keterlambatan OPD/Penyedia dalam menginput RUP (Rencana Umum Pengadaan). Serta kendala pada salah satu personil dari LPSE yakni Sekretaris (Kepala Seksi Infrastruktur TIK) diketahui pada saat wawancara beliau juga merangkap sebagai Pejabat Pengadaan, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bab IV Pasal 13 point (3) bahwa pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai menjadi

PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, lalu terkendala pada pembaruan tugas PPK yang masih membutuhkan adaptasi kembali karena sebagian besar PPK terkendala kurang memiliki skill di teknis IT, ketidaksesuaian syarat untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Seperti halnya PPK Kabupaten Tegal belum seluruhnya memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Serta dibutuhkan pembaharuan *hardware e-procurement*, karena ada kerusakan maupun masih dalam proses maintenance. Seperti halnya komputer, laptop, CCTV, dan kamera.

V.2.9.3 Solusi untuk Kendala *E-Procurement* Kabupaten Tegal

Solusi untuk Kendala *E-Procurement* Kabupaten Tegal, antara lain adalah admin LPSE mengikuti Bimtek tentang upgrade SPSE dan regulasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang diadakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), LPSE Kabupaten Tegal mengadakan sosialisasi upgrade SPSE dan regulasi untuk penyedia, LPSE Kabupaten Tegal mengadakan sosialisasi/*workshop* tentang SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) untuk penyedia/para pelaku usaha *e-procurement*, LPSE Kabupaten Tegal langsung tanggap untuk membantu menyelesaikan kesulitan penyedia saat mengikuti *e-procurement* di Kabupaten Tegal, diperketatnya kembali proses rekrutment PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), serta LPSE Kabupaten Tegal melakukan pembaharuan *hardware e-procurement*.

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapaaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tegal oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah efektif, diukur berdasarkan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Serta menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Teori George Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang tentunya terkait dengan *e-procurement* di Kabupaten Tegal.

Peneliti melihat bahwa pada penerapaaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal telah efektif, hanya saja masih terdapat kendala pada implementasi *e-procurement* ini, kendala tersebut muncul pada sumberdaya, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Ada 7 hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1) Komunikasi

Dalam komunikasi ini yakni pada transmisi kebijakan telah disampaikan oleh LPSE Kabupaten Tegal baik sosialisasi maupun melalui website *e-procurement*. kejelasan tujuan dan cara kebijakan ini juga sudah disampaikan kepada para pelaku usaha oleh pihak LPSE Kabupaten Tegal, serta konsistensi komunikasi LPSE Kabupaten Tegal dengan penyedia/dinas lain dijalankan sesuai dengan ketentuan.

2) Sumber Daya

Pada sumber daya ini terkait jumlah dan kemampuan staf, informasi, kewenangan serta fasilitas, jumlah staff sudah disusun sesuai kebutuhan dari regulasi yang mengaturnya, untuk kemampuan staff LPSE Kabupaten Tegal sudah menguasai microsoft office dan menguasai teknologi dan informasi. Untuk informasi dan kewenangan sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak LPSE baik dalam penyampaian perubahan regulasi maupun penanganan masalah pada implementasi e-procurement ini, dan terkait fasilitas pihak LPSE Kabupaten Tegal telah dapat menyediakan sesuai dengan ketentuan.

3) Disposisi/Sikap Implementor

Kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu: terkait kognisi/pemahaman pelaksana terhadap kebijakan dari LPSE Kabupaten Tegal sudah memahami setiap ada perubahan baik sistem maupun regulasi *e-procurement*, untuk arahan dan tanggapan LPSE Kabupaten Tegal memberikannya dengan cepat kepada penyedia saat terjadi masalah pada proses *e-procurement*, intensitas respon LPSE Kabupaten Tegal juga telah diberikan dengan intens saat penyedia menanyakan berbagai macam hal terkait pelaksanaan *e-procurement*.

4) Struktur Birokrasi

Dari segi struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) terkait, pembagian tugas, koordinasi dari para pelaksana kebijakan sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan regulasi yang mengaturnya.

5) Pencapaian Tujuan

Untuk pencapaian tujuan ini yakni keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses, dalam hal ini adalah tujuan dari eprocurement itu sendiri. Tujuan dari *e-procurement* tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, tingkat efisiensi proses pengadaan, proses monitoring dan audit, serta kebutuhan akses informasi yang realtime. Dalam pencapaian tujuan ini semaksimal mungkin dicapai oleh pihak LPSE Kabupaten Tegal, hanya saja masih terdapat banyak kendala. Diantaranya adalah kendala pada transparansi dan akuntabilitas yakni kendala pada transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan, lalu kendala pada server seringkali terjadi pada saat mati lampu, kendala transmisi regulasi, bila dahulu mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 kini Perpres No.16 Tahun 2018. Serta kendala pada akuntabilitas yakni pada koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan pelaku pengadaan yang lain dalam membuat paket tender sendiri karena terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada yang harus dievaluasi, ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan. Dalam hal akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih ada kendala yakni ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia, setelah adanya perubahan regulasi hal ini harus diimbangi dengan sosialisasi, banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Terkait tingkat efisiensi pengadaan, dalam proses pengadaan di tahun 2019 mengalami kendala yakni keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan)

yang berakibat pada banyak hal hingga gagalnya kegiatan lelang. Kendala monitoring dan evaluasi yakni saat 2018 monitoring dilaksanakan secara manual oleh APIP dan APH, masih terlihat ada kritik dari pihak tertentu pada fitur tanya jawab SPSE 3.0, namun biasanya itu dari pihak LSM yang berkepentingan. Serta terkait kebutuhan akses informasi yang realtime masih terkendala pada server karena mati lampu dan genset LPSE Kabupaten Tegal belum otomatis ketika listrik mati itu tidak bisa langsung hidup harus menunggu besoknya perlu dihidupkan.

6) Integrasi

Dalam hal integrasi, yakni pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi. Dalam hal ini adalah kewenangan LPSE Kabupaten Tegal dengan penyedia/dinas lain untuk mengadakan sosialisasi, sosialisasi kepada penyedia dan sosialisasi kepada dinas lain. Terkait sosialisasi LPSE Kabupaten Tegal telah mengadakan berbagai macam sosialisasi sistem maupun perubahan regulasi. LPSE Kabupaten Tegal telah melakukan sosialisasi kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dan berjalan dengan lancar. Hanya saja masih rendah tingkat kehadiran peserta sosialisasi.

7) Adaptasi

Untuk adaptasi, yakni kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memfokuskan kepada seberapa jauh organisasi pelaksana dalam menyesuaikan diri dalam pelaksanaan sistem ini, termasuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana dan tenaga kerja. Dalam hal ini

pihak LPSE Kabupaten Tegal mampu beradaptasi dengan SPSE yang terbaru yakni SPSE 4.3, untuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana sudah disesuaikan dengan regulasi dan tenaga kerja sudah sesuai pula dengan regulasi, hanya saja pada pengadaan tenaga kerja perlu diperhatikan kembali karena masih ada pegawai LPSE yang merangkap jabatan sebagai pejabat pengadaan.

V.1.1 Faktor–Faktor Pendukung, Penghambat serta Solusi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal

V.1.1.1 Faktor–Faktor Pendukung *E-Procurement* Kabupaten Tegal

1. Infrastruktur LPSE Kabupaten Tegal yakni gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server.
2. Hardware LPSE Kabupaten Tegal, antara lain: komputer, laptop, *scanner*, printer, wifi/*access point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi.
3. Software LPSE Kabupaten Tegal yakni *operating system server* dan jaringan internet (SPSE 4.3).
4. Kelengkapan Staff LPSE Kabupaten Tegal, yakni 9 personil anggota LPSE Kabupaten Tegal. Yakni yang terdiri dari ketua, sekretaris, 2 administrator, 3 verifikator, dan 2 helpdesk.
5. Kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*, yakni menguasai microsoft office dan menguasai teknologi dan informasi.

V.1.1.2 Faktor–Faktor Penghambat *E-Procurement* Kabupaten Tegal

1. Penyedia tidak bisa membuat paket karena terkadang RUP tidak bisa muncul
2. Penyedia tidak bisa *log in*.
3. Penyedia tidak bisa terhubung ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
4. Penyedia itu belum mengisi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
5. Penyedia tidak bisa upload dokumen karena datanya masih belum sesuai
6. Transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik
7. Server bermasalah pada saat mati lampu
8. Transmisi regulasi
9. Dokumen yang dipersyaratkan masih harus dievaluasi
10. Banyak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mendelegasikan tugas ke staff yang lain
11. Keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan)
12. Proses monitoring dan audit di tahun 2018 manual oleh APIP dan APH
13. Kritik dari pihak yang berkepentingan pada fitur tanya jawab SPSE 3.0
14. Minimnya partisipasi pelaku usaha e-procurement dalam berbagai undangan sosialisasi,
15. Kurangnya ketersediaan anggaran OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan,
16. Rangkap jabatan pegawai LPSE sekaligus Pejabat Pengadaan
17. Pembaruan tugas PPK masih membutuhkan adaptasi

18. Ketidaksesuaian syarat untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK Kabupaten Tegal belum seluruhnya memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
19. Kerusakan dan kurangnya hardware e-procurement. Seperti halnya komputer, laptop, cctv, dan kamera.

V.1.1.3 Solusi untuk Kendala *E-Procurement* Kabupaten Tegal

1. Bimbingan teknis tentang upgrade SPSE dan regulasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang diadakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),
2. Sosialisasi upgrade SPSE dan regulasi untuk penyedia,
3. Sosialisasi/*workshop* tentang SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) untuk penyedia/para pelaku usaha *e-procurement*,
4. LPSE Kabupaten Tegal langsung tanggap untuk membantu menyelesaikan kesulitan penyedia saat mengikuti *e-procurement* di Kabupaten Tegal,
5. Memperketat kembali proses rekrutment PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),
6. Memperbaiki *hardware e-procurement* yang telah mengalami kerusakan

VI.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan mengenai penerapan *e-procurement* di Kabupaten Tegal adalah:

1. Optimalisasi sistem prosedur inputing data RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)/penyedia barang jasa.
2. Optimalisasi *website e-procurement* oleh LPSE Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Kabupaten Tegal dan LPSE Kabupaten Tegal ditingkatkan fasilitas terutama hardware pelaksanaan *e-procurement*.
4. Sistem kontrol oleh Pemerintah kabupaten Tegal khususnya LPSE Kabupaten Tegal agar tidak ada pegawai LPSE Kabupaten Tegal yang merangkap jabatan sebagai pejabat pengadaan.
5. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kabupaten Tegal perlu mengikuti bimbingan teknis ataupun workshop guna peningkatan kemampuan agar tidak ada lagi pendelegasian tugas kepada staff lain.
6. Untuk penyedia, sering mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak LPSE Kabupaten Tegal, baik sosialisasi terkait sistem maupun perubahan regulasi guna memperlancar proses jalannya *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mutiarin, dkk. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Prasetyawan, Yudhi. 2018. *E-Procurement Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Singarimbun, dkk. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta Barat: Pustaka LP3ES Indonesia
- Siswanto, dkk. 2008. *Teori & Perilaku Organisasi*. Malang: UIN-Malang Press
- Steers, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal
- Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tegal
- Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 005/007 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

INTERNET

[https://www.academia.edu/22127028/WORKSHOP_POWERSIM,](https://www.academia.edu/22127028/WORKSHOP_POWERSIM)

http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14

<http://bkd.tegalkab.go.id/main/detail/196601131996032001>

<http://lpse.tegalkab.go.id/eproc4/publik/kontakkami>

<http://semuainfotegal.blogspot.com/2015/10/kebijakan-pembangunan-daerah.html>

<https://tegalkab.bps.go.id/publikasi.html>

<http://utama.tegalkab.go.id/>

<http://utama.tegalkab.go.id/page/profil>

http://utama.tegalkab.go.id/page/view/demografi_20190121082852

http://utama.tegalkab.go.id/page/view/struktur_organisasi_20190306085735

[https://www.pengadaan.web.id/2018/03/10-poin-penting-perbedaan-perpres-no-16-tahun-2018-dengan-perpres-no-54-tahun-2010.html.](https://www.pengadaan.web.id/2018/03/10-poin-penting-perbedaan-perpres-no-16-tahun-2018-dengan-perpres-no-54-tahun-2010.html)

<https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-inpres-percepatan-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>

JURNAL

Kodar,Udoyono. (2012). *E-procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1

Nurchana, dkk. Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355-359.

THESIS

Padang, V.S (2016). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal. Thesis, di publikasikan. Universitas Hasanudin

MEDIA MASSA CETAK

Admin, 2005. Lelang Pasar Margasari Tak Sesuai Perpres, Kabupaten Tegal: Suara Merdeka (13 Juli 2018)

Admin, 2018. Pemkab Tegal Gelar Rakor Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tegal: Koran Tegal. (24 April 2018)

Kinamu, Bare Kingkin. 2018. Pemkab Tegal Tegaskan Kualitas Menjadi Hal Penting dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Kabupaten Tegal: Tribun Jateng (24 April 2018)

Admin, 2019. Hingga Maret, Baru Dua Paket Kegiatan yang Dilelang, Kabupaten Tegal: Radar Tegal (22 Maret 2019)

Admin, 2011. Bupati Tegal Ditahan Terkait Kasus Korupsi Rp 3,9 M, Kabupaten Tegal: Detik News (28 Juni 2011)

Admin, 2018. Rugikan Negara Rp 4,9 Miliar, Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalan Ditahan, Kabupaten Tegal: Radar Tegal (06 Juli 2018)

Admin, 2015. Pengangkatan Ketua Ulp Kab. Tegal Dinilai Cacat Hukum, Kabupaten Tegal: Media Rakyat (4 February 2015)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Judul : EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA
BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI
KABUPATEN TEGAL
2. Petunjuk Pengisian: Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar dengan
sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kondisi
sekarang.
3. Identifikasi Informan:
Nama :
Jenis Kelamin : (L/ P)
Alamat :
.....
.....
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Efektivitas *E-Procurement*

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Pencapaian Tujuan:

(1) Transparansi dan akuntabilitas:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* dilakukan pimpinan secara transparan?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah transparansi *e-procurement* selalu disampaikan oleh atasan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* sebelumnya disosialisasikan secara transparansi oleh pimpinan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* dapat dilaksanakan secara akuntabel oleh bagian/unit yang menyelesaikan tugas pekerjaan?
- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada akhir laporan pelaksanaan *e-procurement* dilakukan oleh pimpinan secara transparan dan akuntabel?

(2) Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* melibatkan para pelaku pasar?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah melibatkan pelaku pasar yang tepat?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah persaingan di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah berlangsung dengan baik?
- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada pelaksanaan *e-procurement* persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik ?
- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

(3) Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah penggunaan dana dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?
- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan dalam *e-procurement* sudah dapat dikatakan efisien?

(4) Proses Monitoring dan Audit:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dengan monitoring pada pelaksanaan *e-procurement*, publik dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa ini?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada monitoring pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sepenuhnya direspon publik dengan baik?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses monitoring dapat melancarkan proses *e-procurement* ?
- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah audit dalam pelaksanaan *e-procurement* telah berjalan dengan baik?
- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses audit dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan regulasi terkait pelaksanaan *e-procurement*?

(5) Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah informasi yang tersedia pada sistem *e-procurement* sudah bisa mencukupi informasi yang tepat dan benar?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah *e-procurement* sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah terdapat kendala pada pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time?
- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses jaringan pada *e-procurement* sudah berjalan lancar?

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah para pihak penyedia layanan *e-procurement* sudah dapat mengatasi kendala pada *networks e-procurement*?

2. Integrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* telah diadakan sosialisasi kepada OPD dan masyarakat?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sosialisasi *e-procurement* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada sosialisasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

3. Adaptasi

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penyesuaian diri OPD pelaksana terhadap pengadaan perangkat kerja (persiapan sarana prasarana & tenaga kerja) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana telah melaksanakan pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal sesuai SOP?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada penyesuaian OPD pelaksana didalam pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

2. Indikator Implementasi Kebijakan:

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?
- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Hasil Wawancara Kepala LPSE Kabupaten Tegal

Nama : Zakiyah, S.Kom (Informan 1)
Jenis Kelamin : P
Alamat : Jl. Prodjo Sumarto II No.19, Rt 10/Rw 02, Bengle
Talang, Kabupaten Tegal
Jabatan : Kepala Seksi LPSE
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal

2. Efektivitas *E-Procurement*

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

3. Pencapaian Tujuan:

(4) Transparansi dan akuntabilitas:

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* dilakukan pimpinan secara transparan?

Jawab:

Ya, sudah. Pelaksanaan *e-procurement* telah dilakukan pimpinan secara transparan.

- g) Bapak/Ibu/Saudara, apakah transparansi *e-procurement* selalu disampaikan oleh atasan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

Jawab:

Ya, sudah. Transparansi *e-procurement* selalu disampaikan oleh atasan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan

- h) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* sebelumnya disosialisasikan secara transparansi oleh pimpinan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

Jawab:

Ya, sudah ada sosialisasi. Pelaksanaan *e-procurement* sebelumnya disosialisasikan secara transparansi oleh pimpinan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan

- i) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* dapat dilaksanakan secara akuntabel oleh bagian/unit yang menyelesaikan tugas pekerjaan?

Jawab:

Ya, sudah. Pelaksanaan *e-procurement* dapat dilaksanakan secara akuntabel oleh bagian/unit yang menyelesaikan tugas pekerjaan

- j) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada akhir laporan pelaksanaan *e-procurement* dilakukan oleh pimpinan secara transparan dan akuntabel?

Jawab:

Ya, sudah. Pada akhir laporan pelaksanaan *e-procurement* dilakukan oleh pimpinan secara transparan dan akuntabel.

Dengan sendirinya karena itu sudah by system, makanya rekapitulasi laporan itu sesuai yang termuat di dalam system itu.

Kendala Transparansi dan akuntabilitas:

Kendalanya itu hanya dari manual ke elektronik/ ke system. Jadi kendalanya itu pengenalan IT-nya kepada para pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu kan ada PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, kemudian ada penyedia barang jasa.

(5) Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat:

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* melibatkan para pelaku pasar?

Jawab:

Ya, dengan sendirinya. Karena disitu disampaikan secara terbuka melalui website dan setiap OPD itu juga harus mengunggah SIRUP-nya. Sehingga setiap pelaku pasar itu yang sesuai dengan kriterianya bisa mengikuti.

- g) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah melibatkan pelaku pasar yang tepat?

Jawab:

Ya, didalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah melibatkan pelaku pasar yang tepat.

- h) Bapak/Ibu/Saudara, apakah persaingan di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah berlangsung dengan baik?

Jawab:

Ya, Alhamdulillah persaingan di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* selama ini sudah berjalan dengan baik

- i) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada pelaksanaan *e-procurement* persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik ?

Jawab:

Ya, persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik

- j) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Jawab:

Ya, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sepanjang ini alhamdulillah sudah semakin lancar ya dan para penyedia pun sudah mulai menyadari karena memang sudah saatnya pelaksanaan/ proses pengadaan barang dan jasa itu by system.

Kendala Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat:

Ya, ada kendala-kendala dimana ketika penyedia itu belum mengisi SIKAP (sistem informasi kinerja Penyedia). Kendalanya disitu kalo mereka belum mengisi itu ya mereka mengalami kesulitan untuk bisa

masuk ke tawaran-tawaran yang sudah di umumkan diwebsite itu, kuncinya disitu.

(6) Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan:

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?

Jawab:

Justru dengan menggunakan system elektronik inilah efesiensi baik secara anggaran maupun secara waktu itu bisa penuh.

- g) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ?

Jawab:

Biasanya itu ketika melalui monevnya kan diketahui secara dini itu kendala-kendala yang muncul adanya keterlambatan segera akan di lakukan antisipasi seperti itu. Keterlambatannya itu biasanya bersifat teknis dilapangan tetapi secara umum 90% tepat waktu. Kecuali kalau paket-paket yang memang besar dan memang disitu ada multy years itu kan memang ada tambahan tahapannya.

Keterlambatan Penginputan RUP:

Yang kadang jadi kendalanya itu karena OPD/ yang masih terlambat mengentri RUPnya, mengunggah SIRUPnya. Sehingga kan akhirnya jadi mundur waktunya. Kalo sirupnya sudah tepat waktu, desember sudah di unggah, januari sudah bisa dibuka diikuti oleh penyedia, ya insyaallah tidak terlambat.

Kendala internal dari pihak OPD terlambat mengentri RUP, itu biasanya mereka itu belum melihat resikonya ketika terlambat mengentri RUP.

- h) Bapak/Ibu/Saudara, apakah penggunaan dana dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

Jawab:

Dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

- i) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

Jawab:

Ya, memang harapannya itu, tujuannya itu dengan e-procurement itu kita akan mencapai tepat sasaran baik anggaran maupun sasaran target itu sendiri

- j) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan dalam *e-procurement* sudah dapat di katakan efesien?

Jawab:

Sudah, proses pengadaan dalam *e-procurement* sudah dapat di katakan efesien.

(5) Proses Monitoring dan Audit:

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dengan monitoring pada pelaksanaan *e-procurement*, publik dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa ini?

Jawab:

Monitoringnya itu lewat TEPRRA (Tim evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran). Di TEPRRA itu disana akan terpantau

langsung karna online. Jadi serapan-serapanya itu bisa dipantau, bisa diketahui.

Ya dapat dimonitor langsung dan itu ada di Bappeda timnya, ketuanya Bappeda.

- g) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada monitoring pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sepenuhnya direspon publik dengan baik?

Jawab:

Alhamdulillah, respon publik baik untuk perkembangan sekarang.

- h) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses monitoring dapat meluncurkan proses *e-procurement* ?

Jawab:

Dengan monitoring ini kita bisa melakukan percepatan, percepatan serapan anggaran pada setiap triwulannya yang harus dicapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan (dapat meluncurkan proses *e-procurement*)

- i) Bapak/bu/Saudara, apakah audit dalam pelaksanaan *e-procurement* telah jalankan dengan baik?

Jawab:

Ya audit itu biasanya dilakukan oleh BPK didampingi oleh Inspektorat. Ya selama ini kami lihat berjalan lancar.

- j) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses audit dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan regulasi terkait pelaksanaan *e-procurement*?

Jawab:

Ya, tentunya berdasarkan dengan Perpresnya, sesuai dengan Perpresnya.

Kendala Proses Monitoring dan Audit:

Kendalanya pd th 2018 pd monitoring pengadaan langsung itu karna belum elektronik masih manual dengan istilahnya dengan pemeriksaan secara berkala dari inspektorat

(6) Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time:

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apakah informasi yang tersedia pada sistem *e-procurement* sudah bisa mencukupi informasi yang tepat dan benar?

Jawab:

Ya, bisa. Karena dengan kita membuka alamat website, itu kita bisa melihat dari sana itu RUPnya bisa diketahui.

- g) Bapak/Ibu/Saudara, apakah *e-procurement* sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa?

Jawab:

Ya. *E-procurement* sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa

- h) Bapak/Ibu/Saudara, apakah terdapat kendala pada pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time?

Jawab:

Biasanya itu kendalanya kadang dari penyedia itu ketika log in, biasanya karena server.

- i) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses jaringan pada *e-procurement* sudah berjalan lancar?

Jawab:

Lancar, hanya kadang karena ini bersifat nasional itu kepadatan pengguna jam-jam padat agak lemot (SIRUP masih nasional blm lokal). Tp bila sudah jam siang sore udh agak lancar lagi.

- j) Bapak/Ibu/Saudara, apakah para pihak penyedia layanan *e-procurement* sudah dapat mengatasi kendala pada *networks e-procurement*?

Jawab:

Bisa, dan biasanya kalo mereka mengalami kesulitan juga dipandu oleh petugas LPSE.

4. Integrasi:

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* telah diadakan sosialisasi kepada OPD dan masyarakat?

Jawab:

Sudah, kami dalam 1 th itu kami melaksanakan sosialisasi atau bimtek itu diawal th dan diakhir th, sesuai dengan perkembangan-perkembangan system yang ada.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sosialisasi *e-procurement* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Jawab:

Ya, sosialisasi *e-procurement* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada sosialisasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kendalanya itu biasanya mereka yang diundang tidak seluruhnya datang (tingkat kehadiran dari yang diundang sosialisasi masih kurang), karena mereka kebanyakan merangkap jabatan. Yang diundang itu pelaku pengadaan, yakni PA, Kuasa pengguna Anggaran (KPA), PPK/PPKOM (Pejabat pembuat komitmen), pejabat pengadaan, penyedia, dan admin OPD.

4. Adaptasi

- d) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penyesuaian diri OPD pelaksana terhadap pengadaan perangkat kerja (persiapan sarana prasarana & tenaga kerja) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ada yang cepat, ada yang lambat. Lambat kendalanya karena mereka belum familiar dengan system elektronik, sehingga mereka mengabaikan (mindset SDM)

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana telah melaksanakan pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal sesuai SOP?

Jawab:

Ya, Pelaksana pengadaan seperti LPSE sama ULP, semua kebutuhan-kebutuhan yang hrs ada sudah di penuhi secara bertahap

- f) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada penyesuaian OPD pelaksana didalam pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kendala ketersediaan anggaran pada OPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

2. Indikator Implementasi Kebijakan:

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Ya, tentunya seperti itu, seperti misalkan kalo memang itu harus ke PPK ya ke PPK, Pejabat pengadaan ya pejabat pengadaan, ke admin SPSE ya ke Admin, (sudah disalurkan dengan baik).

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Itu kami pertama melakukan sosialisasi internal, pembekalan kepada petugas-petugas pengelola LPSE, kemudian ke internal kominfo sendiri, yang ada di kominfo kan paling tidak kan harus mengenal, nah setelah itu baru kita sosialisasikan kepada seluruh OPD dengan metode Bimtek/Sosialisasi.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Konsistensinya ya kita berusaha semaksimal mungkin setiap kali ada perkembangan atau ada perubahan dari LKPP baik itu berubah sistemnya atau regulasinya kita segera sosialisasikan, beritahukan, publikasi.

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

Kalo kemampuan sudah ya, hanya jumlahnya yang masih kurang, kalo kualitas sudah kalo kuantitasnya yang belum. Masih kurang banyak kalo di staff saya itu saja masih butuh 3-4 personil lagi.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ya kita punya Perpresnya, perbupnya ada kemudian SOP-nya, terus kitaa juga punya SLA dari LKPP ada SLA-nya Servis Level Agreementnya ada terus SOP-nya juga kita punya kemudian standarisasi LPSE kita sudah sampai 12 standar tinggal 5 standar lagi untuk mencapai 17 standar. Juklak-Juknis LPSE itu dengan 17 standar yang harus dipenuhi dari sanakan ada di dalamnya SOP yang harus di ikuti, kaya salah satu contohnya di standar 3 itu tentang aset. Nah aset itu harus diapain, data harus di update nah kemudian dicatat resikonya pada standar 4 pencatatannya seperti apa, nah itu seperti itu.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ketika terjadi sesuatu itu kami segera melakukan recheck, nah ketika sudah ditemukan permasalahannya maka segera di instruksikan kepada petugas sesuai dengan kendala yang muncul. Kalo itu bersifat sistem atau SPSE-nya berarti ke admin LPSE, kalo bersifat hardwarenya berarti ke admin agensi.

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Kita memang sedapat mungkin bisa memenuhi aspirasi/ Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni harapan-harapan itu sepanjang memang kan tanggung jawab kami yang harus dipenuhi (ya telah berusaha dalam menanggapi harapan-harapan masyarakat, hanya dengan cara bertahap tidak bisa secara sekaligus)

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sedapat mungkin kita lakukan koordinasi, kemudian kita tampung masukan-masukan dari mereka, keinginan-keinginan mereka, kemudian kita sampaikan tentang perihal apa yang menjadi penolakan mereka artinya sedapat mungkin kita komunikasi yang harmonis, koordinasi dan konsultasi.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Respondnya kalo menurut saya cepat

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sepanjang ini ya meskipun banyak pembenahan-pembenahan, ya Alhamdulillah lancar. Ya kalo kendala tetep ada dalam artian itu perlu ada advokasi pada pengambil kebijakan itu dikarenakan istilahnya belum dipahami secara keseluruhan terkait dengan kebijakan *e-procurement* itu. (sudah jelas struktur organisasinya)

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Kami berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan regulasi.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ya Alhamdulillah lancar. Di kabupaten tegal saat ini dalam proses penggabungan/ pembentukan UKPBJ. Perubahan struktur tidak berpengaruh karena tetap berjalan.

Koordinasi BLP & LPSE ada +- menurut saya saling mengisi. Dulu kendalanya pada infrastruktur, contohnya kerusakan router. Nah kami LPSE & BLP kerjasama untuk bagaimana mengantisipasi ini. Seperti itu jadi tidak diserahkan ke LPSE saja tapi kami bersama-sama.

Miss komunikasi BLP & LPSE, contohnya waktu itu mau sosialisasi, ini yang mau melaksanakan itu LPSE/ ULP. Waktu itu sosialisasi tentang Perpres yang baru, tapi akhirnya dengan koordinasi sama-sama melaksanakan, hanya saja sasarannya yang berbeda. ULP mengadakan, kami mengadakan.

Hasil Wawancara Kepala BLP Kabupaten Tegal

Nama : Dedy Junaedi (Informan 2)

Jenis Kelamin : L

Alamat : Jl. Flamboyan II No. B 16, Perumahan Palm Asri II, Dukuhwaru,
Kabupaten Tegal.

Jabatan : Kasubbag Pengadaan Barang Jasa

Unit Kerja : Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Tegal

1. Efektivitas *E-Procurement*

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Pencapaian Tujuan:

(1) Transparansi dan akuntabilitas:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* dilakukan pimpinan secara transparan?

Jawab:

Sudah dilaksanakan secara transparan. Proses *e-procurement* dimulai dari pengumuman rencana umum pengadaan di SIRUP.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah transparansi *e-procurement* selalu disampaikan oleh atasan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

Jawab:

Kalo kami disini kalau BLP tupoksinya adalah melaksanakan tender untuk semua pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau nilainya diatas 200 juta untuk pekerjaan pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya kita handel. Kalau pekerjaan yang konsultasi diatas 100 juta kita handel. Itu kita sifatnya melayani semua OPD. Jadi OPD-OPD itu meminta kita untuk melakukan proses tender Dengan melaksanakan ketentuan persyaratan yang berlaku. OPD meminta BLP melaksanakan proses tender. Dengan mencukupi persyaratan yang kita minta sesuai dengan ketentuan, setelah persyaratan masuk, baru di blp menentukan kelompok kerja

pengadaan barang jasa untuk melaksanakan proses. Kalau dibilang transparan, BLP sangat transparan sekali. Dibilang transparan dari pertama sudah diumumkan dari SIRUP. Semua yang akan ditenderkan harus diinput dulu dari aplikasi SIRUP yang dimiliki oleh Ikpp. Data ada dizirup, semua data ada di SIRUP. Kalau ternyata data di zirup tidak diupload, kita tidak bisa melayani. Karen semua data pintunya SIRUP dulu. Aplikasi namanya SIRUP tujuannya mengumumkan seluruh paket pengadaan keseluruhan masyarakat baik yang ada di kabupaten tegal sampai semua indonesia. Orang yang ada di kabupaten tegal ataupun seluruh indonesia dapat melihat. Semua bisa liat baik yang ditenderkan ataupun tidak. Orang seluruh Indonesia dapat melihat pengadaan barang, semua OPD akan muncul, baik yang ditenderkan maupun yang tidak, itu muncul. Itu pertanggungjawaban ada disitu. Kalau dari atasan, tentu kita sudah transparansi.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* sebelumnya disosialisasikan secara transparansi oleh pimpinan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

Jawab:

Kalo e-procurement tidak hanya di tahun ini. Dari tahun 2011 sudah dilaksanakan, berdiri 2011. tahun 2012 sudah full, semua paket pengadaan yang ditenderkan itu kesistem semua, memang pada awalnya kan sistemnya manual, antara panitia dan penyedia ketemu face to face. Tetapi pada saat adanya sistem ini antara panitia dan penyedia pada saat klarifikasi, jadi tidak ada komunikasi. Kalau dulu bisa ketemu masuk keruang kecil. Kalau sekarang tidak bisa selama tahapnya masih pembukaan semua belum ada yang tahu.

Kalau sosialisasi, sebelum blp melaksanakan e-procurement sudah melaksanakan sosialisasi. Kalau sekarang sudah dilaksanakan atau sudah pelaksanaan atau implementasi bukan tarafnya sosialisasi.

Sekarang pengadaan barang yang tidak menggunakan sistem itu dilarang. Semua sudah memakai sistem dan harus menggunakan sistem.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* dapat dilaksanakan secara akuntabel oleh bagian/unit yang menyelesaikan tugas pekerjaan?

Jawab:

Sudah akuntabel. Pokja siap seandainya dilaksanakan uji forensik.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada akhir laporan pelaksanaan *e-procurement* dilakukan oleh pimpinan secara transparan dan akuntabel?

Jawab:

Sudah

Kendala: Implementasi, kendala tentu ada. Yang paling sering terjadi kendala diserver. Kita pengadaan barang jasa ini posisi server ada di LPSE. LPSE itu dibawah dinas Kominfo. Itu seringkali terjadi pada saat mati lampu. Idealnya kalo mati lampu server itu ada sumber energi cadangan, jadi tidak ada mati lampu server ikut mati, tetapi yang kami hadapi sekarang kadang kala lampu mati server ikut mati karena cadangan genset kurang bisa berfungsi dengan baik. Kendala kedua, yang kita hadapi sekarang itu perubahan aturan. Kita dulu mengacu pada Perpres no.54 sekarang mengacu pada perpers 16 tahun 2018. Ini memang perlu sosialisasi yang lebih baik kepada kami disini pokja ataupun kepada OPD selaku yang mempunyai pekerjaan atau bahkan kepada semua penyedia sebagai pelaku usaha.

Transparansi dan akuntabel cukup baik. Terkendala pada server dan perubahan regulasi. Perubahan regulasi menyebabkan SPSE diupgrade

lagi.SPSE yang sekarang dipakai yang terbaru 4,3. Sebelumnya versi 4,2 dan 3,6. Itu versi yang sebelumnya sudah dipakai.

Kesulitan yang ditemui, kalau sistem itu kebiasaan. Kalau barang baru kan belum hafal, kalau sudah berjalan tentu dengan beberapa kendala tentu akan terjadi perbaikan

(2) Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* melibatkan para pelaku pasar?

Jawab:

Sudah melibatkan semua pelaku pasar. Tetapi tentu pelaku pasar sendiri harus aktif membuka website kami LPSE Tegal Kab. Karena dengan melihat website tentu mereka akan mengetahui pasar yang tersedia dipemda.

Untuk paket pekerjaan konstruksi, konsultasi, barang/jasa lainnya. Kalau dana kecil.Kita hanya disistem saja, yang dibutuhkan hanya pada saat klarifikasi. Kalau diluar kota kita datang kesana.

Sudah melibatkan para pelaku pasar. Pelaku pasar harus secara aktif melihat website LPSE. Dengan itu akan melihat pasar yang tersedia dipemda baik konstruksi, konsultasi maupun jasa lainnya.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah melibatkan pelaku pasar yang tepat?

Jawab:

Kalau menurut kami, pelaku usaha itu bisa mendaftar sesuai dengan yang mereka mau,tetapi yang mendaftar, mereka juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Kalau ada pemenang itu adalah penyedia barang jasa yang dianggap oleh pokja atau panitia yang memenuhi syarat, administrasi, teknis, kualifikasi, ataupun biaya. Jadi sebenarnya kalau tepat atau tidak penyedia itu yang mendapatkan

pekerjaan menurut kami sudah melaksanakan evaluasi tentu sudah tepat.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah persaingan di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah berlangsung dengan baik?

Jawab:

Kalo akses pasar saya kira semuanya berkesempatan baik untuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal ataupun di Kabupaten sekitar. Karena kita sistem pendaftaran itu secara online. Jadi semua bisa daftar. Tidak Cuma dari kabupaten ini bahkan dari Papua, Aceh dan sebagainya bisa akses pasar disini. Kalau tender menentukan sistem sangat terbuka.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada pelaksanaan *e-procurement* persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik ?

Jawab:

Kalau pesaing usaha yang sehat tentu menurut kami sudah karena sudah melaksanakan evaluasi dari semua penawaran yang masuk. Evaluasi ngga cuma kita lihat harganya tetapi kita lihat teknisnya. Secara teknis mereka punya syarat atau tidak karena harga dilihat paling akhir. Tender itu tidak melulu melihat nilai, nilai yang paling kecil yang menang tidak seperti itu. Tetapi bahwa kita melihat administrasinya dulu, teknisnya dulu, harga terakhir. Bahkan harga pun misal ngga sekonyong-konyong pemenang nomor satu adalah penawar terendah tidak. Tetapi kita lihat penawarannya wajar atau tidak. Misal penawaran itu turunnya lebih dari 20% dari harga perkiraan sendiri itu aja panitia pertanyakan, itu dianggap wajar atau tidak, kalau tidak dianggap wajar maka penawaran itu gagal. Misal ada satu penyedia barang konstruksi, menawarkan harga semen 50 ribu, kita survey dilapangan ternyata harga semen 70 ribu itu tidak bisa kita menangkan karena itu harganya tidak wajar kalau tetap kita

menangkan mereka tidak akan mendapat keuntungan tetapi akan mendapat kerugian.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Jawab:

Kita kalau kita seoptimal mungkin melaksanakan proses pemilihan di bagian layanan pengadaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun itu kadang berbenturan dengan beberapa kepentingan. Karena yang namanya tender itu kaya perlombaan. Peserta tender itu tentu mengharapkan menjadi pemenang. Tetapi yang namanya perlombaan pasti hanya ada satu pemenang.

Kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang pertama dengan aturan yang sudah tersedia. Yang kedua tentu aturan aturan pengadaan barang jasa itu dinamis kadang berubah-ubah. Makanya kita berusaha untuk menyampaikan sesuai aturan yang berlaku karena dinamis banget. jadi aturan yang baru pun kita update.

Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah maksimal.

(3) Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?

Jawab:

Ya Sudah. Kalau dana kecil karna kita disistem saja, kita pakai sistem yang dibutuhkan tentu hanya pada saat klasifikasi. Klasifikasi aja kalau diluar kota kita datang kesana. tetapi kalau dalam daerah kita kecil. Kalau penyediannya hanya sekitar-sekitar sini kan sangat kecil.

Kualitas:

Kualitas kita jaga. Kita sebenarnya sangat menentukan kualitas dari hasil akses pemilihan. Karena kalo kita berkecimpung dalam hal pengadaan tentu kaya kita sedang berjalan di antara dua jurang ya. Kita harus jalan lurus, karena kalo kita agak ke kiri kita jatuh kejurang. Maksudnya kita seringkali berhadapan dengan beberapa kepentingan dengan semua keterampilan mereka pengetahuan mereka mengenai pengadaan barang jasa, jadi kita pada akhirnya balik lagi ke dokumen. Dokumennya kaya apa, itu yang akan kita lalui karena kalau kita tidak sesuai dengan dokumen, itu kepolisian atau kejaksaan yang akan mencari kita. Kita berusaha tetap lurus, fokus, hati-hati.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?

Jawab:

Kalo waktu yang telah ditetapkan kita sebenarnya kalau proses pemilihan tidak ada masalah. Tapi itu kadang kala dari pemilik pekerjaan/ OPD itu lambat melakukan pengadaan yang akan ditenderkan. Kalo dari kami mengeluarkan pokja, paling cepat sehari, paling lambat dua hari. Setelah dua hari nanti ada undangan untuk review dokumen pemilihan. Dalam waktu dekat juga bisa segera ditayangkan.

Kendala:

OPD mengirimkan paket yang akan ditenderkan yang lambat

Dari dana yang minimum ini sudah digunakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah penggunaan dana dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

Jawab:

Kita kalau kualitas sudah optimal, sudah ikhtiar, kalau ada kendala kita konsultasikan dengan LKPD sebagai lembaga tertinggi dalam pengadaan barang jasa.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

Jawab:

Telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan dalam *e-procurement* sudah dapat di katakan efisien?

Jawab:

Secara keseluruhan sudah cukup efisien, kalau pengadaan barang kalau memang segala persyaratan ketentuan, jadwal sudah ada patokannya sendiri-sendiri.

Jadi untuk tingkat efisiensi pengadaan barang jasa sudah baik.

(4) Proses Monitoring dan Audit:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dengan monitoring pada pelaksanaan *e-procurement*, publik dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa ini?

Jawab:

Publik dapat memantau dengan baik dengan cara mengakses website.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada monitoring pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sepenuhnya direspon publik dengan baik?

Jawab:

Kebanyakan yang merespon publik yang punya kepentingan sebagai makelar-makelar yang tidak bertanggungjawab. Kalo masyarakat-masyarakat itu ya jarang. biasanya LSM dan wartawan yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan apalah mengancam-mengancam yang mempunyai visi misi tertentu. Kalau dari masyarakat sudah bisa mengakses tapi jarang.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses monitoring dapat melancarkan proses *e-procurement* ?

Jawab:

Kalau dikami tentu semua masukan dari masyarakat akan ditindak lanjuti. Sebagai koreksi teman-teman Pokja dalam melaksanakan proses pemilihan. Sudah dikatakan lancar.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah audit dalam pelaksanaan *e-procurement* telah jalankan dengan baik?

Jawab:

Audit itu dilaksanakan oleh inspektorat-inspektorat Kab. Tegal itu secara reguler ada audit. Sudah berjalan dengan baik audit.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses audit dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan regulasi terkait pelaksanaan *e-procurement*?

Jawab:

Tentu kalo mereka melaksanakan audit itu membandingkan ketentuan berlaku dengan pelaksanaan. Itu selama ini hasil audit tidak ada sesuatu yang salah dengan kami. Jadi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah informasi yang tersedia pada sistem *e-procurement* sudah bisa mencukupi informasi yang tepat dan benar?

Jawab:

Sudah. Karena kita informasi relevan semua, kalau tender relevan semua.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah *e-procurement* sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa?

Jawab:

Sudah

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah terdapat kendala pada pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time?

Jawab:

Kalo sejauh ini kendala tidak ada, kalau orang tidak punya internet mungkin kendala ya, selama dia bisa mengakses, semuanya tersedia semua.

Kendala:

Server. Itu aja mati lampu kan ngga terus-terusan dua/tiga bulan sekali ngga mesti. Saya kira akses untuk orang melihat apa yang ada di proses pengadaan saya kira sangat mudah.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses jaringan pada *e-procurement* sudah berjalan lancar?

Jawab:

Selama ini berjalan lancar, Cuma kalo wifi yang LPSE kalo sekarang wifinya kurang bagus. Cuma kalo server untuk proses pemilihan lumayan bagus, ini kan kalo mereka kan pakenya jaringannya biznet ya, lumayan baguslah.

Kalo wifi untuk temen-temen pokja disini kadang kalo dari kami kan mengharapkan dari semua proses pemilihan dilaksanakan di jam kerja dikantor, jadi apply adressnya temen-temen itu kan sekarang bermain dengan IT kan tentu apply adress aja kan pilihan. Dimana dia upload, log in ya disini kan tentu akan lebih baik. Cuma kendalanya memang akses wifi dari LPSE sendiri kadang kurang bagus. Bahkan kita malah menggunakan akses wifi yang dari kantor sebelah. Harapan kami ari lpse bisa memperbaiki untuk akses wifi untuk oprasional temen-temen pokja .

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah para pihak penyedia layanan *e-procurement* sudah dapat mengatasi kendala pada *networks e-procurement*?

Jawab:

Kalo kendala saya kira yang mereka rasa itu pada saat upload penawaran, itu saat mereka tidak bisa mereka akan segera kesini meminta bantuan, itu sangat terbuka sekali. Temen-temen LPSE sangat terbuka sekali apabila penyedia membutuhkan bantuan apload untuk penawaran. Terus untuk sebelum penyedia bisa log in, mereka harus melaksanakan pelaksanaan registrasi, dari LPSE juga bagus. Registrasi untuk semua penyedia yang mau mendaftar, update ganti alamat mereka sangat suport, yang penting jika ada kendala ada komunikasi dengan LPSE pasti akan coba dibantu.

2. Integrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* telah diadakan sosialisasi kepada OPD dan masyarakat?

Jawab:

Kalau opd dan masyarakat sudah. Kalo pengadaan barang jasa di masyarakat ya penyedia itu kan. Untuk penyedia kita sudah pernah melaksanakan sosialisasi baik aturan baru ataupun sistem yang baru. Karena kita juga tidak mau melaksanakan proses tender dimana penyedia

tidak bisa menggunakan alat karena kita tender menggunakan alat. Alatnya namanya SPSE versi 4,3. Jadi pada saat kita menjelang akan melaksanakan tender kita akan melaksanakan seoptimal mungkin sosialisasi kepada penyedia bahkan langsung workshop, workshop itu mereka mencoba sistem. Jadi pada saat tayang mereka sudah tidak bingung, mereka bisa.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sosialisasi *e-procurement* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Jawab:

Sudah. Sosialisasi pernah kita laksanakan, LPSE pun juga melaksanakan. Bahkan kita rencana dalam bulan ini juga akan melaksanakan bimtek untuk para PPKom dan jadwal pelaksanaan untuk non tender karena kedepan non tender juga harus masuk sistem.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada sosialisasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kendala ada. Yang pertama, penyedia susah diundang, kita mengundang lewatnya perwakilan dari asosiasi-asosiasi. Ternyata memang asosiasi itu kurang efektif, misalkan kita sediakan kursi sosialisasi 100 penyedia hanya dihadiri 80%. Makanya kemarin LPSE masukan dari kami dibuka pengumuman pendaftaran secara online di website, itu juga kurang maksimal. Makanya mungkin kita harus beberapa kali lagi supaya penyedia semuanya familiar jadi dengan apa yang ada di pengadaan barang jasa. Intinya dari integrasi sudah baik, hanya kendala di keaktifan penyedia.

3. Adaptasi

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penyesuaian diri OPD pelaksana terhadap pengadaan perangkat kerja (persiapan sarana prasarana & tenaga kerja) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau peralatan tergantung kerja, kan kalo penyedia jasa konstruksi yang membuat dari konsultan perencana. Jadi kita serahkan sepenuhnya kalau untuk paket pekerjaan. Kita hanya menerima persyaratan persyaratan yang disusun oleh PPKom. Mereka menyesuaikan diri, kita kalau ada perubahan persyaratan kita kirim surat ke mereka supaya kedepan semua OPD itu sudah tau dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana telah melaksanakan pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal sesuai SOP?

Jawab:

Sudah. Sudah melaksanakan dengan SOP, kalau masuk kekita mereka harus menyesuaikan sesuai dengan SOP

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada penyesuaian OPD pelaksana didalam pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kendalanya terlalu lama yang menyebabkan waktu yang tersedia terbatas. Tidak ada asumsi bahwa paket itu gagal lelang. Mereka lambat dalam memasukan paket pengadaan yang mau ditenderkan. Kan waktu akan semakin habis, sehingga tidak ada pokja melelang itu menenderkan itu tidak boleh gagal. Itu kendala sebenarnya. Berarti kecepatan mereka mengirimkan paket pengadaan. Padahal kalo pokja kan harusnya jangan dibatasi waktu. Evaluasi supaya benar kan tidak bisa kamu evaluasi sehari aja, ngga bisa. Tapi kan karena waktunya terbatas kan terpaksa harus dievaluasi sehari itu. Walaupun ya kadang ada kesalahan-kesalahan sedikit.

2. Indikator Implementasi Kebijakan:

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Kalau sekarang, karena kita sudah melaksanakan *e-procurement* bertahun-tahun, saya kira sudah baik. Kepala perangkat daerah sudah familiar apa yang harus dikerjakan apa yang harus disiapkan pun jadi sudah terbiasa dengan pola seperti itu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ya sebenarnya kalo ditingkat OPD, harusnya OPD biasanya ditarget melaksanakan kebijakan secepatnya, karena itu kan hubungannya dengan realisasi anggaran. Cuma memang terjadi di kita realisasi anggaran agak terhambat, terlambat dikatakan karena persiapan pengadaan barang jasanya kurang bagus. Terutama kalo pekerjaan konstruksi itu belum tersediany DAD gambar, itu yang menyebabkan pekerjaan lambat. Realisasi anggaran masih lambat, karena kelengkapan perencanaan pengerjaan pengadaannya kurang cepat.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Komunikasi karena kita sudah lama itu tidak ada kendala, sudah berjalan dengan baik. Tinggal perlu kita intenskan aja. Tentu target kami

sebenarnya percepatan pengadaan di triwulan pertama. Kalau lain-lain sudah oke semua.

Komunikasi sudah terealisasi dengan baik. Hanya realisasi anggaran yang terlambat, karena perencanaan DADnya belum ada.

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

Kalau dikami masih sangat kurang. Kalo hasil dari hitungan analisa pekerja, kabupaten membutuhkan 12 jabatan fungsional. Kita baru tersedia 3 orang, yang lainnya masih staff biasa.yang akan kami arahkan untuk segera beralih ke fungsional.

- b) Bapak/Ibu/Saudara,apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Belum ada. Juklak dan juknisnya ya perpres itu. Yang secara khusus belum ada, mungkin perlu penata usahaan untuk seluruh lingkup kabupaten tegal itu ada Perbup Penata Usahaan Keuangan, didalamnya juga ada mekanisme pengadaan barang jasa untuk pekerjaan-pekerjaan. Itu mereka OPD tidak buat sendiri. Tapi itu disatukan namanya Perbup Penata Usahaan di tingkat Kabupaten . mereka tidak buat sendiri tetapi diinput disini. Ada peraturan bupati yang dibuat di bagian keuangan.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo problema kita handel sendiri. Kita koordinasi dengan APH karena kalo sekarang proses pengadaan itu kita meminta pendampingan ke

kejaksaan ataupun polisi. Semua paket yang ditenderkan kita minta perbandingan kepada APH jadi kalau ada kendala mengenai perselisihan hukum kita berkoordinasi dengan jaksa ataupun kepolisian.

4. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Kalau kita kan hanya sekedar pelaksana pengadaan aja. Kalo tentang kebutuhan pasar kan memang sudah ada mekanismenya sendiri, mekanisme perencanaan kan ada di musrenbang. Musrenbang itu kan meramu semua keinginan dari masyarakat. Jadi suatu dokumen perencanaan dijadikan suatu dokumen anggaran dan kami eksekutornya disini atau pelaksana. Jadi kalau itu sesuai dengan kepentingan masyarakat itu ranahnya ranah diklat perencanaan di musrenbangnya. Karena kalo kita itu sebenarnya fungsi kita adalah hanya untuk memilihkan penyedia yang mau mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pihak BLP sudah berusaha memahami kebijakan tersebut.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo saya kira tidak ada yang menolak, karena itu kewajiban.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Respondnya karena semuanya wajib *e-procurement*. Jadi memang kita sebenarnya melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalo itu harus *e-procurement*, kalau kita pengadaan langsung yang nilainya kecil-kecil menggunakan manual itu memang suatu kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan berarti salah. Itu secara otomatis mereka melaksanakan.

5. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau unit organisasi, kita sebenarnya dalam waktu dekat akan menyesuaikan dengan permendagri 112 tahun 2018. Jadi dalam waktu dekat bagian pengadaan akan berubah menjadi bagian pengadaan barang jasa. Dimana perbedaanya LPSE akan masuk UKPPBJ.

Perubahan struktur birokrasi pada masa transmisi regulasi:

Kalau sekarang belum UKPPBJ, karena peraturan yang baru kan baru terbit bulan desember 2018, tapi kita draf sudah jadi, tinggal di tanda tangani bupati saja. Kalo sekarang posisinya di tanda tangani bupati, dan efektif pejabat yang ada disitu menjabat yang baru. Tinggal pengesahan, sebenarnya kita sudah. Kalau membuat organisasi baru kan kita ada perhitungan scoring yang dilaksanakan oleh bagian organisasi, itu diverifikasi oleh biro organisasi provinsi, itu sudah kita lampau semua bahkan draf untuk perbupnya sudah ada tinggal tanda tangan. Tetapi bupatinya belum, mungkin menunggu momen. Karena kita juga sudah pertengahan tahun ya, kalo organisasi yang baru kan tentu penyesuaiannya kacau. Mungkin nanti akan dilaksanakan akhir tahun dengan struktur

organisasi yang baru. Dimana bagian layanan pengadaan akan berubah menjadi bagian pengadaan barang dan jasa. Itu kalo bagian pengadaan barang dan jasa sudah 100% mengadopsi permendagri 112 tahun 2018. Tetapi kalau faktual sekarang belum, Cuma mungkin akhir tahun. Realisasinya nanti.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Ya, sudah

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sebenarnya kalau koordinasi kita bekerja sama dengan bagian pembangunan dan bagian-bagian yang lain yang mengampu beberapa OPD kita sudah intens berkoordinasi dengan bagian-bagian yang lain juga.

Untuk struktur organisasi sudah ada rencana, tinggal pengesahan saja karena kalo pergantian susah jadi akan menghambat pekerjaan. Terutama kaya pengesahan proyek, belum selesai diganti pejabat langsung. Makanya mungkin kalo slentingan dari sekitar Bupati mungkin akhir tahun akan dilaksanakan evaluasi organisasi sekabupaten akan dilaksanakan evaluasi kelembagaan organisasi.

Memang kalau sekarang dilaksanakan sesuai dengan permendagri kurang sesuai.

Keterlambatan penginputan SIRUP:

Ya itu salah satu kendalanya OPD input SIRUPnya lama. Kalau dari kita kan sebenarnya hanya melayani mereka melelang. Jadi kalo SIRUPnya belum masuk kita tidak bisa lelang dari OPD yang pemilih pekerjaan.

Kalau untuk sarpras:

Yang pertama itu wifi kurang bagus,kalo sarpras saya inginnya temen-temen itu ada semacam desktop pribadi atau laptop satu-satu, jadi kan bekerja bukan cuma dikantor dimanapun bisa selama ada akses internet. Sebenarnya laptop sudah banyak, cuma ya namanya kadang rusak, maintenance dan lain sebagainya.

Harapan:

harapannya prasarana disini semacam kaya desktop, laptop, scanner, printer, atau bahkan cctv. Kalo dokumentasi kami juga mengharapkan dokumentasi gambar dan video kadang kan butuh kamera, dimana pada saat pokja menerima tamu penyedia itu ada rekaman semua, ngga cuma suara tetapi gambar harapan kami kedepan seperti itu. Jadi manakala itu berkelit, kita buka aja videonya.

Saat ini sebenarnya sudah ada, cuma perlu ditingkatkan lagi. Seperti cctv kan baru didepan, kalo kami mengharapkan di dalam ruangan,tempat pokja rapat, pokja menerima tamu itu ada kamera cctv.

Hasil Wawancara Admin LPSE Kabupaten Tegal

Nama : M. Rizal Alim Kuncoro, S.Kom (Informan 3)

Jenis Kelamin : L

Alamat : Slawi-Kulon Rt 01/ Rw 02
Kecamatan Slawi. Kabupaten Tegal.

Jabatan : Pranata Komputer (Admin LPSE)

Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal

1. Efektivitas *E-Procurement*

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Pencapaian Tujuan:

(1) Transparansi dan akuntabilitas:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* dilakukan pimpinan secara transparan?

Jawab:

Selama tahun 2011 sampai tahun 2019 pertengahan ini kalo menurut saya sebagai admin di LPSE dan pranata komputer Diskominfo selaku pemegang sistem. Maksudnya adalah yang mengatur atau pun menambahkan paket kegiatan layanan lelang atau tender itu sudah cukup transparan karena masyarakat bisa memantau secara realtime jadwal pelaksanaan tender atau lelang yang berlangsung, misalkan jadwalnya sekarang upload dokumen, pembukaan dokumen, pemberian penjelasan sampai nanti penetapan pemenang.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah transparansi *e-procurement* selalu disampaikan oleh atasan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

Jawab:

Ya selalu disampaikan setiap periodik minimal 6 bulan sekali tetapi dari kami biasanya ada laporan secara tertulis setiap ² bulan

disampaikan kepada kepala dinas dan kemudian nanti dari kepala dinas menyampaikan ke pimpinan daerah/ bupati atau wakil bupati.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* sebelumnya disosialisasikan secara transparansi oleh pimpinan dalam rangka penyelesaian tugas pekerjaan?

Jawab:

Sudah jadi kalo sosialisasi udah setiap tahun karena regulasi dari pengadaan barang dan jasa pemerintah itu biasanya dinamis, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan di setiap daerah. Jadikan kalo *e-procurement* ada banyak ya, ada tender kemudian ada e-purchasing, ada pengadaan langsung secara elektronik jadi setiap tahun kita dari LPSE Kabupaten Tegal itu selalu memberikan sosialisasi kepada Dinas atau OPD untuk mengupdate data informasi terkait dengan regulasi dan teknis pengadaan barang jasa pemerintah

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pelaksanaan *e-procurement* dapat dilaksanakan secara akuntabel oleh bagian/unit yang menyelesaikan tugas pekerjaan?

Jawab:

Ya dilakukan secara akuntabel karena prosesnya terbuka kemudian nanti disitu juga ada negosiasi ataupun pemilihan secara fair ya dari penyedia barang, melakukan negosiasi ke panitia pengadaan atau panitia lelang nanti penyedia barang yang gugur juga tau kenapa alasannya gugur jadi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan dapat diaudit melalui sistem jadi ketika ada APIP atau APH yang ingin mengaudit paket lelang tertentu atau paket tender tertentu dapat menghubungi ke LPSE untuk menunjuk paket mana yang akan diaudit dengan membawa surat perintah tugas jadi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kendala untuk akuntabilitas: kendalanya mungkin biasanya yang pertama adalah koordinasi antara pelaku pengadaan yang satu dengan

pelaku pengadaan yang lain. Contohnya adalah antara PPK dengan panitia lelang. Jadi misalkan dari perpres yang baru itu yang membuat paket lelang adalah PPKOM sementara di Perpres yang lama yang membuat paket lelang/ paket tender itu adalah panitia pengadaan atau panitia pokja pemilihan, nah karena ada pergantian ini tahun 2018 maka perlu di sesuaikan tugas fungsi antara PPK dan Pokja. Karena ini masa transisi banyak pejabat pembuat komitmen yang masih belum siap untuk membuat pake tender sendiri, sehingga perlu dibantu oleh tim teknis ataupun pokja sendiri, sehingga ketika PPKOM membuat paket terkadang dokumen yang dipersyaratkan ada beberapa yang harus dievaluasi atas saran dari pokja sehingga ini terkadang memperlambat waktu proses pengadaan sehingga diperlukan rapat ataupun koordinasi teknis terkait dengan rencana umum teknis pengadaan itu sendiri.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada akhir laporan pelaksanaan e-procurement dilakukan oleh pimpinan secara transparan dan akuntabel?

Jawab:

Ya, ketika nanti paket tender atau lelang selesai nanti seluruh masyarakat bahkan diluar kabupaten tegal pun bisa melihat rekapitulasi proses pelelangan dari mulai pengumuman sampai penetapan pemenang. Dan PPK juga melaporkan ke Pengguna Anggaran dan pengguna anggaran juga nanti kelak akan ada laporan di tingkat kabupaten namanya POK, laporan (Pelaksana Operasi Kegiatan)

(2) Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* melibatkan para pelaku pasar?

Jawab:

Sejauh ini dari LKPP sendiri sudah mengembangkan cukup banyak untuk akses pasar bahkan mendorong tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) mendorong untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) atau usaha kecil mikro menengah untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal katalog sektoral ataupun katalog lokal jadi di setiap kabupaten kota itu LKPP memberikan kesempatan untuk memberikan peluang kepada penyedia lokal agar barangnya bisa muncul di katalog nasional walaupun dari sisi tender ataupun lelang juga pokja juga tidak satlek untuk memberikan kriteria usaha yang besar tetapi bisa juga yang usaha kecil ataupun mikro menengah.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah melibatkan pelaku pasar yang tepat?

Jawab:

Ya, sudah melibatkan karena tidak mungkin penyedia barang misal penyedia mebel itu mengerjakan pembangunan, tidak mungkin penyedia pembangunan misalkan dari pihak kantor menyediakan peralatan komputer, karena dari kantor itu sudah jelas ketika mau ada proses tender itu juga persyaratannya sudah jelas. Kan ada namanya anwijzing (pemberian penjelasan) sehingga udah sesuai dengan kegiatan ini untuk pelaku usaha seperti ini.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah persaingan di dalam akses pasar pelaksanaan *e-procurement* sudah berlangsung dengan baik?

Jawab:

Sejauh ini sudah berlangsung dengan baik karena setiap tahun kita mengadakan sosialisasi ke asosiasi jasa konstruksi ke penyedia barang

yang mendaftar di LPSE dan juga kita publikas websitenya LPSE bagi penyedia barang atau pelaku usaha yang membutuhkan informasi atau bahkan bimbingan teknis dan pelatihan terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah di wilayah kabupaten Tegal.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada pelaksanaan *e-procurement* persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik ?

Jawab:

Pelaksanaan *e-procurement* persaingan usaha yang sehat sudah tercipta dengan baik

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses pasar dan persaingan usaha yang sehat sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Jawab:

Sejauh ini sudah karena sudah sesuai dengan kriteria-kriteria.

Kalau percepatan dan regulasi itu sudah karena informasi pengadaan itu bisa diakses dimanapun ada berada asalkan ada koneksi internet. Jadi sudah bisa diakses melalui mobile application ataupun nanti melalui website, jadi kalo ada perubahan terkait dengan informasi itu bisa cepat diakses oleh pelaku usaha ataupun dari sisi pemerintah.

Perubahan regulasi dari perpres tahun 2010 dengan perpres 16 th 2018 sehingga membuat banyak perubahan. Kalo dari sisi pemerintah sendiri terkait pengadaan barang jasa itu lebih simple untuk lelang. Kalo dulu ada beberapa macam metode lelang, sekarang Cuma ada secara umum ada tender non tender kemudian juga ada terobosan lagi namanya *e-purchasing*. Nah jadi disisi pemerintah ini lebih diuntungkan karena lebih mudah untuk membeli barang secara cepat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sisi penyedia barang itu juga diberikan kesempatan untuk menampilkan produknya ataupun membuat produk di katalog nasional. Dan dari sisi aplikasi ataupun

pengguna lelang, dimenunya penyedia barang lebih mudah jadi saling menguntungkan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa

Kesulitan:

Setelah adanya perubahan harus di imbangi dengan sosialisasi. Kalo kerepotan pasti, karena dia harus beradaptasi dengan regulasi pengadaan yang baru karena dari sisi PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen). PPKom tugas yang baru ini perannya sangat vital sangat penting, mulai dari penyusunan rencana umum pengadaan kemudian nanti pembuatan paket tender/lelang kemudian nanti sampai e-kontrak kemudian nanti sampai penetapan pemenang. Berbeda dengan perpres yang dulu Perpres no 54 tahun 2010 beserta perubahannya itu yang membuat paket itu pokja yang RUP hanya pengguna anggaran disini tentunya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas PPK karena perannya sangat penting bahkan nanti ketika pekerjaan telah selesai yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan baik itu spesifikasi volume dan teknis adalah PPK.

Kinerja PPK:

Kalo menurut saya sendiri kinerja PPK yang kerja di Kabupaten masih perlu diperbaiki karena banyak PPK yang belum tau tugas fungsinya sebagai PPK, sebagaimana tercantum pada Perpres, banyak PPK yang mendelegasikan tugasnya ke bawahannya atau ke staff yang lain padahal fungsinya sangat penting. Apalagi terkait tender yang nilainya mungkin cukup besar bahkan milyaran rupiah. Ketika PPK memang tidak mengetahui tugas dan pokok fungsinya. Dengan adanya audit maka akan merepotkan diri PPK tersebut, sehingga perlu adanya peningkatan ataupun bimtek untuk PPK seperti itu.

(3) Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?

Jawab:

Iya, kalo sekarang prinsipnya pengadaan barang dan jasa adalah mendapatkan barang sebgus-bagusnya dengan harga yang wajar jadi kalo misalkan kita mau beli barang bagus ngga mungkin harganya murah seperti itu. Kalo dulu kan mungkin semurah-murahnya gitu kan, mungkin kualitasnya tidak dilihat tapi sekarang dalam perkembangannya itu kita berusaha dari pemerintahan itu mengadakan barang bagus dengan harga yang wajar. Jadi kalo efesiensi segi oprasional itu sudah cukup efesien, karena dari sisi LPSE juga tingkat kesejahteraan sudah tercover oleh pemerintah itu sendiri tidak ada biaya-biaya yang lain dan pelaku pengadaan atau pelaku usaha ketika mendaftar di LPSE pun gratis tidak ada biaya untuk pendaftaran seperti itu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dana dan daya yang minimum dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?

Jawab:

Sudah karena dari LPSE sendiri ada namanya kegiatan operasional LPSE dan itu sudah ada RKO (Rencana kegiatan Oprasional) dan setiap bulan sekali itu dievaluasi sesuai dengan target apa engga. Jadi ketika ada miss dari target itu kita bisa mengevaluasinya dan mencari bersama-sama dengan tim yang lain seperti itu.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah penggunaan dana dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

Jawab:

Kualitas pekerjaan, sejauh ini memang kualitas pekerjaan di kabupaten Tegal kalo menurut saya pribadi cukup baik tetapi memang dari sisi penyediaanya masih perlu ditingkatkan karena ketika ada paket-paket yang besar itu ketika terlihat bagus apa engganya dari masyarakat itu bisa dibilang cukup sedikitlah jadi perbandingan 50% ketika ada pembangunan gedung ataupun gapura itu dari desain sudah cukup bagus dari RAB juga sudah cukup sesuai tetapi ketika pekerjaan tetapi ketika pekerjaan itu tidak sesuai tetapi hal itu bukan disalahkan proses pengadaanya tetapi penyediaanya yang mengerjakan seperti itu. Jadi mungkin nanti harapannya diluar proses pengadaan itu ada semacam sosialisasi kepenyedia dari pemimpin daerah ya karena jangan sampai itu yang dicari Cuma menang lelangnya aja tetapi pekerjaannya ditinggalkan. Kalo dari proses pengadaannya sudah sukses cuma pelaksanaanya kadang perlu ditingkatkan (kualitas sdmnya).

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan *e-procurement* telah mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum?

Jawab:

Cukup baik proses pengadaan *e-procurement*.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses pengadaan dalam *e-procurement* sudah dapat di katakan efesien?

Jawab:

Kalo waktu efesien karena bisa dilihat intens,dipantau dimana pun berada bahkan proses pengadaan barang dan jasa tidak melihat hari kerja tetapi hari kalender. Kadang libur pun bisa dilakukan proses

pengadaannya seperti itu. Kalo sdmnya masih kurang untuk panitia ataupun pokja pemilihan karena masih dirangkap oleh beberapa pejabat struktural belum ada yang khusus menangani proses pengadaan barang dan jasa untuk kabupaten Tegal itu masih sekitar yang udah fungsional itu sekitar 6 orang sementara kebutuhannya itu sampai 30 orang untuk melakukan proses pengadaan di kabupaten Tegal.

(4) Proses Monitoring dan Audit:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dengan monitoring pada pelaksanaan *e-procurement*, publik dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa ini?

Jawab:

Sudah, dapat melihat bahkan bisa melakukan sanggahan ya. Jadi ketika proses pengadaan berlangsung ada sebelum penetapan pemenang itu ada jadwal masa sanggah. Nah disitu penyedia yang terlibat boleh melakukan sanggahan ketika memang ada beberapa yang diindikasikan kecurangan ataupun diindikasikan kurang tepat menentukan pemenang itu boleh. Jadi masyarakat secara umum boleh melihat dan bahkan bisa melihat ketika ada kegagalan bisa melaporkan seperti itu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pada monitoring pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sepenuhnya direspon publik dengan baik?

Jawab:

Sejauh ini sudah karena beberapa tahun kemudian itu pasti ada yang mengirimkan surat terkait dengan sanggahan bahkan ada yang langsung mengirim ke Bupati waktu itu. Waktu itu masih PJ Bupatinya melaporkan langsung ketidakpuasan proses pengadaan. Itu tetap kita terima dan hasilnya pun secara administrasi kita

balas dan kita dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia pengadaan

Keluhan masyarakat sampai sekarang itu belum ada, yang ada itu keluhan dari penyedia barang atau LSM biasanya. Jadi kalo masyarakat secara umum jarang ya, mungkin ya masuk itu LSM ya. LSM melihat mungkin ada beberapa yang dirasa tidak fair tetapi kembali lagi itu yang menentukan fair apa engga bukan dari LSM itu sendiri, tapi nanti kalo mau dilanjutkan terus naik ke tingkat persidangan silahkan. Tapi kan LSM kadang cuma menanyakan ini kenapa prosesnya seperti ini, nah kita juga dari panitia pengadaan juga memberikan jawaban. Nah dari situ berarti kita melihat bawasannya sudah ada keterbukaan informasi dari proses pengadaan barang jasa, mulai dari pengumuman sampai nanti penetapan hasil pemenang. Dan ada masa sanggah yang memang diperuntukan untuk masyarakat ataupun LSM/penyedia untuk menyanggah paket tersebut.

Keluhan LSM kalo sejauh ini yang secara jujur itu mereka ditunggangi oleh penyedia barang jasa tertentu. Jadi motifnya sebagian besar itu titipan dari penyedia barang. Kalau sejauh saya tau seperti itu, karena jarang ada LSM murni yang memperjuangkan itu monitoring pengadaan barang secara intens itu paling ada informasi dari penyedia tersebut mungkin motifnya sebagian besar itu mungkin kalah menang disitu. Mungkin untuk motif yang lain sepertinya belum ada belum ketemu

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses monitoring dapat melancarkan proses *e-procurement* ?

Jawab:

Kalo dari monitoring ini tentunya dapat, karena kita nanti bisa melihat dan mengevaluasi kenapa ko ada masa sanggah,

kekurangannya dimana, kemudian yang diperbaiki itu harusnya apa, apakah waktunya, apakah pelayanannya dan seterusnya.

- d) Bapak/bu/Saudara, apakah audit dalam pelaksanaan *e-procurement* telah jalankan dengan baik?

Jawab:

Ya kalo audit sendiri itu kalo di LPSE ada namanya BPKP ,PPK, inspektorat. Jadi di LPSE sendiri memberikan fasilitas ke pada auditor ataupun penyidik/ APIP istilahnya. Itu bisa mengaudit paket-paket yang di inginkan dengan cara melampirkan surat tugasnya. Jadi contohnya kemarin ada BPKP kesini mengaudit paket tertentu kemudian dari Polres Tegal juga ke LPSE meminta akses untuk mengaudit paket tertentu. Kemudian dari PPK juga pernah, jadi kita LPSE itu sifatnya sangat terbuka sekali barangkali ada yang mau di audit silahkan gitu.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah proses audit dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan regulasi terkait pelaksanaan *e-procurement*?

Jawab:

Sudah jadi di Perpres juga sudah ada ya. Di perpres yang lama dan yang baru sudah ada ataupun petunjuk teknis untuk audit itu seperti apa. Bahkan diberikan akses masuk ke dalam sistemnya, sistem pengadaan terutama yang dilakukan menggunakan tender/lelang itu sudah ada dan sudah ada regulasinya di tiap perpres yang kemarin atau mungkin aturan turunannya, diperlemnya atau perka LKPPnya dulu ada. (Kesimpulannya dari proses monitoring dan audit cukup baik, namun ada kritik dari pihak LSM).

(5) Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah informasi yang tersedia pada sistem *e-procurement* sudah bisa mencukupi informasi yang tepat dan benar?

Jawab:

Sudah, karena itu langsung realtime ya jadi dari proses pengadaan itu kan juga bukan hari kerja tetapi hari kalender . bahkan ketika hari liburpun penyedia barang bisa mengakses ataupun bahkan mendownload atau mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahkan pokja kerjanya pun bukan hanya dijam kerja tetapi di hari kalender, kapanpun bisa.

Pada fitur tanya jawab itu terlihat ada pribadi yang kurang puas:

Oh kalo itu berarti bukan terkait dengan proses pengadaan, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait LPSE atau ULPnya bukan terkait proses pengadaannya jadi kadang yang ditanyakan adalah saya ngga bisa log in gimana solusinya seperti itu kemudian saya kok udah daftar tetapi belum diverifikasi, itu berbeda dengan proses pengadaan berarti itu proses pendaftaran di awal, nah itu kalo seperti itu kita biasanya merespondnya di jam kerja atau menghubungi yang bersangkutan karena disitu kan ada mencantumkan email kadang kita juga langsung persent ke email, disamping posting diwebsite juga menghubungi kita jadi terkadang kami dari LPSE pun tidak menjawab karena udah terjawab secara intern atau personal ketemu di LPSE seperti itu. (sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang dan jasa, dari mulai perencanaan umum kemudian pelaksanaan dll jadi bisa melihat nilainya. Kan contohnya pasar margasari dananya kan cukup besar 17/20 M itu bisa dilihat pagunya berapa, negosiasinya berapa ketemu harga dealnya berapa itu terlihat semua, bahkan penyedia-penyedia

yang terlibat pun muncul disitu, misalkan yang nego 17 M itu penyedia a penyedia b itu muncul semua disitu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah *e-procurement* sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa?

Jawab:

E-procurement sudah memudahkan publik dalam mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apakah terdapat kendala pada pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time?

Jawab:

Kendala e-procurement, secara teknis itu ketika listrik mati. Jadi di LPSE itu sistemnya sistem terdistribusi jadi dari LKPP membuat aplikasi kemudian mendistribusikannya ketiap tiap daerah. Jadi setiap daerah kab kota ataupun provinsi itu mempunyai LPSE masing-masing jadi punya server disitu punya pengolahan disitu nah ,di kabupaten Tegal sendiri karena gensetnya itu belum otomatis terkadang ketika malam hari kena petir atau listrik mati itu ngga bisa langsung hidup harus nunggu besoknya perlu di hidupkan nah solusinya ketika kaya gitu maka nanti ada perubahan jadwal lelang yang kita sampaikan kita berita acara ke pokja ke panitia lelang atau biasanya ada listrik mati dari jam sekian sampe jam sekian mohon jika memang diperlukan perubahan jadwal maka pokja bisa membuat perubahan jadwal lelang seperti itu. Jadi misalkan unwidjzingnya dari jam 7 gitu ya, kan mati bisa diganti keesokan harinya seperti itu.

- d) Bapak/Ibu/Saudara, apakah akses jaringan pada *e-procurement* sudah berjalan lancar?

Jawab:

Kalo jaringan internet menggunakan VO kita, dari mulai di Diskominfo sampai sini sudah ada Vonya jadi server kita berada di Diskominfo dan juga di Diskominfo Provinsi ada dua jadi ketika satu mati ada back up lagi di provinsi. Tetapi memang back up ini juga belum langsung otomatis masih terkendala secara teknis tetapi untuk jaringannya kita menggunakan bandwidth yang cukup besar sampai 150 Mbps tetapi nanti disent cuman kalo dari sisi server kita nggak lemotlah bisa di cek nanti maksudnya konektivitasnya stabil seperti itu.

- e) Bapak/Ibu/Saudara, apakah para pihak penyedia layanan *e-procurement* sudah dapat mengatasi kendala pada *networks e-procurement*?

Jawab:

Sudah, kalo jaringan jarang mati karena kita ada semacam SLA (Service Level Agreement) dengan penyedia jasa. Ketika lampu mati itu kita langsung perbaikan maksudnya penanganannya cepat. Bahkan SLAnyanya itu 99% setahun jadi jarang mati hitungan jam itu jarang sekali. Nah paling nanti yang hitungan jam itu listrik. Ya itu tadi membuat berita acara, menyampaikan ke panitia bawasannya ada listrik mati nanti disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan tendernya (sudah baik, hanya kendala pada listrik).

2. Integrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah didalam pelaksanaan *e-procurement* telah diadakan sosialisasi kepada OPD dan masyarakat?

Jawab:

Ya setiap tahun sekali kita mengadakan satu tahun dua kali atau tiga kali nanti pesertanya kita pilih yang memang belum pernah terutama penyedia barang ya, kalo penyedia barang kan setiap sebulan sekali mesti kan ada yang daftar baru, nah itu yang baru-baru itu biasanya kita undang.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sosialisasi *e-procurement* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Jawab:

Ya, kalo sesuai si udah karna itu kan kita pelaksana kegiatan berdasarkan pertama tupoksi dari kita kemudian yang kedua DPA (Dana pengelolaan Anggaran) kemudian juga disesuaikan dengan indeks satuan Harga Kabupaten Tegal. Jadi misalkan untuk makan minum rapat itu indeksinya sekian, kemudian untuk narasumbernya itu sekian itu sesuai dengan regulasi dan dengan jadwal rencana tahunan

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada sosialisasi *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kendalanya mungkin ketika kita mengundang peserta itu ngga 100% datang. Jadi misalkan kita padahal sudah memberikan jangka waktu tertentu misalkan 1/ 2 minggu sebelumnya kita sudah melayangkan undangan atau bahkan melakukan pendaftaran secara online menggunakan google spreadsheet tetapi ketika dilakukan ada aja yang ngga dateng gitu prosentase kehadirannyamungkin seitar 80/90%. Kendalanya mungkin karena yang bersangkutan ada acara atau mungkin berhalangan hadir karena satu dan lain hal kita kurang tau seperti itu.

3. Adaptasi

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penyesuaian diri OPD pelaksana terhadap pengadaan perangkat kerja (persiapan sarana prasarana & tenaga kerja) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo adaptasi karena ini Perpres di lakukan di tengah tahun anggaran yaitu diberlakukan 1 Juli 2018 maka adaptasinya kurang begitu cepat . nah di tahun ini 2019 awal itu baru ada percepatan adaptasi karena mungkin terkait dengan anggaran dan penentuan PPKnya siapa, pokjanya siapa dan seterusnya. Sehingga indeks-indeks harga Kabupaten Tegal pun perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Jadi kalau adaptasinya diawal tahun 2018 itu cukup cepat tetapi ketika dari juli 2018-Desember 2018 itu agak kurang. Tapi kalo di tahun 2019nya itu udah lebih baik daripada Juli-Desember. Karena terbentur anggaran dan ketentuan disini di daerah.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana telah melaksanakan pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal sesuai SOP?

Jawab:

Ya, kalo SOP sendiri seharusnya dibentuk, sebenarnya dibentuk tetapi sampai saat ini itu setahu saya belum ada SOP yang sama atau pun yang seragam terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Karena kita masih mengacu cuman di Perpresnya saja belum diturunkan di keputusan Daerah disini atau Keputusan Bupati Tegal ataupun keputusan Daerah itu belumm ada. Sehingga SOPnya masih mengacu ke Perpres belum ditentukan setiap dinas, belum diturunkan jadi SOP di Kabupaten Tegal.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah kendala pada penyesuaian OPD pelaksana didalam pengadaan perangkat kerja *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Tentu ada ya, yang pertama mungkin PPK dulunya itu mengabaikan tugasnya sekarang harus dituntut lebih menguasai dari sisi teknis . karena PPK juga secara teknis harus menginputkan sendiri aplikasi dengan

pembuatan RUP, kemudian pembuatan paket, kemudian e-kontrak , lalu kemudian nanti SKPBJ harus PPK sendiri yang menggunakan. Maka adaptasinya sangat besar tantangannya karena sebagian besar PPK terkendala mungkin kurang memiliki skill di teknis IT gitu ataupun perkomputeran. Jadi masih ada PPK yang mungkin tidak menguasai skill skill dasar IT seperti mungkin mengetik, membuat perencanaan dan seterusnya. Sehingga biasanya dibuatkan tim teknis pendukung PPK. Pembuatan tim teknis PPK kan tidak langsung bisa dibuat harus ada beberapa kriteria atau beberapa pertimbangan. Nah ini yang menjadi mungkin sedikit menghambat proses adaptasinya. Tahun 2019 ini dari pemerintah Kabupaten Tegal mendorong untuk para PPK agar bisa meningkatkan kapasitas atau mungkin bisa jadi yang punya skill itu dituntut untuk mempunyai sertifikat pengadaan. Jadi mengirimkan diklat ataupun bimtek agar mendapatkan sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa. Jadi syarat untuk membuat ahli PPK itu ada yang namanya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kalo tidak punya sertifikat tidak bisa jadi PPK. Bisa jadi PPK kalo dia merangkap sebagai pengguna Anggaran. Jadi kalo dia sebagai pengguna anggaran ya wajib punya sertifikat tetapi kalo dia bukan pengguna anggaran, dia wajib hukumnya mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa untuk menjadi PPK seperti itu.

Di kab.Tegal sebagian sudah sebagian belum. Presentasinya sekitar 40/30%. Banyak yang sudah punya tetapi skill di teknis IT masih kurang.

2. Indikator Implementasi Kebijakan:

Dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Ya kalo kebijakan ini untuk pendelegasian tugas sebenarnya sudah, karena kita sudah melakukan sosialisasi lebih dari satu kali bahkan kita juga pernah mengundang wakil bupati yang dulu Bu Umi. Tahun 2016 mengundang LKPP, pimpinan daerah, itu untuk mendorong agar pelaksanaan barang dan jasa itu disesuaikan dengan regulasi yang baru. Apalagi terkait dengan pendelegasian tugas yang beda, ada beberapa pelaku pengadaan itu kan istilah baru di Perpres yang sekarang kalo dulu kan ngga ada istilah pelaku pengadaan. Nah ini yang mencoba untuk digali dan dikenalkan secara masif kepada OPD terutama kepada pengguna anggaran PPK dan pejabat pengguna anggaran ataupun pejabat penerima hasil pekerjaan seperti itu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Mungkin caranya adalah dengan melakukan konsolidasi dengan BLP, Bappeda, dan LPSE. Jadi direncanakan itu nanti mau menggunakan metode tender, apakah itu pengadaan langsung ataukah itu e-purchasing itu tentunya harus tau kriteria masing-masing kegiatannya ini lebih pasti menggunakan swakelola/ penyedia dan seterusnya

Konsolidasinya tadi bagian layanan pengadaan dengan LPSE, Bappeda kan biasanya terkait dengan target penyerapan anggarannya jadi misalkan kegiatan ini ditargetkan harus selesai bulan Juli namun ternyata molor

itukan juga harus ada konsolidasinya. Kalo di LPSE biasanya terkait dengan pembuatan rencana umum pengadaannya jadi beberapa OPD itu ketika mau dibuat paket tendernya ternyata metodenya tidak sesuai itu bearti PPKnya juga ngga paham. Kemudian ketika mau dilelang ternyata dokumen-dokumennya belum siap maka kan perlu dikonsolidasikan dengan BLP. Jadi kendalanya adalah mungkin jarang adanya undangan-undangan ataupun rapat-rapat kecil dengan bertemu secara intens karena komunikasinya hanya secara personal tidak langsung rapat. Sehingga kendala-kendala seperti itu masih tetap muncul meskipun sudah tau solusinya seperti itu.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Konsisten komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

SDMnya perlu ditingkatkan karena nanti pengadaan barang jasanya itu luas, bukan cuma tender aja tetapi pengadaan langsung nanti masuk kesini. Bahkan sudah disiapkan aplikasinya bahkan sekarang puskesmas, BLUD sudah difasilitasi di LPSE. Sehingga nanti proses pengadaannya bisa lebih banyak, paketnya bisa lebih banyak. Nah bahkan mungkin nanti bisa jadi tahun ini atau tahun depan itu sampe 1000 paket. Kalo yang sekarang tender itu sekitar 200-an yang 800-an nanti pengadaan langsung belum yang e-purchasing. Sehingga SDMnya perlu ditambah, masih kurang sesuai SK itu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo di Kabupaten Tegal belum mempunyai Juknis dan juklaknya. Kemarin sudah menyampaikan ke pimpinan untuk membuat sebuah minimal surat edaran atau keputusan Bupati mengambil isi dari Perpres itu. Disini itu belum, jadi masih mengacu Perpres. Untuk regulasi ditingkat daerah itu belum ada. masih mengacu Perpres belum jadi keputusan Bupati atau SOP di Kabupaten Tegal itu belum.

Hal ini tidak menghambat, karena di Perpres itu juga udah jelas teknis dan uraian tugasnya. Juklak dan juknis itu menurut saya payung di daerah, jadi bisa jadi di kab dan kota itu ada beberapa kalo diperpres itu masih longgar, itu misal ditegal dipersempit, di daerah lain tetap diperlonggar. Itu kan sebenarnya kan seperti itu, fleksibilitas. Tetapi kita sepenuhnya masih masih mengacu Perpres. Mungkin nanti kedepan ketika sudah menjadi UKPPBJ itu baru dibuat nanti Juklak/Juknis pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Tegal. Kalau di Perpresnya kan secara umum Pemerintah jadi entah itu Kab/kota atau provinsi itu sama. Jadi mungkin nanti kedepan sudah menjadi UKPPBJ, nanti dibuat juklak dan juknisnya. Jadi UKPPBJ di Perpres, Permendagri pun sudah ada. Jadi kalau misalkan kab/kota itu UKPPBJnya nginduk di Sekda/ dibawahnya nanti menjadi bagian layanan pengadaan. Setiap Kab dan kota itu berbeda, jadi kalo disini tahun ini kami belum UKPPBJ, dan di Indonesia masih sedikit. Kemarin kita Rapat Koordinasi Nasional itu masih sedikit, bahkan di Provinsi Jateng pun belum. Sehingga kedepan tahun depan tahun 2020 itu informasinya mau dibuat UKPPBJ nanti LPSEnya masuk kesini. Kalo UKPPBJ dibawah Sekda, BLP dan LPSE sekarang belum satu atap, masih beda dinas, beda struktur. Kalo nanti kan satu struktural UKPPBJ. UKPPBJ itu hanya istilahnya saja, nanti di tiap daerah itu namanya bisa badan pengadaan barang dan jasa ataupun kegiatan barang dan jasa, bagian

badan pengadaan barang dan jasa. Itu kan setiap daerah beda. Tetapi intinya itu bisa disebut UKPPBJ ketika dibawah Sekda, dibawahnya ada ULP ada LPSE sama satunya badan monitoring dan evaluasi. Ada 3 seksi itu atau subbagian tapi bagiannya namanya UKPPBJ.

ULP dan LPSE, sekarang koordinasinya sudah baik meskipun belum satu atap tetapi terkait dengan aset itu masih ada perbedaan karena di LPSE Kabupaten Tegal itu sendiri ruangnya masih minjem di Sekda tetapi strukturnya di Diskominfo, kemudian ketika ada perbaikan aset juga nanti ini juga koordinasinya cukup memakan waktu, jadi kalo punya sendiri kan bisa cepet perbaikan aset, dari pusat langsung diganti kalo ini kan masih ada beberapa tingkatanlah/ tahapan terkait dengan reformasi birokrasi. Jadi kalo kita kan koordinasinya sudah cukup baik tetapi kalo dari sisi asetnya ini masih perlu diperbaiki. Berarti dari sarprasnya, dan perbaikan sarpras masih terhambat, masih berpisah. Peningkatan sarprasnya masih kurang, karena masih beda atap.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo misalkan dari OPD itu ada problem sebenarnya, kita sudah ada sistemnya namanya LPSE support. Contohnya kemarin dinas Pertanian tidak bisa membuat paket. PPK bisa melaporkan melalui sistem, lalu kemudian nanti di LPSE bisa membuka ini errornya ini, nah nanti kita bisa penanganan melalui sistem juga dan sudah ada nomor tiketnya, namanya e-ticketing terkait dengan permasalahan yang ada jadi. Ketika ada dinas manapun yang kesulitan atau terjadi permasalahan itu bisa dilaporkan melalui LPSE support. Nanti penanganannya bisa online ataupun nanti kita bisa ketemu dengan dinas tersebut, penanganan yang memang harus dijelaskan.

Kendala OPD secara umum teknis, terkadang RUP tidak bisa muncul sehingga tidak bisa membuat paket. Kemudian dari penyedia itu biasanya tidak bisa log in ataupun tidak bisa connect ke SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) atau kebanyakan penyedia tidak bisa upload dokumen kemudian datanya masih ngga sesuai dengan data yang sekarang. Kalo dari teknis yang lain, biasanya kadang perubahan jadwal yang itu masih bisa ditanyakan. Kesimpulannya SDM masih butuh peningkatan.

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Ya karena kita sudah beberapa kali mengusulkan ternyata memang belum difasilitasi, belum diterima oleh beberapa pengambilan kebijakan disini karena masih melihat itu dengan fasilitas yang ada itu sudah berjalan dengan baik padahal kita ingin memperbaiki lebih bagus dari sekarang. Mungkin solusinya adalah kita perlu dari LPSE perlu pimpinan yang memang memahami dengan kondisi yang ada, kondisi yang ada di ULP/ LPSE perlu pendekatan yang persuasif agar dapat memperhatikan sarana dan prasarana kemudian meningkatkan kesejahteraan di tingkat pengelola LPSE ataupun pengelola ULP itu sendiri. (masih belum terfasilitasi).

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo tanggapannya bervariasi, mulai dari yang menerima, ada yang mungkin ya sedikit resisten tapi apapun tanggapannya itu harus dilakukan karena itu kan regulasinya kan sudah jelas. Ketika ada perubahan-perubahan mau tidak mau kita harus menaati. Kemudian terkait dengan

kebijakan pimpinan disini. Dari juklak dan juklisnya kan belum ada jadi memang kita hanya menggunakan perpres saja. Kemudian ketika ada permasalahan teknis di lapangan ya kita selama ini sudah menyampaikan dan tanggapan mereka juga sudah menerima. Jika ada permasalahan kita sudah mencoba untuk membantu dan mereka juga menerima serta memahami kondisi yang ada seperti itu.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo intensitas kontrol itu masih sedikit, karena sebagian besar itu yang saya lihat masih ada yang belum memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi kalau tadi kembali lagi PPK masih ada yang belum memahami PPK itu sangat penting. Kemudian PPHP kalo yang sekarang administrasi aja kalo dulu kan memeriksa teknis dan hasil pengerjaannya. Kalo sekarang yang memeriksa teknis hasil pengerjaannya itu PPK. PPHP hanya administrasinya saja, nah ini kadang dari OPD ini belum tau, padahal sudah beberapa kali sudah mensosialisasikan ataupun menyampaikan. Ya mungkin solusinya harus rutin ada kegiatan rapat koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa minimal 1 tahun sekali.

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalo sekarang udah ya, dengan adanya perpres yang baru ada rambu-rambu dari LKPP dan Kemendagri karena kabupaten/ kota kan dibawahnya itu kementerian dalam negeri. Di permendagri kan sudah jelas kalau misalkan perlu dibentuk UKPPBJ. UKPPBJ itu nanti ada LPSEnya ada ULPnya sama yang menangani yang terkait dengan hukum sanggah

dan lainnya. Jadi ketika ada masalah terkait pengadaan barang jasa itu ada subbagian atau bagian yang menangani itu. Jadi sudah cukuplah kalo melihat dari sisi regulasi terkait organisasi itu sudah dibuatkan desain untuk bagaimana LPSE kedepan itu mau kemana kan sudah. Sudah dibuatkan desain cuma belum dijalankan, mungkin tahun depan karena kan mengganti struktur organisasi kan ngga bisa langsung ya, harus dievaluasi secara keseluruhan nanti baru ditahapkan menggunakan Perbup seperti itu.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Sudah tapi memang perlu ditingkatkan terkait dengan pehamannya. Jadi masih ada OPD yang mungkin mengacu ke pemahaman-pemahaman yang lama Perpres yang lama. Tetapi sejauh ini dari mulai tahun 2018 pertengahan sampai 2019 itu sudah ada terlihat perubahannya. Kalo yang tahun ketika perpres itu diberlakukan di Unit yang lain masih ada kebingungan tapi sekarang berkuranglah itu tingkat pehamannya lebih baik cuman masih ada yang ngga tau seperti itu.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Koordinasinya sejauh ini yang terjadi biasanya melakukan rapat koordinasi tetapi tidak menggunakan undangan jadi OPD pelaksana ketika ada permasalahan datang ke LPSE, bertanya kemudian kita dari LPSE berusaha untuk menjelaskan ataupun memberikan solusi permasalahan kemudian kalo sudah clear baru OPD itu ke BLP ataupun kadang OPD ke layanan BLP dulu baru ke kita, jadi tergantung nanti ada permasalahannya dimana. Tetapi untuk yang rapat yang di undang secara resmi itu jarang, karena mungkin permasalahannya kan tidak sewaktu-waktu, kadang ada kadang ngga.

Koordinasi cukup baik, tetapi tidak menggunakan rapat-rapat resmi jadi konsultasi bentuknya seperti ini atau wawancara dari OPD ke kita langsung menyampaikan tidak dalam bentuk rapat seperti itu.

Perlu diadakan rapat resmi, karena mungkin minimal setiap OPD itu ketika membuat rencana pelaksanaan paling tidak dari LPSE dilibatkan karena ketika nanti sudah berjalan dan di pertengahan ada perubahan kan itu bisa menghambat. Misalnya awalnya mungkin mau menggunakan tender diganti menggunakan e-purchasing atau tender itu metode atau pelaksanaannya ada yang tidak sesuai. Ketika membuat paket PPKnya tidak sesuai dengan KAKnya, cuek dan lainnya seperti itu. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk menghindari miss komunikasi.

Hasil Wawancara Pengguna Barang Jasa

Nama : Adji Sri Mulyanto (Informan 4)
Jenis Kelamin : L
Alamat : Banjaranyar, Rt 01/ Rw 01, Balapulung, Kabupaten Tegal.
Jabatan : Pejabat Pengadaan
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Ya beberapa kali dari bagian layanan pengadaan LPSE itu melakukan sosiasiasi dan bimbingan teknis untuk e-proc, baik untuk pejabat pengadaan, pokja ULP maupun pejabat pembuat komitmen dan juga sebenarnya untuk pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran jadi sebetulnya sudah disosialisasikan, sudah disampaikan

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Di eproc itu kan ada beberapa aplikasi, aplikasi yang digunakan untuk tender, digunakan untuk e purchasing dan digunakan untuk pengadaan langsung. Jadi dari aplikasi SPSE yang sudah digunakan oleh pemerintah Kab Tegal itu adalah aplikasi tender, tender cepat, kemudian aplikasi e-purchasing. Nah salah satu yang belum digunakan adalah aplikasi e-pengadaan langsungnya. Jadi belum keseluruhan dari fungsi-fungsi eproc itu digunakan oleh pemerintah Kab. Tegal. Jadi hanya tinggal satu, e-pengadaan langsung. E-pengadaan langsung itu sistemnya, pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang dianggap memiliki

kemampuan kualifikasi usaha untuk mengadakan pengadaan langsung. Nah pengadaan langsung itu kan untuk jasa konsultansi di bawah 100 juta untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu dibawah 200 juta. Itu yang memang di lingkungan kab. Tegal belum digunakan. Salah satu bagian dari eproc yaitu e-pengadaan langsung, kemungkinan mungkin tahun depan akan diimplementasikan. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengadaan langsung secara manual. Jadi pengadaan secara manual adalah pejabat pengadaan memberikan undangan pengadaan langsung dilampiri dokumen pemilihan, kemudian baru dikirim ke calon penyedia (pelaku usaha namanya pelaku usaha. Nanti dari pelaku usaha itu diberikan waktu 3 hari untuk memberikan dokumen penawaran. Itu prosesnya masih manual. Jadi nanti ke depan e proc kalau satu sudah dilaksanakan e pengadaan langsung semua fungsi tadi sudah tercapai.

Kendala:

Kalau kendala sih tidak ada karena sudah training, sudah ada pelatihan barangkali mungkin hanya terjadi ketika aplikasi spse itu dalam kondisi maintenance atau pada saat down jadi ketika misalkan akses internet down atau listriknya mati kemudian genset ngga nyala, server LPSE nya kemudian down itu akan menimbulkan gangguan. Tapi itu paling berkisar antara 5 sampai 20 menit sebelum genset nyala. Ya pernah beberapa kali ada saat itu terjadi down server atau pada saat maintenance dari LKPP itu kendalanya disitu aja. Maintenance itu kan sudah menjadi agenda rutin dari LKPP itu di akhir Desember itu mungkin 30, 31, tanggal 1 itu 3 hari sudah maintenance aplikasi. Kemudian ketika upgrade aplikasi dari SPSE 3.6 ke SPSE 4.0 itu juga jadi sedikit gangguan. Kemudian sekarang SPSE yang 4.3 saya pikir sudah. Mungkin ketika nanti ada pengembangan aplikasi SPSE 5.0 gangguan itu biasanya ketika terjadi instalasi saja berlangsung 1-2 hari paling lama.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Pertama itu sebenarnya sudah diatur itu di Peraturan Bupati Tegal tentang penjabaran penatausahaan APBD, jadi di sana sudah ada klausul untuk pengadaan barang yang ini barang ya yang sudah ada di e catalog itu harus menggunakan e purchasing. Itu salah satunya. Kemudian ketentuan yang lainnya di peraturan Perbup tersebut adalah sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi semua proses itu ditempuh melalui dengan e procurement.

Konsistensi komunikasi OPD pelaksana:

Sangat konsisten. Itu hampir di setiap tahun ada yang namanya evaluasi untuk keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Tegal untuk pelaksanaan e proc itu sendiri. Jadi ada monev, baik dari Dinas Kominfo maupun dari setda berkaitan dengan berapa jumlah paket yang ditenderkan ya melalui e proc itu registernya sudah ada. Nah yang tidak melalui e proc itu juga ada sebenarnya di bagian layanan pengadaan rinciannya itu. Jadi ada yang melalui eproc dan ada yang belum menggunakan e proc. Yang belum melalui e-proc ya itu pengadaan langsung yang belum menggunakan aplikasi LPSE.

Dari sisi komunikasi sudah tergolong baik.

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

Salah satu yang jelas sudah sesuai dengan SOP adalah pejabat pengadaan dan PPK. Itu syaratnya harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan

jasa. Itu pasti sesuai SOP salah satu syaratnya. Untuk staf pengelola saya pikir perlu ditingkatkan kemampuan TIK nya disana, karena beberapa juga masih terkendala dalam misalkan upload SIRUP, sistem informasi rencana pengadaan. itu perlu ditingkatkan untuk kualitas SDM di staf pengelola

Kalau jumlah rata-rata sudah mencukupi, baik OPD pelaksana maupun OPD di luar dinas kominfo sudah cukup

Ini beda ya, untuk paket pengadaan yang tender itu dilakukan oleh balada, untuk paket ya. Untuk paket pengadaan ditentderkan. Jadi disana ada yang namanya bagian pengadaan itu jadi nanti paketnya itu terjadi pokja. Misalkan paket konstruksi ada pokjanya. Paket jasa konsultasi ada pokjanaya. Pengadaan barang sudah. Jadi ini untuk tender. Jadi yang tendernya dilaksanakan balada, yang sistemnya dilaksanakan oleh LPSE. Jadi berkolaborasi. Untuk apakah pokja balada itu sudah cukup untuk memenuhi itu? Ya itu saya pikir domain nya di balada. Kalau di LPSE sendiri dengan 9 orang sudah cukup lah. BLP (Bagian layanan pengadaan). Kalau disini disebut balada.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sudah. Bagi bagian layanan pengadaan maupun di dinas kominfo sudah memiliki SOP untuk pengadaan barang hasa melalui elektronik.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Biasanya ketika terjadi problem nanti kami akan memberikan informasi kepada bagian layanan pengadaan ketika terjadi gangguan sistem. Itu

menjadi sebuah SOP ketika terjadi gangguan sistem, ketua LPSE itu akan memberikan surat pemberitahuan ke bagian layanan pengadaan secara resmi diberikan, Secara singkatnya biasanya digunakan informasi whatsapp lebih dulu. Nanti surat informasi detailnya menggunakan surat resmi. Misalkan terjadi upgrade sistem dari 4.0 ke 4.3. Kami memberitahukan terlebih dahulu ketika itu. Sehingga memungkinkan balada bisa mengantisipasi. Misalkan ketika disana ada paket Anwijzing misalnya itu bisa jadwalnya bisa menyesuaikan proses update sistem disini.

Jumlah sudah maksimal

Jumlah di LPSE sudah cukup, tapi kalau jumlah orang yang menangani paket tender di bagian pengadaan, mungkin bagian pengadaan yang tahu. Itu bedanya disitu.

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Menanggapi harapan masyarakat tentu kita bekerja secara profesional. Jadi tidak ada lagi yang namanya tatap muka antara pejabat pengadaan maupun pokja ULP dengan penyedia. Sekarang kan tatap mukanya ketika penyedia akan mendaftarkan diri sebagai calon penyedia. Itu baru ada tatap muka antara penyedia dengan unit kerja dari LPSE. Sementara untuk tatap muka antara penyedia dengan pokja hampir tidak ada. Kecuali ketika telah terjadi pengumuman pemenang, Pembuktian kualifikasi. Pada saat pembuktian kualifikasi itulah pokja bertemu dengan penyedia. Jadi inilah yang namanya transparansi. Untuk harapan masyarakat tentu, pengadaan

barang dan jasa melalui e-proc itu dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada yang namanya kongkalikong.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Awal awal tentu ada yang namanya penolakan itu hanya masalah kebiasaan saja. Dari manual ke sistem. Tapi lambat laun karena ini merupakan perintah aturan perundang-undangan. Sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010. Pada saat LPSE berdiri 2011 sampai dengan sekarang. Saya pikir sudah terinternalisasi. Sudah menjadi budaya. Bahwa pengadaan dilakukan melalui e procurement.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Respon biasanya ketika ada aduan itu masuk LPSE dan kemudian biasanya masuk ke helpdesk nanti ketika helpdesk itu belum bisa menyelesaikan, naik ke tingkat admin. Ketika admin belum juga menyelesaikan, baru naik ke tingkat pimpinan, ketua LPSE.

Sikap implementor sudah nilai baik.

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sudah jelas ada pembagi tugas dan kewenangan yang jelas di help desk kemudian di admin, kemudian di kesekretariatan dan di ketuanya. Masing-masing sudah sesuai dengan job deskripsi dan disinipun tidak ada

campur tangan pengguna anggaran, independen untuk pelaksanaan kegiatannya tidak ada intervensi memenangkan pemenang tertentu.

Untuk perubahan itu belum di Kab Tegal, jadi masih antara bagian layanan pengadaan dan LPSE itu terpisah. Kemungkinan untuk SOTK tahun 2020 struktur itu akan menjadi yang namanya UKPBJ. Jadi nanti unit di sini, seksi LPSE disini akan melebur ke bagian layanan pengadaan UKPBJ disani. Itu kemungkinan tahun 2020. Jadi untuk bagaimana proses transformasi yang nanti itu ketika sudah terjadi UKPBBJ menyatunya antara LPSE dengan bagian pengadaan.

Sementara ini belum satu atap.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik di Pepres 16 2018 maupun di peratuarn lembaga LKPP sudah.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Koordinasi ini khususnya dengan koordinasi dengan bagian layanan pengadaan jelas rutin dilakukan karena itu harus menjadi satu kesatuan walaupun berbeda atap, itu menjadi satu unit kesatuan yang saling menyukkseskan terjadinya proses pengadaan barang jasa pemerintah.

Selisih faham tidak ada karena semuanya mengacu ke prepres pengadaan barang dan jasa. Misalkan kita akan mengimplermentasikan SPSE versi 4.3 kita tidak serta merta LPSE langsung instalsai. Tapi kita komunikasi dulu dengan bagian pengadaan bahwa sesuai Perpres kita harus menggunakan aplikasi terbaru. Oleh karena itu bagian pengadaan akan

mengikuti apa yang menjadi tupoksi dari LPSE. Jadi komunikasi itu terbangun antara bagian layanan pengadaan dengan LPSE khususnya.

Kendala:

Kendala itu kendala teknis, kalau untuk kendala kebijakan, koordinasi itu tidak ada. Kendala teknis itu mislaknya server lpse itu down atau sedang dilakukan maintenance. Itu saja kendalanya disitu.

Untuk penyedia itu ada yang namanya pelatihan untuk penyedia juga. Ini nanti e-pengadaan langsung jadi penyedia itu karena belum terbiasa menggunakan e pengadaan langsung. LPSE mereka sudah, Cuma aplikasi pengadaan itu kan belum. Nah itu kami LPSE juga melakukan bintek untuk penyedia. Memang belum keseluruhan penyedia. Cuma kami biasanya menggunakan sistem asosiasinya. Pengadaan konstruksi kami ambil berapa, barang berapa, jasa konsultasi berapa, jasa lain-lainnya berapa. Kalau untuk keseluruhan sangat banyak.

Kalau untuk keberatan tidak ada. Keberatan itu biasanya di proses tender, di bagian layanan pengadaan.

Kendala hanya di teknis

Hasil Wawancara Pengguna Barang Jasa

Nama : Sutoyo, SH, M.H (Informan 5)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Gatot Subroto, Rt.03/ Rw 07, Slawi Kulon, Kabupaten Tegal.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Disalurkan. Artinya Masing-masing skpd kan punya kegiatan, kegiatan kalo kaitan dengan pengadaan kita kan komunikasi sama LPSE, kita membentuk tim begitu dikomunikasikan. Komunikasi dengan baik

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kejelasan tujuan: Sangat bagus realisasinya dari 5 tujuan tadi sudah terpenuhi

Realisasi tujuan: pada transparansi dan akuntabilitas kembali pada pelakunya panitia lelang dengan si pengadaan barang jasa.

Selama ini dikabupaten tegal cukup baik.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Selama ini ya yang saya amati karena Didinas saya itu , barang jasanya sangat kecil. Bisa dipantau dengan baik. Kayak contohny didinas perpustakaan hanya beberapa kegiatan satu atau dua. Cukup baik LPSE. Cukup konsisten.

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

Sudah cukup baik.

Tergantung teknis, seperti contohnya APBD kan anggaran dimulai lelang-lelang kan april, kalau dipercepat semisal teknis dipercepat dibulan januari itu cepat si, kayanya kalau contohnya di DPU ada kerja sama pihak ketiga berkaitan dengan konsultan, di DPU untuk gambar sudah menggunakan konsultan. Sehingga itu kan sangat membantu.

Jumlah di LPSE Sudah cukup

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau itu dimasing-masing SKPD yang mengatur ada juknasnya, biasanya si ada peraturan bupati itulah.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sementara ini kan kalo saya melihat SKPD saya ya ngga ada kendala, jadi kegiatan sangat kecil atau minim, mungkin banyak problemnya di SKPD yang punya anggaran besar.

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Sementara ini udah bagus, jadi begini ya publik mungkin sudah tau, pihak pemborong konstruksi sudah tau. Saya kira tidak ada masalah. Cuma masih perlu publikasi lebih intens dimasyarakat.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ya selama ini kita diposisi Dari proses lelangnya dari pengadaannya kita transparan dan betul-betul yang dapat adalah pemenang, secara administrasi terpenuhi tidak ada masalah

Arahan dan tanggapannya, Dari SKPD sendiri tidak ada. Karena tidak ada problema.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kontrolnya jelas, pertama kan ada kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tentu dari awal kita sudah mengkomunikasikan dengan baik dengan LPSE, kita transparan apa adanya. Nanti LPSE yang tau detail. Untuk sikap implementor sudah tergolong baik.

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Ya itu sangat baik, ada LPSE, karena tidak semua SKPD tahu tentang administrasi tata cara pengadaan dan sebagainya. Saya sangat setuju dibentuk LPSE.

Untuk struktur organisasinya sudah jelas, sudah ada.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Sudah

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sangat baik, di SKPD saya

Dalam hal teknis ada kendala atau tidak

Jawaban: Tidak ada. Sudah baik. Servernya sudah bagus. Kita sering menggunakan, diperpustakaan sendiri orang datang membaca, ada servernya. Jadi tidak ada kendala

Kesimpulannya dari pelaksanaan e-procurement sudah baik

Penyimpangan pengadaan. Kalau melihat kondisi, kalau dalam pengadilan pasti ada kasus.

Kalau dulu tidak ada LPSE, ada kasus yang bupati.

LPSE tahun 2011. Itu dulu masih pakai konvensional.

Kesimpulan. Tergolong baik untuk pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Tegal.

Hasil Wawancara Penyedia Barang Jasa

Nama : Agus Ariyanto (Informan 6)
Jenis Kelamin : L
Alamat : Desa Pesarean Rt 29/ Rw 07, Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal
Jabatan : Direktur
Unit Kerja : CV.Arta

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Ada pemberitahuan dari petugas LPSEnya untuk mendaftarkan perusahaannya mengikuti lelang secara elektronik

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Tujuan dan cara *e-procurement* Saya pahami dan saya praktekkan

Ada sedikit bingung karena ada peraturan peraturan baru dari tahun yang dulu.

Ada sedikit kesulitan

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kadang baik kadang juga ngga. Kadang servernya suka error. Dari pihak sini sudah langsung merespon, cuma mungkin server suka error

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

Cukup memadai, tidak ada problema dengan SDM

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Tidak tahu

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sampai saat ini menurut saya sudah baik.

SDM sudah dinilai cukup baik.

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Sudah faham

Menurut saya sudah efektif

E-procurement sudah efektif

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Menurut saya sudah cukup bagus

Harapannya untuk memverifikator stand by terus disitu biar nunggunya ngga lama.

Jadi datang langsung dikerjain

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau itu sih menurut saya sudah bagus, langsung merespon dengan cepat.

Sudah baik.

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Belum kenal

Belum tahu dengan jelas

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Kalau dilihat sih sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Kalau di penyimpangan ngga ada, sudah sesuai dengan peraturan

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Untuk sampai ini sudah cukup baik

Kendala:

Yang menjadi kendala itu biasanya waktu mendaftar yang baru CV baru CV baru yang mau didaftarkan tapi biasanya pikirannya masuk ke LPSE Kabupaten Tegal tapi masuknya ke LKPP

Kesalahan log in pada waktu pendaftaran

Belum paham dari pihak CV atau penyedia

Mungkin sudah disosisiaskan, tapi dari pihak penyedia yang belum paham betul.

Kendalanya kebanyakan itu

Kritik dan saran:

Sarannya buat LPSE Kabupaten Tegal, agar kalau buat yang pendaftaran itu yang di browser biar tulisannya jelas, jadi tidak keliru pada waktu daftar LKPP.

Hasil Wawancara Penyedia Barang Jasa

Nama : Faiq Rizal (Informan 7)
Jenis Kelamin : L
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Rt 13/ Rw 05, Slawi Wetan
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
Jabatan : Staff
Unit Kerja : PT Kamajati Group

1. Komunikasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* transmisi sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan telah disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya?

Jawab:

Kalau sejauh ini seluruh informasi biasanya kita dapatkan di sebuah website namanya LPSE. Jadi seluruh informasi baik syarat lelang ataupun hal-hal yang perlu disiapkan untuk pengajuan lelang atau penawaran biasanya disampaikan melalui situs LPSE

Peraturannya juga lewat situs LPSE

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kejelasan tujuan dan cara OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Sebenarnya kalo tujuan sih standar, dalam artian untuk masalah kita pihak kedua penyedia jasa, selama ini standar, maksudnya umumlah persyaratannya seperti ini, seperti ini. Pokoknya kita harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kalau kontraktor atau penyedia jasa harus kemampuan untuk mendapat sebuah pekerjaan persyaratan seperti ini, ya kita harus, tidak bisa keluar dari spesifikasi. Kalau keluar dari situ resikonya kita tidak bisa ikut nawar.

Sudah transparan dan akuntabel

Kalau persaingan belum tentu ya setiap tahun kan beda, dalam artian setiap tahun kan biasanya kerja itu kadang lagi banyak ataupun lagi sedikit. Dan yang nawar juga dulu sih masih satu wilayah. Jadi ada sebuah lelang khususnya di wilayah Kab Tegal, biasanya itu penyedia jasa yang lelang itu orang-orang kabupaten, jadi kompleknya di masih satu wilayah. Tapi kalau sudah kearah sini, sekarang dia sudah mulai, ya istilahnya bisa memperluas wilayah, dari Jawa Tengah ada, misalkan dari PT kabupaten ada, PT kota ada. Ya intinya sih semuanya ikut bersaing, jadi ngga cuman PT sini.

Dana daya apa sudah tepat waktu:

Yang namanya perusahaan kepenginnya untung cuman biasanya yang namanya pekerjaan yang menentukan pihak pertama, misalkan dari PU ataupun apa, saya kira kalau untuk penyedia jasa sebelum kita mau melakukan penawaran kita memang bisanya hitung-hitungan kemampuan kita kira-kira sanggup ngga. Kalau dikira kayanya kita ngga pekat, ngga bakalan untung yang paket ini atau gimana. Biasanya penyedia jasa juga maksudnya kita perlu nawar atau tidak

Kalau pengawasan, Biasanya kalau jasa, pengawasan itu kita mulai dari kita mendapat pekerjaan. Setelah kita menang proyek atau lelang itu kita mulai kerjain, pelaksanaannya gimana, baru ada pengawasan dari pihak dinas. Pengawasan sesuai dengan perjanjian lelang kerjaan. Misalkan pekerjaan aspal harus ketebalan 3 cm, harus sesuai dengan spesifikasi waktu penawaran.

Kebutuhan informasi:

Kalau informasi saya kira kita gampang untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan, Cuma dari pihak kontraktor harus selalu memantau, kita haru selalu update. Kalau kita ngga sering liat itu, kita ngga dapat informasi.

Implementasi kebijakan e-procurement Kab.Tegal:

Biasanya kalau pihak LPSE setelah menentukan, biasanya ketika kita menawar dia nanti mengelompokkan dari juara 1, 2, 3 semuanya itu PT, penyedia jasa yang nantinya akan nawar sebuah proyek baru. Dari 5 itu LPSE menilai dari segi harga ataupun kelayakan sebuah perusahaan, alat, dan tenaga. Saya kira untuk LPSE juga cukup sesuai dengan aturan yang ada.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah konsistensi komunikasi OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau konsistensi informasi dari pihak LPSE ke kontraktor maksudnya ke penyedia jasa itu tidak ada, semuanya seluruh informasi pekerjaan nilai kontrak ataupun apa itu masuk di sistem website itu, sistem elektronik, kecuali setelah pihak penyedia jasa mendapatkan sebuah project pekerjaan dari hasil pemenang tender, biasanya nanti LPSE menginformasikan atau membuka informasi. Nanti setelah LPSE, petugas LPSE sampai segitu, baru nanti dilanjutkan pihak kedua, biasanya DPU.

Tidak ada kendala komunikasi

2. Sumber Daya:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam pelaksanaan *e-procurement* jumlah dan kemampuan staf sudah sesuai SOP?

Jawab:

Kalau LPSE, kalau penyedia jasa memang kita ngga terlalu lebih kesana. Maksudnya itu bukan urusan kita. Setahu saya kita dari pihak penyedia jasa pekerjaan kita nawar, nanti kita mendapatkan informasi dari sebuah website, kalau kita menang atau masuk ke kualifikasi nanti berurutan, 1, 2, 3, 4, 5 nanti dipanggil pihak LPSE pekerjaan mana yang sekiranya sesuai dengan kebijakan atau yang dianggap mampu.

Kalau sistemnya apa di LPSE itu SDMnya saya kira cukup mampu, cuman untuk pekerjaan itu monoton, maksudnya peraturannya dari dulu seperti itu, saya kira mudah, tinggal menceklist syarat-syaratnya itu. Jadi orang LPSE itu punya list sendiri, persyaratannya, tinggal ngoreksi saja yang mana atau pun yang tidak ada. Jadi saya kira cukup SDMnya.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah OPD pelaksana memiliki (Juklak-Juknis) serta data yang terkait dengan kebijakan pada pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau juklak junknis, semua hampir sama kaya persyaratan, persyaratan lelang. Jadi disampaikan oleh LPSE, jadi semuanya harus mengacu kesitu. Kalau itu sih saya kurang tahu, kalau arahnya sudah masuk kesitu. Penyedia jasa kayaknya kurang paham.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah OPD pelaksana dalam memberikan kewenangan saat terjadi problema serta bagaimana penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau untuk LPSE itu sebenarnya kan lembaga hanya sifatnya hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan. Setelah pengadaan selesai, itu LPSE itu udah bukan kewajiban LPSE untuk mengawasin sebuah project. Biasanya nanti ada pihak sendiri, dinas sendiri, biasanya PU atau DPU, itu untuk pekerjaan pengadaan jalan. Untuk selain itu saya kurang tahu.

Penyediaan fasilitas pada *e-procurement* di Kabupaten Tegal:

Cukup

Dari SDM tidak ada kendala

3. Disposisi/Sikap Implementor:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kognisi OPD pelaksana yakni pemahaman pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal berjalan efektif?

Jawab:

Harapan untuk setiap penyedia jasa, intinya semuanya informasi harus transparan, dari seluruhnya bukan hanya informasi masalah kerjaan atau harga, semuanya harus transparan. Intinya kita harapkan harus transparan, dan informasi harus cepat dan tepat waktu. Biasanya kan informasi kadang dead line sudah mepet. Sudah kurang berapa hari informasi biasanya baru keluar. Biasanya seringkali kadang mepet kadang ngga. Ngga tentu.

Pemahaman pelaksana:

Kalau LPSE saya kira harapan kami seluruh memang harapan dari pihak penyedia jasa memang harapannya seperti itu, cuman dari pihak LPSE nya itu kayaknya untuk merespon itu belum ada wadah dari sebuah penyedia jasa untuk menyampaikan kritik saran.

Jadi sifatnya hanya face to face, maksudnya sampaikan ke panitia. Tapi untuk wadahnya itu seperti apa tidak ada.

Mungkin sebagian besar belum tahu barangkali

- b) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah arahan dan tanggapan OPD pelaksana, saat ada penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Untuk LPSE itu sebenarnya konteknya bukan ke arah situ. Intinya LPSE itu sifatnya hanya memfasilitasi sebuah pengadaan, selebihnya nanti biasanya dinas DPU yang nantinya akan mulai dari pengawasan biasanya dari DPU

Pengarahan:

Kalau pengarahan secara langsung, kayaknya belum

Saya masih disini karyawan kisaran 4 tahun, selama ini saya belum pernah menemui, cuman ngga tau nanti, sebelum saya atau kedepannya mungkin ada.

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kontrol intensitas respon OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Responnya standar

Sikap implementor:

Standarlah

Kalau cukup baik kayaknya kurang, masih standar saja

Harapannya ada wadah kritk dan saran dan lebih transparan

4. Struktur Birokrasi:

- a) Bapak/Ibu/Saudara, apakah sudah jelas struktur organisasi (unit organisasi pelaksana) dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau saya terus terang kurang begitu paham, tapi ngga tahu untuk penyedia jasa yang lain. Soalnya kalau pihak kontraktor bisanya fokusnya lebih ke arah penawaran. Jadi untuk masalah itu harusnya penting, penting bagi kita untuk mengetahui, tapi di lapangan jarang memang, arahnya lebih fokus kesitu semua.

- b) Bapak/Ibu/Saudara, apakah pembagian tugas OPD pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawab:

Kalau LPSE sesuai peraturan, karena dia juga mengeluarkan pengadaannya harus sesuai dengan aturan main

- c) Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah koordinasi dari OPD pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Tegal?

Jawab:

Kalau itu saya kira cukup

Struktur Birokrasi:

Kebanyakan belum memahami struktur karena kita fokusnya ke bagaimana kita mendapat sebuah pekerjaan. Dapat pekerjaan, dengan mudah, persyaratannya harus transparan, ataupun waktu harus sesuai kemampuan kebanyakan penyedia jasa, tidak terlalu mepet ataupun apa. Tapi untuk arah kesitu arahnya kesitu kurang tahu dan kurang tepat

Kendala:

Kalau masalah kendala, sebenarnya umum. Biasanya kendala akses masuk, akses penguploadan dokumen, biasanya ada trouble kita harus nunggu beberapa jam, bahkan kadang harus nunggu beberapa hari baru kita bisa upload. Kita juga pernah ngalamin sama sekali tidak bisa upload, jadi kita harus secara konvensional, harus kesana, tanya-tanya gimana caranya. Mungkin kadang juga kayaknya dulu kita pernah konvensional, biasanya membawa dokumen atau apa kalo memang penguploadnya itu susah, error, seringnya error. Servernya biasanya lagi down.

SDM ngga ada kendala saya kira cukup ,hanya secara teknis.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Seksi LPSE Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Kepala BLP Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Admin LPSE Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Pengguna Barang dan Jasa



Wawancara dengan Pengguna Barang dan Jasa



Wawancara dengan Penyedia Barang dan Jasa



Wawancara dengan Penyedia Barang dan Jasa



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI

(SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal

Nomor : 038/K/I/FISIP- UPS/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pra Research

6 Februari 2019

Kepada : Yth. Ka.Kesbangpolinmas
Kabupaten Tegal.
di
Slawi

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

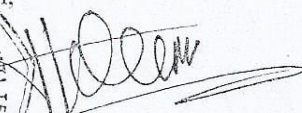
Nama : Amelia Anisah Putri
NPM : 2115500009
Tempat, tgl. Lahir : Tegal, 15 Juni 1997
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl.Gatot Subroto No.108 Rt.03/Rw.07
Desa Slawi Kulon Kec.Slawi Kab.Tegal

Untuk menjalankan pra research di Kabupaten Tegal.

Perlu kiranya kami beritahukan bahwa pra research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi : “Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E- Procurement) Di Kabupaten Tegal.”

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.


Dr. H. Nuridin, SH, MH
FISIP NIDN.0610116002

Tembusan Yth :
1. Ketua LPSE Kab. Tegal
2. Ketua ULP Kab. Tegal



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI

(SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014)
Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal

Nomor : 245/K/FISIP/UPS/V/2019
Lampiran :
Perihal : **Ijin Research**

15 Mei 2019

Kepada : Yth. **Ka. Kesbangpol**
Kabupaten Tegal
di
Tegal

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : **Amelia Anisah Putri**
NPM : 2115500009
Tempat, tgl. Lahir : Tegal, 15 Juni 1997
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.108 Rt.03 Rw 07
Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal

Untuk menjalankan research di Kabupaten Tegal.

Perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Adapun Judul Skripsi : **"Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E- Procurement) Di Kabupaten Tegal"**

Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. Nuridin, SH.M.H.
NIPY. 9351091960

USULAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN

Diajukan oleh:

Nama : AMELIA ANISAH PUTRI

NPM : 2115500009

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

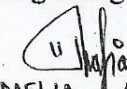
Jumlah SKS yang sudah ditempuh :

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

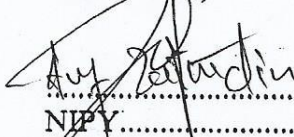
Usulan Judul Skripsi :

1. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-PROCUREMENT) di Kabupaten Tegal
2. Legalitas Dan Dampak Dalam Penambangan Galian C di Desa Dukuh Salam
3. Implementasi PERDA Kabupaten Tegal NO.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Retribusi parkir) di Kab. Tegal

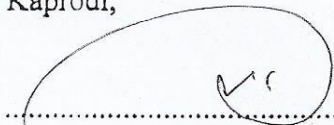
Tegal,.....
Yang mengajukan,


AMELIA ANISAH PUTRI

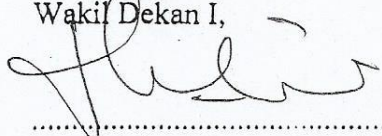
Mengetahui,
Dosen Wali,


NIPY.....

Menyetujui,
Kaprodi,


Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si
NIPY. 16652681974

Mengesahkan,
Wakil Dekan I,


Unggul Sugi Harto, S.IP. M.Si
NIPY. 14251921973

**USULAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN**

Kepada : Yth. Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal
Di
Tegal

[Signature] 31/1/19

Dengan ini kami mengusulkan Dosen Pembimbing Skripsi atas nama:

Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono, M.Si

Pembimbing II : Arif Zainudin SIP MIP

Atas perhatian dan terrealisasinya disampaikan terima kasih.

Tegal, 31 Januari 2019
Hormat kami,

[Signature]
AMELIA ANISAH PUTRI

.....(potong disini).....

Kepada : Yth. Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal
Di
Tegal

[Signature] 31/1/19

Dengan ini kami mengusulkan Dosen Pembimbing Skripsi atas nama:

Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono, M.Si

Pembimbing II : Arif Zainudin SIP MIP

Atas perhatian dan terrealisasinya disampaikan terima kasih.

Tegal, 31 Januari 2019
Hormat kami,

[Signature]
AMELIA ANISAH PUTRI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)

Alamat : Jl.Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp (0283) 491964 - 492023
Fax (0283) 492023

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 070/V/395/2019

- I. D a s a r : Surat dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal
Nomor : 070/29/0410
Tanggal : 16 Mei 2019
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas Ijin Penelitian di wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AMELIA ANISAH PUTRI (NPM:2115500009)
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Gatot Subroto No,108 Rt.03 Rw /07
Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 4. Penanggungjawab : Dekan FISIP UPS Tegal
 5. Maksud/tujuan : Ijin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul "EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E- PROCUREMENT) DI KABUPATEN TEGAL
 6. Lokasi : LPSE dan BLP Kabupaten Tegal
 7. Pembimbing : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian/riset/kerja praktik, terlebih agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada (Bappeda & Litbang) Kabupaten dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - c. Setelah penelitian penelitian/riset/kerja praktik selesai dilaksanakan Tegal.
- III. Rekomendasi penelitian/riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 16 Mei 2019 s/d 16 Agustus 2019.

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 16 Mei 2019

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL,
KABID KELITBANG DAN PENGELOLAAN DATA



FANI DWIAT MOHAMMAD, SE
Pembina

NIP. 19610903 198303 1 014

Tembusan : Kepada Yth.
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. LPSE Kab,Tegal
3. BLP Kab,Tegal;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Alamat : Jl. Piere Tendean No. 1 Slawi Telp. (0283) 492428
Website : www.kesbangpollinmas.tegalkab.go.id

Slawi, 16 Mei 2019

Nomor : 070 / 29 / 0410
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Ijin Research

Kepada :
Yth. KEPALA BAPPEDA dan LITBANG
KABUPATEN TEGAL
di -

S L A W I

Menarik Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Research :

Dari : Universitas Pancasakti Tegal
Nomor : 245/K/FISIP/UPS/V/2019
Tanggal : 15 Mei 2019

Bersama ini kami beritahukan, bahwa wilayah Kabupaten Tegal akan dilaksanakan Research oleh :

Nama : Amelia Anisah Putri
N P M : 2115500009
Judul : Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan atas Pelaksanaan Research dalam wilayah Kabupaten Tegal dan bersama ini pula kami lampirkan foto copy surat rekomendasi dari Dekan Universitas Pancasakti Tegal.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

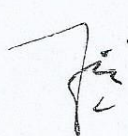


KABUPATEN TEGAL






Kasi Pol Hubga





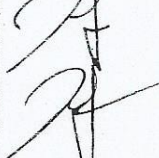
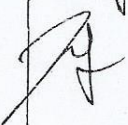

EDY BOWO LUKSONO, SH







NIP. 19621225 199103 1 003



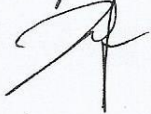

Tembusan : Kepada Yth.
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

No.	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Tanda Tangan
1.	Senin, 4 Maret 2019	1. COVER Logo ganti 2. BAB I Rumusan masalah - Pengertian masalah Halaman proposal - Romawi	
2.	Selasa, 12 Maret 2019	1. Halaman, spasi 1,5 + 0,2 2. BAB II Kerangka Teori - Definisi Teori - Menambahkan Teori Efektivitas E-Procurement Definisi konsep - pengadaan - Efektivitas E-procurement Peta Pohon Penelitian - Mencari indikator pengadaan - Mencari indikator Efektivitas E-procurement Alur Pikir - Menambah Regulasi	
3.	Senin, 18 Maret 2019	1. BAB II Definisi konsep 2. BAB III Jenis dan Tipe Penelitian - perbaiki penulisan Teknik Pengumpulan Data - perbaiki penulisan Sistematika penulisan	

No.	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Tanda Tangan
4	Senin, 25 Maret 2019	BAB II - Indikator Pengadaan Barang & Jasa • Konvensional • E-Procurement	
5	Senin, 1 April 2019	BAB II Definisi Konsep - Indikator	
6	Sekesai 2 April 2019	BAB II Definisi Konsep BAB III sistematika penulisan Pertanyaan	
7	Kamis, 4 April 2019	Pertanyaan	
	3/4-19	Kepada: Lh: Pembina II. dalam sub ybs di bidang, proposal & Penerapan wave.	

No.	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Tanda Tangan
8	8/4 2019 Senin	BAB I -Latar Belakang Penelitian	
9	Senin. 15 April 2019	BAB I -Latar Belakang Penelitian	
10	Senin 22 April 2019	BAB I -Latar Belakang Penelitian (ACC)	
11	Kamis 25 April 2019	BAB II -Tinjauan Pustaka Revisi bab II	
12	Selasa 30 April 2019	BAB II ACC BAB III Revisi	
13	Rabu 8 Mei 2019	BAB III ACC Pedoman wawancara	
15	9/5-19	Acc proposal akhir dan ulas ya dikumpulkan ijin Riset	

No.	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Tanda Tangan
15	20-Mei-2019	BAB IV <ul style="list-style-type: none"> - Buat presentase Tabel Sawah + Bukan Sawah - Tambahkan Geografis: (Tabel) iklim, dll - Tabel pendidikan Tingkat pend. kab Tegal - Struktur Birokrasi kab Tegal - Tabel Jumlah pegawai LPSE 	
16	23 Mei 2019	BAB IV <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Tabel Pegawai LPSE 	
17	28/5-19	Bab IV peny. ke <ul style="list-style-type: none"> - Kumpulan ke Puskas - <u>III</u> - Laporan Bab IV 	
18	24/6-19	BAB V <ul style="list-style-type: none"> - melanjutkan menyusun BAB V 	
19	26/6-19	BAB V <ul style="list-style-type: none"> - melanjutkan menyusun hasil penelitian - Revisi Hasil penelitian - menambahkan data 	
20	5 Juli 2019	BAB V <ul style="list-style-type: none"> - Revisi Hasil penelitian - melanjutkan pembahasan 	

No.	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Tanda Tangan
21	10-Juli-2019	- Revisi BAB V (Pembahasan)	
22	15-Juli-2019	- Revisi BAB V (Pembahasan)	
23	23 Juli 2019	- Ace Sidang - Penyempurnaan Ace Sidang, Pembuatan Skema uji sidang. Revisi ke TCR	 



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Sekretariat : Jl. Halmahera Km. I Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Senin tanggal 29 Juli 2019** Pukul 08.30 wib sampai dengan selesai berdasar Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tentang Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi atau Pendadaran bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tingkat Sarjana :

1. Nama : **Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si**
NIPY : 14251921973
2. Nama : **Arif Zainudin, M.IP**
NIPY : 20964101988
3. Nama : **Drs. Djoko Suyono, M.Si**
NIPY : 2451891956

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya.

Nama : **Amelia Anisah Putri**
NPM : 2115500009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal.


	Angka	Equivalen
Nilai		
Keterangan		

Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

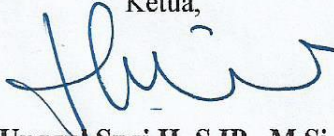
Anggota,

Sekretaris,

Ketua,


Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIPY. 2451891956


Arif Zainudin, M.IP
NIPY. 20964101988


Unggul Sugi H, S.IP., M.Si
NIPY. 14251921973





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Sekretariat : Jl. Halmahera Km. I Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 211/K/E/FISIP-UPS/I/2019 Perihal penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi :

1. Nama : **Drs. Djoko Suyono, M.Si**
NIPY : 2451891956
2. Nama : **Arif Zainudin, M.IP**
NIPY : 20964101988

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah dibimbing skripsinya.

Nama : **Amelia Anisah Putri**
NPM : 2115500009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal.

No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1.	Penunjukkan Dosen Pembimbing	14 Januari 2019	
2.	Proposal	15 Jan – 22 Feb 2019	
3.	Rencana Penelitian	25 Feb – 22 Maret 2019	
4.	Pengumpulan Data	25 Maret – 30 April 2019	
5.	Analisis Data	01 Mei – 03 Juni 2019	
6.	Penyusunan Laporan / Penulisan Skripsi	10 Juni – 15 Juli 2019	

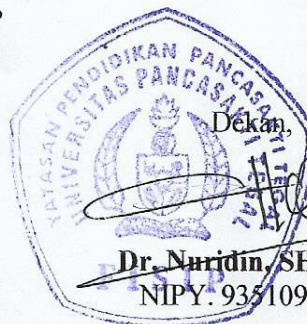
Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembimbing II,

Arif Zainudin, M.IP
NIPY. 20964101988

Pembimbing I,

Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIPY. 2451891956



Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9351091960